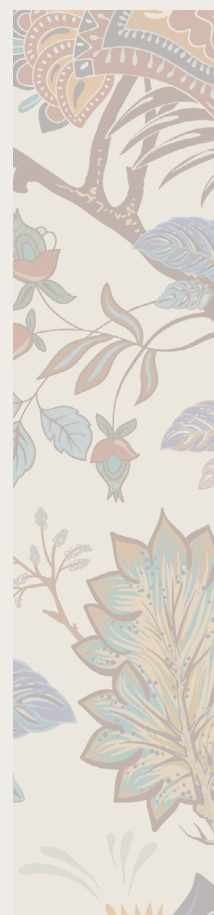


LAPORAN **TRIWULANAN**

II-2019

LAPORAN **TRIWULANAN**

Triwulan II - 2019



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK,
kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat
melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:



<http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK>

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

Kata Pengantar

Wimboh Santoso, Ph.D

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan Rahmat-Nya, OJK dapat senantiasa berkontribusi dalam menjalankan amanat undang-undang sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan di Indonesia.

Pada triwulan II-2019 ini, perkembangan perekonomian global diwarnai oleh berlanjutnya ketegangan hubungan dagang Amerika Serikat – Tiongkok yang berpotensi melebar ke negara-negara lain. Berlarutnya perang dagang tersebut menekan volume perdagangan, menurunkan investasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Akibatnya, proyeksi pertumbuhan perekonomian global kembali direvisi turun oleh IMF dan Bank Dunia. Sementara itu, Tiongkok juga mengalami pertumbuhan terendahnya sejak 27 tahun terakhir. Merespon hal tersebut, bank sentral di banyak negara cenderung menjalankan kebijakan akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif.

Seiring dengan kebijakan moneter yang cenderung akomodatif, pasar keuangan global secara umum menguat yang ditandai dengan terjadinya *inflow* ke pasar keuangan negara berkembang. Hal ini kemudian mendorong perbaikan kinerja pasar keuangan di negara berkembang. Namun demikian, risiko pasar keuangan ke depan tetap perlu diwaspadai mengingat masih tingginya ketidakpastian terkait

kesepakatan perang tarif dagang Amerika Serikat – Tiongkok, potensi penurunan harga komoditas dan potensi perlambatan perekonomian global.

Sementara itu, perekonomian domestik masih tumbuh stabil di tengah perlambatan ekonomi global yang terjadi. Pertumbuhan tersebut antara lain ditopang oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang meningkat dan investasi yang terjaga stabil. Tingkat inflasi terjaga pada rentang target yang ditetapkan. Kinerja eksternal pada triwulan ini mengalami surplus akibat impor yang berkontraksi lebih dalam dibandingkan tingkat ekspor. Meski demikian, keseimbangan eksternal ini masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut karena adanya kecenderungan perlambatan ekspor.

Sejalan dengan kondisi makroekonomi domestik tersebut, ketahanan industri jasa keuangan juga masih terjaga dengan baik. Kinerja intermediasi perbankan secara umum masih dalam keadaan solid dengan kredit yang tumbuh positif dan tingkat risiko yang terkendali. Begitu juga aktivitas pembiayaan non-bank yang secara gradual meningkat dengan NPF yang masih terjaga. Sedikit berbeda, industri pasar modal pada triwulan ini mengalami koreksi tipis ditandai dengan melemahnya IHSG, turunnya kapitalisasi saham dan NAB Reksa Dana.

OJK secara aktif mendorong sektor jasa keuangan untuk berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi antara lain melalui sektor prioritas seperti penyaluran kredit dan pengembangan skema asuransi ke sektor pariwisata, penyaluran pembiayaan ke sektor ekonomi berorientasi ekspor dan substitusi impor, penghimpunan dana untuk pembiayaan infrastruktur melalui instrumen Pasar Modal serta pembiayaan dan asuransi di sektor agrobisnis, perikanan, dan pertambangan.

Dalam kewenangannya melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan 5 (lima) Peraturan OJK (POJK) dan 6 (enam) Surat Edaran OJK (SEOJK) selama triwulan II-2019. POJK yang diterbitkan terdiri dari 2 (dua) POJK yang mengatur sektor Perbankan, 1 (satu) POJK yang mengatur sektor Pasar Modal dan 2 (dua) POJK yang mengatur sektor IKNB. Di antara peraturan yang diterbitkan tersebut, terdapat ketentuan pelaporan bank umum dan BPR melalui Sistem Pelaporan OJK. Ketentuan tersebut beserta implementasi sejumlah sistem Informasi baik yang berhubungan dengan pemangku kepentingan eksternal seperti Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang telah berjalan maupun untuk perampingan proses bisnis internal seperti Sistem Informasi Procurement OJK (SIPROJEK) dan Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) merupakan rangkaian upaya OJK dalam melakukan digital transformasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya, sebagai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK secara aktif menjangkau kelompok masyarakat potensial dalam melaksanakan kegiatan edukasi masif antara lain melalui sosialisasi,

Safari Ramadhan, iB Vaganza, OJK Goes to School dan *Training of Trainers*. Dalam rangka mengakomodasi akses keuangan bagi seluruh masyarakat serta area terpencil, OJK terus memperluas jaringan Bank Wakaf Mikro, TPAKD, BUMDes dan BUMR. Selain itu, OJK juga melakukan inovasi produk untuk menyesuaikan target grup tersebut antara lain dengan mengembangkan asuransi mikro dan dana pensiun mikro.

Untuk mendukung kinerja OJK dalam melayani pemangku kepentingan, OJK mengupayakan pemenuhan fasilitas gedung kantor baik di kantor pusat maupun kantor regional dan kantor OJK daerah. Terkait dengan gedung kantor pusat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan OJK menyepakati penggunaan barang milik negara yaitu lahan di lokasi Lot 1 Kawasan SCBD, Jakarta di mana akan dibangun gedung Indonesia Financial Center yang akan dipergunakan sebagai kantor pusat OJK. Sedangkan untuk kantor OJK di daerah telah dilaksanakan perancangan dan *groundbreaking* pembangunan gedung kantor KOJK DI Yogyakarta, KOJK Solo dan KOJK Papua.

Akhir kata, segenap Anggota Dewan Komisiner mengapresiasi kinerja seluruh pegawai OJK yang telah menjalankan perannya dalam memberikan kontribusi untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK yang lebih efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi nilai strategis organisasi. Kami bersama segenap jajaran pejabat dan pegawai berkomitmen untuk senantiasa menyempurnakan kinerja dan pelayanan dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang stabil, inklusif, dan kontributif sehingga manfaat atas keberadaan OJK dapat terus dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan



Wimboh Santoso, Ph.D



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xviii
DUKUNGAN OJK TERHADAP PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH	xx
INDIKATOR UMUM SEKTOR JASA KEUANGAN	xxii

BAB 1

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA	27
1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global	27
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik	29
1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan	32
1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN	33
1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional	34
1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	37
1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	38
1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	40
1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL	41
1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek	42
1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi	45
1.3.3 Perkembangan Jumlah SID	48
1.3.4 Perkembangan Perusahaan Efek	48
1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	49
1.3.6 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	54
1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK	56
1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS	57
1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun	60
1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	62
1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional	65
1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	67
1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	68
1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB	71
1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	72
1.4.9 Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>)	72
1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM PENDUKUNG SEKTOR PRIORITAS PEMERINTAH	73
1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)	73
1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)	73
1.5.3 Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)	74

BAB 2

TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

1.5.4	Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal	75
1.5.5	Program 1.000 Aktuaris	76
1.5.6	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	76
1.5.7	Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	76
1.5.8	Asuransi Nelayan	76
1.5.9	Asuransi Usaha Budidaya Ikan Kecil	76
1.5.10	Pembiayaan Ekonomi Kreatif	77
1.5.11	Pembiayaan dan Asuransi pada Sektor Pariwisata	77

2.1	AKTIVITAS PENGATURAN	81
2.1.1	Pengaturan Bank	81
2.1.2	Pengaturan Pasar Modal	81
2.1.3	Pengaturan IKNB	81
2.2	AKTIVITAS PENGAWASAN	81
2.2.1	Pengawasan Perbankan	81
2.2.2	Pengawasan Pasar Modal	84
2.2.3	Pengawasan IKNB	88
2.3	AKTIVITAS PENGEMBANGAN	104
2.3.1	Pengembangan Industri Perbankan	104
2.3.2	Pengembangan Industri Pasar Modal	104
2.3.3	Pengembangan IKNB	106
2.3.4	Inovasi Keuangan Digital	107
2.4	STABILITAS SISTEM KEUANGAN	107
2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	107
2.4.2	Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	109
2.4.3	Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	109
2.5	KEBIJAKAN SEKTOR JASA KEUANGAN TERINTEGRASI	109
2.5.1	Pengembangan Sektor Prioritas	109
2.5.2	<i>Blended Finance</i>	111
2.5.3	Program B20	112
2.5.4	Perizinan Terintegrasi	113
2.5.5	Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	113
2.6	EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	124
2.6.1	Sosialisasi Pengaturan	115
2.6.2	Inklusi Keuangan	115
2.6.3	Literasi dan Edukasi Keuangan	119
2.6.4	Perlindungan Konsumen	121
2.6.5	Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen	125
2.6.6	<i>Market Conduct</i>	126
2.7	PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN	127
2.7.1	Penanganan Perkara	127
2.7.2	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	127

2.7.3	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	127
2.7.4	Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	128
2.8	PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME	128
2.8.1	Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020	128
2.8.2	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	128
2.8.3	Koordinasi Kelembagaan	128
2.9	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	129
2.9.1	Kerjasama Domestik	129
2.9.2	Kerjasama Internasional	130

BAB 3

TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	133
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	133
3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	138
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	142
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	144
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	144
3.2.2	Pengaturan Industri Pasar Modal Syariah	144
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	145
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	145
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	145
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	146
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	146
3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	147
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	147
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	147
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	148

BAB 4

MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI

4.1	MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK	151
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	151
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	151
4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis dan Program Khusus OJK	151
4.2	AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS	153
4.2.1	Audit Internal	153
4.2.2	Pengelolaan Risiko	153
4.2.3	Indeks Integritas	153
4.2.4	Control Self Assessment (CSA)	153

4.2.5	Program Pengendalian Gratifikasi	153
4.2.6	Pengelolaan LHKPN	154
4.2.7	<i>Whistle Blowing System</i>	154
4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER	154
4.4	KOMUNIKASI	155
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	155
4.4.2	Layanan Informasi	157
4.4.3	OJK TV	157
4.5	KEUANGAN	158
4.5.1	Realisasi Anggaran	158
4.5.2	International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015	158
4.5.3	Pemenuhan Kewajiban PPh Badan Otoritas Jasa Keuangan	158
4.6	SISTEM INFORMASI	158
4.6.1	Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) 2018-2022	158
4.6.2	Pertukaran Informasi Antar Lembaga	158
4.6.3	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	159
4.7	LOGISTIK	163
4.7.1	Penyediaan Gedung Kantor Pusat	163
4.7.2	Penyediaan Gedung Kantor Regional/OJK	163
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	164
4.8	SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI	164
4.8.1	Kebijakan Sumber Daya Manusia	164
4.8.2	Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM)	164
4.8.3	Seleksi Izin Prinsip Tugas Belajar	167
4.8.4	Pengembangan Sumber Daya Manusia	167
4.9	OJK INSTITUTE	169
4.9.1	Program Pengembangan SDM SJK	169
4.9.2	Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	169
4.9.3	Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK	169
4.9.4	Program <i>Visit OJK</i>	170
4.9.5	OJK Mengajar	170
4.9.6	Penelitian <i>OJK Institute</i> dan <i>e-library</i>	170
4.10	MANAJEMEN PERUBAHAN	170
4.10.1	Program Manajemen Perubahan	171
4.10.2	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan	171

SINGKATAN DAN AKRONIM

172

Daftar Tabel

Tabel I - 1	<i>Global Economic Prospect World Bank</i>	29
Tabel I - 2	<i>World Economic Outlook IMF</i>	29
Tabel I - 3	Perkembangan <i>Yield</i> 10Y Pasar Surat Utang Global	32
Tabel I - 4	Perkembangan Indikator CDS Jangka Menengah Negara ASEAN-5	33
Tabel I - 5	Kondisi Bank Umum	33
Tabel I - 6	Kondisi Bank Umum Konvensional	34
Tabel I - 7	Tingkat Konsentrasi Aset BUK	35
Tabel I - 8	Kondisi Umum BPR	37
Tabel I - 9	Konsentrasi Penyaluran UMKM	39
Tabel I - 10	Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank	40
Tabel I - 11	Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)	40
Tabel I - 12	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham	43
Tabel I - 13	Perkembangan IHSG dan Net Asing	44
Tabel I - 14	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	45
Tabel I - 15	Perkembangan Pengelolaan Investasi	45
Tabel I - 16	Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya	46
Tabel I - 17	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	46
Tabel I - 18	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	47
Tabel I - 19	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	48
Tabel I - 20	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	49
Tabel I - 21	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	49
Tabel I - 22	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	49
Tabel I - 23	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	49
Tabel I - 24	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	50
Tabel I - 25	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan II-2019	50
Tabel I - 26	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	51
Tabel I - 27	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	51
Tabel I - 28	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi I	52
Tabel I - 29	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi II	53
Tabel I - 30	Rencana Penggunaan Dana Atas Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri	54
Tabel I - 31	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	54
Tabel I - 32	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	55
Tabel I - 33	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)	56
Tabel I - 34	Total Aset IKNB	56
Tabel I - 35	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	57
Tabel I - 36	Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS	58
Tabel I - 37	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	59
Tabel I - 38	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	59
Tabel I - 39	RBC Industri Asuransi	59
Tabel I - 40	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun	60
Tabel I - 41	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	60
Tabel I - 42	Portofolio Investasi Dana Pensiun	61
Tabel I - 43	Jumlah Dana Pensiun	62
Tabel I - 44	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	63
Tabel I - 45	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	64
Tabel I - 46	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	64
Tabel I - 47	Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	66

Tabel I - 48	Rasio Keuangan Modal Ventura	66
Tabel I - 49	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	68
Tabel I - 50	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	71
Tabel I - 51	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	71
Tabel I - 52	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	72
Tabel I - 53	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	72
Tabel I - 54	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Peer To Peer Lending</i>)	72
Tabel I - 55	LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro)	73
Tabel I - 56	Jumlah Agen dan Nasabah Laku Pandai	73
Tabel I - 57	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim	74
Tabel I - 58	Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya	75
Tabel I - 59	Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif	77
Tabel II - 1	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	82
Tabel II - 2	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	82
Tabel II - 3	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum	83
Tabel II - 4	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	83
Tabel II - 5	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional	84
Tabel II - 6	Jaringan Kantor BPR Triwulan II-2019	84
Tabel II - 7	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR	84
Tabel II - 8	Pengawasan Transaksi Efek	85
Tabel II - 9	Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik	86
Tabel II - 10	Laporan Berkala	87
Tabel II - 11	Sanksi Administratif Pasar Modal	88
Tabel II - 12	Analisis Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	88
Tabel II - 13	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	89
Tabel II - 14	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	90
Tabel II - 15	Pemeriksaan (<i>On-site Supervision</i>) Lembaga Pembiayaan	90
Tabel II - 16	Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan	90
Tabel II - 17	Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha	91
Tabel II - 18	Pelaksanaan Pendampingan LKM	91
Tabel II - 19	LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro)	91
Tabel II - 20	Jumlah Pemeriksaan Langsung	92
Tabel II - 21	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB	92
Tabel II - 22	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB	93
Tabel II - 23	Penetapan Izin IKNB	93
Tabel II - 24	Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB	94
Tabel II - 25	Jumlah IKNB Konvensional	94
Tabel II - 26	Rekapitulasi Likuidasi IKNB	95
Tabel II - 27	Rekapitulasi Peleburan IKNB sampai dengan Triwulan II-2019	96
Tabel II - 28	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/ Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB	96
Tabel II - 29	Rekapitulasi Perubahan Nama	97
Tabel II - 30	Rekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNB	98
Tabel II - 31	Rekapitulasi Pelaporan Kantor selain Kantor Cabang IKNB	99
Tabel II - 32	Rekapitulasi Pelaporan Produk	100
Tabel II - 33	Rekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNB	100
Tabel II - 34	Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB	101
Tabel II - 35	Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB	101
Tabel II - 36	Rekapitulasi Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal	102
Tabel II - 37	Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB	102
Tabel II - 38	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB	103
Tabel II - 39	Pendaftaran Profesi sampai dengan Triwulan II-2019	103
Tabel II - 40	Pendaftaran Agen Asuransi dan Agen Penjamin	103
Tabel II - 41	Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang	109
Tabel II - 42	Materi Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)	115

Tabel II - 43	Kegiatan Sosialisasi dan <i>Workshop</i>	116
Tabel II - 44	Fitur Tabungan Mahasiswa dan SiMUDA	116
Tabel II - 45	Penerimaan Layanan OJK	124
Tabel II - 46	Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diterima oleh LAPS pada Semester II-2018	125
Tabel II - 47	Penyidikan	127
Tabel II - 48	Pemberkasan Kejaksaan	127
Tabel II - 49	Kerjasama Domestik	129
Tabel III - 1	Indikator Perbankan Syariah	133
Tabel III - 2	Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	135
Tabel III - 3	Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi	136
Tabel III - 4	Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	138
Tabel III - 5	Penambahan Emiten pada DES	138
Tabel III - 6	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	139
Tabel III - 7	Perkembangan Indeks Saham Syariah	139
Tabel III - 8	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	140
Tabel III - 9	Perkembangan Reksa Dana Syariah	140
Tabel III - 10	Jasa Layanan Syariah	141
Tabel III - 11	Aset IKNB Syariah	142
Tabel III - 12	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	142
Tabel III - 13	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	143
Tabel III - 14	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pengurus Bank dan DPS	145
Tabel III - 15	Permohonan Perizinan	145
Tabel IV - 1	Judul Siaran Pers	156
Tabel IV - 2	Jumpa Pers dan <i>Media Briefing</i>	157
Tabel IV - 3	Tema <i>Decision Maker</i> - OJK Update	157
Tabel IV - 4	Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2019	162

Daftar Grafik

Grafik I - 1	Periode Ekspansi Perekonomian AS	27
Grafik I - 2	Tingkat Pengangguran AS dan Tingkat <i>Initial Jobless Claims</i>	27
Grafik I - 3	Porsi Pertumbuhan Tiongkok Berdasarkan Jenis Industri	28
Grafik I - 4	Tingkat Pertumbuhan PDB Beberapa Negara	28
Grafik I - 5	Tingkat Inflasi IHK Beberapa Negara	28
Grafik I - 6	<i>Headline Manufacturing PMI</i>	29
Grafik I - 7	Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya	29
Grafik I - 8	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	30
Grafik I - 9	Indeks Penjualan Riil dan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini	30
Grafik I - 10	Tingkat Inflasi Indonesia	30
Grafik I - 11	Realisasi Penerimaan Pajak terhadap APBN	31
Grafik I - 12	Realisasi Penerbitan SBN Bruto terhadap target	31
Grafik I - 13	Neraca Pembayaran Indonesia	31
Grafik I - 14	Neraca Perdagangan Indonesia	31
Grafik I - 15	Perkembangan Pasar Saham Global	32
Grafik I - 16	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	32
Grafik I - 17	Indeks VIX	33
Grafik I - 18	Perkembangan Aset BUK	35
Grafik I - 19	Tren Pertumbuhan DPK	35
Grafik I - 20	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)	35
Grafik I - 21	Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qtq)	36
Grafik I - 22	Tren NPL (%)	36
Grafik I - 23	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	36
Grafik I - 24	Perkembangan Aset BPR	37
Grafik I - 25	Tren Pertumbuhan DPK (yoy)	37
Grafik I - 26	Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan	38
Grafik I - 27	Tren ROA dan BOPO BPR	38
Grafik I - 28	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	39
Grafik I - 29	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq)	42
Grafik I - 30	Perkembangan Indeks Industri (qtq)	43
Grafik I - 31	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	43
Grafik I - 32	Perkembangan IHSG dan Net Asing	44
Grafik I - 33	Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)	44
Grafik I - 34	Perkembangan Jumlah SID	48
Grafik I - 35	Rencana Penggunaan Dana	53
Grafik I - 36	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Jumlah Klien	55
Grafik I - 37	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2019	57
Grafik I - 38	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	61
Grafik I - 39	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	62
Grafik I - 40	Piutang Perusahaan Pembiayaan	63
Grafik I - 41	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	65
Grafik I - 42	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	66
Grafik I - 43	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	67
Grafik I - 44	Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	67
Grafik I - 45	Pertumbuhan Aset LJKK	68
Grafik I - 46	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	68
Grafik I - 47	<i>Outstanding</i> Penjaminan	69
Grafik I - 48	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	69

Grafik I - 49	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	69
Grafik I - 50	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	69
Grafik I - 51	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pegadaian	70
Grafik I - 52	Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)	70
Grafik I - 53	Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)	70
Grafik I - 54	Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)	70
Grafik I - 55	Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)	71
Grafik I - 56	Wilayah Persebaran Agen	73
Grafik I - 57	Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING	74
Grafik II - 1	Penyebaran Jaringan Kantor BUK	83
Grafik II - 2	Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan I-2019	107
Grafik II - 3	CAR Perbankan	108
Grafik II - 4	RBC Industri Perasuransian	108
Grafik II - 5	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	108
Grafik II - 6	Rasio NPL Perbankan	108
Grafik II - 7	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	108
Grafik II - 8	Kredit Perbankan ke Sektor Berorientasi Ekspor	110
Grafik II - 9	Kredit Perbankan ke Sektor Perumahan	110
Grafik II - 10	Kredit Perbankan ke Sektor Pariwisata	110
Grafik II - 11	Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK	114
Grafik II - 12	Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Periode Triwulan II-2019	114
Grafik II - 13	Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK	114
Grafik II - 14	Manfaat SLIK	114
Grafik II - 15	Penerimaan Layanan Triwulan II-2019	121
Grafik II - 16	Layanan Pertanyaan Triwulan II-2019	121
Grafik II - 17	Layanan Informasi Triwulan II-2019	121
Grafik II - 18	Layanan Pengaduan Triwulan II-2019	121
Grafik II - 19	Pertanyaan Terkait Produk Perbankan Terbanyak	122
Grafik II - 20	Pertanyaan Terkait Produk Pasar Modal Terbanyak	122
Grafik II - 21	Pertanyaan Terkait Produk Perasuransian Terbanyak	122
Grafik II - 22	Pertanyaan Terkait Produk IKNB Lainnya Terbanyak	122
Grafik II - 23	Pertanyaan Terkait Produk Dana Pensiun Terbanyak	122
Grafik II - 24	Pertanyaan Terkait Produk Lembaga Pembiayaan Terbanyak	122
Grafik II - 25	Permasalahan Perbankan Terbanyak	123
Grafik II - 26	Permasalahan Perasuransian Terbanyak	123
Grafik II - 27	Permasalahan IKNB Lainnya Terbanyak	123
Grafik II - 28	Permasalahan Dana Pensiun Terbanyak	123
Grafik II - 29	Permasalahan Lembaga Pembiayaan Terbanyak	123
Grafik II - 30	5 Besar Jenis Produk IKNB - Lainnya	123
Grafik II - 31	Tingkat Penyelesaian Layanan	124
Grafik II - 32	Kanal Layanan	124
Grafik II - 33	Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	124
Grafik II - 34	Permohonan Layanan yang Disetujui LAPS	125
Grafik II - 35	Pelanggaran Iklan	126
Grafik II - 36	Tren Pelanggaran Iklan	126
Grafik III - 1	Tren Aset Perbankan Syariah	134
Grafik III - 2	Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (selain Modal)	135
Grafik III - 3	Pertumbuhan DPK Bank Syariah (<i>qta</i>)	135
Grafik III - 4	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	137
Grafik III - 5	Indikator Likuiditas Harian BUS	138
Grafik III - 6	Laba dan ROA Perbankan Syariah	138
Grafik III - 7	Judul Siaran Pers Triwulan II-2019	139
Grafik III - 8	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	140

Grafik III - 9	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	141
Grafik III - 10	Jumlah Entitas IKNB Syariah	142
Grafik IV - 1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	151
Grafik IV - 2	Pengelolaan Risiko OJK 2019	153
Grafik IV - 3	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisioner (RDK) dan <i>Board Seminar</i> (BS)	154
Grafik IV - 4	Jumlah Publikasi <i>Website</i>	155
Grafik IV - 5	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK Triwulan II-2019	155
Grafik IV - 6	Tema Siaran Pers	156
Grafik IV - 7	Statistik OJK TV	157
Grafik IV - 8	Realisasi Anggaran	158
Grafik IV - 9	Fungsi Utama	159
Grafik IV - 10	Fungsi Pendukung	159
Grafik IV - 11	Alur Penggunaan SIPROJEK	160
Grafik IV - 12	Lokasi KR/KOJK Posisi Juni 2019	164
Grafik IV - 13	Fitur LMS OJK	168
Grafik IV - 14	Realisasi Jumlah Peserta PKL OJK Triwulan II-2019	169
Grafik IV - 15	Realisasi Jumlah Peserta Penelitian	170

Ringkasan Eksekutif

Tinjauan Perekonomian Global dan Domestik

Pada triwulan II-2019 IMF dan Bank Dunia kembali merevisi turun pertumbuhan perekonomian global 2019 seiring eskalasi perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok dan perlambatan pertumbuhan perekonomian sebagian besar negara utama dunia. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi AS sebesar 2,2% (yoy) yang sedikit di bawah ekspektasi. Tingkat ekspor AS tumbuh terkontraksi sedangkan kinerja perekonomian domestiknya terpantau tumbuh solid didukung konsumsi rumah tangga. Perekonomian AS masih berada dalam siklus ekspansi dan siklus tersebut merupakan yang terpanjang sepanjang sejarah. Pertumbuhan perekonomian Zona Eropa relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara maju lainnya. PDB Zona Eropa tumbuh melambat 1,1% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut kebijakan moneter jangka panjang yang akomodatif masih dibutuhkan guna mendorong perekonomian lebih lanjut.

Pada region Asia, perekonomian Tiongkok juga menunjukkan tren melambat. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok tercatat 6,4% (yoy) yang merupakan angka terendah sejak 27 tahun terakhir. Pelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh kinerja eksternal yang masih terkontraksi. Akan tetapi diharapkan keadaan ini membaik pasca perundingan terkait perang tarif dengan AS pada G20 Summit. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi Jepang tumbuh menguat 1,2% (yoy) dengan inflasi rendah. Merespon hal tersebut Bank of Japan berencana mempertahankan kebijakan ekspansifnya guna mendorong inflasi untuk mencapai target 2,0%.

Perekonomian global secara umum diperkirakan masih dalam tren melambat. Hal ini diindikasikan dari pergerakan data indikator *headline manufacturing* dari *Purchasing Manager Index* (PMI) Zona Euro, Jepang, dan Tiongkok yang mulai turun di bawah angka 50. Oleh karena itu, kegiatan manufaktur maupun sektor riil ke depan diperkirakan masih akan stagnan. Eskalasi perang dagang AS-Tiongkok dan perlambatan pertumbuhan perekonomian sebagian besar negara utama dunia masih menjadi *downside risk* utama. Kontraksi permintaan global ini kemudian diperkirakan akan menekan pertumbuhan ekspor dan tingkat investasi terutama di negara berkembang.

Pertumbuhan harga komoditas migas dan non-migas juga diperkirakan juga akan turun sejalan dengan perlambatan perekonomian global.

Kendati perlambatan ekonomi global, perekonomian domestik pada triwulan II-2019 masih tumbuh stabil sebesar 5,05% (yoy) ditopang oleh tumbuhnya tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi yang terjaga serta kinerja eksternal yang mencatatkan surplus. Akan tetapi, perlu menjadi perhatian bahwa surplus neraca perdagangan adalah akibat kontraksi impor yang lebih dalam dibandingkan ekspor. Indikator sektor riil juga cenderung bergerak *mixed* di mana Indikator Markit PMI manufaktur menunjukkan perusahaan domestik dalam zona ekspansi di level 50,6 sedangkan pertumbuhan Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) melambat.

Terkait fiskal, penerimaan pajak baru mencapai 38,57% dari target APBN meskipun laju pengeluaran pemerintah masih sesuai pergerakan historisnya. Untuk membiayai defisit anggaran tersebut, Pemerintah menerbitkan SBN sebesar Rp504 triliun.

Defisit neraca transaksi berjalan triwulan II-2019 kembali melebar yaitu tercatat sebesar USD8,4 miliar (3,04% terhadap PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya. Peningkatan defisit tersebut utamanya didorong oleh perilaku musiman repatriasi dividen dan pembayaran bunga utang luar negeri di triwulan-II 2019. Namun demikian, neraca pembayaran Indonesia selama semester I 2019 masih mencatatkan surplus sebesar USD0,4 miliar didorong oleh surplus neraca transaksi finansial yang tinggi. Sejalan dengan surplus neraca pembayaran, cadangan devisa Indonesia terpantau stabil. Cadangan devisa Juni 2019 tercatat di USD123,8 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil dan transparan dan dapat tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan melindungi kepentingan konsumen, OJK melakukan beberapa inisiatif, antara lain:

1. Kebijakan untuk Mendukung *Blended Finance*

OJK dan Pemerintah terus mengembangkan penerapan pola *blended finance* sebagai salah satu instrumen keuangan untuk membiayai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara umum *blended finance* adalah proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan berkelanjutan dengan memadukan unsur keberlanjutan. Dengan *blended finance* diharapkan tercipta skema pendanaan yang menarik bagi swasta dengan melibatkan pendanaan pemerintah dan lembaga internasional maupun filantropis yang bersifat *soft loan*, *grant* maupun *guarantee mechanism*. *Blended finance* dapat digunakan sebagai salah satu instrumen keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menutup keterbatasan ruang fiskal, menarik sumber-sumber pendanaan internasional masuk ke Indonesia dan sekaligus berkontribusi pada kestabilan sistem keuangan.

2. Pengembangan Pembiayaan dan Asuransi Sektor Pariwisata

OJK memberikan dukungan terhadap Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui sektor prioritas, salah satunya sektor pariwisata, dengan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang dapat berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, OJK mendorong partisipasi aktif perusahaan untuk membentuk konsorsium dalam mendukung program pengembangan asuransi di sektor pariwisata. OJK menekankan pentingnya perlindungan kepada para wisatawan dan pelaku usaha pariwisata khususnya dari risiko bencana alam.

3. Implementasi Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

SPRINT merupakan sistem yang dibangun untuk mengefisienkan proses perizinan lintas industri di sektor jasa keuangan. Pengembangan modul perizinan pada aplikasi SPRINT sampai dengan triwulan II-2019 adalah 31,6% atau sebanyak 221 dari 699 sub izin yang menjadi target pengembangan. Layanan Informasi dan perizinan serta registrasi melalui SPRINT juga dialihkan ke Kontak OJK 157 pada triwulan ini. Selain itu, OJK juga menginisiasi integrasi proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum dan pencatatan Efek melalui aplikasi SPRINT dengan BEI.

Pada lingkup peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK melaksanakan Sinergi Edukasi OJK dengan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Bagi Dosen Perguruan Tinggi di Solo dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi guru SMA dan setingkat di Manado dan Jayapura. Dalam rangka sosialisasi dan edukasi komunitas, OJK melakukan *Training of Trainers*, Safari Ramadhan, iB Vaganza, dan Edukasi Keuangan bagi keluarga buruh migran dan UMKM. OJK juga menggelar kegiatan SimPel Day 2019 di Jakarta bekerja sama dengan 29 bank peserta SimPel/SimPel iB. Kegiatan diikuti oleh 1.500 siswa dan guru. Sebagai salah satu kegiatan utama, dilakukan pembacaan Ikrar Aksi Pelajar Indonesia Menabung oleh pelajar yang hadir serta secara serentak oleh pelajar di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, OJK juga senantiasa mempercepat perluasan jangkauan akses keuangan daerah antara lain dengan pengukuhan TPAKD, fasilitasi BUMDesa Center, dan BUMR.

Manajemen Strategis dan Tata Kelola

Pada aspek manajemen strategis, OJK memasuki tahap pertama siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) tahun 2020, yaitu penyusunan dan penyesuaian strategi OJK. Tahapan yang telah dilaksanakan antara lain penerjemahan misi dan visi, eksternal dan *internal environmental scanning*, serta penggalan masukan pemangku kepentingan dan ahli. Pada periode yang sama OJK melakukan *strategic* dan *operational review* pelaksanaan Peta Strategi 2019.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur gedung kantor baik di kantor pusat maupun kantor OJK regional dan daerah, OJK melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Kementerian Keuangan untuk pembangunan gedung kantor pusat. Selain itu, untuk KOJK Solo, DI Yogyakarta dan Papua, juga telah dilaksanakan perencanaan dan peletakan batu pertama pembangunan.

OJK secara aktif menginisiasi program manfaat balik terhadap pemangku kepentingan khususnya masyarakat melalui 13 kunjungan *Visit OJK* dari instansi maupun pelajar dan mahasiswa, dengan total peserta sebanyak 1.095, melaksanakan OJK mengajar di Pontianak serta menerima 33 mahasiswa yang melakukan penelitian tugas akhir. OJK juga menerbitkan 16 Siaran Pers dan 75 liputan OJK TV serta melaksanakan empat Jumpa Pers. Selain itu, OJK melaksanakan pengembangan bagi sumber daya manusia di industri keuangan melalui rangkaian *workshop* yang diikuti lebih dari 900 peserta.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan II-2019 dijabarkan dalam buku Laporan Triwulanan II-2019.

Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah



Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

OJK memberikan lima izin usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro sehingga total BWM berjumlah **48**. Pembiayaan yang disalurkan sebanyak **Rp22,84 miliar** kepada **17.700 nasabah** yang terbentuk ke dalam **2.254 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)**.



Program JARING

Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank *partner* dan Konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit sebesar **Rp30,97 triliun** atau tumbuh **4,75% (yoy)** dan **NPL gross 3,48%**.



Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen pertanian. Sampai dengan triwulan II-2019, jumlah lahan pertanian yang terdaftar adalah **332,84 ha** dengan jumlah petani **557.444 orang**. Nilai premi tercatat adalah **Rp59,91 miliar**.



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Jumlah sapi yang tercover adalah **65.115 ekor** dan jumlah peternak yang ikut serta adalah **36.980 peternak** dengan total premi **Rp13,023 miliar** dan realisasi klaim **Rp1,359 miliar**.



Asuransi Nelayan

Asuransi yang mewajibkan nelayan memberikan perlindungan bagi nelayan dari risiko saat melaut. Sampai triwulan II-2019 klaim berjalan untuk asuransi nelayan mencapai **7.641 nelayan** dari **27 provinsi** dengan realisasi premi **Rp1,14 miliar**.



Asuransi Usaha Budidaya Ikan Kecil

Asuransi Usaha Budidaya Ikan Kecil memberikan proteksi terhadap kegagalan usaha budidaya komoditas Ikan kecil seperti udang, ikan bandeng, nila, patin dan polikultur karena penyakit/bencana alam. Luas lahan Asuransi Usaha Budidaya ikan kecil yang terdaftar sampai dengan triwulan II-2019 adalah sebesar **10.220 ha** dengan premi sebesar **Rp2,99 miliar**.

SimPel

Simpanan Pelajar

Simpanan Pelajar (SimPel)

Program Tabungan untuk Pelajar dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan.



Jumlah Bank
314 Bank



Jumlah Rekening
17.230.308



Total Saldo
Rp6,408 triliun

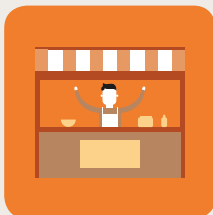


Perjanjian Kerjasama
330.475



Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

- Penawaran Umum Emiten di sektor infrastruktur sebesar **Rp14,08 triliun**.
- Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap berjumlah lima dengan dana kelolaan sebesar **Rp3,13 triliun**.
- Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) menurun sebesar **1,54%** menjadi **Rp23,59 triliun** dan jumlah kontrak RDPT turun menjadi **60 RDPT**.
- Kontrak KIK EBA berjumlah **tujuh** dengan dana kelolaan sebesar **Rp6,72 triliun**.
- KIK-DIRE berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan **Rp11,34 triliun**.
- KIK-DINFRA mengalami kenaikan sehingga berjumlah **enam** dengan dana kelolaan sebesar **Rp2,65 triliun**.



Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM. Selama triwulan II-2019, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar **Rp2,09 triliun**.

LAKU PANDAI

Sahabat Masyarakat
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Untuk Rakyat Indonesia

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account (BSA)*, kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.



Jumlah Bank Penyelenggara
29 Bank



Jumlah Agen
1.123.096 Agen



Jumlah Nasabah
24.226.083 Nasabah



Jumlah Outstanding Tabungan
Rp2,49 triliun

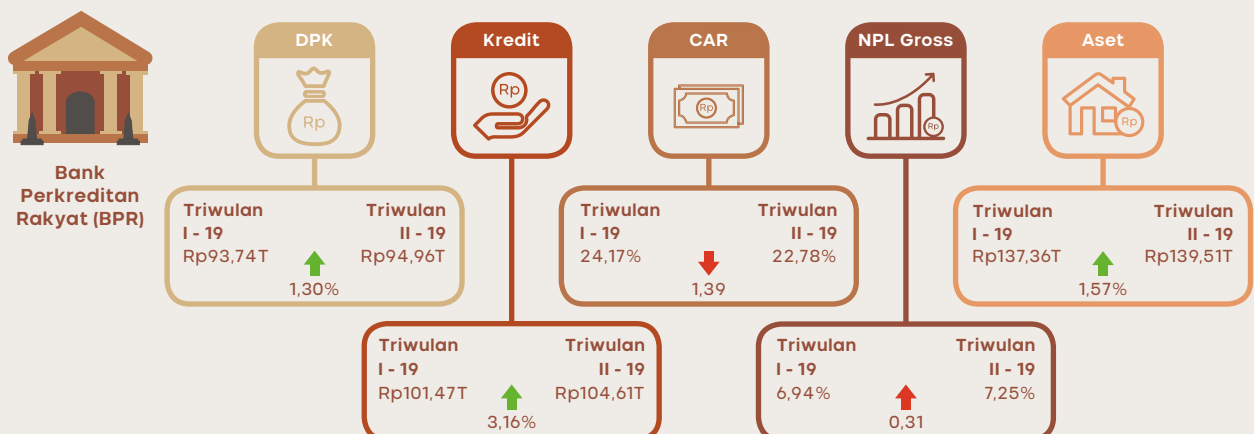
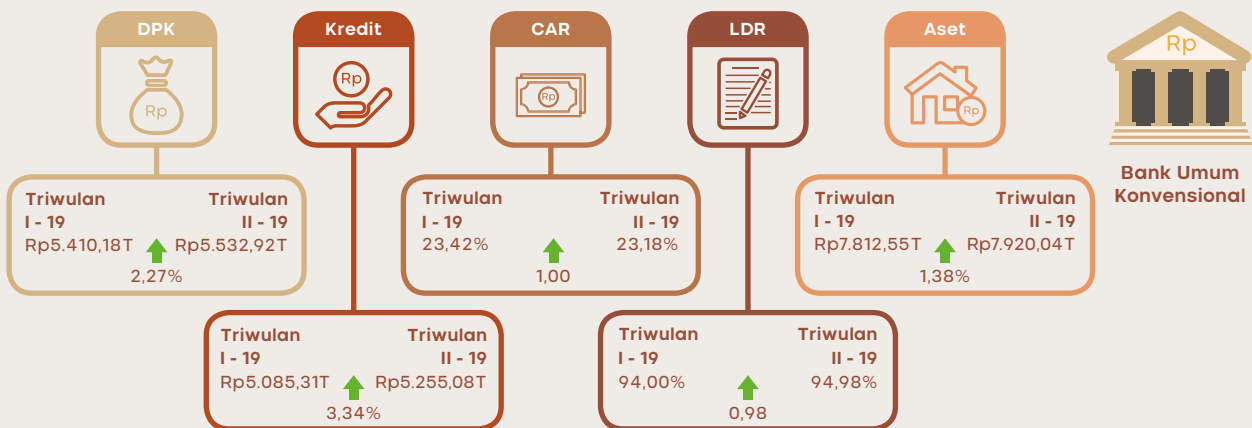
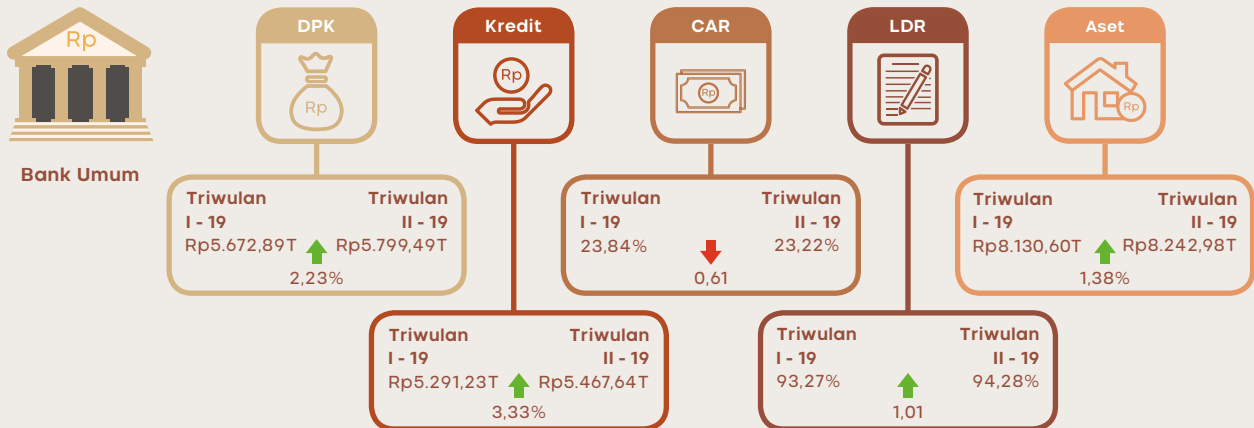


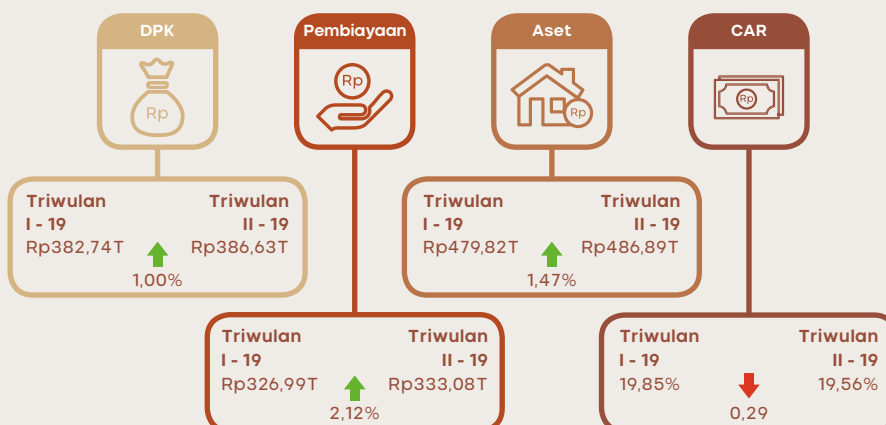
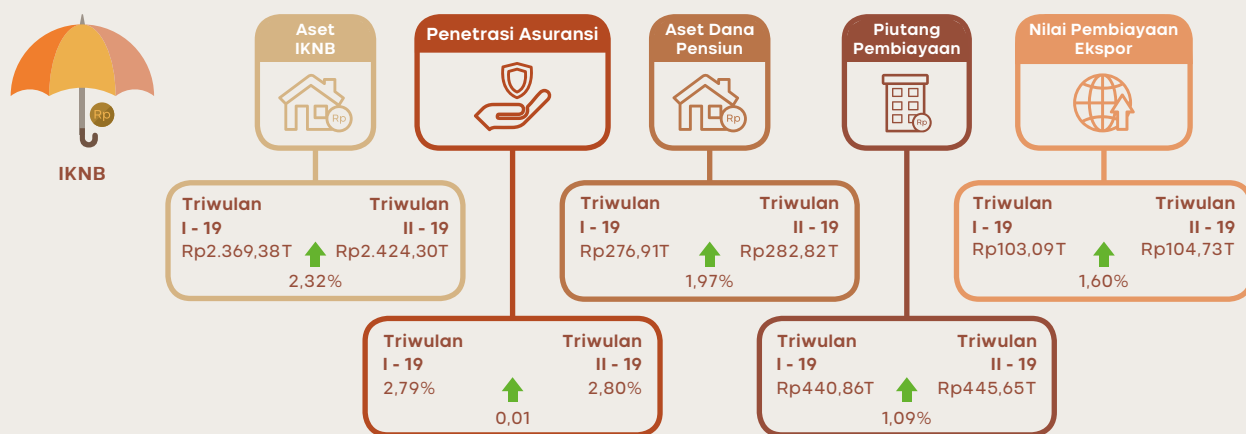
Jumlah Provinsi Tempat Agen
34 Provinsi

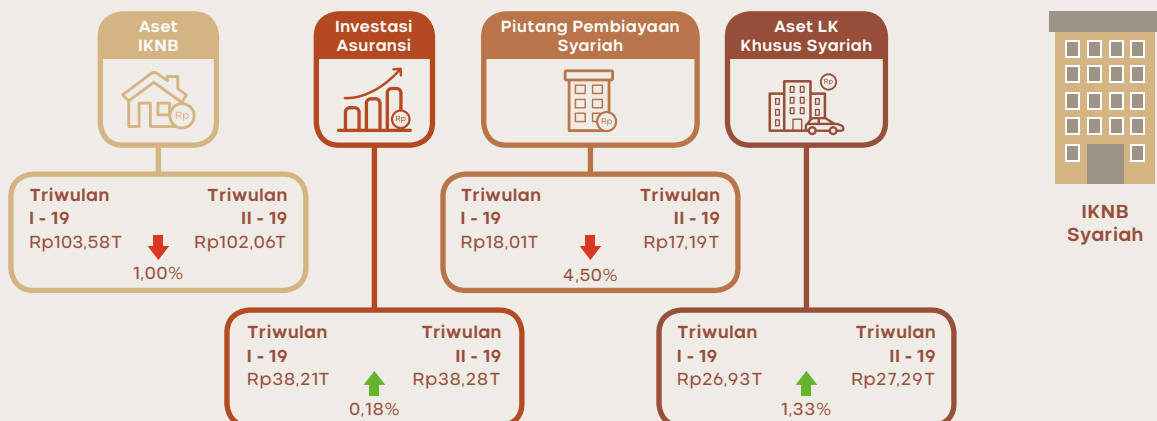
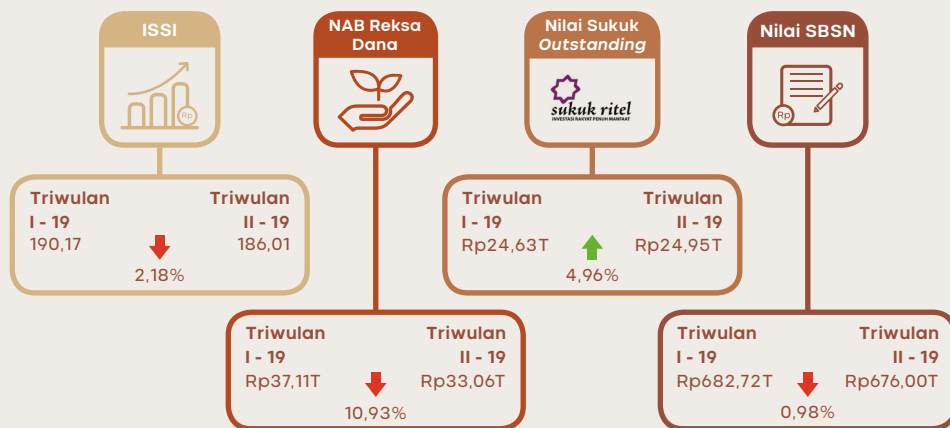
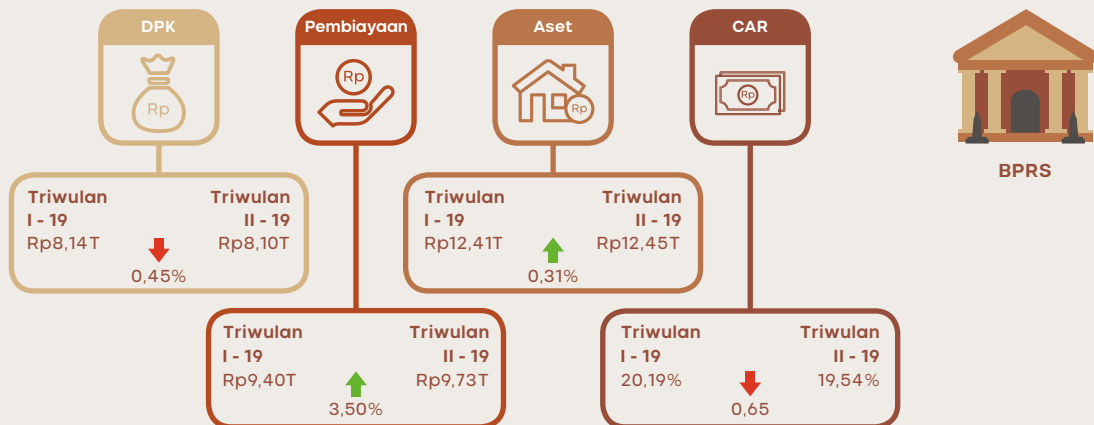


Jumlah Kab/Kota
512 Kab/Kota

Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan









01

Tinjauan Industri
Sektor Jasa Keuangan



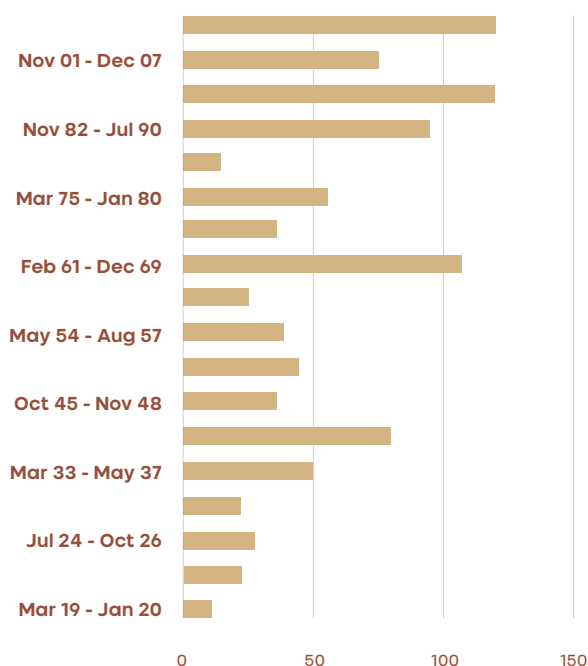
1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

IMF dan Bank Dunia kembali merevisi turun pertumbuhan perekonomian global 2019 seiring eskalasi perang dagang AS-Tiongkok dan perlambatan pertumbuhan perekonomian sebagian besar negara utama dunia. Sejalan dengan hal tersebut, *leading indicators* triwulan II-2019 menunjukkan bahwa perekonomian global masih dalam tren melambat. Kebijakan bank sentral dunia cenderung akomodatif di triwulan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. The Fed menurunkan *Federal Funds Rate* (FFR) di *Federal Open Market Committee* (FOMC) Meeting bulan Juli 2019, sedangkan Bank of Japan (BoJ) dan European Central Bank (ECB) menyatakan akan tetap mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif, dengan sinyal yang semakin dovish.

PDB Amerika Serikat tumbuh sedikit di bawah ekspektasi pada triwulan II-2019 ke 2,29% (yoy) disebabkan oleh perlambatan kinerja eksternal AS. Tingkat ekspor AS tumbuh terkontraksi di -1,54% (yoy). Ketidakpastian mengenai tarif perang dagang dengan Tiongkok juga menyebabkan tingkat investasi AS turun ke 4,12% (yoy). Berkebalikan dengan kinerja eksternalnya, perekonomian domestik AS terpantau tumbuh solid dengan tingkat konsumsi rumah tangga yang tumbuh 2,57% (yoy). Inflasi IHK pada Juni 2019 tercatat sebesar 1,66% (yoy). Namun demikian, The National Bureau of Economic Research (NBER) masih menilai bahwa perekonomian AS masih berada dalam fase ekspansi. Siklus ekspansi perekonomian AS ini telah berlangsung selama 121 bulan sejak Juni 2009 dan telah menjadi siklus ekspansi AS terpanjang sepanjang sejarah.

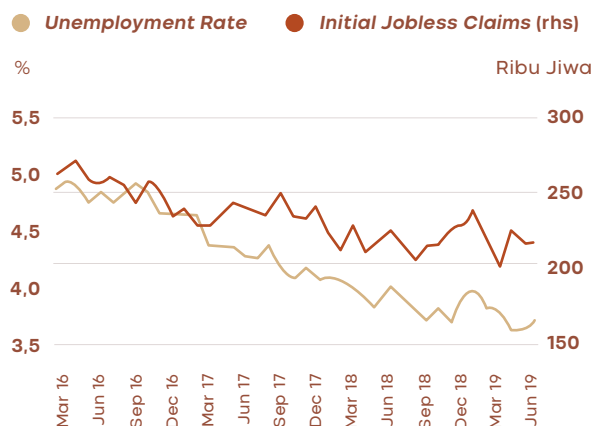
Grafik I - 1 ◇ Periode Ekspansi Perekonomian AS



Sumber: National Bureau of Economic Research

Indikator ketenagakerjaan AS menunjukkan bahwa perekonomian AS masih terus membaik. Tingkat pengangguran triwulan II-2019 turun ke 3,7% (triwulan I-19: 3,8%). Turunnya tingkat pengangguran ini sejalan dengan pergerakan *initial jobless claims* yang turun ke 221 ribu di akhir Juni 2019 (akhir Maret 2019: 230 ribu).

Grafik I - 2 ◇ Kondisi Ketenagakerjaan AS

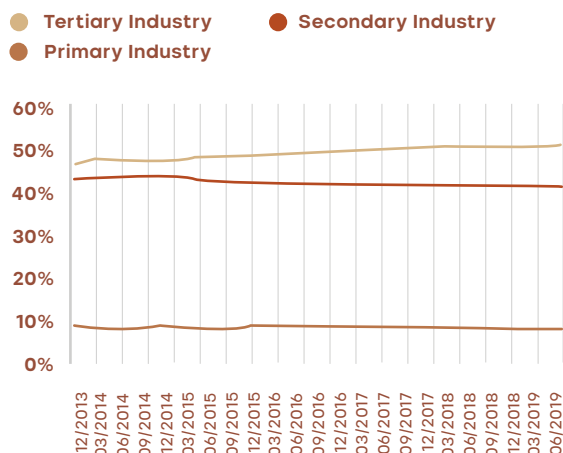


Sumber: US Department of Labor

Pada rapat *Federal Open Market Committee* (FOMC) tanggal 30-31 Juli 2019, The Fed mengumumkan penurunan *federal funds rate* sebesar 25 bps ke rentang 2,0% - 2,25% sebagai *insurance cut* mengantisipasi perkembangan *trade wars*. Selain itu, penurunan juga dilakukan sebagai respon terhadap pertumbuhan investasi global yang masih lambat serta tingkat inflasi AS yang masih di bawah 2%.

Pertumbuhan Tiongkok terkini menunjukkan tren melambat pada triwulan II-2019 di level 6,4% (yoy). Pertumbuhan ini merupakan yang terendah dalam 27 tahun terakhir. Tiongkok masih terus berupaya untuk merubah struktur perekonomiannya agar dapat tumbuh lebih berkelanjutan. Porsi industri tersier, yang sebagian besar merupakan sektor jasa, masih dalam tren naik mengalahkan porsi industri sekunder, yang sebagian merupakan sektor manufaktur. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bergerak relatif stabil di 2,3% (yoy). Kinerja eksternal masih berkontraksi dengan ekspor turun -1,3% (yoy) dan impor turun -7,3% (yoy). Kinerja eksternal ini diharapkan akan kembali membaik setelah dimulainya kembali perundingan perang tarif dagang dengan AS pasca pertemuan di G20 Summit tanggal 28-29 Juni 2019 di Jepang.

Grafik I - 3 ◇ Porsi Pertumbuhan Tiongkok Berdasarkan Jenis Industri

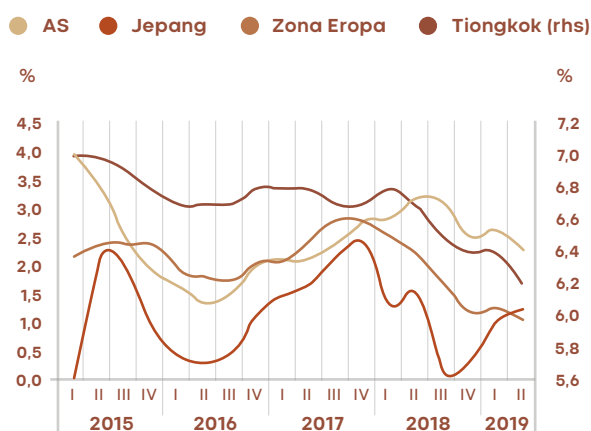


Sumber: CEIC

Perekonomian Jepang tumbuh menguat 1,2% (yoy) di triwulan II-2019 dengan inflasi rendah di level 0,7% (yoy). *Monetary Policy Meeting Bank of Japan* (BoJ) pada 20 Juni 2019 menyatakan BoJ akan mempertahankan posisi kebijakan moneter ekspansifnya guna mendorong inflasi secara bertahap dapat mencapai target 2,0% yang telah ditetapkan. BoJ berencana untuk tetap mempertahankan kebijakan suku bunganya paling tidak hingga musim semi 2020.

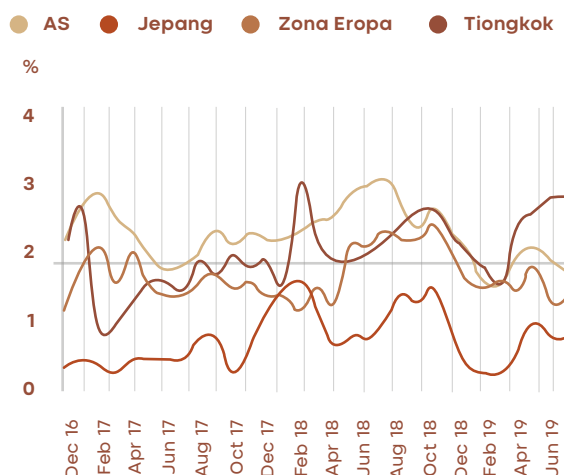
Pertumbuhan perekonomian Zona Eropa relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara maju lainnya. PDB Zona Eropa tumbuh melambat 1,1% (yoy) dengan inflasi stabil 1,3% (yoy) di Juni 2019. European Central Bank (ECB) mengumumkan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga kebijakannya hingga September 2019 (siaran pers hasil rapat *Governing Council* 25 Juli 2019). Namun demikian, Presiden ECB tetap memberikan sinyal *dovish* dengan menyatakan bahwa kebijakan moneter jangka panjang yang akomodatif masih dibutuhkan guna mendorong perekonomian lebih lanjut. Dengan demikian, pasar menekspektasikan ECB akan menurunkan suku bunga kebijakannya pada September 2019.

Grafik I - 4 ◇ Tingkat Pertumbuhan PDB Beberapa Negara



Sumber: CEIC

Grafik I - 5 ◇ Tingkat Inflasi IHK Beberapa Negara

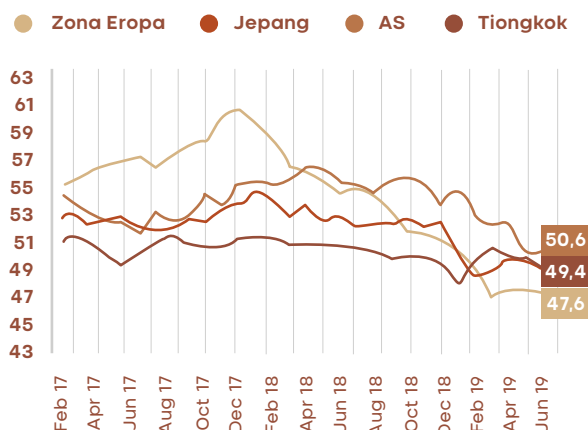


Sumber: CEIC

Perekonomian global ke depan diperkirakan masih akan dalam tren melambat. Hal ini diindikasikan dari pergerakan data indikator *headline manufacturing* dari *Purchasing Manager Index* (PMI) Zona Euro, Jepang, dan Tiongkok yang mulai turun di bawah angka 50. Selain itu, PMI AS juga dalam tren menurun sejak pertengahan 2018 dan mulai menyentuh batas

50. Oleh karena itu, kegiatan manufaktur maupun sektor riil ke depan diperkirakan masih akan stagnan.

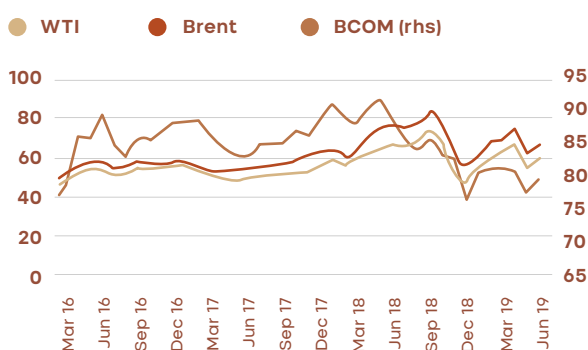
Grafik I - 6 ◇ *Headline Manufacturing PMI*



Sumber: IMF

Harga minyak dunia West Texas Intermediate (WTI) dan Brent triwulan II-2019 masing-masing berada di level USD58,5/brel (-3,34% *qtq*) dan USD64,7/brel (-2,97% *qtq*). Indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) juga turun -1,77% (*qtq*). Penurunan ini terutama didorong oleh eskalasi perang dagang dengan Tiongkok yang juga meluas ke Meksiko dan India. Namun demikian, harga komoditas sempat menguat kembali di akhir Juni 2019 pasca kesepakatan AS dan Tiongkok untuk mendiskusikan kembali kerja sama perdagangan pada G20 Summit 28-29 Juni 2019 di Jepang.

Grafik I - 7 ◇ *Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya*



Sumber: Bloomberg

World Bank merevisi turun proyeksi perekonomian global pada rilis *Global Economic Prospects* (GEP) Juni 2019. Eskalasi perang dagang AS-Tiongkok dan perlambatan pertumbuhan perekonomian sebagian besar negara utama dunia masih menjadi *downside risk* utama. Kontraksi permintaan global ini kemudian diperkirakan akan menekan pertumbuhan ekspor dan tingkat investasi terutama di negara berkembang. Pertumbuhan harga komoditas migas dan non-migas juga diperkirakan juga akan turun sejalan dengan perlambatan perekonomian global.

Tabel I - 1 ◇ *Global Economic Prospect World Bank*

% yoy	2019f	
	GEP Jan 2019	GEP Juni 2019
Global	2,9	2,6
Negara Maju	2,0	1,7
Negara Berkembang	4,3	4,0
Harga Minyak	-2,9	-3,4
Harga Komoditas Non Migas	1	-2,1

Sumber: World Bank

Sejalan dengan GEP Juni 2019, angka proyeksi perekonomian global pada *World Economic Outlook* (WEO) International Monetary Fund (IMF) Juli 2019 kembali direvisi turun. Revisi turun WEO terutama bersumber dari perang dagang AS dan Tiongkok yang masih terus berlanjut serta pertumbuhan perdagangan global yang masih stagnan. Perlambatan perekonomian terutama terjadi di kawasan Asia. Laju pertumbuhan kegiatan investasi dan konsumsi kawasan negara Asia dinilai masih akan lebih rendah dari perkiraan karena perusahaan dan rumah tangga masih menahan pengeluarannya.

Tabel I - 2 ◇ *World Economic Outlook IMF*

% yoy	2019f		
	WEO Jan 2019	WEO April 2019	WEO Juli 2019
Global	3,5	3,3	3,2
Negara Maju	2,0	1,8	1,9
Negara Berkembang	4,5	4,4	4,1
Harga Minyak	-14,1	-13,4	-4,1
Harga Komoditas Non Migas	-2,7	-0,2	-0,6

Sumber: IMF

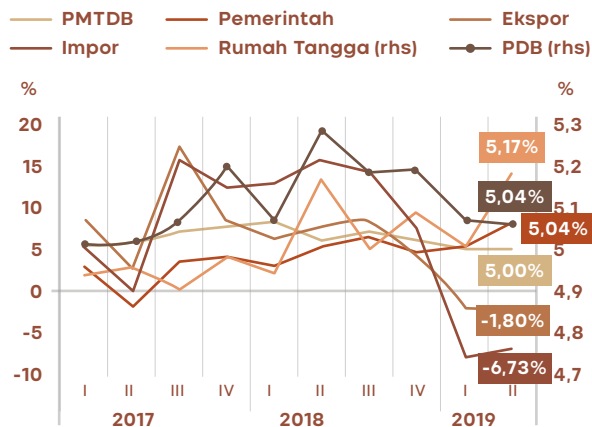
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Perekonomian domestik pada triwulan II-2019 tumbuh stabil di tengah perlambatan ekonomi global yang sedang terjadi. Tingkat inflasi tetap terjaga pada rentang target inflasi yang ditetapkan. Namun demikian, kinerja eksternal perlu mendapat perhatian lebih lanjut seiring tren perlambatan ekspor yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi domestik triwulan II-2019 tercatat tumbuh stabil sebesar 5,05% (yoy). Tingkat konsumsi rumah tangga tumbuh meningkat di 5,17% (yoy). Investasi juga terjaga stabil di 5,01% (yoy). Kinerja

eksternal juga kembali mencatatkan surplus yang didorong oleh perlambatan pertumbuhan impor. Pada triwulan berjalan, ekspor berkontraksi -1,81% (yoy), dengan impor berkontraksi lebih dalam sebesar -6,73% (yoy).

Grafik I - 8 ◇ Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

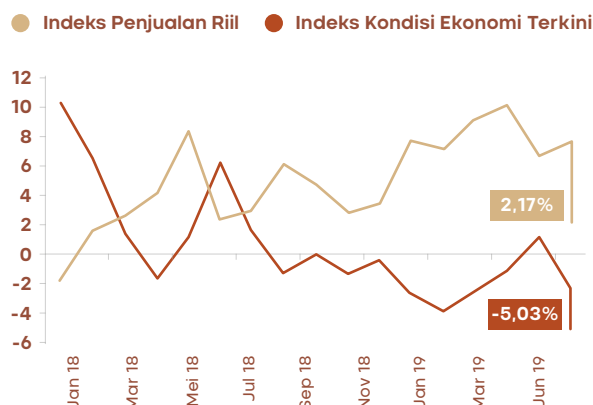


Sumber: BPS

Indikator sektor riil cenderung bergerak *mixed*. Indikator Markit PMI manufaktur menunjukkan perusahaan domestik masih berada dalam zona ekspansi di level 50,6 (triwulan I-19: 51,2). Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan II-2019 tercatat sebesar 19,17% (triwulan I-19: 8,65%). Hal ini mengindikasikan kegiatan dunia usaha pada triwulan II-2019 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penjualan semen dan kendaraan bermotor juga

bergerak masing-masing naik sebesar 46,81% (yoy) dan 1,19% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Juni 2019 melambat ke level 2,17% (yoy). Pergerakan indeks tersebut sejalan dengan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini dari Survei Konsumen Juni 2019 yang berkontraksi -5,03% (yoy).

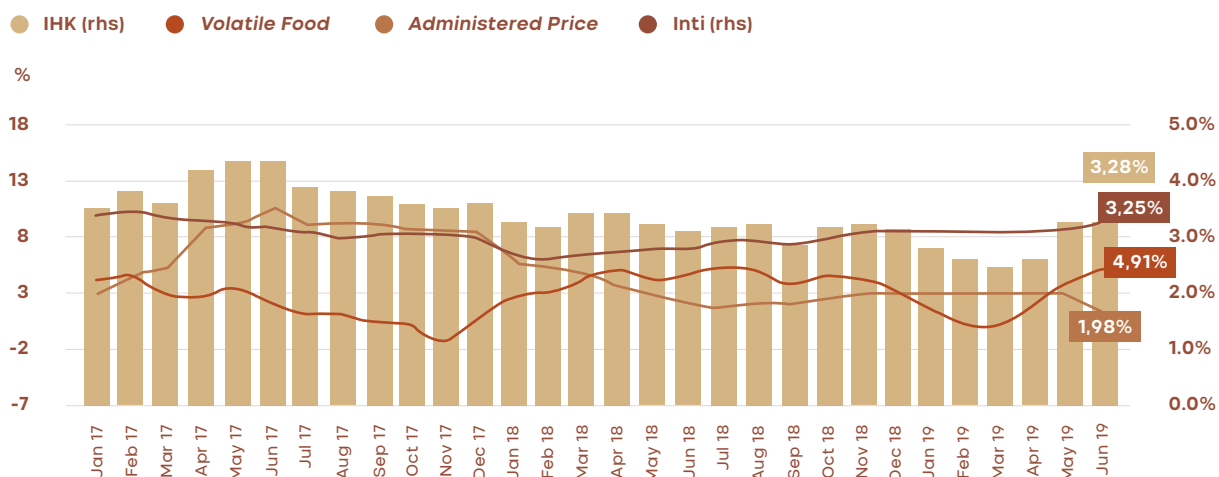
Grafik I - 9 ◇ Indeks Penjualan Riil dan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini



Sumber: Bank Indonesia

Inflasi triwulan II-2019 tercatat pada level 3,28% (yoy). Inflasi inti tercatat stabil sebesar 3,25% (yoy). Naiknya inflasi triwulan II-2019 terutama disebabkan oleh kenaikan harga pangan pasca Hari Raya Idul Fitri. Harga pangan naik 4,91% (yoy), sedangkan harga barang yang diatur pemerintah naik 1,98% (yoy).

Grafik I - 10 ◇ Tingkat Inflasi Indonesia

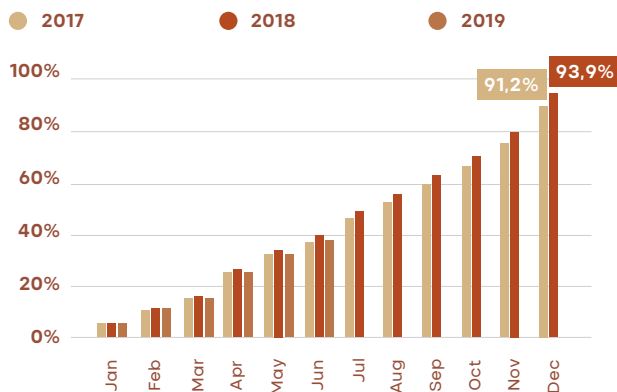


Sumber: BPS

Data per Juni 2019 menunjukkan bahwa penerimaan pajak baru mencapai Rp688 triliun atau 38,57% dari target APBN (Juni 2018: 40,39%). Sejalan dengan hal tersebut, total penerimaan negara baru mencapai Rp898 triliun atau 41,51% (Juni 2018: 43,99%). Namun demikian, pengeluaran negara masih sesuai dengan pergerakan historisnya, tercatat sebesar Rp1.034

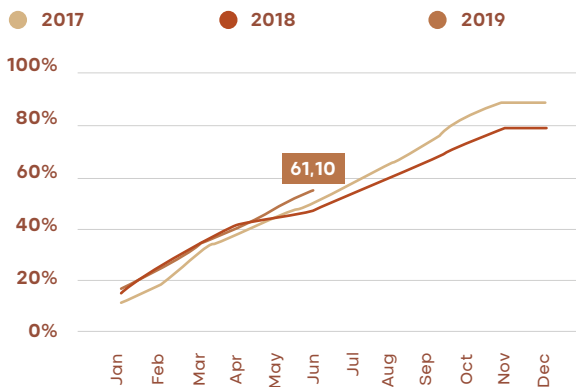
triliun 42,03% dari APBN (Juni 2018:42,51%). Untuk membiayai defisit anggaran tersebut, Pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar Rp504 triliun atau 61,1% dari target hingga bulan Juni 2019. Laju penerbitan SBN ini lebih besar dibandingkan data capaian bulan yang sama di dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar 52,89% di tahun 2018 dan 55,92% di tahun 2017.

Grafik I - 11 ◇ Realisasi Penerimaan Pajak terhadap APBN



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik I - 12 ◇ Realisasi Penerbitan SBN Bruto terhadap Target

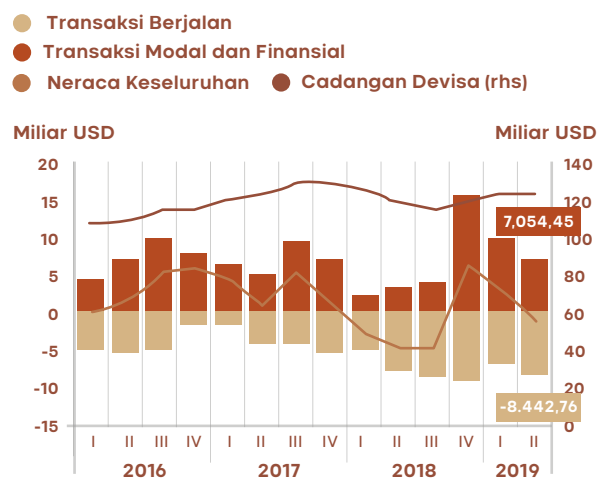


Sumber: Kementerian Keuangan

Defisit neraca transaksi berjalan triwulan II-2019 kembali melebar. Defisit neraca transaksi berjalan triwulan II-2019 tercatat sebesar USD8,4 miliar (3,04% terhadap PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya sebesar USD7,0 miliar (2,60% terhadap PDB). Sampai dengan triwulan II-2019,

defisit neraca transaksi berjalan masih berada dalam batas aman, yaitu 2,8% terhadap PDB. Peningkatan defisit tersebut terutama didorong oleh perilaku musiman repatriasi dividen dan pembayaran bunga utang luar negeri di triwulan-II 2019. Namun demikian, neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar USD0,4 miliar didorong oleh surplus neraca transaksi finansial yang tinggi. Sejalan dengan surplus neraca pembayaran, cadangan devisa Indonesia terpantau stabil. Cadangan devisa tercatat di USD123,8 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

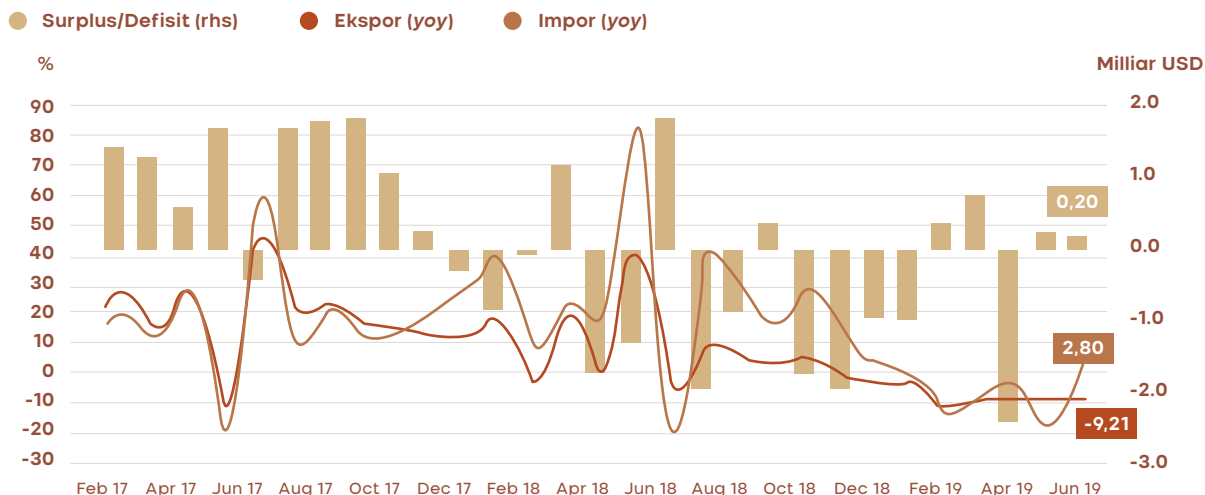
Grafik I - 13 ◇ Neraca Pembayaran Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia triwulan II-2019 mengalami defisit sebesar USD1,87 miliar. Impor naik 2,8% (yoy), sedangkan ekspor turun -9,21% (yoy). Neraca migas masih menjadi penyumbang utama defisit sebesar USD3,51 miliar, sedangkan neraca non migas mencatat surplus sebesar USD1,63 miliar.

Grafik I - 14 ◇ Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS

1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

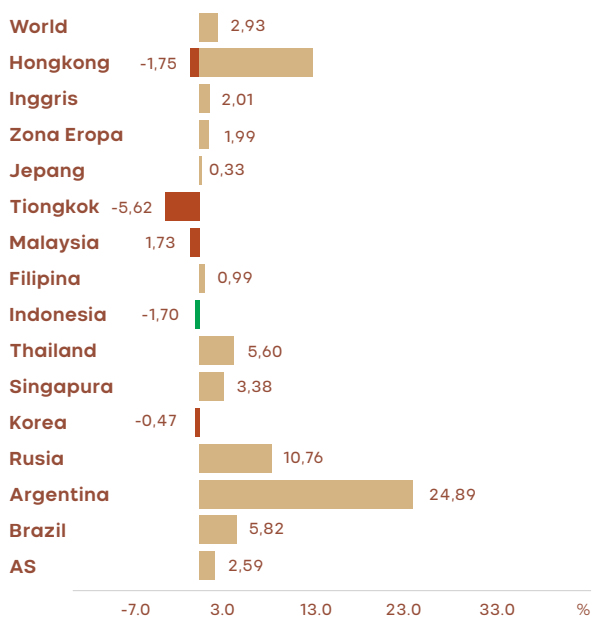
Pasar keuangan global secara umum menguat di triwulan II-2019. Sentimen *dovish* kebijakan moneter bank sentral di negara maju mendorong terjadinya kembali *inflow* ke pasar keuangan negara berkembang. Hal ini kemudian mendorong perbaikan kinerja pasar di masing-masing negara. Namun demikian, risiko pasar keuangan ke depan tetap perlu diwaspadai mengingat masih tingginya ketidakpastian terkait kesepakatan perang tarif dagang AS-Tiongkok dan potensi perlambatan perekonomian global.

A. Pasar Saham

Pasar saham global tumbuh solid di triwulan II-2019 dengan indeks MSCI World naik sebesar 2,93% (*qtq*). Pasar saham AS juga menguat signifikan pada triwulan ini seiring masih solidnya perbaikan kinerja indikator sektor riil AS. Sedangkan, pasar saham Tiongkok terkoreksi -5,62% (*qtq*) disebabkan dinamika pergerakan perang dagang dan perkembangan indikator perekonomian Tiongkok terkini yang menunjukkan berlanjutnya perlambatan perekonomian. Di domestik, IHSG terkoreksi -1,70% (*qtq*) ke level 6.358,63. Namun demikian, IHSG masih tetap naik secara *year to date* sebesar 2,65% hingga akhir Juni 2019. Kenaikan indeks terutama didorong oleh masuknya dana non-residen ke pasar saham sebesar Rp56,67 triliun.

Grafik I - 15 ◇ Perkembangan Pasar Saham Global

28 Jun 2019 vs 29 March 2019



Sumber: Bloomberg

B. Pasar Surat Utang Global

Pasar surat utang global triwulan II-2019 secara umum bergerak membaik. *Yield* surat utang tenor 10 tahun di berbagai negara mulai bergerak turun sejalan dengan meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter oleh The Fed dan ECB di paruh kedua tahun ini. Tren perbaikan *yield* ini diperkuat pula oleh tingkat inflasi global yang cenderung moderat. Di domestik, *yield* surat utang pemerintah Indonesia (SBN) turun 26,5 *bps* didorong oleh masuknya dana non-residen ke pasar SBN sebesar Rp21,63 triliun.

Tabel I - 3 ◇ Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global

	Des '18	Mar '19	Jun '19	Δqtq (bps)
Indonesia	8,03	7,63	7,37	-26,5
Filipina	7,44	7,07	5,61	-146,1
Malaysia	4,07	3,77	3,63	-13,5
Thailand	2,48	2,43	2,12	-31,4
Tiongkok	3,31	3,07	3,24	16,7
Jepang	0,00	-0,08	-0,16	-7,7
Inggris	1,28	1,00	0,83	-16,7
AS	2,83	2,57	2,07	-50,0

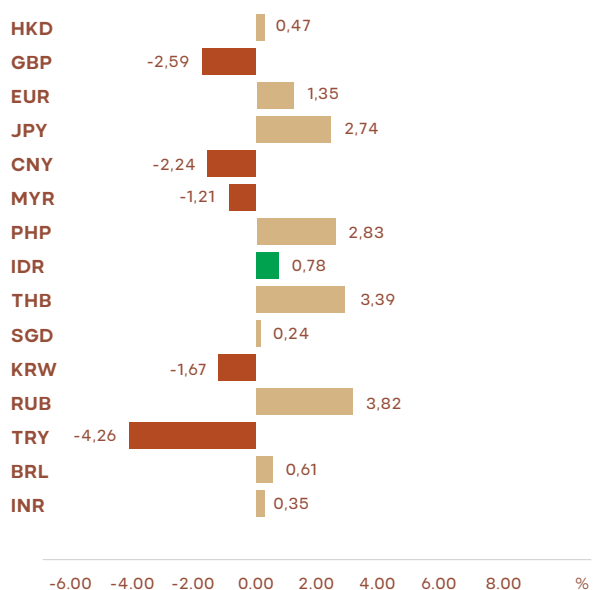
Sumber: Bloomberg

C. Pasar Nilai Tukar

Nilai tukar global sepanjang triwulan II-2019 relatif membaik. Rupiah terapresiasi 0,78% (*qtq*) ke Rp14.128/USD. Menguatnya nilai tukar Rupiah ini terutama didorong oleh *capital inflow*, baik dari pasar saham dan pasar SBN.

Grafik I - 16 ◇ Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global

28 Jun 2019 vs 29 March 2019

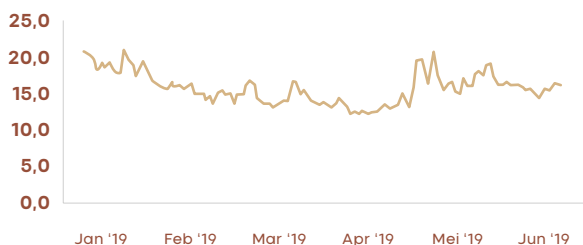


Sumber: Reuters

D. Volatilitas dan Risiko

Pasar keuangan global triwulan II-2019 relatif lebih stabil dengan triwulan sebelumnya. Nilai rata-rata index VIX pada triwulan II-2019 turun ke level 15,1 (Mar 19: 16,1).

Grafik I - 17 ◇ Indeks VIX



Sumber: Bloomberg

Di kawasan ASEAN-5, risiko jangka menengah triwulan II-2019 terpantau turun. *Credit Default Swap* (CDS) tenor 5 tahun rata-rata turun sebesar 9,3 bps dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tren penurunan ini relatif sejalan dengan pergerakan VIX Index.

Tabel I - 4 ◇ Perkembangan Indikator CDS Jangka Menengah Negara ASEAN-5

	Des '18	Mar '19	Jun '19	Δ qta (bps)
Indonesia	137,5	91,8	90,4	-1,4
Filipina	88,2	58,4	49,0	-9,4
Malaysia	109,8	65,9	54,8	-11,1
Vietnam	166,0	131,1	113,5	-17,6
Thailand	44,0	42,6	35,7	-6,9

Sumber: Bloomberg

1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan II-2019 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 23,22%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko didukung oleh laba yang masih tumbuh dan perbaikan kualitas kredit perbankan. Fungsi intermediasi perbankan juga relatif cukup baik dilihat dari kredit yang tumbuh tinggi yaitu sebesar 9,92% (yoy) dan DPK sebesar 7,42% (yoy).

Tabel I - 5 ◇ Kondisi Bank Umum

Indikator	Nominal			qta		yoy	
	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan II-2018	Triwulan II-2019
Total Aset (Rp Miliar)	8.068.346	8.130.604	8.242.987	+0,77%	+1,38%	+8,89%	+7,74%
Kredit (Rp Miliar)	5.294.882	5.291.231	5.467.646	-0,07%	+3,33%	+10,75%	+9,92%
DPK (Rp Miliar)	5.630.448	5.672.886	5.799.494	+0,75%	+2,23%	+6,99%	+7,42%
- Giro (Rp Miliar)	1.315.034	1.316.606	1.406.536	+0,12%	+6,83%	+9,88%	+7,24%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.825.259	1.749.477	1.826.202	-4,15%	+4,39%	+10,48%	+6,34%
- Deposito (Rp Miliar)	2.490.155	2.606.803	2.566.756	+4,68%	-1,54%	+3,13%	+8,30%
CAR (%)	23,42	23,84	23,22	42	(61)	(54)	125
ROA (%)	2,50	2,56	2,47	6	(9)	(4)	9
NIM / NOM (%)	5,00	4,74	4,79	(26)	5	(23)	(19)
BOPO (%)	78,33	83,08	80,43	475	(265)	38	58
NPL / NPF Gross (%)	2,37	2,51	2,50	15	(1)	(29)	(17)
NPL / NPF Net (%)	1,04	1,15	1,18	11	3	(18)	(5)
LDR / LFR (%)	94,04	93,27	94,28	(77)	101	313	214

1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan II-2019, sejalan dengan kinerja bank umum, kondisi ketahanan BUK masih solid, tercermin dari CAR sebesar 23,18% yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Fungsi intermediasi BUK juga cukup baik tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 9,84% (yoy) dan pertumbuhan DPK sebesar 7,27% (yoy). Pertumbuhan kredit masih

tercatat lebih cepat dibandingkan DPK yang mengakibatkan LDR naik menjadi 94,98%. Namun demikian, pertumbuhan DPK mulai tercatat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, risiko kredit BUK secara gradual juga membaik, terlihat dari turunnya NPL *gross* dan NPL *net* yang masing-masing menjadi 2,47% dan 1,14%.

Tabel I - 6 ◇ Kondisi Bank Umum Konvensional

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan II-2018	Triwulan II-2019
Total Aset (Rp Miliar)	7.356.224	7.812.547	7.920.038	+0,79%	+1,38%	+8,91%	+7,66%
Kredit (Rp Miliar)	4.784.436	5.085.310	5.255.085	-0,14%	+3,34%	+11,12%	+9,84%
DPK (Rp Miliar)	5.157.744	5.410.178	5.532.926	+0,69%	+2,27%	+6,98%	+7,27%
- Giro (Rp Miliar)	1.281.096	1.281.672	1.367.355	-0,45%	+6,69%	+9,89%	+6,73%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.641.484	1.663.094	1.736.841	-4,27%	+4,43%	+10,17%	+5,81%
- Deposito (Rp Miliar)	2.235.164	2.465.412	2.428.731	+4,99%	-1,49%	+3,22%	+8,66%
CAR (%)	22,01	23,42	23,18	44	(24)	(73)	116
ROA (%)	2,43	2,60	2,51	5	(10)	(5)	8
NIM (%)	5,11	4,86	4,90	(28)	4	(25)	(20)
BOPO (%)	79,46	82,92	80,24	506	(269)	46	77
NPL Gross (%)	2,63	2,47	2,47	14	(1)	(27)	(16)
NPL Net (%)	1,19	1,11	1,14	11	3	(16)	(5)
LDR (%)	92,76	94,00	94,98	(79)	98	345	222

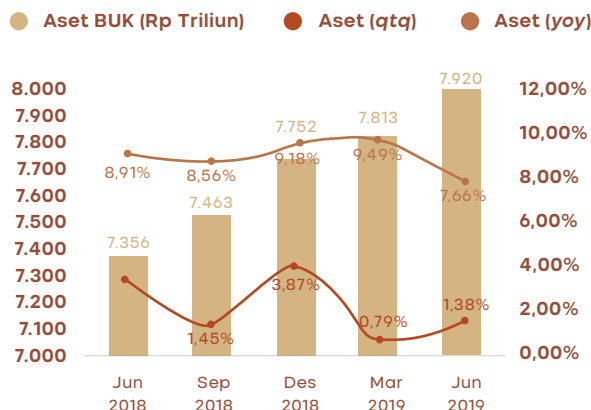
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, Desember 2018

A. Aset

Total aset BUK pada triwulan II-2019 tumbuh 7,66% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,91% (yoy). Meskipun masih tercatat melambat, namun aset perbankan masih tetap tumbuh, ditopang oleh pertumbuhan DPK dan beberapa komponen modal diantaranya cadangan modal, tambahan modal disetor, dan modal pinjaman. Secara kepemilikan, aset kelompok bank BUMN dan BUSN Devisa yang memiliki porsi aset terbesar melambat, sehingga menarik ke bawah pertumbuhan aset. Di sisi lain, BPD dan BUSN Non Devisa justru mencatatkan peningkatan pertumbuhan, meskipun dalam porsi yang cukup kecil, yaitu 9,35% dari total aset perbankan.

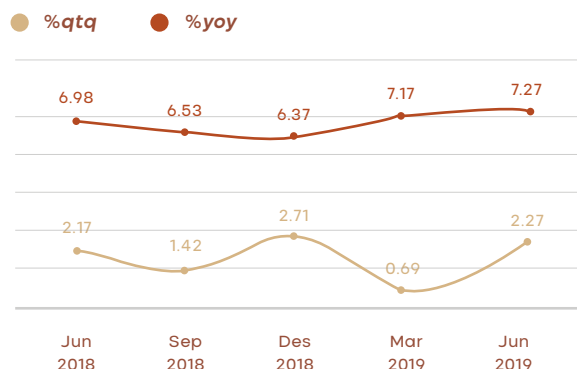
Secara triwulanan, aset BUK tumbuh sebesar 1,38% (qtq) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 0,79% (qtq). Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan aset pada kelompok bank BUMN yang tumbuh 2,28% (qtq) setelah sebelumnya berkontraksi -1,14% (qtq). Secara umum, aset perbankan Indonesia terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset empat BUK terbesar mencapai 49,54% atau hampir setengah dari aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 80,78% dari aset perbankan.

Grafik I - 18 ◇ Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, Juni 2019

Grafik I - 19 ◇ Tren Pertumbuhan DPK



Sumber: SPI, Juni 2019

Tabel I - 7 ◇ Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4%	CR20%
2015	46,24	79,47
2016	48,18	80,14
2017	48,81	79,87
2018	49,65	79,93
Triwulan I-2019	48,88	80,83
Triwulan II-2019	49,54	80,78

Sumber: OJK

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 7,27% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,98% (yoy). Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan DPK Rupiah yang tumbuh 8,15% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,23% (yoy). Peningkatan DPK Rupiah utamanya akibat pertumbuhan deposito rupiah pada nasabah perorangan, seiring dengan kenaikan suku bunga deposito. Sementara itu, pertumbuhan giro dan tabungan masih tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, pengumpulan DPK masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi 77,61% dari total DPK BUK perbankan Indonesia, dengan 50,01% di antaranya berpusat di DKI Jakarta.

Secara triwulanan DPK BUK tumbuh 2,27% (qta), meningkat dibandingkan posisi Maret 2019 yang tumbuh 0,69% (qta). Peningkatan DPK triwulanan didorong oleh peningkatan pertumbuhan pada semua kelompok bank, kecuali kelompok BPD.

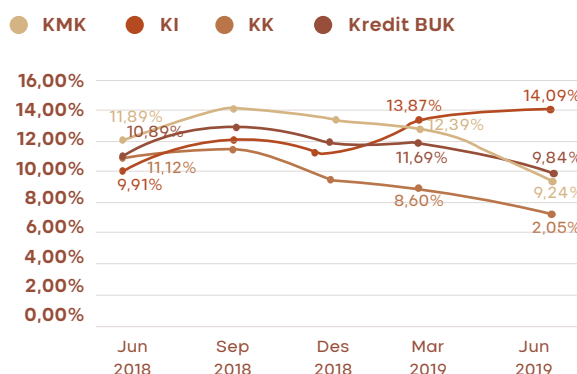
C. Kredit

Pada triwulan II-2019, kredit BUK tumbuh 9,84% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,12% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan oleh penguatan nilai tukar IDR/USD yang mengakibatkan penurunan pada kredit valuta asing (valas) yang cukup signifikan.

Kredit produktif masih tumbuh walaupun melambat menjadi sebesar 10,92% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 11,21% (yoy). Perlambatan didorong oleh melambatnya Kredit Modal Kerja (KMK) sebagai kredit dengan porsi terbesar yang tumbuh 9,24% (yoy) dibandingkan 11,89% (yoy) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, dengan masih tumbuhnya kredit produktif ini mengindikasikan adanya ekspansi bisnis dan perekonomian yang masih menggeliat.

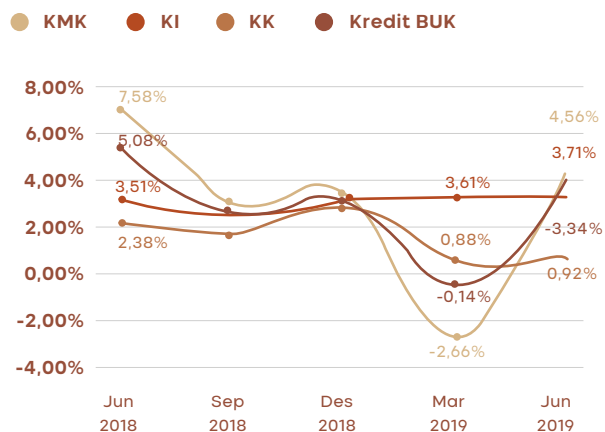
Secara triwulanan kredit tumbuh 3,34% (qta) setelah sebelumnya berkontraksi -0,14% (qta) pada Maret 2019. Hal tersebut utamanya didorong oleh KMK yang tumbuh cukup signifikan pada periode ini.

Grafik I - 20 ◇ Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)



Sumber: SPI, Juni 2019

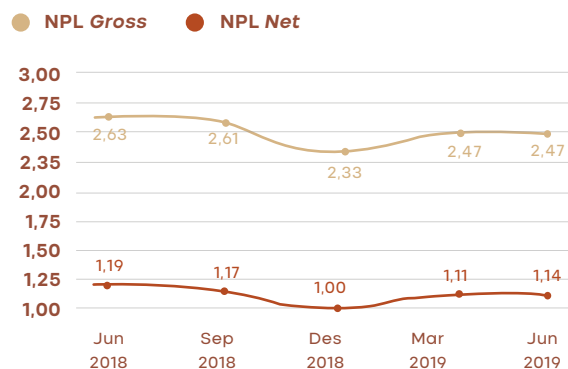
Grafik I - 21 ◇ Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qta)



Sumber: SPI, Juni 2019

Di tengah perlambatan kredit, kualitas kredit masih terus melanjutkan tren perbaikan. Rasio NPL *gross* dan *net* BUK turun masing-masing 16 bps (yoy) dan 1 bps (yoy) menjadi 2,47% dan 1,14%. Berdasarkan jenis penggunaan, rasio NPL KMK, KI dan KK secara tahunan masing-masing turun 3 bps, 11 bps dan 2 bps menjadi 1,47%, 0,53% dan 0,47%. Meskipun terus menunjukkan tren perbaikan, perlu diperhatikan adanya peningkatan rasio NPL sejak awal tahun 2019.

Grafik I - 22 ◇ Tren NPL (%)



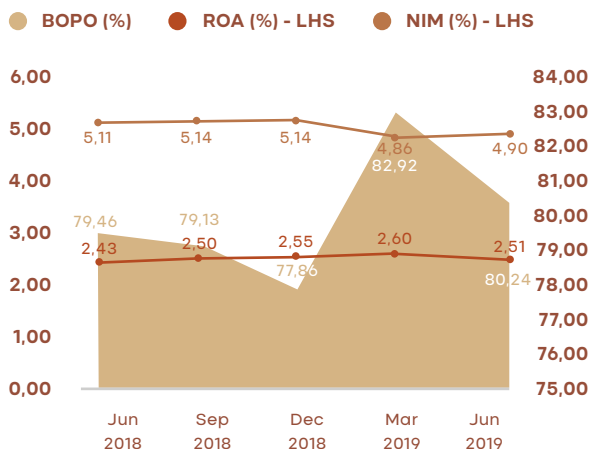
Sumber: SPI, Juni 2019

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan masih terjaga terlihat dari naiknya ROA dari tahun sebelumnya sebesar 2,43% menjadi 2,51%. Kenaikan tersebut disebabkan laba yang masih tumbuh cukup baik yaitu sebesar 11,89% (yoy). Di lain sisi, BOPO perbankan meningkat menjadi 80,24% dari 79,46% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan operasional. Selain itu, kenaikan suku bunga deposito mendorong pertumbuhan beban bunga DPK lebih tinggi dari pendapatan kredit, yang berdampak pada rata-rata

total aset produktif perbankan tumbuh lebih tinggi dari pendapatan bunga bersih. Hal tersebut menyebabkan NIM perbankan turun dari 5,11% menjadi 4,90%.

Grafik I - 23 ◇ Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI, Juni 2019

E. Permodalan

Pada triwulan II-2019 kondisi permodalan BUK masih solid, tercermin dari meningkatnya rasio CAR menjadi 23,18% (Juni 2018: 22,01%). Peningkatan CAR dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan modal yang didorong oleh kenaikan laba, cadangan modal, tambahan modal disetor. Sementara itu, ATMR melambat seiring dengan melambatnya pertumbuhan kredit. Selain itu, ATMR Pasar juga turun yang dipengaruhi meredanya volatilitas nilai tukar pada periode laporan.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada triwulan II-2019, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, meskipun masih dibayangi DPK yang tumbuh melambat.

Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang cukup tinggi meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL).

Tabel I - 8 ◇ Kondisi Umum BPR

Indikator	Nominal			qta		yoy	
	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan II-2018	Triwulan II-2019
Total Aset (Rp Miliar)	128.005	137.362	139.512	+1,23%	+1,57%	+9,74%	+8,99%
Kredit (Rp Miliar)	94.279	101.410	104.616	+3,25%	+3,16%	+7,88%	+10,96%
DPK (Rp Miliar)	86.300	93.747	94.962	+1,95%	+1,30%	+10,85%	+10,04%
- Tabungan (Rp Miliar)	26.686	29.602	29.138	+0,38%	-1,57%	+14,10%	+9,19%
- Deposito (Rp Miliar)	59.614	64.145	65.824	+2,69%	+2,62%	+9,45%	+10,42%
CAR (%)	22,72	24,17	22,78	82	(139)	23	6
ROA (%)	2,48	2,43	2,37	(5)	(6)	(13)	(11)
BOPO (%)	81,74	81,85	82,34	111	49	35	60
NPL Gross (%)	7,15	6,94	7,25	57	31	22	10
NPL Net (%)	5,41	5,28	5,58	54	30	82	18
LDR (%)	77,60	77,36	78,91	82	155	(143)	131
CR (%)	15,94	15,00	15,17	(383)	16	84	(78)

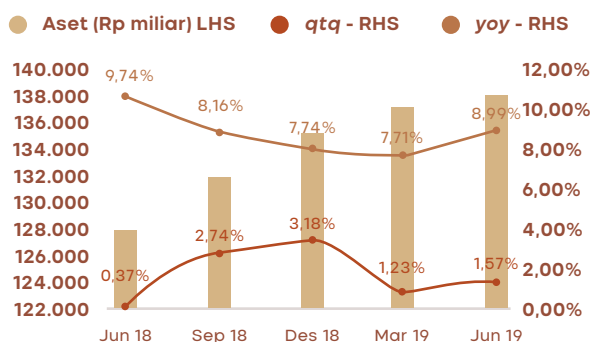
Sumber: SPI, Maret 2019

A. Aset

Aset BPR pada Juni 2019 tumbuh 8,99% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,74% (yoy). Melambatnya pertumbuhan aset salah satunya dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK dan modal BPR.

Berdasarkan lokasi, aset BPR mayoritas berada di Pulau Jawa (57,25%) dengan Jawa Tengah memiliki porsi terbesar yaitu 23,50%. Dilihat dari pertumbuhannya, aset BPR di Maluku Utara tumbuh tertinggi sebesar 53,90% (yoy), meskipun memiliki porsi yang rendah yaitu 0,15% dari total aset BPR. Sementara peningkatan nominal aset BPR tertinggi berada di Jawa Tengah yang tumbuh 12,21% (yoy).

Grafik I - 24 ◇ Perkembangan Aset BPR

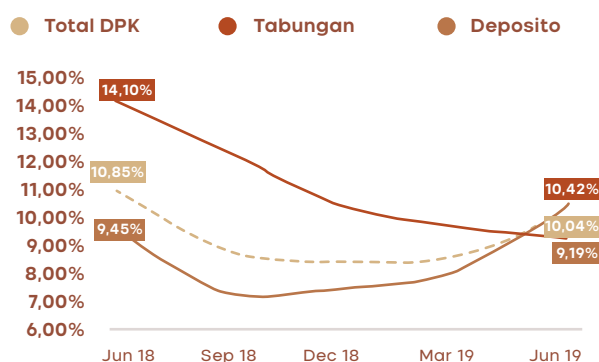


Sumber: SPI BPR, Juni 2019

B. DPK

DPK BPR pada Juni 2019 tumbuh 10,04% (yoy) menjadi Rp94,96 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan Juni 2018 sebesar 10,85% (yoy). Perlambatan terjadi pada tabungan yang melambat cukup besar, dari 14,10% (yoy) menjadi 9,19% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan deposito menunjukkan peningkatan dari 9,45% (yoy) menjadi 10,42% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK BPR antara lain diakibatkan oleh persaingan perebutan dana dengan perusahaan *financial technology peer to peer* (P2P) *lending* yang sedang berkembang. Untuk menyikapi hal tersebut, OJK mengupayakan konsolidasi BPR disertai penguatan permodalan BPR melalui pemenuhan kewajiban modal minimum.

Grafik I - 25 ◇ Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



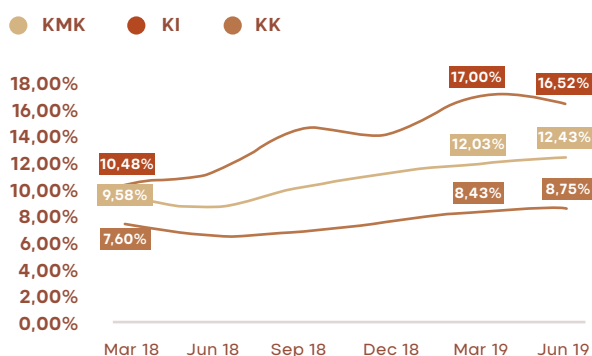
Sumber: SPI BPR, Juni 2019

C. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada triwulan II-2019 tumbuh 10,96% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,88% (yoy). Penyaluran kredit BPR sebagian besar disalurkan untuk kredit produktif, yaitu sebesar 53,10%. Sedangkan porsi kredit untuk tujuan konsumsi tercatat sebesar 45,53%. Pertumbuhan kredit BPR utamanya didorong oleh pertumbuhan KMK sebesar 12,43% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,71% (yoy). Penyaluran KMK BPR utamanya disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,91% dari total penyaluran KMK) yang tumbuh 8,82% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,38% (yoy).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,41%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,74%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah BPR yang mayoritas (4.727 BPR*) berada di wilayah Jawa (75,09%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,10% dari total BPR Nasional (132 BPR).

Grafik I - 26 ◇ Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan

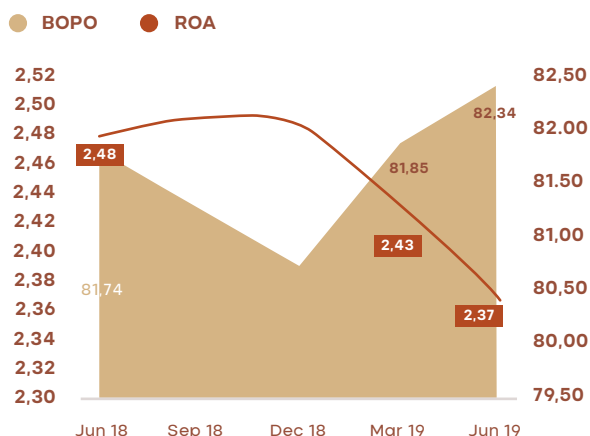


Sumber: SPI BPR, Juni 2019

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada triwulan II-2019 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tercermin dari turunnya ROA menjadi 2,37% yang disebabkan utamanya oleh melambatnya laba operasional yang hanya tumbuh 1,71% (yoy). Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 60 bps menjadi 82,34%. Perlambatan laba BPR terjadi seiring dengan meningkatnya beban bunga kontraktual deposito yang tumbuh 11,13% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,85% (yoy).

Grafik I - 27 ◇ Tren ROA dan BOPO BPR



Sumber: SPI, Juni 2019

E. Permodalan

Permodalan BPR cukup solid dan memadai tercermin dari rasio CAR sebesar 22,78% yang meningkat dari 22,72% pada triwulan II-2018. Hal tersebut seiring dengan upaya BPR untuk memperkuat permodalan antara lain melalui *merger* dan konsolidasi.

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan II-2019, kredit UMKM tumbuh 11,56% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,02% (yoy). Peningkatan kredit UMKM masih ditopang oleh penyaluran ke sektor perdagangan besar, diikuti sektor pengolahan dan pertanian seiring dengan porsi penyaluran ke sektor tersebut yang cukup besar. Apabila dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran UMKM ke sektor pertambangan dan penggalian tumbuh tertinggi yaitu sebesar 67,98% (yoy).

Kualitas kredit UMKM juga membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 4,42% menjadi 3,71%. Perbaikan NPL tersebut terjadi pada sebagian besar sektor ekonomi, utamanya pada sektor listrik, air, dan gas dengan penurunan NPL UMKM menjadi 2,95%.

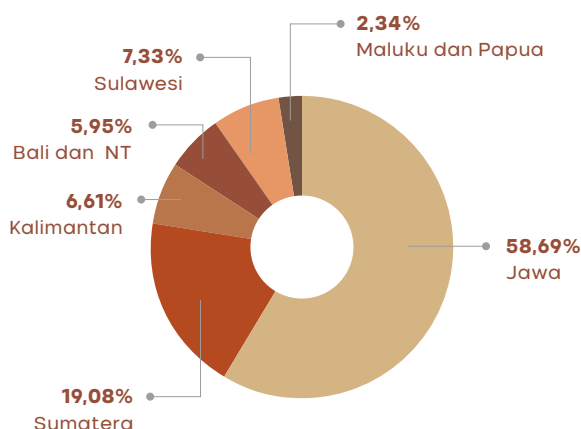
Tabel I - 9 ◇ Konsentrasi Penyaluran UMKM

Indikator	Nominal (Rp M)			Porsi		qta		yoy	
	Jun '18	Des '18	Jun '19	Jun '18	Jun '19	Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
Perdagangan Besar dan Eceran									
Baki Debet	480.540	499.248	522.008	52,57%	51,19%	1,88%	2,63%	8,38%	8,38%
NPL	19.896	17.170	19.835	4,14%	3,80%	8,05%	6,92%	2,58%	-0,31%
Industri Pengolahan									
Baki Debet	93.234	99.028	102.217	10,20%	10,02%	0,10%	3,11%	3,72%	9,63%
NPL	3.811	3.292	3.822	4,09%	3,74%	7,87%	7,63%	11,83%	0,29%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan									
Baki Debet	83.439	89.560	101.664	9,13%	9,97%	3,55%	9,62%	14,14%	21,84%
NPL	2.519	2.073	2.378	3,02%	2,34%	13,56%	1,02%	-6,46%	-5,60%
Listrik, Gas, dan Air									
Baki Debet	3.497	4.307	5.019	0,38%	0,49%	4,78%	11,21%	-5,54%	43,52%
NPL	698	135	148	19,96%	2,95%	11,11%	-1,33%	341,77%	-78,80%
Lainnya									
Baki Debet	253.367	277.829	288.868	27,72%	28,33%	-1,43%	5,48%	14,80%	14,01%
NPL	13.459	9.751	11.670	5,31%	4,04%	6,89%	11,96%	11,58%	-13,29%
Baki Debet UMKM	914.077	969.972	1.019.776			0,92%	4,18%	10,02%	11,56%
NPL UMKM	40.383	32.421	37.853	4,42%	3,71%	8,05%	8,06%	7,07%	-6,27%

Sumber: SPI, Maret 2019

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,69%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku,

dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,23%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat yang tumbuh masing-masing 21,66% (yoy) dan 20,90% (yoy).

Grafik I - 28 ◇ Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah


Sumber: SPI, Maret 2019

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (58,11%) dan BUSN (33,89%). Dilihat dari pertumbuhannya, kredit UMKM KCBA dan bank Campuran tumbuh tertinggi

sebesar 20,67% (yoy). Namun demikian, kredit UMKM BPD tercatat sedikit melambat menjadi 9,77% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 10,04% (yoy).

Tabel I - 10 ◇ Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank

Indikator	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '18	Des '18	Jun '19		Mar '19	Jun '19	Jun '18	Jun '19
BUMN	527.800	551.935	592.553	58,11%	2,39%	4,85%	11,81%	12,27%
BUSN	312.628	338.455	345.561	33,89%	-0,81%	2,94%	7,46%	10,53%
BPD	66.172	70.089	72.638	7,12%	-1,83%	5,57%	10,04%	9,77%
KCBA dan Campuran	7.478	9.493	9.024	0,88%	-2,64%	-2,36%	-2,54%	20,67%
Total UMKM	914.077	969.972	1.019.776	100%	0,92%	4,18%	10,02%	11,56%

Sumber: SPI, Juni 2019

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan, dengan porsi masing-masing sebesar 18,29% dan

16,50%. Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga yaitu 23,23% terhadap total kredit.

Tabel I - 11 ◇ Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp Triliun)		qtq		yoy		Porsi
		Triwulan II-2018	Triwulan II-2019	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Jun '18	Jun '19	
Lapangan Usaha								
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	334,52	362,56	-0,23%	2,40%	12,77%	8,38%	6,63%
2.	Perikanan	11,21	13,02	1,70%	5,51%	9,01%	16,13%	0,24%
3.	Pertambangan dan Penggalian	113,51	136,55	-0,12%	-0,87%	-7,31%	20,29%	2,50%
4.	Industri Pengolahan	843,89	902,05	-3,36%	3,82%	7,55%	6,89%	16,50%
5.	Listrik, Gas, dan Air	164,68	208,93	9,80%	11,81%	29,60%	26,87%	3,82%
6.	Konstruksi	277,22	348,34	2,43%	7,59%	18,39%	25,65%	6,37%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	930,04	999,85	-0,34%	2,79%	10,03%	7,51%	18,29%
8.	Penyediaan Akomodasi dan PMM	97,77	104,20	0,62%	3,82%	1,08%	6,58%	1,91%
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	214,23	232,46	-1,54%	8,64%	23,13%	8,51%	4,25%
10.	Perantara Keuangan	230,76	250,02	-5,00%	7,65%	8,82%	8,34%	4,57%
11.	Real Estate	229,84	258,47	2,26%	1,83%	8,76%	12,46%	4,73%
12.	Administrasi Pemerintahan	22,53	25,41	3,74%	-2,30%	1,51%	12,77%	0,46%
13.	Jasa Pendidikan	10,75	13,32	2,77%	5,14%	16,25%	23,86%	0,24%
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,35	25,19	1,84%	8,98%	10,91%	30,19%	0,46%
15.	Jasa Kemasyarakatan	72,15	79,18	1,70%	-2,58%	19,82%	9,73%	1,45%
16.	Jasa Perorangan	2,72	3,37	0,69%	23,43%	1,44%	24,21%	0,06%
17.	Badan Internasional	0,11	0,17	-0,62%	0,39%	-31,16%	54,48%	0,00%
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	2,89	1,93	-29,45%	21,30%	-11,08%	-33,15%	0,04%
Bukan Lapangan Usaha								
19.	Rumah Tangga	1.161,94	1.270,17	1,34%	1,26%	12,35%	9,31%	23,23%
20.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	233,99	232,45	-1,45%	0,01%	3,06%	-0,66%	4,25%
Industri		4.974	5.468	-0,07%	3,33%	10,75%	9,92%	100%

Sumber: SPI, Juni 2019

Penyaluran kredit bank umum triwulan II-2019 tumbuh 9,92% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,75% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh lesunya harga komoditas dan pelemahan daya beli masyarakat.

Ditinjau dari porsinya, hingga saat ini penyaluran kredit perbankan Indonesia masih disalurkan ke sektor rumah tangga (23,23%) yang tumbuh 9,31% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,35% (yoy). Kredit sektor ini utamanya disalurkan untuk subsektor kepemilikan rumah tinggal yang pada periode ini melambat 12,28% (yoy) dari 13,08% (yoy). Kredit untuk kepemilikan rumah tinggal utamanya disalurkan untuk kepemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70 (KPR tipe menengah), yang sedikit mengalami pertumbuhan menjadi 18,14% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 17,77% (yoy).

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (18,29%). Kredit di sektor ini tumbuh 7,51% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,03% (yoy). Penyaluran kredit terbesar pada sektor ini adalah perdagangan eceran kecuali mobil dan sepeda motor (7,55%) dan perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor makanan, minuman dan tembakau (7,45%) yang masing-masing tumbuh menjadi 9,11% (yoy) dan 4,89% (yoy).

Sektor industri pengolahan juga masih merupakan salah satu sektor dengan penyaluran kredit terbesar pada periode ini, yaitu sebesar 16,50% dengan porsi terbesar disalurkan kepada industri makanan dan minuman serta industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia. Kredit sektor industri pengolahan tercatat tumbuh 6,89% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,55% (yoy). Meskipun secara umum mengalami perlambatan, beberapa sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang meningkat sejak awal tahun, diantaranya adalah industri pakaian jadi dan industri barang galian bukan logam.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar, yaitu 6,63% dari total penyaluran kredit perbankan, utamanya untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, laju pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tercatat semakin melambat. Sebelumnya pada Juni 2018, pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tumbuh sebesar 12,06% (yoy), sedangkan tahun selanjutnya, pada Juni 2019 pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit hanya tumbuh sebesar 3,03% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit di sub sektor perkebunan kelapa sawit ini seiring dengan melambatnya ekspor kelapa sawit Indonesia dan menurunnya harga CPO di pasar global.

Sementara itu, dilihat dari pertumbuhannya, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencatat pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 30,19 % (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,91% (yoy). Namun demikian, porsi penyaluran kredit pada sektor ini sangat kecil (0,46% dari total penyaluran kredit bank umum).

Sektor listrik, gas dan air juga tumbuh cukup baik sebesar 26,87% (yoy), utamanya dari ketenagalistrikan lainnya yang tumbuh 28,59% (yoy). Hal ini sesuai dengan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang masih berjalan selama periode 2015 – 2019, dimana kebutuhan investasi untuk pengembangan sektor kelistrikan sangat besar, baik untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun Independent Power Producer (IPP). Pembiayaan ke sektor ini dari perbankan dilakukan secara bilateral (bank langsung kepada debitur di sektor ini) maupun secara sindikasi.

Pada periode laporan, kredit ke sektor konstruksi juga mencatat pertumbuhan kredit yang tinggi, yaitu sebesar 25,65% (yoy), seiring dengan maraknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Pertumbuhan kredit pada sektor itu utamanya didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada sub sektor konstruksi gedung dan bangunan sipil utamanya dipicu oleh penyaluran kredit untuk bangunan jalan tol yang tumbuh 85,54% (yoy). Hal ini sesuai dengan target Pemerintah untuk membangun jalan tol 1.070 km pada tahun 2019, dengan tujuan meningkatkan konektivitas antar daerah serta efisiensi waktu tempuh transportasi dan jaringan logistik. Lokasi proyek untuk penyaluran kredit pembangunan jalan tol masih berpusat di Pulau Jawa, namun mulai terlihat peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa, diantaranya Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.

Sektor jasa pendidikan juga masih tumbuh tinggi, 23,86% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil (0,24%). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh tingginya kredit pada sub sektor jasa pendidikan tinggi yang tumbuh 30,68% (yoy). Penyaluran kredit sub sektor ini utamanya disalurkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara, dengan kelompok bank penyalur utama BUMN dan BUSN Devisa.

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

Perdagangan efek selama triwulan II-2019 dipengaruhi oleh sentimen global dan sentimen domestik. Beberapa sentimen global yang mempengaruhi

antara lain ketidakpastian perang dagang antara China dan Amerika Serikat, serta kebijakan The Fed pada tanggal 19 Juni 2019 yang tetap mempertahankan suku bunga acuan AS pada kisaran 2,25%-2,50%. Selain itu, pemberitaan bahwa IMF kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan perekonomian global ke level 3,3% atau turun 0,2% dari proyeksi sebelumnya sebagai imbas belum adanya titik temu penyelesaian perang dagang AS-China dan AS-Eropa, turut memberikan sentimen negatif dari tataran global.

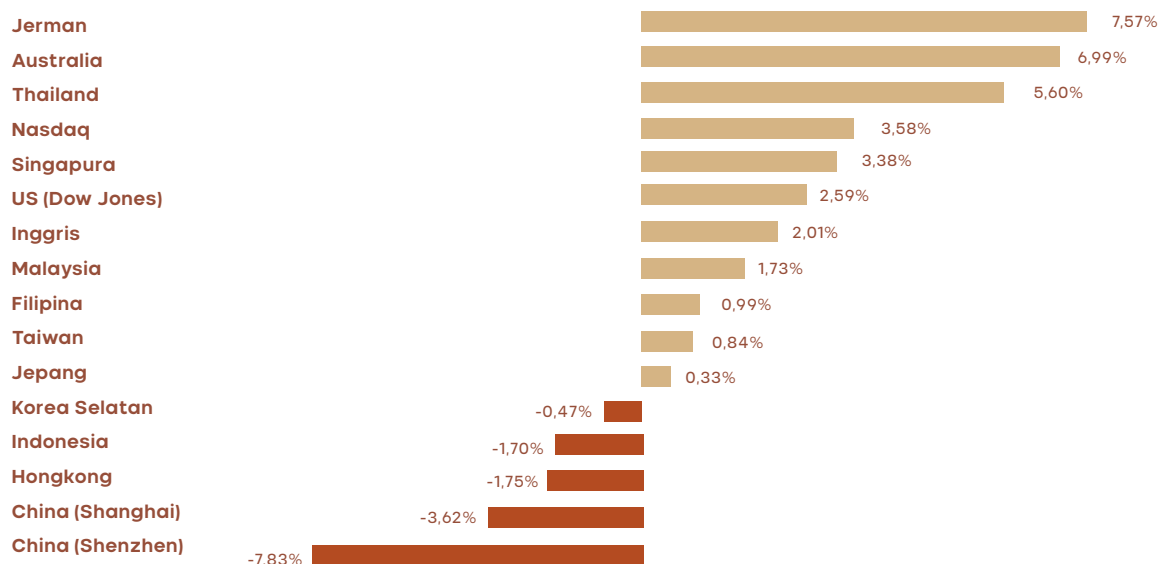
Sedangkan di domestik, kondisi yang mempengaruhi kinerja Pasar Modal diantaranya adalah kebijakan Bank Indonesia mempertahankan BI 7-days Repo Rate di level 6,00% dengan suku bunga *Deposit Facility* di level 5,25% dan *Lending Facility* turun di 6,75%, dinaikkannya *Sovereign Credit Rating* Republik Indonesia oleh Lembaga Pemeringkat Rating Standard

and Poor's dari BBB-/Outlook Stabil menjadi BBB/Outlook Stabil pada 31 Mei 2019, serta tingkat inflasi yang terkendali yaitu di level 2,05% (yoy) atau 3,28% (ytd).

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan II-2019 berada pada posisi 6.358,63 atau mengalami penurunan sebesar 1,70% jika dibandingkan dengan posisi triwulan I-2019. Perdagangan Efek pada triwulan II-2019 berdasarkan nilai dan volume transaksi yang didominasi oleh investor lokal. Sementara itu perilaku investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *capital inflow (net buy)* di pasar saham. Adapun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan penguatan sebesar Rp100,- atau 0,70% menjadi Rp 14.141,-/USD dibandingkan triwulan sebelumnya.

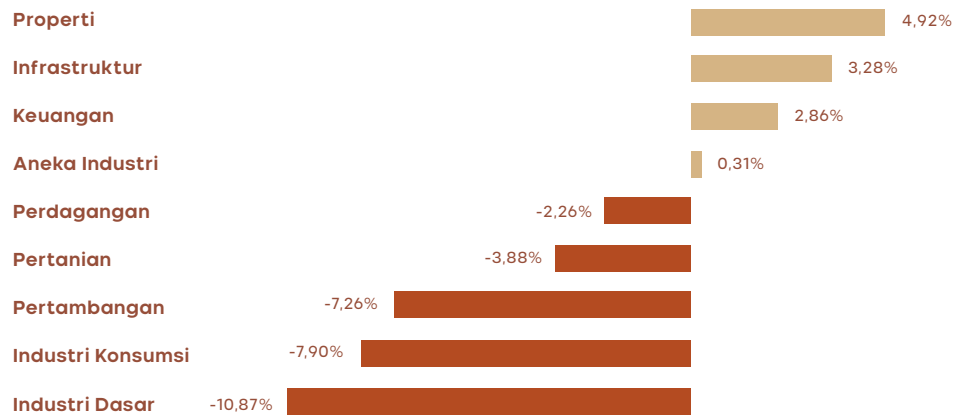
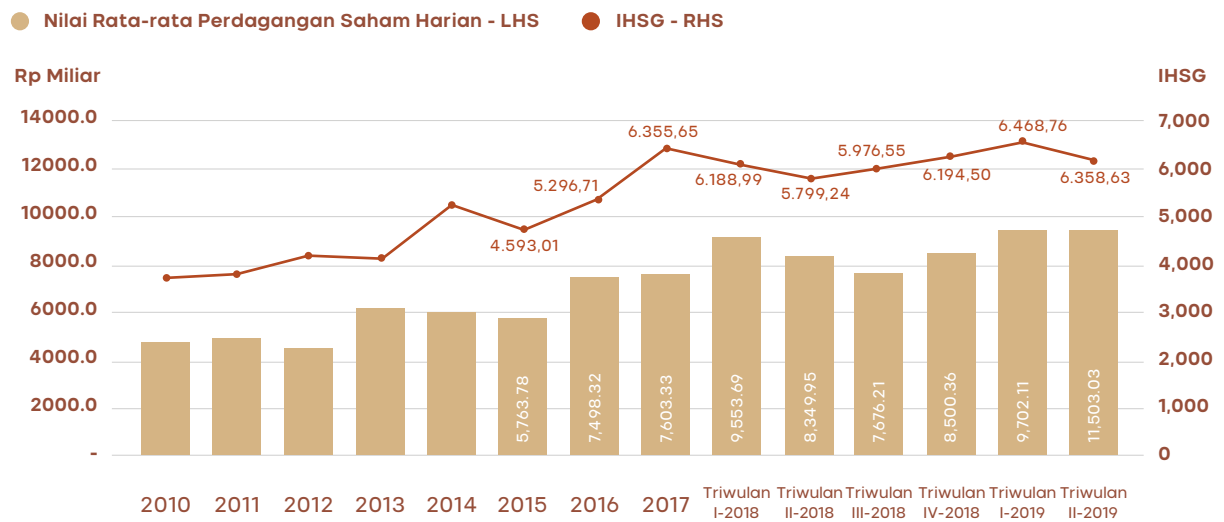
Grafik I - 29 ◇ Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtd)



Sumber: Bloomberg

Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami penurunan sebesar 1,54% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya menjadi Rp7.243,04 triliun. Sebaliknya, rata-rata nilai, volume, dan frekuensi perdagangan per hari seluruhnya mengalami kenaikan. Nilai perdagangan naik sebesar Rp1.800,92 miliar (18,56%) menjadi Rp9.702,11 miliar, volume perdagangan naik Rp1.890,51 juta (13,31%) menjadi sebesar Rp16,09 miliar dan frekuensi transaksi naik sebesar 37 ribu kali (8,38%) menjadi 479 ribu kali transaksi.

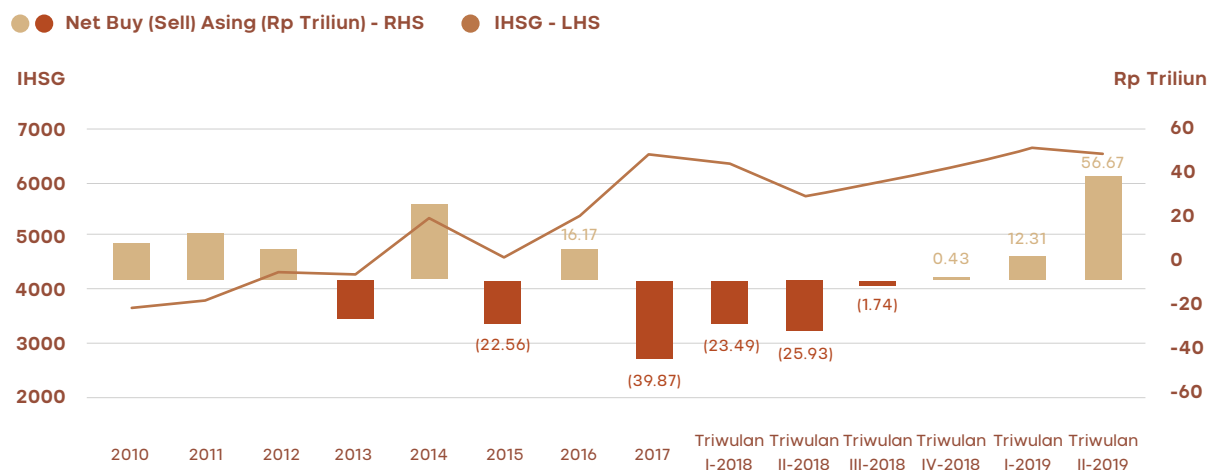
Indeks sektor properti pada triwulan ini mencatatkan kenaikan tertinggi yaitu sebesar 4,92%. Hal ini turut dipengaruhi oleh cukup banyaknya insentif perpajakan dari Pemerintah pada sektor properti di tahun ini. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan terdalam yaitu sektor industri dasar dan kimia. Penurunan pada sektor ini masih disebabkan oleh sentimen global yaitu perang dagang.

Grafik I - 30 ◇ Perkembangan Indeks Industri (qtq)**Grafik I - 31** ◇ Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian**Tabel I - 12** ◇ Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

(dalam miliar Rupiah)

Indikator (Rata-rata harian)	2018				2019	
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar)	9,553.69	8,349.94	7,676.20	8,402.19	9,702.11	11,503.03
Investor Asing (Rp miliar)						
Beli	3,516.68	3,120.26	2,791.47	2,731.24	6,363.62	6,933.65
Jual	3,895.62	3,600.51	2,819.62	2,724.36	6,562.49	7,985.64
Investor Domestik (Rp miliar)						
Beli	6,037.01	5,224.68	4,884.73	5,670.95	3,338.48	4,569.37
Jual	5,658.07	4,749.44	4,856.59	5,677.83	3,139.61	3,517.38
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	384,845	409,065	369,900	386,281	442,245	479,310

Grafik I - 32 ◇ Perkembangan IHSG dan Net Asing



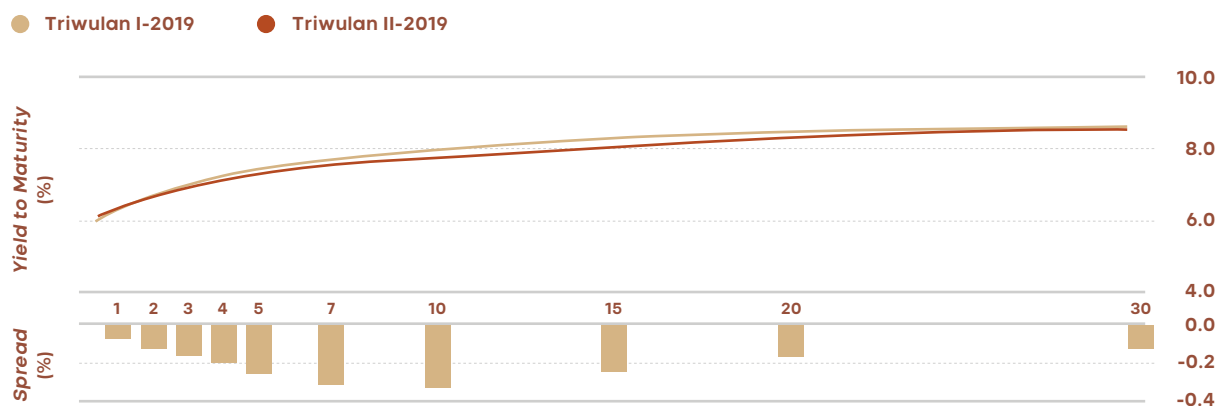
Tabel I - 13 ◇ Perkembangan IHSG dan Net Asing

(dalam miliar Rupiah)

Periode	IHSG	Net Sell/Buy
2015	4.593,01	(22.589,03)
2016	5.296,71	16.169,49
2017	6.355,65	(39.896,15)
2018	6.194,50	426,51
Total		(50.745,84)
Triwulan I-2019	6.488,75	12.131,14
Triwulan II-2019	6.359,63	56.666,2
Total		68.797,42

Selama triwulan II-2019 transaksi investor asing membukukan *net buy* sejumlah Rp56,67 triliun.

Grafik I - 33 ◇ Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja pasar Obligasi pada triwulan II-2019 mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan *trend* penurunan

dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar -20,0 *bps*. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami penurunan masing-masing sebesar -12,0 *bps*, -27,9 *bps*, dan -20,4 *bps*.

Tabel I - 14 ◇ Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan II-2018			Triwulan I-2019			Triwulan II-2019		
	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)
Obligasi:									
Korporasi	87,87	87,97	7.486	76,95	76,52	8.119	88,12	87,97	8.057
SBN	1.150,36	1.149,47	56.092	1.796,71	1.663,09	60.268	1.620,91	1.609,84	66.602
Total	1.238,23	1.237,45	63.578	1.873,66	1.739,61	68.387	1.709,03	1.697,81	74.659
Repo	112,14	101,57	375	382,92	241,68	566	503,84	481,32	701

Secara total, aktivitas perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan II-2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan pada triwulan I-2019. Hal ini turut dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah hari kerja pada bulan Juni 2019 dikarenakan libur Hari Raya Idul Fitri. Volume perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan II-2019 turun sebesar 9,78% menjadi Rp1.620,91 triliun dan nilai perdagangan juga turun sebesar 3,20% menjadi Rp1.609,84 triliun. Sedangkan frekuensi transaksi mengalami peningkatan sebesar 10,51% menjadi 66.602 kali.

Penurunan aktivitas perdagangan Obligasi Pemerintah triwulan II-2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor global dan domestik sebagai berikut:

1. Kembali memanasnya hubungan dagang AS-China pada bulan Mei 2019 yang diwarnai dengan aksi saling menaikkan tarif impor telah meningkatkan risiko dan kekhawatiran pasar terhadap perlambatan ekonomi global. Dengan demikian, pelaku pasar lebih memburu *safe haven asset* seperti USD yang mengakibatkan *outflow* di pasar SBN.
2. Terdepresiasi Rupiah yang sempat menyentuh level terendah sejak akhir Desember 2018 yakni di level Rp14.525/US\$ (pada 22 Mei 2019) sebagai dampak dari *outflow* di pasar SBN.

Penurunan aktivitas tidak dialami oleh Obligasi Korporasi. Aktivitas perdagangan Obligasi Korporasi pada triwulan II-2019 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan triwulan I-2019. Volume perdagangan naik sebesar 14,52% menjadi Rp88,12 triliun dan nilai perdagangan juga naik sebesar 14,97% menjadi Rp87,97 triliun. Sedangkan frekuensi perdagangan turun 0,76% menjadi 8.057 kali.

1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan II-2019 mengalami penurunan sebesar Rp2,51 triliun (0,49%) menjadi Rp512,58 triliun dibandingkan dengan triwulan I-2019 sebesar Rp515,09 triliun. NAB Reksa Dana Terproteksi menunjukkan penurunan jumlah NAB terbesar yaitu Rp7,10 triliun (-5,44%), diikuti oleh Reksa Dana Syariah sebesar Rp4,06 triliun (-12,27%), dan Reksa Dana Saham sebesar Rp0,2 triliun (-0,15). Di sisi lain, Reksa Dana Pasar Uang masih mencatatkan peningkatan NAB sebesar Rp4,04 triliun (1,46%), diikuti oleh Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp1,55 triliun (1,46%), Reksa Dana Campuran sebesar Rp1,41 triliun (5,26%), ETF sebesar Rp1,40 triliun (9,95%), dan Reksa Dana Indeks Rp0,46 triliun (8,73%).

Tabel I - 15 ◇ Perkembangan Pengelolaan Investasi

NAB Per Jenis Reksa Dana	2018 (Rp triliun)			2019 (Rp triliun)	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
RD Pasar Uang	49,99	45,22	42,79	49,71	53,75
RD Pendapatan Tetap	101,89	102,66	101,60	105,02	106,58
RD Saham	137,44	136,94	143,80	142,60	142,39
RD Campuran	23,93	23,64	24,40	25,49	26,90
RD Terproteksi	126,61	139,20	141,41	137,63	130,53
RD Indeks	4,71	5,02	5,33	4,80	5,25
ETF	9,82	10,62	11,56	12,75	14,12
RD Syariah*	32,17	31,80	34,49	37,08	33,06
Total	486,56	495,09	505,39	515,09	512,58

*) termasuk ETF Saham Syariah

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) menurun sebesar 1,54% menjadi Rp23,59 triliun pada triwulan II-2019. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga

mengalami penurunan sebesar 6,25% menjadi 60 RDPT dari sebelumnya 66 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan II-2019 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

Tabel I - 16 ◇ Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Investasi	2018			2019	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Reksa Dana					
Jumlah	1.921	2.035	2.098	2.089	2.094
Total NAB	486,56	495,09	505,39	515,09	512,58
RDPT					
Jumlah	62	59	62	64	60
Total NAB	23,39	26,58	26,65	23,96	23,59
EBA					
Jumlah	7	8	8	7	7
Nilai Sekuritisasi	6,32	7,49	7,21	6,98	6,72
EBA-SP					
Jumlah	5	5	5	5	5
Nilai Sekuritisasi	3,75	3,66	3,46	3,26	3,13
DIRE					
Jumlah	3	4	7	7	7
Total Nilai	0,61	0,62	0,72	0,92	11,34
KPD					
Jumlah	440	478	494	502	514
Total Nilai	189,30	196,72	204,77	214,00	217,18
DINFRA					
Jumlah	-	2	4	4	6
Total Nilai	-	0,33	0,34	0,64	2,65

OJK sampai dengan triwulan II-2019 telah menerbitkan 156 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa

Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 17 ◇ Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	12
Reksa Dana Campuran	6
Reksa Dana Pendapatan Tetap	13
Reksa Dana Pasar Uang	19
Reksa Dana Terproteksi	55
Reksa Dana Indeks	1
ETF-Indeks	4
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	2
Reksa Dana Syariah Campuran	2
Reksa Dana Syariah Saham	7
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	14
Reksa Dana Syariah Terproteksi	20
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk	1
Total	156

Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan 159 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 81 Reksa Dana Konvensional dan 13 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari :

- 118 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 86 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 31 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Lima Reksa Dana Campuran terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut, satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
- 12 Reksa Dana Saham terdiri dari empat Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, empat Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan, tiga Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut, dan satu Reksa Dana dibubarkan berdasarkan ketentuan;
- Satu Reksa Dana Pasar Uang dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;
- Sembilan Reksa Dana Pendapatan tetap terdiri dari enam dibubarkan karena kesepakatan MI & BK, dua Reksa Dana yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut dan satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;
- Satu Reksa Dana Indeks dibubarkan karena kesepakatan MI & BK;
- Sembilan Reksa Dana Syariah Terproteksi terdiri dari tujuh Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan dua Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;
- Satu Reksa Dana Syariah Campuran dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.
- Satu Reksa Dana Syariah Saham dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan.
- Satu Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.
- Satu Reksa Dana Syariah Indeks dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan.

Tabel I - 18 ◇ Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Investasi	2018				2019	
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Individu						
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.101	2.165	2.215	2.332	2.430	2.550
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	25.714	26.450	26.958	27.466	27.970	28.525
Penasehat Investasi (PI)	4	4	5	6	4	4
Institusi						
Manajer Investasi (MI)	90	90	90	92	93	93
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *Bank & PPE Khusus	35	37	37	37	41	41
Penasehat Investasi (PI)	3	4	4	5	5	5
MI sebagai PI	1	3	5	6	7	12
APERD sebagai PI	-	-	-	1	1	2
PE sebagai APERD	17	17	18	21	21	21

Selama triwulan II-2019, OJK memberikan lima izin Manajer Investasi (MI) sebagai Penasihat Investasi (PI) dan satu izin Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) sebagai PI, sehingga jumlah MI sebagai PI dan APERD sebagai PI masing-masing meningkat sebesar 71,43% dan 100,00%.

Pada periode ini OJK tidak memberikan izin baru kepada MI, APERD, PI Institusi, dan PE sebagai APERD,

sehingga MI tetap berjumlah 93 MI, APERD tetap berjumlah 41 APERD, PI Institusi tetap berjumlah 5 PI, dan PE sebagai APERD tetap berjumlah 21 PE.

Adapun untuk pelaku individu industri Pengelolaan investasi, OJK tidak menerbitkan atau mencabut izin PI Individu sehingga jumlah PI Individu tetap sebanyak 4 PI Individu. Di sisi lain, jumlah WMI dan

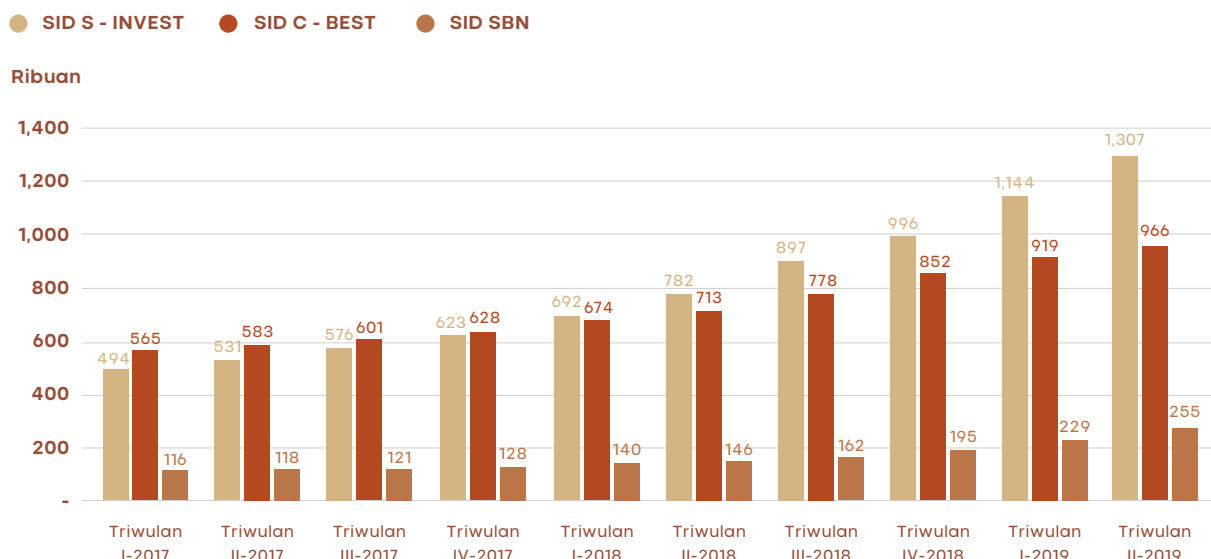
WAPERD masing-masing mengalami peningkatan sebesar 4,94% dan 1,98%.

1.3.3 Perkembangan Jumlah SID

Pada Triwulan II-2019, jumlah SID C-BEST, SID S-INVEST dan SID SBN mengalami peningkatan. Jumlah SID C-BEST mencapai 966.079 atau mengalami peningkatan sebanyak 47.192 (5,14%) jika dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 918.887. Jumlah SID S-INVEST pada triwulan ini mencapai 1.306.890 atau mengalami peningkatan sebanyak 163.089 (14,26%) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 1.143.801. Jumlah SID SBN pada triwulan ini mencapai 255.030 atau mengalami peningkatan sebanyak 25.566 (11,14%) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 229.464.

Grafik I - 34 ◇ Perkembangan Jumlah SID



1.3.4 Perkembangan Perusahaan Efek

Tabel I - 19 ◇ Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

No.	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1.	Perantara Pedagang Efek	33
2.	Penjamin Emisi Efek *)	3
3.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	84
4.	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1
5.	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		124

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Pada triwulan ini terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek. Selain itu, terdapat dua penerbitan izin Perusahaan Efek yaitu satu izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang Tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan

satu izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK sebanyak 124 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 12 lokasi selain Kantor Pusat dan enam penutupan sejumlah lima lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan II-2019.

Tabel I - 20 ◇ Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2019	2019
	s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan II
Jumlah Lokasi Selain Kantor Pusat	696	702

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, pada periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 185 izin dengan rincian 170 izin Wakil

Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 15 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 10.208 WPPE dan 2.223 WPEE.

Tabel I - 21 ◇ Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I-2019		Triwulan II-2019		Izin Total s.d. Triwulan II	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	182	150	177	170	320	10.208
WPEE	42	32	16	15	47	2.223
Total	224	182	193	185	367	12.431

Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu perpanjangan izin dengan rincian satu perpanjangan

izin WPPE sehingga secara total selama 2019 OJK telah menerbitkan dua perpanjangan izin WPPE.

Tabel I - 22 ◇ Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I-2019		Triwulan II-2019		Izin Total s.d. Triwulan II	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	331	1	1	1	2	2
WPEE	15	0	0	0	0	0
Total	346	1	1	1	2	2

OJK menerima 130 dokumen perizinan dengan rincian 123 dokumen permohonan izin WPPEP dan tujuh permohonan WPPEPT. OJK juga menerbitkan 83

izin WPPEP dan enam untuk izin WPPEPT. Sehingga sampai periode laporan total izin WPPEP sebanyak 1.286 dan WPPEPT sebanyak 93.

Tabel I - 23 ◇ Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan I-2019		Triwulan II-2019		Izin Total s.d. Triwulan II	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	142	121	123	83	204	1.286
WPEE	7	6	7	6	12	93
Total	149	127	130	89	216	1.379

1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama triwulan II-2019, jumlah emisi dan nilai emisi Penawaran Umum mengalami penurunan sebesar

19% dan 12% dibanding dengan triwulan II-2018. Nilai emisi Penawaran Umum Perdana Saham mengalami

penurunan menjadi Rp7,8 triliun atau sebesar 27% dengan jumlah emisi untuk Penawaran Umum Perdana Saham tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 23 Perusahaan. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas mengalami peningkatan menjadi Rp20,2 triliun, namun jumlah emisi mengalami penurunan sebesar 36% atau sebanyak sembilan Perusahaan. Untuk jumlah emisi dan nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang mengalami penurunan menjadi sebesar 24%

dan 15% dengan jumlah emisinya sebanyak 28 (dua puluh delapan) Perusahaan dan nilai emisinya menjadi Rp39,9triliun.

Selama triwulan II-2019, jumlah Penawaran Umum sebanyak 60, terdiri dari 23 Penawaran Umum Perdana Saham, sembilan Penawaran Umum Terbatas dan 28 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang.

Tabel I - 24 ◇ Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan II-2018		Triwulan II-2019		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	23	10.797	23	7.835	0%	-27%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue)	14	19.498	9	20.164	-36%	3%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	37	46.857	28	39.884	-24%	-15%
a. Obligasi/ Sukuk + Subordinasi	5	6.800	3	2.250	-40%	-67%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	18	19.449	14	14.969	-22%	-23%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	14	20.608	11	23.065	-21%	12%
Total Emisi	74	77.152	60	67.883	-19%	-12%

Tabel I - 25 ◇ Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan II-2019

No.	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
1.	Perbankan	-	168.866	8.600.000
2.	Asuransi dan Pembiayaan	4.797.375	-	18.890.000
3.	Sekuritas dan Investasi	39.950	1.744.690	-
4.	Perdagangan	394.340	-	850.000
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	1.067.280	880.748	1.750.000
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	280.452	-	-
7.	Properti dan Perhotelan	389.054	13.950.995	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	317.500	2.965.482	3.144.250
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	195.200	-	-
10.	Barang Konsumsi	60.019	-	-
11.	Aneka Industri Lainnya	118.000	-	-
12.	Industri Dasar	125.450	-	4.900.000
13.	Industri Logam	50.000	-	500.000
14.	Industri Kimia	-	-	1.150.000
15.	Agrobisnis	-	-	-
16.	Pertambangan dan Kehutanan	-	453.408	500.000
Total		7.834.621	20.164.190	40.284.250

^{*)} Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan II-2019, terdapat 34 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak

23 Perusahaan telah mendapat surat efektif dan 11 Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari 23 Emiten tersebut sebesar Rp7,83 triliun.

Tabel I - 26 ◇ Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Menteng Heritage Realty Tbk	Properti dan Perhotelan	125.133.750.000
2.	PT Jasnita Telekomindo Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	50.038.048.200
3.	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	Real Estate dan Konstruksi	255.000.000.000
4.	PT Hotel Fitra International Tbk	Properti dan Perhotelan	22.440.000.000
5.	PT Bali Bintang Sejahtera Tbk	Perdagangan	350.000.000.000
6.	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk	Industri Logam	50.000.000.000
7.	PT Surya Fajar Capital Tbk.	Sekuritas dan Investasi	39.950.000.000
8.	PT Golden Flower Tbk.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	43.200.000.000
9.	PT Krida Jaringan Nusantara Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	30.300.000.000
10.	PT Indonesian Tobacco Tbk	Barang Konsumsi	60.019.140.000
11.	PT Bima Sakti Pertiwi Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	62.500.000.000
12.	PT Darmi Bersaudara Tbk	Perdagangan	22.500.000.000
13.	PT Eastparc Hotel	Properti dan Perhotelan	54.880.667.800
14.	PT Inocycle Technology Group Tbk	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	152.000.000.000
15.	PT Berkah Prima Perkasa Tbk	Perdagangan	21.840.000.000
16.	PT Envy Technologies Indonesia Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	222.000.000.000
17.	PT MNC Vision NeTriwulanorks Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	845.280.000.000
18.	PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk	Industri Dasar	125.450.000.000
19.	PT Fuji Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	33.000.000.000
20.	PT Hensel Davest Indonesia Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	200.114.250.000
21.	PT Arkha Jayanti Persada Tbk.	Aneka Industri Lainnya	118.000.000.000
22.	PT Asuransi Sinarmas MSIG Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	4.764.375.000.000
23.	PT DMS Proportindo Tbk.	Properti dan Perhotelan	186.600.000.000
Total			7.834.620.856.000

B. Penawaran Umum Terbatas (Right Issue)

Selama triwulan II-2019, terdapat 12 perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan sembilan perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif.

Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atau right issue dari perusahaan tersebut sebesar Rp20,2triliun.

Tabel I - 27 ◇ Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Hotel Mandarine Tbk.	Properti dan Perhotelan	1.994.564.429.400
2.	PT Mas Murni Indonesia Tbk.	Properti dan Perhotelan	718.653.617.000
3.	PT Bank Yudha Bhakti Tbk	Perbankan	168.866.136.452

4.	PT Lippo Karawaci Tbk.	Properti dan Perhotelan	11.237.777.256.250
5.	PT Lippo Cikarang Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	2.965.482.000.000
6.	PT Buana Lintas Lautan Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	667.996.805.600
7.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	212.751.396.000
8.	PT MNC Investama Tbk	Sekuritas dan Investasi	1.744.690.135.700
9.	PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	453.407.917.900
Total			20.164.189.694.302

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selama triwulan II-2019 terdapat tiga Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk, 14 Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I

dan 11 Perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp38,1 triliun.

Tabel I - 28 ◇ Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi I

PUB Obligasi Tahap I				
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Oto Multiartha	Asuransi dan Pembiayaan	Penawaran Umum Obligasi III Oto Multiartha Tahun 2019	1.000.000.000.000
2.	PT Medco Power Indonesia Tbk.	Perdagangan	Sukuk II	850.000.000.00
3.	PT Tridomain Performance Materials Tbk.	Industri Kimia	Penawaran Umum Obligasi II	400.000.000.000
4.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Perbankan	PUB I Obligasi Tahap I	2.000.000.000.000
5.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB III Obligasi Tahap I	2.000.000.000.000
6.	PT Surya Artha Nusantara Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB III Obligasi Tahap I	500.000.000.000
7.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB II Obligasi Tahap I	3.000.000.000.000
8.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Perbankan	PUB Obligasi III Tahap I	1.000.000.000.000
9.	PT Federal International Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap I	1.500.000.000.000
10.	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi II Tahap I	269.000.000.000
11.	PT Bank Victoria International Tbk	Perbankan	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I PT Bank Victoria International Tbk	100.000.000.000
			Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I PT Bank Victoria International Tbk	300.000.000.000
12.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap I	2.000.000.000.000
			PUB Sukuk Sukuk Mudharabah I Tahap I	100.000.000.000
13.	PT Waskita Beton Precast Tbk	Industri Logam	PUB Obligasi I Tahap I	500.000.000.000
14.	PT Mora Telematika Indonesia	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Sukuk Ijarah I Tahap I	1.000.000.000.000
15.	PT J Resources Asia Pasifik Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap I	500.000.000.000

16.	PT Bank UOB Indonesia dahulu UOB BuanaOB	Perbankan	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I	100.000.000.000
17.	PT Bank QNB Indonesia Tbk d.h. PT QNB BANK KESAWAN Tbk	Perbankan	PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	100.000.000.000
Total				14.969.000.000.000

Tabel I - 29 ◇ Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi II

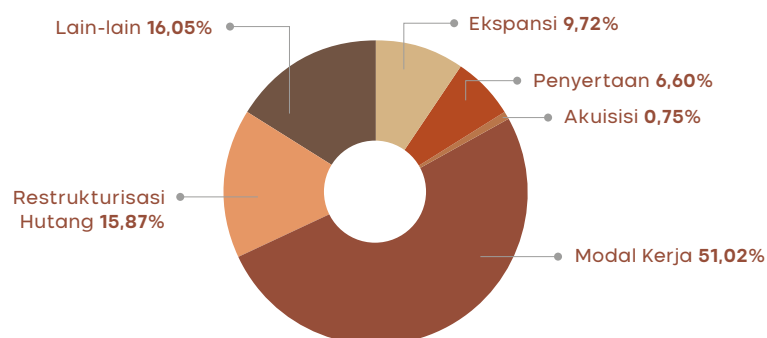
PUB Obligasi Tahap II dst				
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Sinar Mas Multifinance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap II	400.000.000.000
2.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap V	2.000.000.000.000
			PUB Sukuk Mudharabah III Tahap IV	96.000.000.000
3.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap IV	3.857.000.000.000
			PUB Sukuk Mudharabah I Tahap III	441.000.000.000
4.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi III Tahap IV	1.845.750.000.000
5.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB III Obligasi Tahap III	750.000.000.000
6.	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap II	1.675.000.000.000
7.	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Industri Dasar	PUB I Tahap II	4.900.000.000.000
8.	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Industri Kimia	PUB II Tahap II	750.000.000.000
9.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	PUB II Tahap II	1.029.500.000.000
10.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi III Tahap II	5.000.000.000.000
11.	PT Mandala Multifinance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap II	321.000.000.000
Total				23.065.250.000.000

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan selama triwulan II-2019 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 51,02% atau sekitar Rp36,4triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 9,72% atau sekitar Rp6,9triliun untuk ekspansi;

0,75% atau sekitar Rp532miliar untuk akuisisi; 6,60% atau sekitar Rp4,7triliun untuk penyertaan; 15,87% atau sekitar Rp11,3triliun untuk restrukturisasi hutang; dan 16,05% atau sekitar Rp11,4triliun untuk lain-lain.

Grafik I - 35 ◇ Rencana Penggunaan Dana



Tabel I - 30 ◇ Rencana Penggunaan Dana Atas Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restrukturisasi Hutang	Lain-Lain
1.	Perbankan	-	-	-	8.738.711	-	-
2.	Asuransi dan Pembiayaan	2.996.280	-	-	18.578.512	720.840	4.756.938
3.	Sekuritas dan Investasi	-	23.150	-	164.369	1.582.745	10.000
4.	Perdagangan	-	67.042	-	282.558	271.620	590.067
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	859.441	691.199	-	1.103.682	859.610	121.754
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	94.603	9.029	30.247	129.607	-	-
7.	Properti dan Perhotelan	1.321.547	3.746.047	501.498	3.471.138	2.639.346	2.628.115
8.	Real Estate dan Konstruksi	104.740	173.270	-	2.900.002	265.372	2.959.937
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	42.668	-	-	82.732	56.891	-
10.	Barang Konsumsi	-	-	-	53.405	-	-
11.	Aneka Industri Lainnya	-	-	-	113.820	-	-
12.	Industri Dasar	-	-	-	54.577	4.923.096	-
13.	Industri Logam	341.808	-	-	199.462	-	-
14.	Industri Kimia	749.798	-	-	-	-	377.680
15.	Agrobisnis	-	-	-	-	-	-
16.	Pertambangan dan Kehutanan	418.375	-	-	514.070	-	-
Total		6.929.260	4.709.736	531.745	36.386.646	11.319.519	11.444.491

*) Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

1.3.6 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemeringkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank

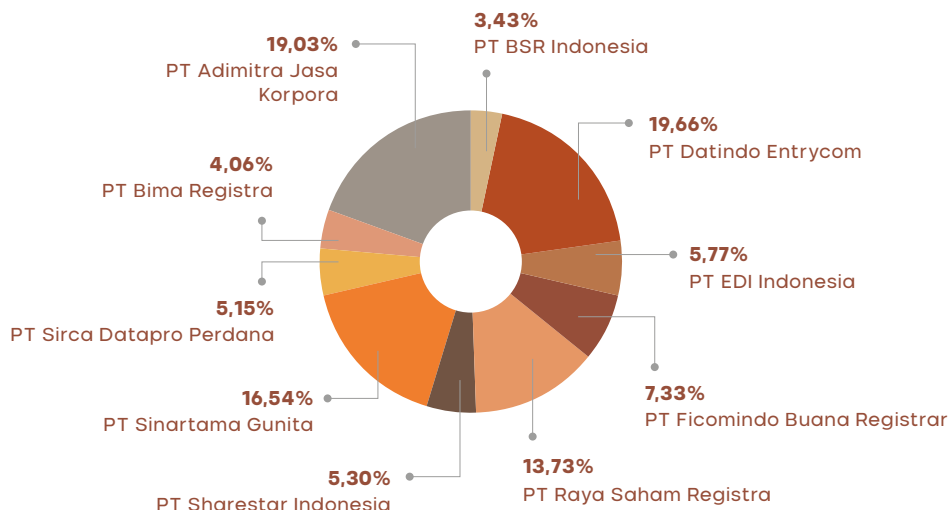
Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel I - 31 ◇ Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2019		Jenis
	Triwulan I	Triwulan II	
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	23	23	Surat Persetujuan

Wali Amanat	13	13	Surat Tanda Terdaftar
Pemeringkat Efek	2	2	Surat Perizinan
Ahli Syariah Pasar Modal	0	0	Surat Perizinan

Grafik I - 36 ◇ *Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien*



Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, dari data di atas dapat diketahui pangsa pasar BAE didominasi oleh PT Datindo Entrycom yang mencapai 19,66%, PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 19,03%, PT Sinartama Gunita sebanyak 16,54% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah PT BSR Indonesia sebanyak 3,43%, PT Bima Registra sebanyak 4,06%, dan PT Sirca Datapro Perdana sebanyak 5,15%.

2. OJK menetapkan pembatalan STTD yang terdiri dari 10 pembatalan STTD AP yang tidak daftar ulang, lima pembatalan STTD Penial dan satu pembatalan STTD ASPM.

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 32 ◇ *Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal*

Profesi	Aktif	
	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
Akuntan	641	642*
Konsultan Hukum	302	333
Penilai	233	233*
Notaris	178	189*
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	98	102

*) Jumlah Akuntan, Penilai, Notaris dan Konsultan Hukum yang aktif tersebut merupakan jumlah Penilai, Notaris dan Konsultan Hukum yang telah mengajukan daftar ulang sampai dengan 27 Maret 2018 (Akuntan) dan 22 Desember 2018 (Konsultan Hukum, Penilai, Notaris) serta jumlah Akuntan, Penilai, Notaris dan Konsultan Hukum yang mengajukan pendaftaran baru.

B. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum dan Notaris. Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode Triwulan II-2019.

1. OJK menerbitkan sebanyak 52 Surat Tanda Terdaftar (STTD) dan enam Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan, terdiri dari:
 - a. Akuntan: Tiga STTD Daftar baru
 - b. Konsultan Hukum: Delapan STTD Daftar baru dan 24 STTD Daftar ulang
 - c. Notaris: Lima STTD Daftar baru dan tujuh STTD Daftar ulang
 - d. ASPM: Lima Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, selama triwulan II-2019 OJK bekerjasama dengan asosiasi menyelenggarakan

tiga Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel I - 33 ◇ Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)

No.	Judul Kegiatan	Profesi	Lokasi	Jumlah Peserta Teraftar di OJK
1.	Aspek Akuntansi dan Audit dari Penerapan PSAK 71 "Instrument Keuangan" Laporan Keuangan Sektor Pasar Modal	Akuntan	Jakarta	192 orang
2.	Peranan Konsultan Hukum Dalam Penanganan Bank Bermasalah	Konsultan Hukum	Jakarta	39 orang
3.	<i>Fintech</i> : Regulasi, Perangkat Teknologi dan Pengawasan Dikaitkan Dengan Maraknya Illegal <i>Fintech</i>	Konsultan Hukum	Jakarta	65 orang
4.	Penilaian properti dan bisnis untuk keperluan laporan keuangan	Penilai	Yogyakarta	35 orang

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Sepanjang Triwulan II-2019, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya total aset IKNB sebesar 2,32% menjadi Rp2.424,30 triliun.

Adapun industri yang mengalami peningkatan aset terbesar yaitu dari industri Asuransi Konvensional serta Lembaga Pembiayaan.

Tabel I - 34 ◇ Total Aset IKNB

(dalam triliun Rupiah)

No.	Industi	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
1.	Asuransi Konvensional dan BPJS	1.150,10	1.175,11	1.209,63	1.249,17	1.282,39
2.	Dana Pensiun Konvensional	260,71	263,54	269,51	276,91	282,38
3.	Lembaga Pembiayaan*)	577,83	593,69	589,57	596,31	607,43
4.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus*)	219,13	224,14	228,50	234,90	242,01
5.	Industri Jasa Penunjang IKNB **)	8,98	8,98	9,61	9,61	9,61
6.	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional ***)	0,34	0,40	0,47	0,47	0,48
Total Aset		2.217,09	2.265,86	2.307,29	2.369,38	2.424,30

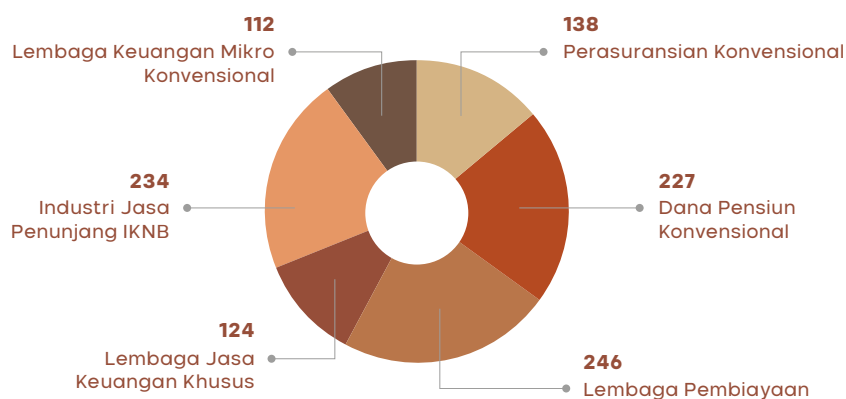
*) Aset Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk data syariah

**) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB Triwulan II 2019 menggunakan data per Semester II 2018

***) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan II 2019 menggunakan data kuartal I 2019

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 246 pelaku, diikuti oleh Industri Jasa Penunjang IKNB,

Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Asuransi Konvensional serta BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 37 ◇ Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2019

Catatan:

1. Data Pelaku IKNB per Maret 2019

2. Pelaku Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk syariah

1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai dengan periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS tumbuh 2,66% menjadi Rp1.282,39 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan aset ini diiringi dengan peningkatan jumlah investasi yang naik sebesar 2,03% menjadi Rp1.096,72 triliun. Portofolio investasi yang mengalami peningkatan terbesar adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang tumbuh Rp9,21 triliun, Obligasi yang naik Rp6,25 triliun, dan Saham yang tumbuh Rp6,08 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan SBN tersebut seiring dengan meningkatnya performa pasar *government* dan *corporate bonds* (ICBI* Jun'19: 260,39; ICBI Mar'19: 251,46).

Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, BPJS dan asuransi jiwa menjadi penggerak utama meningkatnya jumlah investasi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar Rp19,14 triliun dan Rp3,22 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi kinerja industri asuransi, pendapatan premi masih menunjukkan tren yang positif dengan nilai yang lebih baik dari triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 2,9% (yoy) menjadi Rp221,14 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi oleh Asuransi Jiwa dengan porsi sebesar 38,7%, diikuti oleh BPJS sebesar 35,5%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 23,0%, serta Asuransi Wajib sebesar 2,7%.

Tabel I - 35 ◇ Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
1. Total Aset						
	Asuransi Jiwa	509,37	516,34	520,64	534,75	544,83
	Asuransi Umum dan Reasuransi	159,71	161,65	166,46	171,83	175,87
	Asuransi Wajib	128,23	129,07	133,73	134,94	134,03
	BPJS	352,79	368,05	388,80	407,65	427,66
	Jumlah	1.150,10	1.175,11	1.209,63	1.249,17	1.282,39
2. Total Investasi						
	Asuransi Jiwa	453,06	458,88	463,96	474,05	477,27
	Asuransi Umum dan Reasuransi	79,93	82,21	83,20	86,84	87,60
	Asuransi Wajib	112,88	114,33	117,19	124,01	122,68
	BPJS	334,85	351,02	372,29	390,02	409,16
	Jumlah	980,71	1.006,44	1.036,64	1.074,92	1.096,72

3. Total Pendapatan Premi					
Asuransi Jiwa	95,47	141,14	186,05	44,28	85,65
Asuransi Umum dan Reasuransi	43,44	62,74	88,28	24,99	50,93
Asuransi Wajib	5,67	8,87	12,07	3,00	5,98
BPJS	70,32	107,18	146,90	37,98	78,59
Jumlah	214,90	319,93	433,30	110,25	221,14
4. Total Klaim Bruto					
Asuransi Jiwa	72,93	108,88	142,36	36,39	73,06
Asuransi Umum dan Reasuransi	15,57	25,20	37,02	10,24	20,38
Asuransi Wajib	6,46	10,18	13,74	3,67	7,16
BPJS	55,88	88,80	123,01	33,34	67,88
Jumlah	150,84	233,06	316,13	83,64	168,48
5. Total Liabilitas					
Asuransi Jiwa	425,71	435,42	445,65	459,66	468,96
Asuransi Umum dan Reasuransi	98,90	100,06	102,63	106,08	109,12
Asuransi Wajib	108,60	109,02	112,46	113,61	113,67
BPJS	64,19	64,61	67,27	74,49	81,21
Jumlah	697,39	709,11	728,02	753,83	772,95

Tabel I - 36 ◇ Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
1.	Deposito Berjangka	108,60	108,24	124,93	127,61	129,86
2.	Sertifikat Deposito	0,39	0,34	0,25	0,27	0,26
3.	Saham	214,80	221,64	227,75	233,36	239,44
4.	Obligasi	110,51	114,57	109,13	113,36	119,61
5.	MTN	1,95	2,16	2,74	3,08	3,36
6.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	269,42	277,71	280,29	298,95	308,16
7.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	0,90	0,90	0,90	0,53	0,25
8.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	0,00	-	-	-	-
9.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Reksa Dana	233,53	238,29	245,45	252,39	250,06
11.	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	2,72	3,54	3,42	3,34	3,23
12.	Dana Investasi Real Estat	0,21	0,21	0,08	0,24	0,24
13.	REPO	-	-	-	-	-
14.	Penyertaan Langsung	18,20	18,64	18,51	18,58	18,82
15.	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	15,42	16,07	19,42	19,38	19,35
16.	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	0,53	0,53	0,54	0,55	0,55
17.	Emas Murni	0,00	0,00	-	0,00	0,00
18.	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	0,26	0,30	0,20	0,21	0,20
19.	Pinjaman Polis	2,10	2,13	2,15	2,14	2,15
20.	Investasi Lain	1,18	1,18	0,89	0,95	1,19
Jumlah		980,71	1.006,44	1.036,64	1.074,92	1.096,72

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (28,1%), Reksa Dana (22,8%), Saham (21,8%) dan Deposito Berjangka (11,8%).

Terdapat perubahan jumlah pelaku pada pelaporan triwulan ini dibanding triwulan sebelumnya yaitu pengurangan satu perusahaan pada asuransi umum konvensional, sehingga jumlah pelaku menjadi 138 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 37 ◇ Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
1.	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	30	30	30	29	29
	c. Patungan	22	22	22	23	23
	Sub Total	53	53	53	53	53
2.	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	2	2	2	2	2
	b. Swasta Nasional	50	50	50	52	51
	c. Patungan	22	22	22	21	21
	Sub Total	74	74	74	75	74
3.	Reasuransi	6	6	6	6	6
4.	BPJS	2	2	2	2	2
5.	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	138	138	138	139	138

Tabel I - 38 ◇ Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
GDP (miliar Rupiah)	13.588.797	13.588.797	13.588.797	14.837.400	14.837.400
Premi Bruto (miliar Rupiah)	420.331	411.158	411.022	414.082	415.665
Jumlah Penduduk (juta)	257	257	257	265	265
Penetrasi	3,09%	3,03%	3,02%	2,79%	2,80%
Densitas (ribu Rupiah)	1.635,53	1.569,90	1.569,39	1.562,57	1.568,55

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi per TW II 2019 yang disetahunkan
- 2) Angka GDP merupakan GDP per TW 4 2017 berdasarkan press release BPS
- 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
- 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi naik sebesar 0,38% menjadi Rp1.568.550 per tahun. Selain

itu penetrasi asuransi meningkat 0,01% menjadi sebesar 2,80%.

Tabel I - 39 ◇ RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
Asuransi Jiwa	455,1%	430,5%	440,6%	456,6%	662,9%
Asuransi Umum dan Reasuransi	333,0%	315,3%	332,5%	314,6%	312,6%

RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC mencapai 662,9%, atau naik 206,3% dibanding periode sebelumnya. Peningkatan RBC tersebut

didorong oleh naiknya investasi dan pendapatan premi pada industri asuransi jiwa. Sementara itu, RBC Asuransi Umum mengalami penurunan sebesar 2,0% menjadi 312,6% dibanding periode sebelumnya.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan II-2019, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp5,4 triliun atau naik 1,97% dari Rp276,91 triliun menjadi Rp282,38 triliun. Peningkatan aset terbesar dialami oleh DPPK-PPMP dan DPLK masing-masing sebesar Rp1,77 triliun dan

Rp2,67 triliun, sedangkan DPPK-PPIP sebesar Rp1,02 triliun atau naik 3,04%. Sejalan dengan hal tersebut, investasi industri Dana Pensiun naik sebesar Rp6,13 triliun dari Rp266,70 triliun menjadi Rp272,72 triliun.

Tabel I - 40 ◇ Distribusi Aset Industri Dana Pensiun

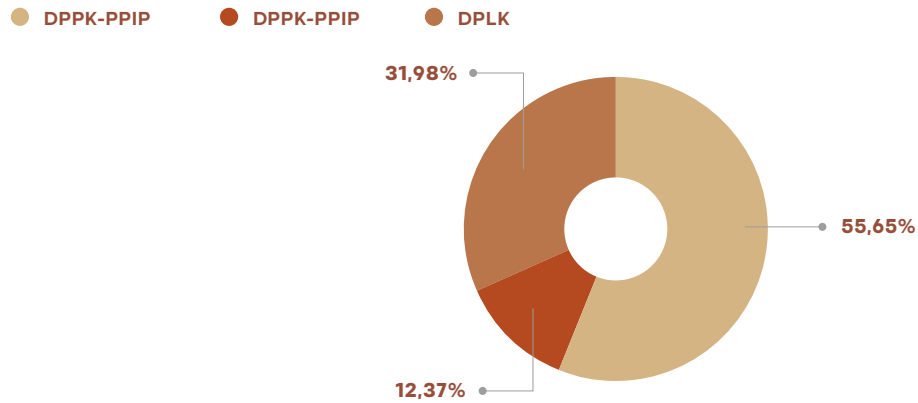
(dalam triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
DPPK-PPMP	150,25	151,48	154,02	157,24	159,02
<i>Growth</i>	-2,81%	0,81%	1,69%	2,09%	1,13%
DPPK-PPIP	31,43	31,84	32,70	33,61	34,63
<i>Growth</i>	-0,38%	1,29%	2,70%	2,79%	3,04%
DPLK	79,03	80,22	82,78	86,06	88,73
<i>Growth</i>	0,63%	1,51%	3,19%	3,95%	3,10%
Total Aset (triliun rupiah)	260,71	263,53	269,51	276,91	282,38
<i>Growth</i>	1,43%	-1,50%	1,08%	2,75%	1,97%

Tabel I - 41 ◇ Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
DPPK-PPMP	144,42	144,38	147,45	150,05	151,83
<i>Growth</i>	-3,13%	-0,03%	2,12%	1,77%	1,19%
DPPK-PPIP	30,62	31,15	32,04	32,57	33,74
<i>Growth</i>	-0,71%	1,73%	2,87%	1,63%	3,61%
DPLK	77,55	78,90	81,45	84,08	87,25
<i>Growth</i>	0,61%	1,74%	3,24%	3,23%	3,76%
Total Aset (triliun rupiah)	252,60	254,43	260,94	266,70	272,82
<i>Growth</i>	-1,72%	0,73%	2,56%	2,20%	2,30%

Grafik I - 38 ◇ Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun**Tabel I - 42** ◇ Portofolio Investasi Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
1.	Surat Berharga Negara	57,24	57,96	59,30	62,02	64,53
2.	Tabungan	0,58	0,50	0,40	0,44	0,56
3.	Deposito On Call	2,06	1,05	1,06	1,55	1,80
4.	Deposito Berjangka	66,44	66,04	68,31	70,46	72,46
5.	Sertifikat Deposito	1,36	1,21	1,49	1,52	0,74
6.	Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	-	-
7.	Saham	29,11	30,29	30,60	32,07	32,77
8.	Obligasi	53,50	55,18	55,29	55,30	56,65
9.	Sukuk	3,15	3,24	3,34	3,10	3,18
10.	Unit Penyertaan Reksadana	16,01	15,78	16,88	16,03	15,79
11.	Medium Term Note	0,17	0,19	0,17	0,19	0,19
12.	Efek Beragun Aset dari KIK EBA	1,06	1,05	1,01	0,98	0,94
13.	Unit Penyertaan berbentuk KIK	0,13	0,11	0,11	0,09	0,10
14.	Kontrak Opsi Saham	-	-	-	-	-
15.	Repurchase Agreement	-	-	-	-	-
16.	Penempatan Langsung pada Saham	8,67	8,79	9,37	9,28	9,58
17.	Tanah	3,99	4,03	4,08	4,08	4,12
18.	Bangunan	2,27	2,09	2,53	2,49	2,11
19.	Tanah dan Bangunan	6,84	6,91	7,00	7,09	7,29
Total		252,60	254,43	260,94	266,70	272,82

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu deposito berjangka (26,56%), obligasi (20,76%), SBN (23,65%), dan saham (12,01%).

Selama periode triwulan II-2019 terdapat satu pembubaran Dana Pensiun (DPLK Pasaraya KEP-44/D.05/2019) dan satu pembentukan Dana Pensiun (DPLK Axa Financial Services KEP-56/D.05/2019) maka sampai dengan periode laporan tidak terdapat perubahan jumlah pelaku yaitu 227 entitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 43 ◇ Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
DPPK PPMP	167	164	164	162	162
DPPK PPIP	44	44	44	41	41
DPLK	23	24	24	24	24
Jumlah	234	232	232	227	227

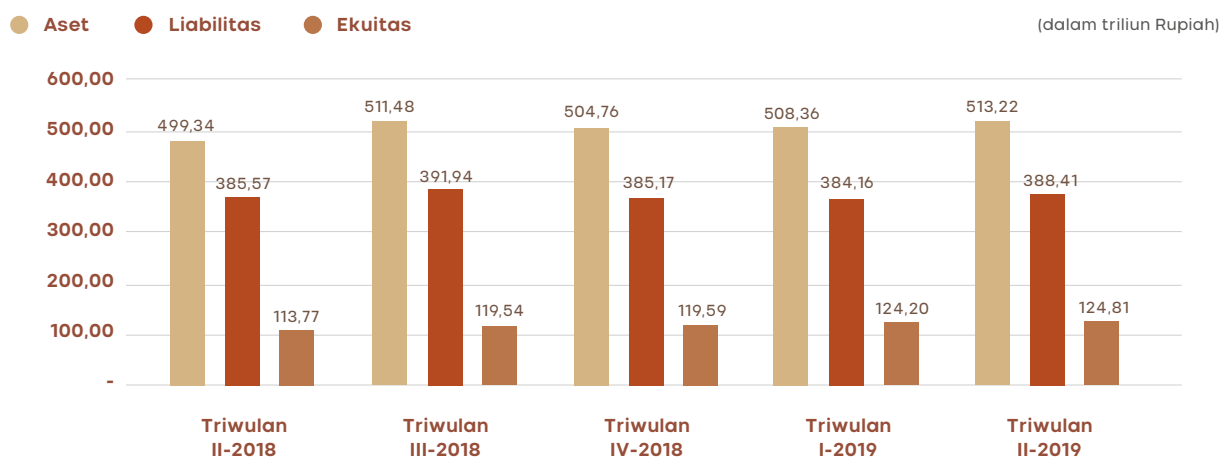
1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan II-2019 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,95%, 1,11%, dan 0,49% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 39 ◇ Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

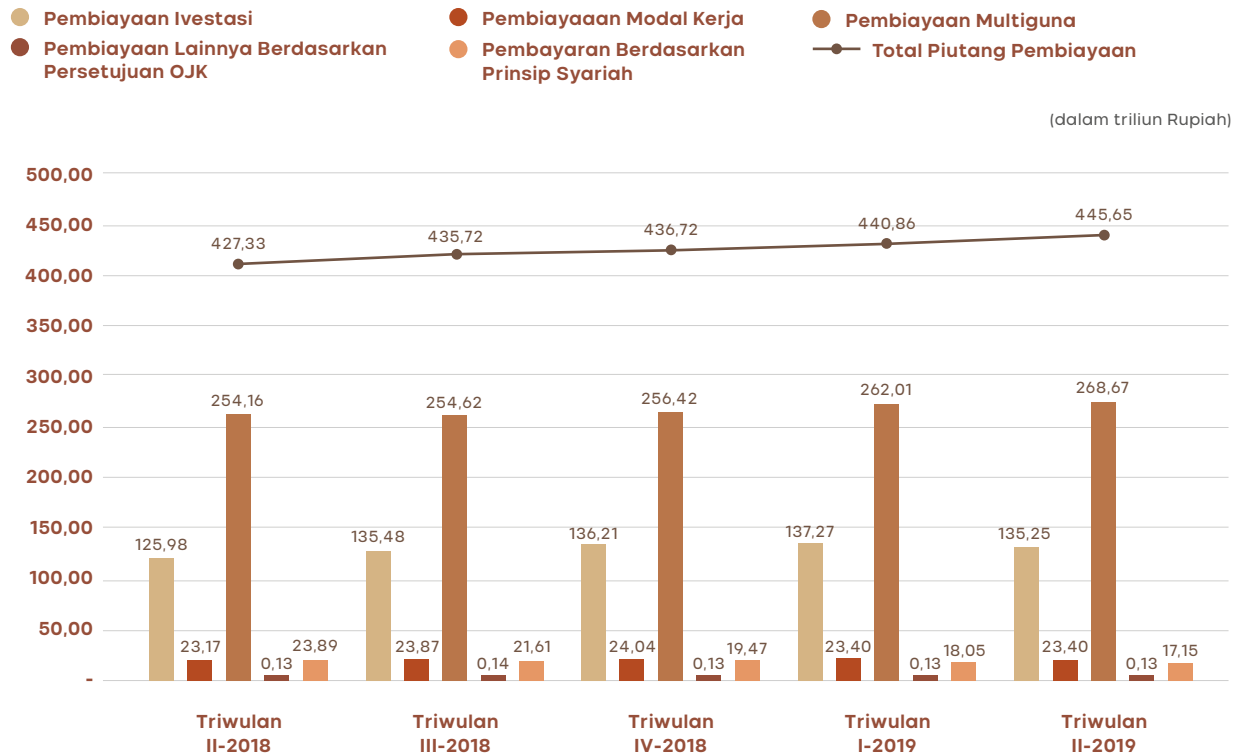
Selama periode laporan terdapat tiga pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan pada Triwulan II-2019 sebesar 183 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan

total aset, sebanyak 71 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92%, sedangkan 112 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 8%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang mengalami peningkatan sebesar Rp4,78 triliun atau 1,09% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan

proporsi masing-masing sebesar 60,29% dan 30,35%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 76,31% (Rp353,59 triliun).

Grafik I - 40 ◇ Piutang Perusahaan Pembiayaan**Tabel I - 44** ◇ Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam triliun Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
A.	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	340,96	347,72	349,18	350,86	353,59
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	18,18	18,43	18,59	18,37	19,06
2.	Pertambangan dan penggalian	26,21	28,95	29,56	29,53	28,92
3.	Industri pengolahan	37,55	38,17	38,29	37,58	37,89
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	18,79	19,83	16,25	17,38	15,14
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0,36	0,40	0,41	0,38	0,44
6.	Konstruksi	16,58	16,46	16,14	15,76	15,54
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	73,65	75,18	77,51	80,71	85,19
8.	Transportasi dan pergudangan	29,23	30,51	31,62	32,42	32,68
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	10,01	9,98	9,73	9,12	8,76
10.	Informasi dan komunikasi	3,96	3,71	3,00	2,89	2,90
11.	Jasa keuangan dan asuransi	4,87	4,98	6,23	5,95	6,39
12.	Real Estate	2,07	2,16	2,49	2,68	2,72
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	2,95	3,21	3,40	3,47	3,78
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	42,39	43,44	44,46	44,15	43,62
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7,34	7,25	7,06	6,71	6,57
16.	Jasa pendidikan	4,71	4,62	4,76	4,62	4,68
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9,28	9,19	9,08	8,74	8,93

18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	2,27	2,30	2,41	2,22	1,98
19.	Kegiatan jasa lainnya	21,46	21,27	21,01	21,43	22,10
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	9,01	7,61	7,06	6,61	6,14
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,09	0,11	0,11	0,14	0,14
B.	Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	102,59	103,95	103,38	106,88	109,79
1.	Rumah tangga	63,99	65,68	65,35	72,25	75,09
2.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	38,59	38,27	38,03	34,63	34,70
Jumlah		443,55	451,67	452,57	457,74	463,38

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel I - 45 ◇ Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
FAR (%)	85,58%	85,19%	86,43%	86,72%	86,83%
NPF (%)	3,15%	3,17%	2,71%	2,71%	2,82 %
Gearing Ratio (kali)	3,14	3,03	2,99	2,84	2,83

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*), Kualitas piutang

pembiayaan (NPF) dan *Gearing Ratio* masih terjaga masing-masing pada rasio 86,83%, 2,82% dan 2,83 kali.

Tabel I - 46 ◇ NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
A.	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	3,28%	3,23%	2,67%	2,67%	2,81%
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	1,86%	2,27%	2,66%	3,15%	3,68%
2.	Pertambangan dan penggalan	4,99%	5,75%	5,14%	4,13%	4,44%
3.	Industri pengolahan	2,52%	2,96%	2,28%	2,43%	2,56%
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0,16%	0,15%	0,18%	0,16%	0,21%
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	2,69%	2,34%	1,36%	1,88%	1,13%
6.	Konstruksi	2,47%	2,19%	2,28%	2,42%	2,57%
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	3,77%	3,01%	1,83%	1,83%	1,89%
8.	Transportasi dan pergudangan	11,39%	9,99%	8,97%	8,55%	8,55%
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1,82%	1,98%	1,84%	2,13%	2,30%
10.	Informasi dan komunikasi	0,98%	0,91%	0,89%	0,87%	0,89%
11.	Jasa keuangan dan asuransi	1,47%	1,82%	1,42%	1,46%	1,37%
12.	Real Estat	3,92%	3,92%	2,93%	3,16%	3,29%
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	2,24%	2,02%	1,31%	1,36%	1,48%
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	1,56%	1,51%	1,40%	1,53%	1,91%
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,41%	1,35%	1,17%	1,36%	1,31%

16.	Jasa pendidikan	1,82%	1,62%	1,53%	1,78%	1,66%
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,40%	1,26%	1,23%	1,68%	1,70%
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	1,06%	1,13%	1,13%	1,20%	1,13%
19.	Kegiatan jasa lainnya	1,79%	3,35%	1,55%	1,96%	1,76%
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	2,42%	2,08%	1,54%	1,73%	1,87%
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	1,52%	1,70%	2,44%	1,70%	1,61%
B.	Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	2,73%	2,95%	2,85%	2,85%	2,87%
1.	Rumah tangga	2,27%	2,28%	2,15%	2,09%	2,30%
2.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,50%	4,09%	4,05%	4,44%	4,09%
NPF Industri		3,15%	3,17%	2,71%	2,71%	2,82%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Lab bersih industri perusahaan pembiayaan juga mengalami kenaikan secara *year on year* sebesar

13,40% atau naik menjadi Rp8,95 triliun pada triwulan II-2019.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Pada triwulan II-2019 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp286,24 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 51,57% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 40,41%, Yen Jepang 7,94%, Euro 0,06%,

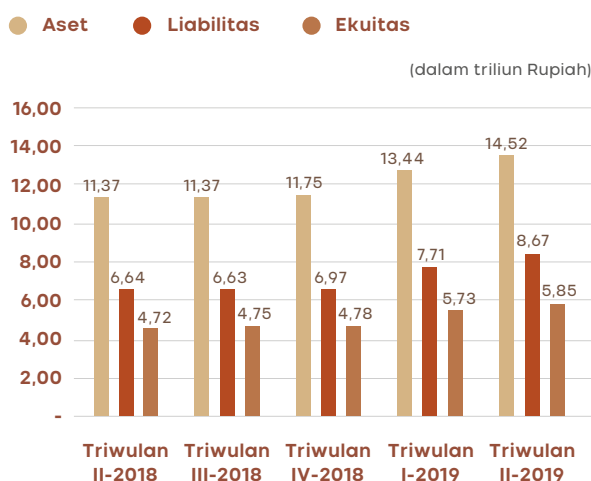
dan Singapore Dollar 0,02%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan masing-masing sebesar 8,08%, 12,52%, dan 2,10% menjadi Rp14,52 triliun, Rp8,67 triliun, dan Rp5,85 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 41 ◇ Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

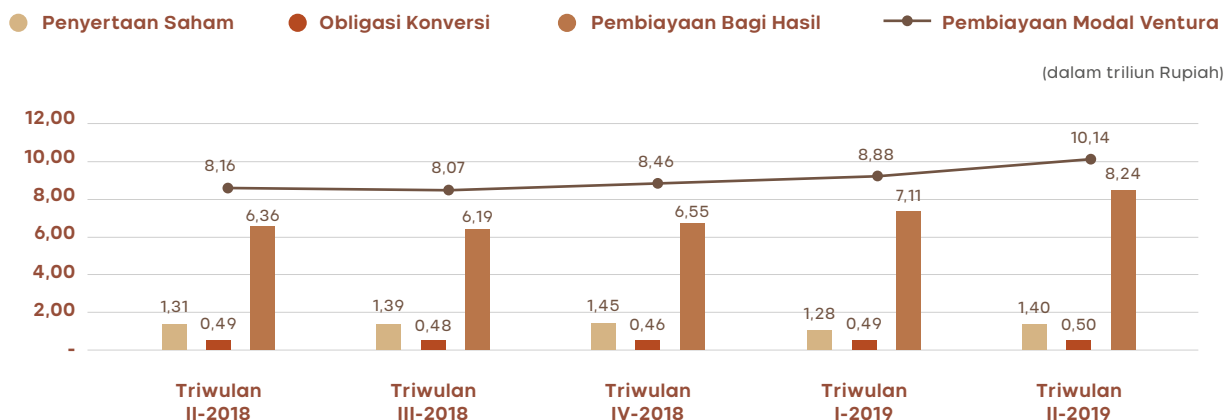


B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Selama periode triwulan I-2019 sampai triwulan II-2019 terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura pada Triwulan II-2019 sebesar 61 perusahaan.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan sebesar 14,21% menjadi Rp10,14 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 81,25% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp8,24 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp4,93 triliun atau sebesar 48,17%.

Grafik I - 42 ◇ Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal**Tabel I - 47** ◇ Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam miliar Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
1.	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	814	668	707	678	768
2.	Pertambangan	485	490	507	501	530
3.	Perindustrian	567	735	745	778	844
4.	Konstruksi	462	497	490	443	461
5.	Perdagangan, Restoran, dan Hotel	3.772	3.597	3.716	4.214	4.926
6.	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	157	137	135	144	162
7.	Jasa Pendukung Bisnis	797	787	932	902	946
8.	Jasa Sosial dan Masyarakat	182	177	174	203	236
9.	Lain-Lain	1.007	1.064	1.132	1.107	1.353
Jumlah		8.243	8.152	8.538	8.971	10.225

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

D. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi

Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 95,23%, 69,82%, 2,54%, 4,63%.

Tabel I - 48 ◇ Rasio Keuangan Modal Ventura

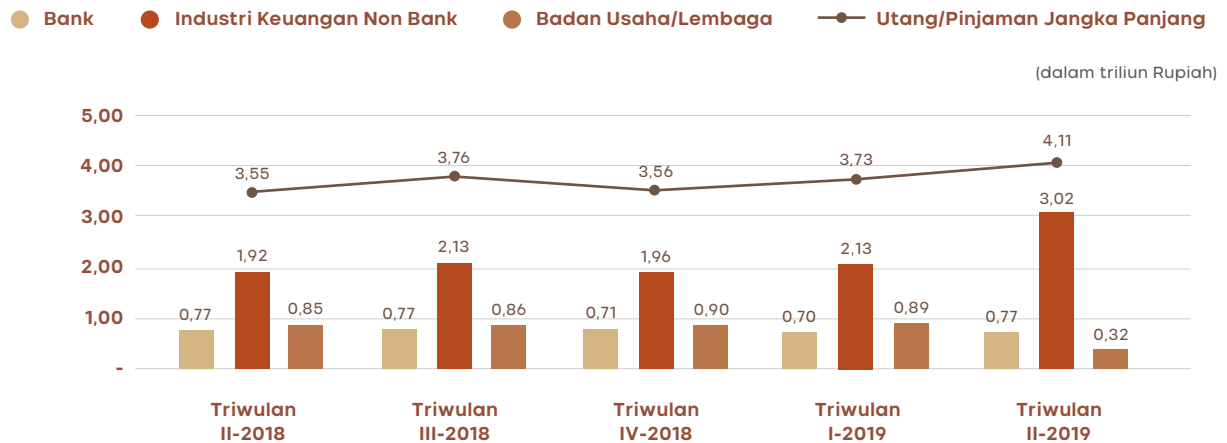
Rasio Keuangan	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Δ
BOPO	96,23%	95,23%	-1,00%
IFAR	66,07%	69,82%	3,75%
ROA	1,88%	2,54%	0,66%
ROE	3,04%	4,63%	1,59%

E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total

pinjaman pada triwulan II-2019 adalah sebesar Rp4,11 triliun atau naik sebesar 10,36% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 43 ◇ Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura

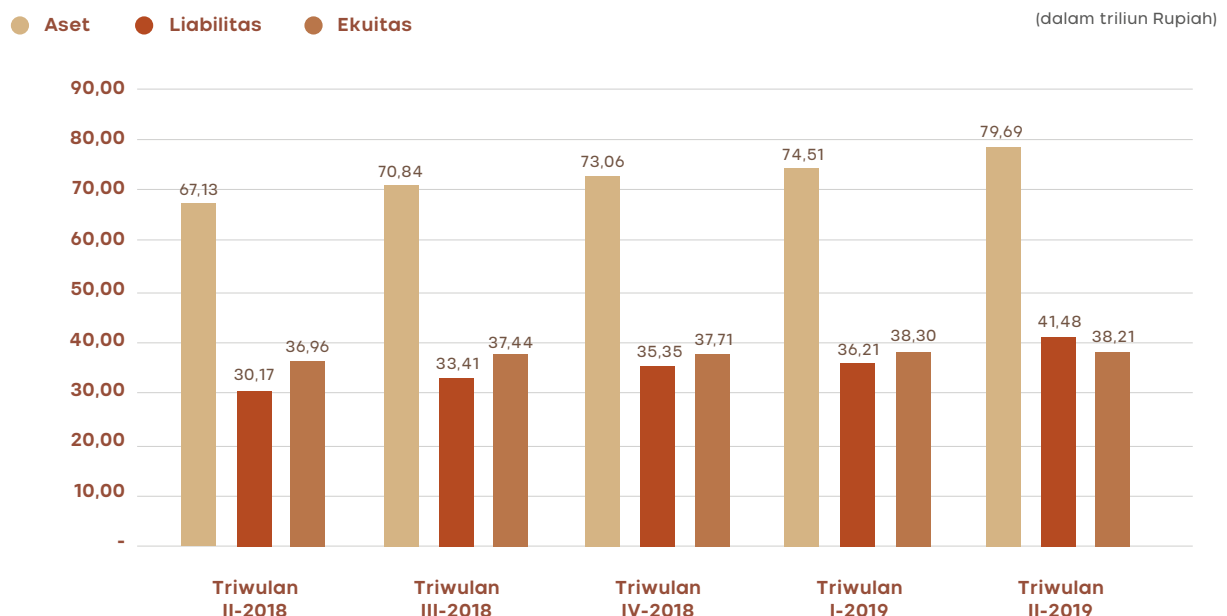


1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset sebesar Rp79,69 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Rp41,48 triliun dan Rp38,21 triliun pada

triwulan II-2019. Total aset dan liabilitas mengalami kenaikan sebesar 6,95% dan 14,54% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, total ekuitas mengalami penurunan sebesar 0,23% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 44 ◇ Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



Tabel I - 49 ◇ Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

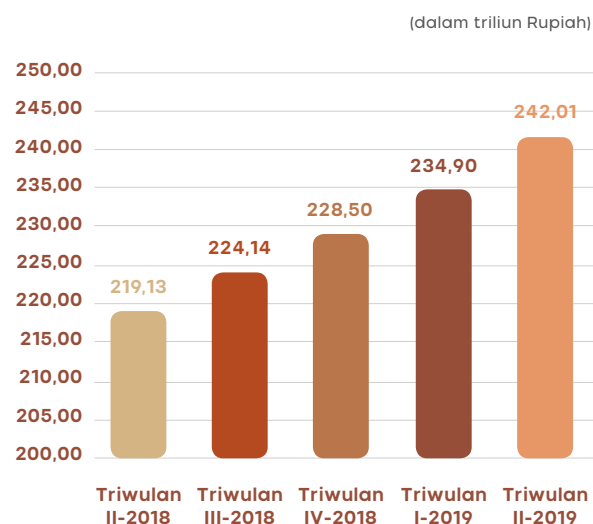
(dalam triliun Rupiah)

Jenis Infrastruktur	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
Air Minum	1,24	1,24	1,43	1,61	1,64
Jalan	10,63	12,51	13,95	14,83	15,24
Ketenagalistrikan	15,14	17,68	18,56	18,50	21,59
Lainnya	4,40	5,47	6,62	6,48	6,57
Minyak & Gas Bumi	3,38	3,49	2,83	2,78	2,74
Telekomunikasi	1,92	1,92	3,34	3,27	5,04
Transportasi	3,15	4,24	5,57	6,87	7,91
Total	39,85	46,54	52,29	54,34	60,74

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Total Aset LJKK naik 3,03% pada triwulan II-2019 menjadi Rp242,01 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 45 ◇ Pertumbuhan Aset LJKK

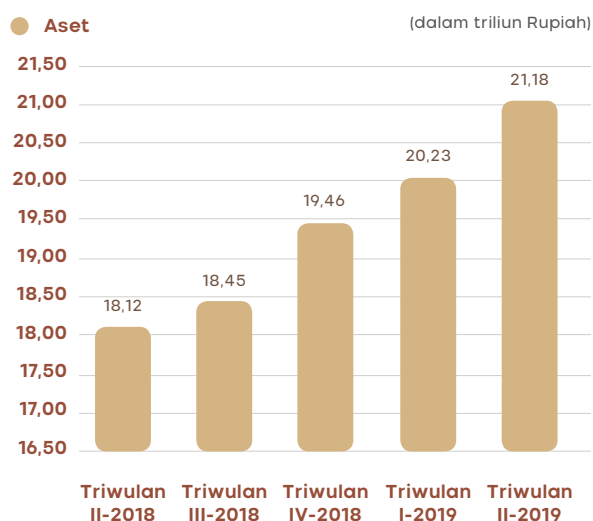


A. Perusahaan Penjaminan

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit.

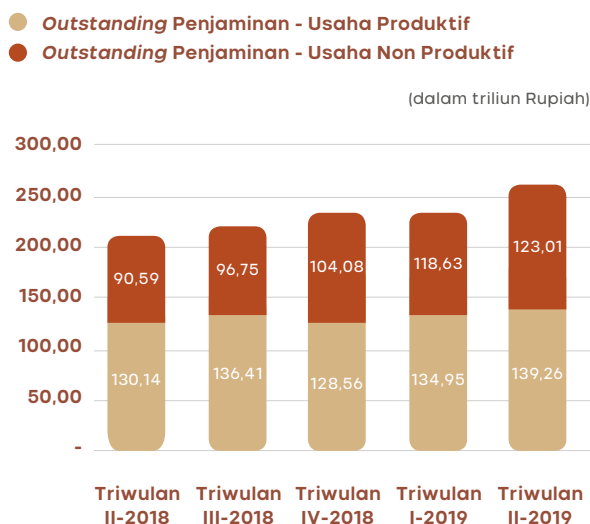
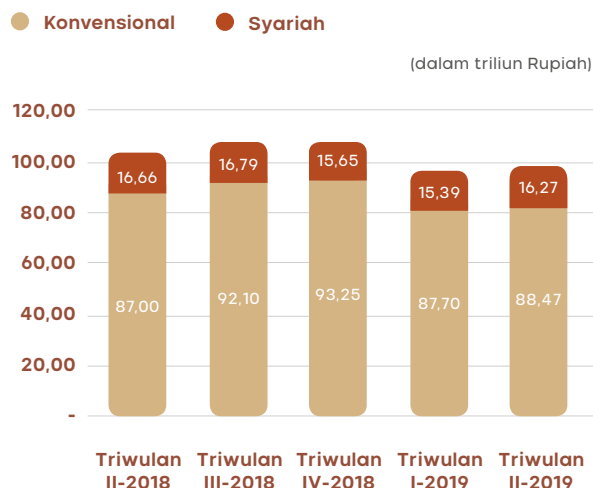
Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 4,71% menjadi Rp21,18 triliun.

Grafik I - 46 ◇ Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan



*) data termasuk syariah

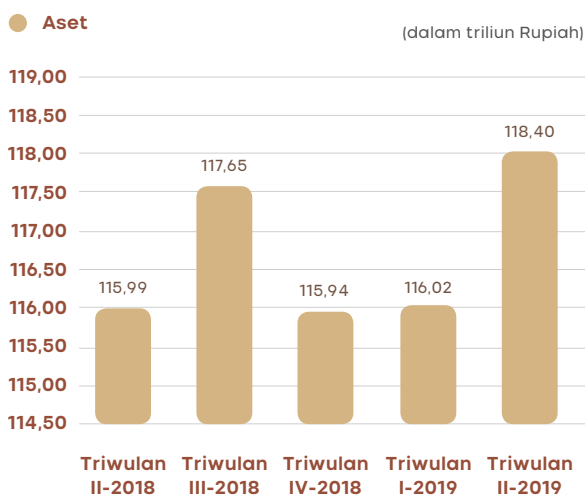
Outstanding penjaminan selama triwulan II-2019 mengalami kenaikan 3,43% menjadi Rp262,27 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh naiknya nilai *outstanding* usaha produktif sebesar 3,20% dibanding dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp139,26 triliun. Di sisi lain, nilai *outstanding* penjaminan usaha non produktif meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 3,69% menjadi Rp123,01 triliun.

Grafik I - 47 ◇ Outstanding Penjaminan**Grafik I - 49** ◇ Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia

B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional.

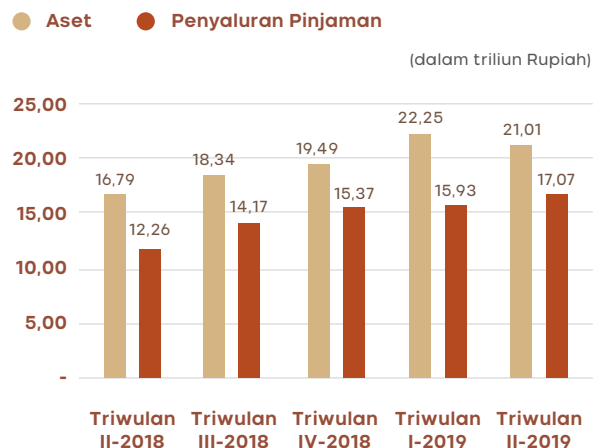
Total aset LPEI meningkat 2,05% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari Rp116,02 triliun menjadi Rp118,40 triliun

Grafik I - 48 ◇ Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pada periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp104,73 triliun, atau naik 1,60% dari periode sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya pembiayaan konvensional sebesar 0,88% menjadi Rp88,47 triliun dan piutang syariah sebesar 5,70% menjadi Rp16,27 triliun.

C. Sarana Multigriya Finansial

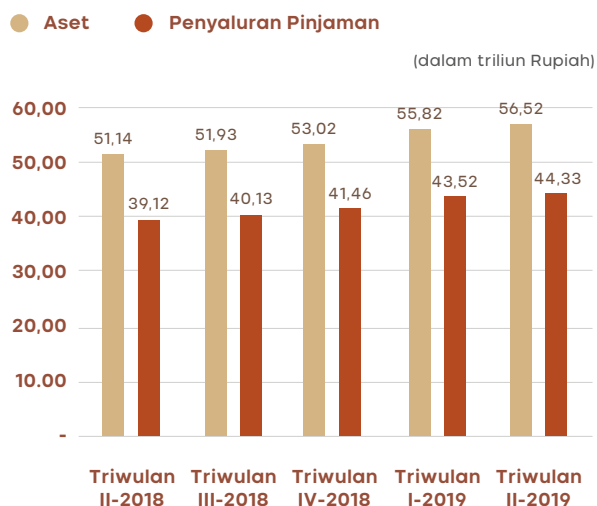
Aset PT SMF (Persero) pada triwulan II-2019 mengalami penurunan sebesar 5,56% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp21,01 triliun. Meskipun demikian, nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) mengalami kenaikan 7,19% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp17,07 triliun.

Grafik I - 50 ◇ Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)

D. Pergadaian

Sampai dengan triwulan II-2019, terdapat 72 perusahaan pergadaian swasta yang mendaftarkan diri serta 25 perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh izin dari OJK. Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian tercatat naik 1,28% menjadi Rp56,52 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan II-2019 sebesar Rp44,33 triliun, atau naik 1,85% dibandingkan triwulan sebelumnya.

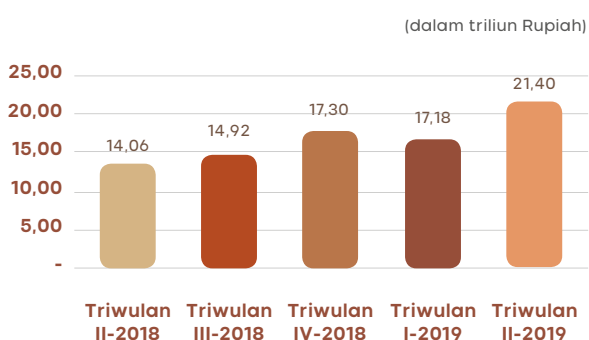
Grafik I - 51 ◇ Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman Pegadaian



E. PT PNM (Persero)

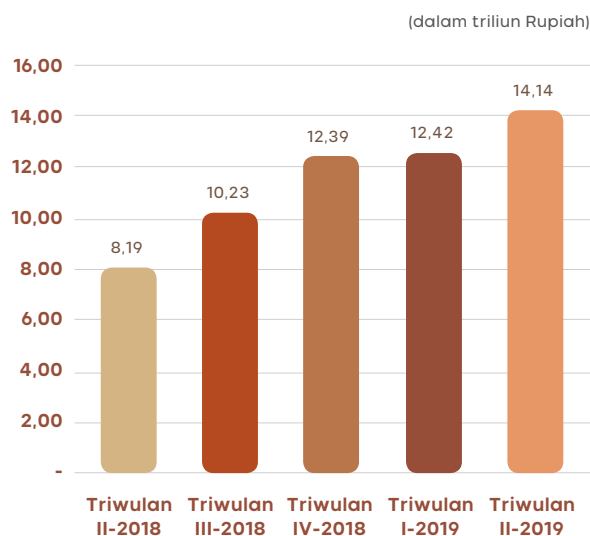
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Grafik I - 52 ◇ Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)



Sesuai tujuan pendiriannya, kegiatan usaha utama PT PNM (Persero) adalah pemberian pinjaman dan modal untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Pada triwulan II-2019, pemberian pinjaman yang disalurkan PT PNM (Persero) mengalami kenaikan sebesar 13,87% dari periode sebelumnya menjadi Rp14,14 triliun.

Grafik I - 53 ◇ Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)



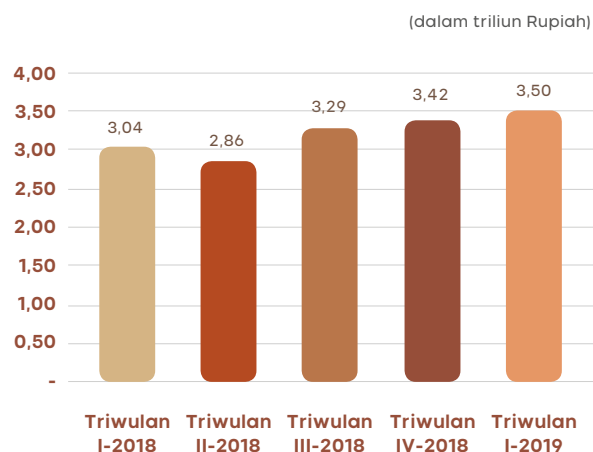
F. PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki tiga entitas anak, yaitu:

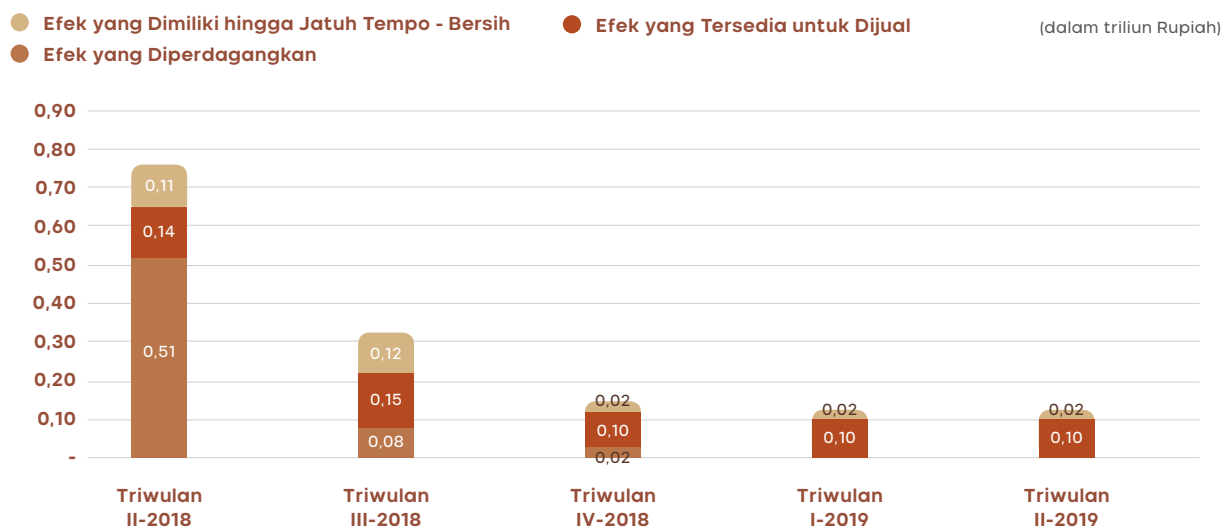
1. PT Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek;
2. PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan
3. PT Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan.

Aset PT Danareksa (Persero) pada triwulan II-2019 sebesar Rp3,50 triliun, mengalami kenaikan 2,50% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 54 ◇ Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)



Portofolio efek PT Danareksa (Persero) terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa (Persero) pada triwulan II-2019 tercatat sebesar Rp0,12 triliun, masih tetap seperti triwulan sebelumnya.

Grafik I - 55 ◇ Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)

1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Tabel I - 50 ◇ Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Semester I-2017	Semester II-2017	Semester I-2018	Semester II-2018
1.	Aset	8,26	8,05	8,98	9,61
2.	Liabilitas	5,78	5,64	6,31	6,94
3.	Modal Sendiri	5,06	2,41	2,67	2,67
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	0,92	1,91	1,21	2,38
5.	Laba/ (Rugi)	0,21	0,57	0,30	0,69

Tabel I - 51 ◇ Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
1.	Pialang Asuransi	167	166	166	165	164
2.	Pialang Reasuransi	43	43	43	44	43
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	27	27	27	27
Jumlah		237	236	236	236	234

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode kuartal I-2019 adalah sebanyak 177 LKM dengan 112

LKM Konvensional dan 65 *full* syariah. Total aset LKM Konvensional sesuai dengan laporan kuartal I-2019 adalah sebesar Rp481,06 miliar.

Tabel I - 52 ◇ Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

No.	Jenis Badan Usaha	Kuartal I-2018	Kuartal II-2018	Kuartal III-2018	Kuartal I-2019
1.	Konvensional				
	Koperasi	133	125	101	89
	PT	21	21	22	23
2	Syariah				
	Koperasi	38	46	59	64
	PT	1	1	1	1
	Jumlah	193	193	183	177

Tabel I - 53 ◇ Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

(dalam miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Kuartal I-2018	Kuartal II-2018	Kuartal III-2018	Kuartal I-2019
1.	Aset	339,89	402,49	470,10	481,06
2.	Liabilitas	216,61	236,25	268,46	280,30
3.	Ekuitas	123,29	166,23	201,65	200,76
4.	Pinjaman Yang Diberikan	288,22	335,30	344,99	339,13
5.	Simpanan/Tabungan	188,52	195,22	219,88	227,03

* Data TW II 2019 menggunakan data laporan kuartal I 2019

1.4.9 Perkembangan Industri Fintech (Financial Technology)

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode Triwulan II 2019 sebanyak 119 entitas, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp44,8 triliun atau naik 35% dari periode sebelumnya sebesar Rp 33,2 triliun.

Sementara itu TWP 90 atau ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo pada periode laporan adalah sebesar 1,75%.

Tabel I - 54 ◇ Perkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)

No.	Keterangan	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
1.	Penyelenggara Terdaftar	64	70	88	106	119
2.	Pemberi Pinjaman	123.633	161.297	207.507	272.548	498.824
3.	Penerima Pinjaman	1.090.306	2.300.007	4.359.448	6.961.993	9.743.679
4.	Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun)	7,6	13,8	22,7	33,2	44,8
5.	TWP 90	0,79%	1,20%	1,45%	2,62%	1,75%

1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM FLAGSHIP OJK

1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dalam membentuk LKM syariah, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, pendirian LKM syariah di lingkungan pesantren diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah.

Pada triwulan II-2019, jumlah BWM terus meningkat menjadi 48 BWM. BWM yang diberikan izin selama triwulan II-2019 sebagai berikut:

Tabel I - 55 ◇ LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro)

No.	Nama LKM Syariah
1.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah BWM Apik Kaliwungu Kendal
2.	Koperasi LKMS BWM Al Anshor Peduli
3.	Koperasi LKMS BWM Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Maslahah
4.	Koperasi LKMS Kariman Birajuda Al Karimiyyah
5.	Koperasi LKMS BWM Ahmad Taqiuddin Mansur "ATQIA"

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan BWM, OJK turut aktif menjadi narasumber dalam berbagai acara pelatihan pengelola BWM, evaluasi, dan *monitoring* dalam rangka pengembangan BWM.

1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

Pada triwulan II-2019, terdapat 29 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai, terdiri dari 27 BUK (termasuk 14 BPD) dan dua BUS. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan II-2019 mencapai 1.123.096 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan BSA juga bertambah menjadi sebanyak 24.226.083 nasabah dan menghimpun nominal BSA sebesar Rp2,49 triliun. Tabungan BSA tersebut sedikit turun 0,80% (*qta*) dipengaruhi oleh adanya penarikan bantuan sosial oleh nasabah.

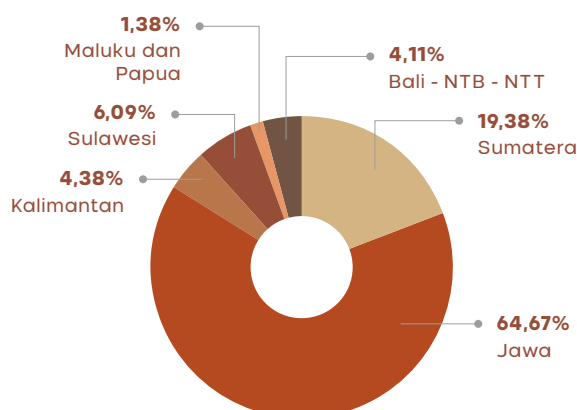
Tabel I - 56 ◇ Jumlah Agen dan Nasabah Laku Pandai

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1.092.490	30.606
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	Outstanding Tabungan BSA
24.226.083	Rp2,49 Triliun

Sumber: OJK

Sebagian besar nasabah BSA masih terkonsentrasi di pulau Jawa (68,35%) utamanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, diikuti oleh Sumatera sebesar 16,47% dan sisanya sebesar 15,18% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Hal tersebut juga seiring dengan penyebaran agen Laku Pandai yang sebagian besar berada di pulau Jawa (64,67%) dan Sumatera (19,38%), sementara sisanya (15,95%) tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Grafik I - 56 ◇ Wilayah Persebaran Agen



Sumber: OJK

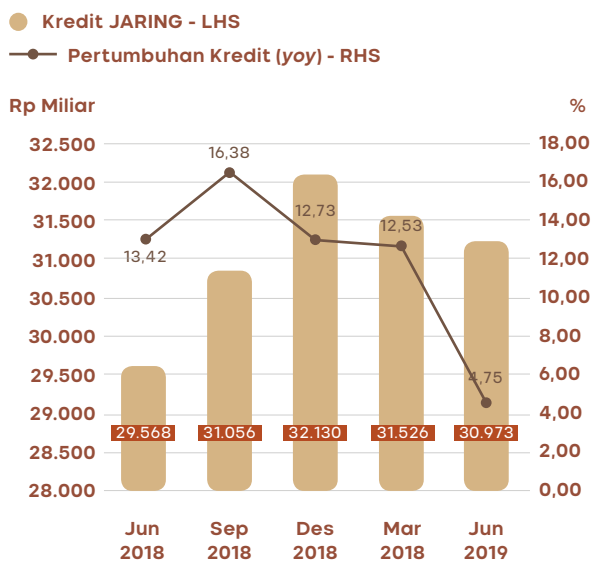
Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Dalam rangka mendukung program pemerintah, agen Laku Pandai Bank Himbara dimanfaatkan sebagai agen *e-warong* dalam penyaluran program Bantuan Sosial Non Tunai berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan sarana pembayaran zakat (*zakat inclusion*).

1.5.3 Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Sampai dengan triwulan II-2019, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp30,97 triliun atau tumbuh 4,75% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya (13,42%, yoy). Perlambatan terjadi dipengaruhi oleh turunnya kredit pada subsektor industri pengolahan dan perdagangan yang masing-masing turun sebesar 3,79% (yoy) dan 0,77% (yoy), serta melambatnya penyaluran kredit ke subsektor budidaya yang hanya tumbuh 3,66% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan pada periode laporan masih cukup baik ditopang oleh penyaluran kredit ke subsektor penangkapan dan jasa sarana produksi perikanan yang masing-masing tumbuh 24,62% (yoy) dan 36,87% (yoy).

Risiko kredit kelautan dan perikanan masih terjaga di bawah 5%, meskipun meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,48%. Naiknya NPL kredit ini di dorong oleh kenaikan NPL utamanya pada subsektor penangkapan ikan tuna dan budidaya biota laut udang. Sementara itu, perbaikan kualitas kredit terdapat pada subsektor jasa sarana produksi dan perdagangan.

Grafik I - 57 ◇ Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING



Sumber: OJK

Tabel I - 57 ◇ NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim

Kegiatan Usaha	2018 (%)		2019 (%)
	Jun	Mar	Jun
Penangkapan	2,97	8,89	9,34
Budidaya	1,56	5,20	1,50
Jasa Sarana Produksi	4,54	3,70	2,50
Industri Pengolahan	0,42	0,42	0,46
Perdagangan	2,66	2,13	3,14
NPL	1,93	3,48	3,38

Sumber: OJK

*Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan.

1.5.4 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

Tabel I - 58 ◇ Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Investasi	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
Reksa Dana						
Jumlah	1.849	1.921	2.035	2.098	2.089	2.094
Total NAB	496,50	486,56	495,09	505,39	515,09	512,58
RDPT						
Jumlah	55	62	59	62	64	60
Total NAB	18,57	23,39	26,58	26,65	23,96	23,59
EBA						
Jumlah	7	7	8	8	7	7
Nilai Sekuritisasi	6,59	6,32	7,49	7,21	6,98	6,72
EBA-SP						
Jumlah	5	5	5	5	5	5
Nilai Sekuritisasi	4,11	3,75	3,66	3,46	3,26	3,13
DIRE						
Jumlah	3	3	4	7	7	7
Total Nilai	0,59	0,61	0,62	0,72	0,92	11,34
KPD						
Jumlah	423	440	478	494	502	514
Total Nilai	197,59	189,30	196,72	204,77	214,00	217,18
DINFRA						
Jumlah	-	-	2	4	4	6
Total Nilai	-	-	0,33	0,34	0,64	2,65

A. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil. Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) menurun sebesar 1,54% menjadi Rp23,59 triliun pada triwulan II-2019. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga mengalami penurunan sebesar 6,25% menjadi 60 RDPT dari sebelumnya 66 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan II-2019 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

B. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA)

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Selama periode laporan OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun pembubaran Kontrak Investasi Kolektif

Efek Beragun Aset (KIK-EBA), sehingga jumlah KIK-EBA tetap sebanyak tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp6,72 triliun.

C. Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor. Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun pembubaran Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap sebanyak lima EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp3,13 triliun.

D. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)

Dana Investasi Real Estate adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estate, Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estate, dan/atau kas dan setara kas. Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) pada triwulan II-2019 tetap sebanyak tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp11,34 triliun.

E. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)

Pada triwulan II-2019, nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 2,39% menjadi 514 KPD dengan dana kelolaan sebesar Rp217,18 triliun atau meningkat sebesar 1,48% dibanding dengan triwulan sebelumnya.

F. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur

Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) pada triwulan II-2019 mengalami kenaikan sebesar 50% menjadi enam KIK-DINFRA dengan dana kelolaan sebesar Rp2,65 triliun.

1.5.5 Program 1.000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaris keahlian khusus asuransi umum. OJK telah melakukan rekapitulasi atas laporan kegiatan Program 1000 Aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), Jasindo Insurance Academy (JIA), dan Tim READI dalam rangka penyusunan laporan kegiatan Program 1000 Aktuaris tahun 2018. Jumlah aktuaris mengalami kenaikan sejumlah 17 orang, sehingga sampai dengan triwulan II-2019 terdapat 602 aktuaris yang terdiri dari 306 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan 296 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*).

1.5.6 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko

asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AUTP 80 % ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan II-2019, total premi yang tercatat adalah sebesar Rp59,91 miliar dengan jumlah petani yang ikut serta sebanyak 557.444 orang dan luas lahan terdaftar adalah 332.840 ha (33,28%). Jumlah luas lahan yang diklaim adalah 652 ha dengan nilai klaim berjalan sebesar Rp3,91 miliar.

1.5.7 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Pada triwulan II-2019, premi AUTS adalah sebesar Rp13,023 miliar,- dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp10,418 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp2,604 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 65.115 ekor sapi (54,26%) di 27 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 36.980 orang. Sementara itu, jumlah realisasi klaim adalah sebesar Rp1,359 miliar.

1.5.8 Asuransi Nelayan

Pada triwulan II-2019, program Asuransi Nelayan dengan program bantuan premi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dijalankan pada bulan Juni. Program tersebut mencapai 15.000 nelayan atau 3% dari target 500.000 nelayan dan total premi mencapai Rp2,1 miliar. Selain itu, Asuransi Nelayan Mandiri telah dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 7.641 orang. Jumlah realisasi premi adalah sebesar Rp1,144 miliar. Sementara itu, jumlah nilai klaim per triwulan II-2019 adalah sebesar Rp94,433 juta dari sebanyak 8 orang.

1.5.9 Asuransi Usaha Budidaya Ikan Kecil

Asuransi Perikanan memberikan perlindungan risiko pada pembudidaya atas penyakit yang dapat mengakibatkan matinya komoditas perikanan atau kegagalan usaha akibat bencana alam. Komoditas perikanan yang diasuransikan terdiri dari udang, ikan bandeng, ikan nila payau, ikan nila tawar, ikan patin dan polikultur. Lahan pembudidaya yang ditanggung pada Asuransi Perikanan adalah seluas 10.220 ha dengan rentang nilai premi sebesar Rp90.000,- sampai dengan Rp225.000,- sesuai dengan ketentuan luasan lahan.

Sampai dengan triwulan II-2019, luas lahan terdaftar pada Asuransi Perikanan untuk Pembudidaya Ikan Kecil adalah 102,206 juta m² dengan total premi sebesar Rp2,987 miliar. Nilai klaim per triwulan II-2019 adalah sebesar Rp2,003 miliar untuk 1.335 m² pada 22 provinsi.

1.5.10 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan II-2019, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp2,09 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 59 ◇ Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

No.	Kelompok Sub Sektor	Saldo (Rp juta)
1.	Periklanan	26.669
2.	Arsitektur	60.335
3.	Pasar Barang Seni	27.738
4.	Kerajinan	269.451
5.	Desain	9.020
6.	Fashion	191.641
7.	Video, Film dan Fotografi	35.823
8.	Permainan Interaktif	4.327
9.	Musik	8.732
10.	Seni Pertunjukan	1.022
11.	Penerbitan dan Percetakan	96.700
12.	Layanan Komputer dan Piranti Lunak	561.636
13.	Televisi dan Radio	8.413
14.	Riset dan Pengembangan	6.878
15.	Kuliner	786.083
Total		2.094.468

1.5.11 Pembiayaan dan Asuransi pada Sektor Pariwisata

Setelah pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, OJK berperan memberikan dukungan melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang memudahkan

pembiayaan pengembangan sektor pariwisata. OJK dan Lembaga Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di sektor pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang dapat berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Sampai dengan periode triwulan II-2019, pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp11,23 triliun. Selain itu, OJK mendorong partisipasi aktif Perusahaan Asuransi untuk membentuk konsorsium dalam mendukung program pengembangan sektor pariwisata. Dalam langkah awal, OJK telah berkordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk memaparkan pentingnya perlindungan kepada para wisatawan dan pelaku usaha pariwisata terutama dari potensi risiko bencana alam. Sampai dengan triwulan II-2019, terdapat 1 Konsorsium Asuransi yang memiliki produk khusus bagi para wisatawan (universal travel protection) yang melindungi jiwa dan aset pelaku usaha pariwisata. Selanjutnya akan digagas peraturan dan petunjuk teknis mengenai kewajiban asuransi di sektor pariwisata.





02

Tinjauan Operasional
Sektor Jasa Keuangan



Pengaturan dan Pengawasan

- Penerbitan 2 POJK yang mengatur Pengawasan Perbankan, 1 POJK yang mengatur Pengawasan Pasar Modal dan 2 POJK yang mengatur Pengawasan IKNB Konvensional
- Penerbitan 6 Sprindik, 4 Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan, dan 3 berkas Perkara dinyatakan Lengkap (P-21)



Pengembangan

- Penyelesaian *tools* pemenuhan kebutuhan data pengawas berbasis Teknologi Informasi berupa OJK-BOX dan *Condensed Report*
- Dukungan Pendirian Perusahaan Efek Daerah (PED), *Electronic Book Building*, Sistem Penyampaian Dokumen Pencatatan Secara Elektronik dan Pengembangan Notasi Khusus serta Produk Derivatif
- Pemberian Surat Tanda Tercatat kepada 14 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dan pelaksanaan pengujian 23 sampel objek *Regulatory Sandbox*
- Dukungan Penerapan *Blended Finance* dan Program B20
- Layanan Informasi Satu Pintu SPRINT dan integrasi proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum dan pencatatan Efek melalui SPRINT
- Pemenuhan rekomendasi hasil MER APG melalui *Priority Actions Plan* OJK



Edukasi dan Perlindungan Konsumen

- Sosialisasi Ketentuan EPK di Padang, Tangerang Selatan, Manado dan Cirebon
- Penyelenggaraan SimPel Day bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional
- Peluncuran 8 BUMDesa di Kabupaten Trenggalek dan Magetan
- Sinergi Edukasi bagi Pengajar Perguruan Tinggi di Yogyakarta, Solo, Manado dan Jayapura
- Edukasi Keuangan kepada komunitas Buruh Migran, Komunitas Perempuan dan Ibu Rumah Tangga. Komunitas Wirausaha dan Santri

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Bank

Pada triwulan II-2019, OJK menerbitkan dua ketentuan terkait sektor Perbankan, sebagai berikut:

1. POJK Nomor 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka mendukung efektivitas fungsi pengawasan di Bank Umum maka diperlukan metode penyampaian laporan oleh bank kepada OJK yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan OJK. Salah satu ketentuan yang diatur adalah mengenai kewajiban dan tata cara penyampaian Laporan dan/atau koreksi laporan secara daring (*online*) melalui Sistem Pelaporan OJK.

2. POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka mendukung efektivitas fungsi pengawasan di BPR dan BPRS maka diperlukan metode penyampaian laporan oleh bank kepada OJK yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan OJK. Salah satu ketentuan yang diatur adalah mengenai kewajiban dan tata cara penyampaian Laporan dan/atau koreksi laporan secara daring (*online*) melalui Sistem Pelaporan OJK.

3. SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank

Peraturan ini diterbitkan sebagai ketentuan lebih lanjut yang mengatur cakupan, tata cara, konsekuensi hasil akhir penilaian kembali, serta standarisasi format penyampaian laporan pengkinian data dan informasi domisili Pihak Utama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 POJK No.34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Pada triwulan II-2019 OJK menerbitkan Peraturan Industri Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
2. SEDK Nomor 2/SEDK.04/2019 tentang Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko di Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

3. SEDK Nomor 3/SEDK.04/2019 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko Pada Manajer Investasi

2.1.3 Pengaturan IKNB

Pada triwulan II-2019, OJK menetapkan sebanyak dua peraturan terkait Industri Jasa Keuangan Non Bank dengan detail sebagai berikut:

1. POJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun

Dalam rangka mengimbangi pertumbuhan industri dana pensiun, kekayaan dana pensiun perlu dikelola secara hati-hati. Salah satu upaya mewujudkan pengelolaan dana pensiun yang efektif dan efisien, diperlukan penerapan tata kelola yang menyeluruh bagi dana pensiun. Berdasarkan hal-hal tersebut, OJK menetapkan ketentuan Tata Kelola Dana Pensiun yang terdiri dari hal-hal terkait penerapan tata kelola dana pensiun, pendiri dan mitra pendiri, pengurus dan pelaksana tugas pengurus, dewan pengawas, sistem remunerasi, tata kelola investasi, tata kelola teknologi Informasi, Manajemen risiko dan pengendalian internal, rencana bisnis, keterbukaan Informasi dan sebagainya.

2. POJK Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Dalam memberikan landasan hukum terhadap pengawasan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) di Indonesia dan menciptakan kegiatan usaha yang sehat dengan memberikan dukungan akses pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah kepada masyarakat, ditetapkan POJK Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). Adapun pokok-pokok pengaturan, yaitu:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Kelembagaan dan Kepengurusan;
- c. Penyelenggaraan Usaha;
- d. Rencana Pemenuhan;
- e. Sanksi Administratif;
- f. Ketentuan Peralihan;
- g. Ketentuan Penutup.

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Penegakan Kepatuhan Bank

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan II-2019, rincian penanganan tindak pidana perbankan, sebagai berikut:

Tabel II - 1 ◇ Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan II-2019					
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
1. PKP yang diterima	-	7	-	14	7	14
2. PKP dalam proses analisis *)	-	2	-	5	2	5
3. PKP yang dikembalikan sebelum investigasi	1	2	4	3	3	7
4. PKP yang diinvestigasi *)	4	7	11	20	11	31
a. Persiapan dan/atau Proses Investigasi *)	1	2	3	4	3	7
b. Investigasi Selesai/Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK	3	4	8	15	7	23
c. Tindak Lanjut oleh Satker Pengawasan Bank	-	1	-	2	1	2
5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)	-	3	-	7	3	7

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber : OJK

Berdasarkan hasil pelimpahan, pada triwulan II-2019 terdapat tujuh kasus dugaan tipibank, di antaranya pada bidang perkreditan sebanyak tiga kasus, bidang pendanaan sebanyak dua kasus dan bidang penyalahgunaan aset sebanyak dua kasus.

Mengingat penyebab dugaan tipibank antara lain bersumber dari internal bank, manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan *independent review* oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

2. Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Selama triwulan II-2019 OJK memberikan keterangan ahli dan keterangan saksi dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 2 ◇ Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Saksi	Ahli	Total
1.	Polri	-	11	11
2.	Kejaksaan RI	2	2	4
3.	Penyidikan OJK	-	1	1
Total		2	14	16

Sumber : OJK

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

3. Sosialisasi

Dalam upaya peningkatan pemahaman mengenai peran OJK menangani dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, serta penerapan strategi anti *fraud*, pada triwulan II-2019 dilakukan sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan kepada industri perbankan (Bank Umum dan BPR) di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa di Universitas Nusa Cendana dan Universitas Katolik Widya Mandira.

B. Kelembagaan Bank Umum

Pada tahun 2019, OJK mengeluarkan kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu reformasi internal berupa percepatan perizinan perbankan termasuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari sebelumnya 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

1. Perizinan

Pada triwulan II-2019, telah diselesaikan 70 perizinan perubahan jaringan kantor Bank Umum di wilayah Jabodetabek, terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status bank, merger bank umum, dan pembukaan kantor perwakilan bank luar negeri di Indonesia. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 20 perizinan dan pemindahan alamat KCP sebanyak 17 perizinan.

Terdapat dua proses merger bank umum yang disetujui, yaitu: (i) merger Bank Nusantara Parahyangan ke dalam Bank Danamon Indonesia pada 25 April 2019, dan (ii) merger Bank OKE Indonesia ke dalam Bank Dinar Indonesia, Tbk pada 21 Juni 2019. Selain itu, terdapat pencabutan izin

usaha Kantor Cabang (KC) HSBC Limited di Jakarta pada 8 April 2019.

Tabel II - 3 ◇ Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum*

No.	Jenis Perizinan	Triwulan II-2019
1. Pembukaan Bank Umum		
a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	
b. Kantor Cabang (KC)	-	
c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	1	
d. Kantor Fungsional (KF)	-	
e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	
2 Penutupan Bank Umum		
a. Izin Usaha	-	
b. Kantor Perwakilan Bank Umum di luar Negeri	-	
c. Kantor Cabang (KC)	4	
d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	20	
e. Kantor Fungsional (KF)	-	
3. Pemindahan Alamat Bank Umum		
a. Kantor Pusat (KP)	1	
b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	
c. Kantor Cabang (KC)	2	
d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	17	
e. Kantor Fungsional (KF)	-	
f. Kantor Perwakilan Bank	-	
4. Perubahan Status Bank Umum		
a. Peningkatan Status		
- KP menjadi KC	6	
- KK menjadi KCP	12	
- KF menjadi KCP	-	
- KK menjadi KC	-	
b. Penurunan Status Bank Umum		
- KP menjadi KC	-	
- KC menjadi KCP	1	
- KCP ke KF/KK	3	
5. Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	-	
6. Perubahan Badan Hukum	-	
7. Merger Bank Umum	2	
8. Izin Bank Devisa	-	
9. Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	1	
Jumlah	70	

*J) Ket: Hanya mencakup perizinan perubahan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek

Sumber: OJK

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2019, jaringan kantor BUK berkurang 301 unit dari triwulan sebelumnya berjumlah 139.572 jaringan kantor menjadi 139.271 jaringan kantor.

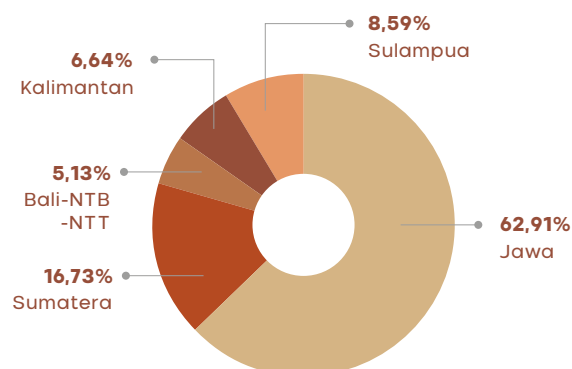
Tabel II - 4 ◇ Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

No.	Jaringan Kantor	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
1.	Kantor Pusat Operasional	48	47
2.	Kantor Pusat Non Operasional	53	52
3.	Kantor Cabang Bank Asing	9	8
4.	Kantor Wilayah	173	172
5.	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.888	2.865
6.	Kantor Cabang (Luar Negeri)	1	1
7.	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	25	25
8.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.158	16.001
9.	Kantor Kas	10.318	10.280
10.	Kantor Fungsional	1.111	1.062
11.	Payment Point	2.056	2.080
12.	Kas Keliling/ Kas Mobil/ Kas Terapung	1.420	1.424
13.	Kantor Dibawah KCP KCBA yang tidak termasuk 8, 9, 10*)	12	12
14.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	2	2
15.	ATM/ADM	105.298	105.240
Total		139.572	139.271

Sumber : LKPBU

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa. Secara umum, jaringan kantor menurun pada semua wilayah, dengan penurunan terbesar terdapat di wilayah Jawa yang berkurang sejumlah 222 jaringan kantor utamanya berupa pengurangan KCP sebanyak 87 kantor.

Grafik II - 1 ◇ Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber : LKPBU

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Pada triwulan II-2019, dari 139 pemohon terdapat 63 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 49 calon yang lulus sebagai PSP/PSPT, Dewan Komisaris, dan Direksi BUK, termasuk

calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, terdapat 17 permohonan yang tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Tabel II - 5 ◇ FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional

Pemohon FPT	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Tidak Ditindaklanjuti	Triwulan II-2019
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	2	-	2	-	2	6
Dewan Komisaris	23	2	13	4	9	51
Direksi	38	2	34	2	6	82
Total	63	4	49	6	17	139

Sumber: OJK

C. Kelembagaan BPR

1. Perizinan

Pada triwulan II-2019, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu proses merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- Proses Merger, yaitu pada:
 - PT BPR Cempaka Mitra Nagori Kuansing ke dalam PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera.
 - PT BPR Artha Selomanik Putra ke dalam PT BPR Arthanugraha Makmursejahtera.
 - PT BPR Rangkiang Denai ke dalam PT BPR Rangkiang Aur; dan
- Pencabutan Izin Usaha PT BPR Legian.

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2019, terdapat 1.581 BPR dengan 14.934 jaringan kantor. Dari 14.934 jaringan kantor tersebut, 6.295 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan 12 BPR dan 2 kantor BPR.

Tabel II - 6 ◇ Jaringan Kantor BPR Triwulan II-2019

Jaringan Kantor	2018	2019	
	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II
Kantor Pusat (KP)	1.603	1.593	1.581
Kantor Cabang (KC)	1.659	1.700	1.703
Kantor Kas (KK)	2.964	3.004	3.011
ATM	231	177	182
Payment Point	8.845	8.438	8.457
Total	15.302	14.912	14.934

Sumber: OJK

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

OJK melaksanakan FPT *New Entry* kepada 278 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 230 calon (82,73% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, sementara 48 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

Tabel II - 7 ◇ Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

Pemohon FPT	Triwulan II-2019		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	117	27	144
Komisaris	90	19	109
PSP	23	2	25
Jumlah	230	48	278

Sumber: OJK

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1. Pengawasan Transaksi Saham

OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut:

- Monitoring* terhadap 34 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar

Tabel II - 8 ◇ Pengawasan Transaksi Efek

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	6
2.	Saham disampaikan dalam bentuk <i>pointers</i>	6
3.	Saham telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	7
4.	Saham sedang dilakukan <i>monitoring</i>	15
Total		34

- b. Penelaahan terhadap delapan perdagangan saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Dari saham-saham tersebut, enam saham sedang dilakukan penelaahan, sementara dua saham telah ditingkatkan ke pemeriksaan teknis.
- c. Pemeriksaan teknis terhadap empat saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. Dari saham-saham tersebut, keseluruhannya telah selesai pemeriksaan dan dilimpahkan ke Unit Kerja Pemeriksaan Pasar Modal.

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

OJK melakukan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

- Review alert* pada bulan April, Mei dan Juni yang menghasilkan 8.911 *alert* Obligasi Pemerintah, 2.420 *alert* Obligasi Korporasi dan 543 *alert* waran. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap satu seri Waran, penelaahan terhadap tiga Obligasi Pemerintah, dan *monitoring* terhadap delapan seri Obligasi Pemerintah, enam seri Obligasi Korporasi dan tujuh seri Waran.
- Penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) bulan April dan Mei berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek masing-masing sebanyak 15 dan 12 partisipan.
- Penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) bulan April, Mei dan Juni 2019.

3. Pengawasan Self Regulatory Organization, Lembaga Penilai Harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

OJK dalam melakukan pengawasan terhadap Self Regulatory Organization (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara

Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) dengan melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:

- Penyampaian tanggapan atas Laporan Keuangan Tahunan Dana Jaminan (*audited*) tahun 2018.
- Pembentukan komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi KSEI masa jabatan tahun 2019-2022.
- Pembentukan komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Komisaris KPEI masa jabatan tahun 2019-2022.
- Penyampaian tanggapan atas pelaporan revisi anggaran BEI tahun 2019 untuk program kerja dukungan atas pendirian perusahaan efek daerah.
- Penyampaian tanggapan atas penyampaian usulan KPI unggulan PT BEI tahun 2019.

4. Pengawasan Perusahaan Efek

OJK melaksanakan beberapa kegiatan terkait pengawasan Perusahaan Efek sebagai berikut:

- Persetujuan 14 perubahan susunan direksi, 10 perubahan susunan komisaris, dan satu proses persetujuan perubahan pemegang saham.
- Persetujuan peningkatan modal disetor atas 2 Perusahaan Efek.
- Analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 124 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan II-2019 sebesar Rp23,86 triliun atau naik sebesar 0,50% dari rata-rata triwulan I-2019. Kenaikan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 106 Perusahaan Efek Anggota Bursa, semuanya memenuhi nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan.
- Analisis dan pemantauan atas 50 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 51 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan Penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek.
- Pemantauan laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPE) dalam triwulan II-2019 yaitu periode bulan Maret 2019 sampai dengan Mei 2019. Dalam periode tersebut, terdapat empat Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPE pada bulan Maret 2019, empat Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPE pada bulan April 2018, dan tiga Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPE pada bulan Mei 2019. Adapun Perusahaan Efek dimaksud yang merupakan Perusahaan Efek tidak aktif/suspen.

5. Pemeriksaan terhadap *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai Harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

OJK menyampaikan temuan hasil pemeriksaan setempat terhadap PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperiksa pada triwulan I-2019. Dari pemeriksaan tersebut, diperoleh 10 temuan hasil pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

- Satu temuan aspek edukasi dan pemasaran - dukungan asosiasi;
- Lima temuan aspek pencatatan efek; dan
- Empat temuan aspek keamanan informasi.

6. Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

OJK melakukan pemeriksaan setempat terhadap delapan Kantor Pusat Perusahaan Efek. Adapun fokus pemeriksaan adalah *Risk Based Approach* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (RBA APU-PPT). Pada periode ini juga telah dilakukan pendampingan pemeriksaan kepada pengawas kantor regional / kantor OJK terhadap enam kantor cabang Perusahaan Efek. Di samping itu, pada periode ini juga telah disampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap tiga Perusahaan Efek. OJK juga melaksanakan pemeriksaan kepatuhan khusus terhadap satu Perusahaan Efek.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap 12 kantor pusat MI, satu Perusahaan Efek sebagai APERD, tiga kantor pusat APERD, dan dua Bank Kustodian.

Terkait pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD, OJK telah menyelesaikan sebanyak empat LHP terkait Manajer Investasi, di mana enam masih dalam proses permintaan konfirmasi dan dua dalam tahap finalisasi. Terkait pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD, OJK telah menyelesaikan satu LHP sedangkan dua LHP dalam proses permintaan konfirmasi. Untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap Bank Kustodian, dua LHP masih dalam proses permintaan konfirmasi.

Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung oleh sistem *E-monitoring* yang digunakan OJK untuk melakukan kegiatan pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK masih terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem yang ada, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang andal dan terpercaya.

Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap

laporan bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan II-2019, terdapat dua MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan April dan Mei 2019.

Sementara itu, pada triwulan II-2019, terdapat satu MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD periode April 2019 dan dua MI yang terlambat pada periode Juni 2019.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik terkait aksi korporasi sebagai berikut:

Tabel II - 9 ◇ Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

No.	Aksi Korporasi	Triwulan II-2018	Triwulan II-2019
1.	Transaksi Afiliasi	35	36
2.	Transaksi Afiliasi Bersamaan Dengan Transaksi Material	1	1
3.	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	12	5
4.	Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	9	6
5.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	2	4
6.	Pembagian Saham Bonus	-	-
7.	Pembagian Dividen Berupa Kas	26	13
8.	Pembagian Dividen Saham	-	-
9.	Laporan <i>Buyback</i> Saham	-	8
10.	Laporan <i>Buyback</i> Saham Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis	-	-
11.	Pembelian Kembali Obligasi	-	-
12.	Penelaahan Terhadap Program ESOP/MSOP	-	1
13.	Penelaahan Atas Rencana Penggabungan Usaha	1	2
14.	Penelaahan Atas Penawaran Tender	-	1
15.	Penelaahan Atas Penawaran Tender Sukarela	-	-
16.	Penelaahan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	5	9
17.	Penelaahan <i>Go Private</i>	-	-

OJK juga melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala, sebagai berikut:

Tabel II - 10 ◇ Laporan Berkala

No.	Laporan Berkala	LKT 2018		LT 2018	
		EPP	%	EPP	%
1.	Tepat Waktu	611	85,8%	468	65,7%
2.	Terlambat	37	5,2%	70	9,8%
3.	Belum Menyampaikan	50	7%	160	22,5%
4.	Belum Wajib Menyampaikan	14	2%	14	2%

Berdasarkan pengawasan OJK selama triwulan II-2019 terdapat 155 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, di mana 131 laporan tepat waktu, dan 24 laporan terlambat. Selanjutnya, OJK melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 182 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 163 laporan hasil pemeringkatan efek, 230 hasil RUPS, serta delapan laporan penjatahan Penawaran Umum. OJK juga melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valuta asing oleh Emiten dan Perusahaan Publik sebanyak 441 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Sampai dengan triwulan II-2019 OJK melakukan penelaahan atas 39 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari lima laporan dari Akuntan, tujuh laporan dari Konsultan Hukum, satu laporan dari Penilai, satu laporan dari Notaris dan 25 laporan Perubahan Data ASPM.

OJK melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) dan pemetaan/*mapping* terhadap lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kepatuhan terhadap satu Perusahaan Pemeringkat Efek (PPE);
2. Pemeriksaan kepatuhan terhadap tiga Bank Kustodian (BK);
3. Pemetaan/*mapping* terhadap tiga Notaris Pasar Modal
4. Pemeriksaan kepatuhan terhadap satu Konsultan Hukum; dan
5. Sedang melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap satu Konsultan Hukum (KH) lainnya.

Dari kegiatan tersebut, LHP atas pemeriksaan kepatuhan PPE telah diselesaikan sementara LHP atas ketiga BK dan dua Konsultan Hukum dalam proses

penyusunan. Kemudian OJK juga menyelesaikan Laporan Hasil *Mapping* untuk tiga pemetaan Notaris, sementara satu pemetaan lainnya masih dalam proses penyusunan.

Terkait Pemeriksaan Kepatuhan Akuntan Publik Pasar Modal tahun 2019 akan dilakukan terhadap 12 KAP dan Pemeriksaan Insidentil terhadap dua AP dari dua KAP dengan ruang lingkup pemeriksaan yaitu pendalaman Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP. Sebanyak 10 Laporan Hasil Pemeriksaan telah direviu dan satu LHP Insidentil atas satu AP/KAP telah diselesaikan.

Selama triwulan II-2019, OJK telah melakukan penelaahan atas lima permohonan izin perorangan sebagai Ahli Syariah Pasar Modal. Pada triwulan II-2019, OJK telah mengeluarkan lima Surat Keputusan Izin ASPM.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Sampai dengan triwulan II-2019 OJK telah melaksanakan pemeriksaan Pasar Modal sebanyak 56 pemeriksaan yang terdiri dari tiga Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi, 20 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek, dan 33 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik.

Selain itu, terdapat satu pemeriksaan yang diteruskan kepada Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dengan dugaan pelanggaran antara lain ketentuan terkait Manipulasi Pasar.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

Selama triwulan II-2019, OJK telah menetapkan sebanyak 47 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 11 ◇ Sanksi Administratif Pasar Modal

Pelanggaran	Sanksi Administratif		
	Peringatan Tertulis	Denda	Pembekuan Izin
Keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman	6	28 dengan total denda sebesar Rp413.700.000	
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman	1	11 dengan total denda sebesar Rp1.025.000.000	1 Pembekuan Izin Wakil Perusahaan Efek kepada Perorangan
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.	-	-	
Total	7	39	1

Selain sanksi administratif, OJK juga menetapkan dua Perintah Tertulis untuk melakukan sesuatu kepada Perusahaan dan Kantor Akuntan Publik.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2018 dan 2019, selama triwulan II-2019 OJK menetapkan 12 Surat Teguran Pertama dan 33 Surat Teguran Kedua dan dua pelimpahan piutang macet ke PUPN terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak enam rekomendasi sanksi administratif, 14 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta lima rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode triwulan II-2019, OJK menindaklanjuti 27 Permohonan Keberatan di mana 17 Keberatan telah ditanggapi dan 10 Keberatan masih dalam proses.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Pada triwulan II-2019, OJK melakukan analisis terhadap delapan laporan keuangan berkala Perusahaan Perasuransian, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 12 ◇ Analisis Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Periode Laporan	Asuransi Jiwa	Asuransi Umum	Reasuransi	Asuransi Wajib
April 2019	5	4	-	-
Mei 2019	2	4	-	-
Juni 2019	2	2	-	-

2. Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan II-2019, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 Perusahaan Asuransi, yaitu lima Asuransi Jiwa dan tujuh Asuransi Umum dengan ruang lingkup mencakup operasional, dukungan dana, APU dan PPT, risiko strategi dan asuransi serta posisi aset dan liabilitas.

Terkait pemeriksaan tersebut OJK telah menerbitkan 12 LHP yang terdiri dari enam LHP Sementara dan enam LHP Final.

3. Pemantauan Tindak Lanjut, Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan II-2019, OJK telah melakukan 24 pengenaan sanksi, satu pencabutan sanksi dan 15 denda administrasi. Dari pengenaan sanksi tersebut, penyebab terbanyak adalah dikarenakan terlambat menyampaikan Laporan publikasi.

4. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan II-2019, OJK menindaklanjuti sebanyak 34 pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi.

5. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahan Cadangan

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Pada triwulan II-2019, OJK telah memproses 19 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan II-2019, OJK menerima 44 permohonan surat keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. Pengesahan Cadangan

Selama periode triwulan II-2019, terdapat 17 permohonan pengesahan cadangan premi dan satu pengesahan kenaikan cadangan teknis yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh permohonan tersebut telah ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun pada triwulan II-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 13 ◇ Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	April 2019	Mei 2019	Juni 2019	April 2019	Mei 2019	Juni 2019
Dana Pensiun Pemberi Kerja	203	200	195	2	5	10
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	25	23	22	0	2	3
Total	228	223	217	2	7	13

2. Pemeriksaan Langsung

Pada triwulan II-2019, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 11 Dana Pensiun, yaitu:

- Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera
- Dana Pensiun Nindya Karya
- Dana Pensiun Pegawai Rumah Sakit Budi Kemuliaan
- Dana Pensiun PT PLN (Persero)
- Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Dana Pensiun Mitra Krakatau
- Dana Pensiun Len Industri
- Dana Pensiun Ukhuwah UMI
- Dana Pensiun Bank Bukopin
- Dana Pensiun Pekerja Hotel Aryaduta Jakarta
- Dana Pensiun Hutama Karya

Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHP Sementara kepada Dana Pensiun yang diperiksa paling lambat 30 hari setelah pemeriksaan langsung berakhir. Selanjutnya, Dana Pensiun dapat memberikan tanggapan atas LHP Sementara tersebut paling lambat 15 hari kerja setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan sementara. Pemeriksa wajib menyampaikan LHP Final paling lambat 15 hari setelah diterimanya tanggapan dari Dana Pensiun tersebut. Pada triwulan II-2019, OJK telah menerbitkan 14 LHP Sementara (LHPS) dan 11 LHP Final (LHPF).

3. Pengenaan Sanksi

Pada triwulan II-2019, OJK telah mengenakan sanksi peringatan tertulis pertama kepada 15 Dana Pensiun, sanksi peringatan tertulis kedua kepada empat Dana Pensiun, sanksi peringatan tertulis ketiga kepada satu Dana Pensiun, teguran tertulis pertama kepada 15 Dana Pensiun, sanksi denda administrasi kepada 38 Dana Pensiun, dan pencabutan sanksi kepada empat Dana Pensiun.

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak sembilan laporan berkala yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode Maret-Mei 2019 dan enam laporan keuangan bulanan periode Maret-Mei 2019 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial. Selanjutnya, OJK melakukan audiensi terkait penyampaian dan format laporan keuangan semesteran pada bulan April dan Mei 2019.

D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. Analisis Laporan Berkala (*off-site supervision*)

Pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur untuk periode Maret-Mei 2019.

Tabel II - 14 ◇ Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Maret 2019	April 2019	Mei 2019	Maret 2019	April 2019	Mei 2019
LBPP	7	3	5	178	211	175
LBPMV	2	1	4	56	56	54
LBPPI	0	0	0	2	2	2

^{*)} LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan bulanan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap sembilan Lembaga Pembiayaan, yang terdiri dari tiga Perusahaan Pembiayaan dan enam Perusahaan Modal Ventura. Pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan dilakukan dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS).

Tabel II - 15 ◇ Pemeriksaan (*On-site Supervision*) Lembaga Pembiayaan

No.	Nama Perusahaan	Jenis
1.	Citra Mandiri Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
2.	Sarana Jateng Ventura	Perusahaan Modal Ventura
3.	Star Finance	Perusahaan Pembiayaan
4.	Rabana Finance	Perusahaan Modal Ventura
5.	Astra Mitra Ventura	Perusahaan Modal Ventura
6.	Celebes Artha Ventura	Perusahaan Modal Ventura
7.	Shakti Top Finance	Perusahaan Pembiayaan
8.	Sarana Bengkulu Ventura	Perusahaan Modal Ventura
9.	Sarana Jambi Ventura	Perusahaan Modal Ventura

Tabel II - 16 ◇ Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan

Kegiatan	Jumlah
LHPS telah dikirimkan	9
LHPF telah dikirimkan	10

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

OJK mengenakan 180 sanksi administratif terhadap lembaga pembiayaan yang terdiri dari sanksi peringatan pertama (SP 1), 24 sanksi peringatan kedua (SP 2), 30 sanksi peringatan ketiga (SP 3), dan 16 sanksi pembekuan kegiatan usaha.

4. Sosialisasi Fidusia

OJK melakukan sosialisasi Fidusia di Pontianak, Purwokerto, Samarinda, dan Bengkulu. Peserta kegiatan sosialisasi adalah pimpinan atau perwakilan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan. Sementara

itu, pihak-pihak yang terlibat terdiri dari OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM yang bertindak selaku narasumber.

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

1. Pemberian Izin Usaha LKM

Pada triwulan II-2019, OJK memberikan izin usaha sebanyak 14 izin usaha termasuk di dalamnya tiga izin usaha bersyarat. Sementara itu, terdapat 4 izin usaha LKM yang tidak berlaku kembali, sehingga sampai dengan triwulan II-2019 terdapat 185 LKM.

Tabel II - 17 ◇ Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha

No.	Nama LKM	Jenis Usaha	Asal Daerah
1.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah BWM Apik Kaliwungu Kendal	Syariah	Kabupaten Kendal
2.	Koperasi LKMS BWM Al Anshor Peduli	Syariah	Kota Ambon
3.	Koperasi LKMS BWM Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Masalahah	Syariah	Kabupaten Magelang
4.	Koperasi LKMA Mulya Jaya Sentosa	Konvensional	Kab. Tulang Bawang
5.	PT LKM Akhlakul Karimah	Konvensional	Kabupaten Cianjur
6.	Koperasi LKMS Kariman Birajuda Al Karimiyyah	Syariah	Kabupaten Sumenep
7.	PT LKM BKD Indramayu	Konvensional	Kabupaten Indramayu
8.	Koperasi LKMA Subur Lestari Sejahtera	Konvensional	Kabupaten Grobogan
9.	Koperasi LKM Lembah Sarang Olang	Konvensional	Kabupaten Lima Puluh Kota
10.	Koperasi LKMS Agribisnis Gapoktan Panampuang Prima	Syariah	Kabupaten Agam
11.	Koperasi LKMA PUAP Tri Argo Basuki	Konvensional	Kabupaten Purbalingga
12.	Koperasi LKMS BWM Ahmad Taqiuddin Mansur "ATQIA"	Syariah	Kabupaten Lombok Tengah
13.	PT LKM BKD Mandiri Cirebon	Konvensional	Kabupaten Cirebon
14.	PT LKM BKD Kabupaten Pekalongan	Konvensional	Kabupaten Pekalongan

2. Pendampingan Langsung Penyusunan Laporan Keuangan LKM

OJK melakukan pendampingan secara langsung dalam melakukan penyusunan laporan keuangan untuk melihat profil dan proses bisnis LKM. Selain itu, pendampingan juga dilakukan kepada LKM bermasalah seperti LKM yang memiliki NPL yang tinggi maupun LKM yang memiliki *fraud*.

Pada triwulan II-2019, OJK melakukan pendampingan LKM di 3 kota dengan mengikutsertakan 3 LKM, sebagai berikut:

Tabel II - 18 ◇ Pelaksanaan Pendampingan LKM

No.	Lokasi	Nama LKM
1.	Tangerang	PT LKM Artha Kertaraharja
2.	Deli Serdang	Koperasi LKMS Pondok pesantren Mawaridussalam
3.	Banda Aceh	PT LKMS Mahirah Muamalah

3. Pendirian LKM Syariah Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dalam membentuk LKM syariah, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BWM merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, pendirian BWM di lingkungan pesantren

diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah.

Pada triwulan II-2019, jumlah BWM terus meningkat menjadi 48 BWM. BWM yang diberikan izin selama triwulan II-2019 tersaji sebagai berikut:

Tabel II - 19 ◇ LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro)

No.	Nama LKM Syariah
1.	Koperasi LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal
2.	Koperasi LKMS BWM Al Anshor Peduli
3.	Koperasi LKMS BWM Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Masalahah
4.	Koperasi LKMS Kariman Birajuda Al Karimiyyah
5.	Koperasi LKMS BWM Ahmad Taqiuddin Mansur "ATQIA"

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan BWM, pada triwulan II-2019 OJK menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas pengelola BWM di Bogor, serta turut aktif menjadi narasumber dalam *workshop* audit internal BWM dalam rangka pengembangan BWM.

F. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

OJK melakukan pemeriksaan terhadap delapan Lembaga Keuangan Khusus yang terdiri dari satu Perusahaan Penjaminan dan tujuh Perusahaan

Pergadaian. Pemeriksaan langsung terhadap Lembaga Keuangan Khusus pada triwulan II-2019 sebagai berikut:

Tabel II - 20 ◇ Jumlah Pemeriksaan Langsung

No.	Nama Perusahaan
1.	Gadai Oke
2.	Koperasi Citra Bella Sarana
3.	Mari gadai
4.	PT Pondok Gadai
5.	PT Sahabat Gadai Sejati
6.	Dotri Gadai
7.	PT Jamkrida Banten
8.	PT Awi Gadai Jogja

Berdasarkan pemeriksaan langsung yang telah diselesaikan, telah diterbitkan 19 LHPS dan enam LHPF.

H. Pengawasan *Financial Technology (Fintech)*

Selama triwulan II-2019, OJK memberikan tanda terdaftar kepada 14 Penyelenggara *Fintech Lending* dan izin usaha kepada 6 penyelenggara *Fintech Lending*, sehingga jumlah penyelenggara *Fintech Lending* sampai dengan triwulan II-2019 adalah 106 penyelenggara terdaftar dan 7 penyelenggara berizin.

I. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

OJK menerima 1.384 permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB. Rincian permohonan perizinan

G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Sampai dengan triwulan II-2019, pengawasan atas perusahaan jasa penunjang yang telah beroperasi dilakukan dengan:

1. Pemeriksaan tematik terhadap 13 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB, yaitu sebanyak 17 pemeriksaan terhadap Perusahaan Pialang Asuransi, enam Perusahaan Pialang Reasuransi, dan dua Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi, serta terdapat pemeriksaan cabang terhadap tiga Perusahaan Pialang Asuransi;
2. Penerbitan 16 LHPS dan tiga LHPF berdasarkan pemeriksaan tahun 2019, serta satu LHPS dan 21 LHPF berdasarkan pemeriksaan tahun 2018;
3. Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan jasa penunjang sebanyak 90 sanksi yang terdiri dari 23 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), 12 Sanksi Peringatan Kedua (SP2), sembilan Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), 43 Sanksi Administratif berupa Denda, dan tiga Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) pada periode triwulan II-2019.

Dalam rangka penyempurnaan proses pendaftaran, perizinan, dan perubahan kepemilikan Penyelenggara *Fintech Lending*, OJK menetapkan *checklist* (daftar *self assessment*) pendaftaran, perizinan, dan perubahan kepemilikan versi bulan Mei 2019 berlaku bagi calon penyelenggara dan penyelenggara yang mengajukan pendaftaran/perizinan atau perubahan kepemilikan.

kelembagaan IKNB selama triwulan II-2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 21 ◇ Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai	Telah Dianalisis & Ditanggapi*)	Dalam Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Jumlah				
Pemberian Izin Usaha/ Pendaftaran	27	6	33	11	17	4	1
Pencabutan Izin Usaha	16	5	21	13	6	2	-
Likuidasi	28	5	33	9	17	7	-
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	24	4	28	7	17	-	4
Perubahan Kepemilikan/AD/ Modal/PS/PDP	190	61	251	102	135	11	3
Perubahan Nama	5	2	7	6	1	-	-
Kantor Cabang	220	147	367	305	39	21	2
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	459	204	663	641	21	1	-
Produk	529	347	876	743	111	22	-
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	507	259	766	440	166	57	103

Pelaporan Pengurus	195	186	381	302	71	8	-
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	89	51	140	140	-	-	-
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	54	67	121	99	10	12	-
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	57	40	97	85	-	12	-
Total	2.400	1.384	3.784	2.903	611	157	113

*) Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) atau masih proses analisis

1. Pemberian Izin Usaha/Pendaftaran

Pada periode triwulan II-2019, rincian pemberian izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 22 ◇ Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	2	-	2	1	1	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	2	-	2	-	1	-	1
Dana Pensiun	3	2	5	1	1	3	-
Perusahaan Pembiayaan	4	-	4	1	3	-	-
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	1	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian - Izin Usaha	14	4	18	6	11	-	-
Perusahaan Pergadaian - Pendaftaran	1	-	1	1	-	-	-
Total	27	6	33	11	17	4	1

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Tabel II - 23 ◇ Penetapan Izin IKNB

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	PT Gadai Dwijaya Utama	Perusahaan Pergadaian
2.	PT Rumah Titip Gadai	Perusahaan Pergadaian
3.	PT Rumah Gadai Jabar	Perusahaan Pergadaian
4.	PT Gadai Langgeng Jaya	Perusahaan Pergadaian
5.	PT Gadai Cahaya Dana Abadi	Perusahaan Pergadaian
6.	DPLK AXA Mandiri Financial Services	Dana Pensiun

2. Pencabutan Izin Usaha

OJK telah menerima lima permohonan pencabutan izin usaha IKNB yang terdiri dari satu permohonan pencabutan izin usaha Perusahaan Asuransi Umum

dan empat permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 24 ◇ Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	1	1	1	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	6	4	10	4	4	2	-
Perusahaan Pembiayaan	4	-	4	3	1	-	-
Perusahaan Modal Ventura	5	-	5	5	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	1	-	1	-	1	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-
Total	16	5	21	13	6	2	-

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Sampai dengan triwulan II-2019, jumlah IKNB konvensional adalah sebanyak 703 perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 25 ◇ Jumlah IKNB Konvensional

Jenis industri	Jumlah
I. Asuransi dan Reasuransi *	
1. Asuransi Jiwa	53
2. Asuransi Umum	74
3. Reasuransi	6
4. Penyelenggara Program Asuransi Sosial & BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	3
5. Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	2
Total Asuransi dan Reasuransi	138
II. Dana Pensiun	
1. DPPK PPIP	74
2. DPPK PPMP	163
3. DPLK	25
Total Dana Pensiun	262
III. Lembaga Pembiayaan*	
1. Perusahaan Pembiayaan	74
2. Modal Ventura	57
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2
Total Lembaga Pembiayaan	133
IV. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*	
1. Perusahaan Penjaminan	74
2. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan / PT SMF	1
3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / Indonesia Eximbank	1
4. Perusahaan Pegadaian / PT Pegadaian (Persero)- Izin usaha	22
5. Perusahaan Pegadaian –Pendaftaran	72
Total Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	170
TOTAL LJKNB (Konvensional)	703

3. Likuidasi

OJK menerima satu permohonan terkait proses likuidasi Perusahaan Asuransi Umum dan delapan permohonan terkait proses likuidasi Dana Pensiun.

Rincian proses likuidasi IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 26 ◇ Rekapitulasi Likuidasi IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi						
a. Proses Pembubaran	-	1	1	-	-	1
b. Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	1	-	1	-	-	1
c. Laporan Perkembangan Likuidasi	1	-	1	1	-	-
d. Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	-	-	-	-	-	-
Subtotal	2	1	3	1	-	2
Perusahaan Asuransi Jiwa						
a. Proses Pembubaran	-	-	-	-	-	-
b. Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	-	-	-	-	-	-
c. Laporan Perkembangan Likuidasi	1	-	1	-	-	1
d. Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	-	-	-	-	-	-
Subtotal	1	-	1	-	-	1
Dana Pensiun						
a. Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	15	1	16	7	8	1
b. Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	9	3	12	1	8	3
c. Persetujuan Perubahan Tim Likuidasi	1	-	1	-	1	-
Subtotal	25	4	29	8	17	4
Total	20	9	29	5	16	8

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

4. Pengambilalihan (Akuisisi)

OJK menerima satu permohonan peleburan Perusahaan Pembiayaan dan tiga permohonan pengambilalihan Perusahaan Asuransi Umum serta 24 permohonan pengambilalihan yang

merupakan *outstanding* dari periode sebelumnya. Rincian proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 27 ◇ Rekapitulasi Peleburan IKNB sampai dengan Triwulan II-2019

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	-	1	1	1	-	-	-
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	2	3	5	1	3	-	1
Perusahaan Asuransi Jiwa	2	-	2	-	2	-	-
Perusahaan Pembiayaan	17	-	17	5	10	-	2
Perusahaan Modal Ventura	3	-	3	-	2	-	1
Total	24	3	27	6	17	-	4

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

Permohonan penggabungan Perusahaan Pembiayaan yang telah disetujui yaitu untuk PT Verena Multifinance Tbk dan PT IJB Verena Finance dengan PT Verena Multifinance Tbk sebagai *surviving entity* berdasarkan surat nomor S-17/D.05/2019 tanggal 27 Juni 2019, sedangkan permohonan pengambilalihan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pembiayaan yang telah disetujui adalah PT Tez Capital Finance dan PT QBE General Insurance.

5. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP)

OJK menerima 61 permohonan/pelaporan terkait perubahan kepemilikan perusahaan/perubahan anggaran dasar/perubahan pemegang saham/perubahan PDP dari seluruh subsektor di IKNB dan 190 permohonan/pelaporan dari triwulan sebelumnya. Sampai dengan triwulan II-2019 telah diselesaikan 102 persetujuan/pencatatan/pengesahan sebagai berikut:

Tabel II - 28 ◇ Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	24	4	28	13	15	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	19	5	24	15	7	-	2
Dana Pensiun	54	13	67	19	46	2	-
Perusahaan Pembiayaan	53	24	77	28	40	8	1
Perusahaan Modal Ventura	31	10	41	17	23	1	-
Perusahaan Penjaminan	7	4	11	8	3	-	-
Perusahaan Pergadaian	1	1	2	2	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	1	-	1	-	1	-	-
Total	190	61	251	102	135	11	3

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

6. Perubahan Nama

OJK menerima dua pelaporan perubahan nama IKNB dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 29 ◇ Rekapitulasi Perubahan Nama

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	1	1	2	2	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	1	-	1	1	-	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	2	1	3	2	1	-	-
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	1	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-
Total	5	2	7	6	1	-	-

Pelaporan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh OJK, yaitu:

- PT Asuransi Jiwa Starinvestama (d/h PT Asuransi Jiwa Recapital);
- PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (d/h PT Asuransi Asoka Mas);
- PT BRI Ventura Investama (d/h PT Sarana NTT Ventura);
- PT Sejahtera Bahtera Finance (d/h PT Sejahtera Pertama Multifinance);
- PT Jtrust Olympindo Multi Finance (d/h PT Olympindo Multi Finance); dan

- PT Great Eastern General Insurance Indonesia (d/h PT QBE General Insurance Indonesia).

7. Kantor di Luar Kantor Pusat (Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran)

OJK menerima 147 pelaporan terkait kantor cabang yang terdiri dari delapan pelaporan kantor cabang Perusahaan Asuransi Umum, 121 pelaporan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan, 15 pelaporan kantor cabang Perusahaan Modal Ventura, dan tiga pelaporan kantor cabang Perusahaan Penjaminan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 30 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi							
- Pembukaan Kantor Cabang	6	-	6	4	-	-	2
- Penutupan Kantor Cabang	5	1	6	6	-	-	-
- Perubahan Alamat	15	6	21	19	2	-	-
- Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Pusat	2	1	3	2	-	1	-
Subtotal	28	8	36	31	2	1	2
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi							
- Pembukaan Kantor Cabang	-	-	-	-	-	-	-
- Penutupan Kantor Cabang	1	-	1	1	-	-	-
- Perubahan Alamat	-	-	-	-	-	-	-
- Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Pusat	4	-	4	4	-	-	-
Subtotal	5	-	5	5	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan							
- Pembukaan Kantor Cabang	35	34	69	52	9	8	-
- Penutupan Kantor Cabang	27	20	47	28	10	9	-
- Perubahan Alamat	90	67	157	139	15	3	-
Subtotal	152	121	273	219	34	20	-
Perusahaan Modal Ventura							
- Pembukaan Kantor Cabang	17	7	24	24	-	-	-
- Penutupan Kantor Cabang	2	1	3	2	1	-	-
- Perubahan Alamat	10	7	17	17	-	-	-
Subtotal	29	15	44	43	1	-	-
Perusahaan Modal Ventura							
- Pembukaan Kantor Cabang	1	-	1	1	-	-	-
- Penutupan Kantor Cabang	-	-	-	-	-	-	-
- Perubahan Alamat	5	3	8	6	2	-	-
Subtotal	6	3	9	7	2	-	-
Total	220	147	367	305	39	21	2

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Sementara itu, OJK menerima 204 pelaporan pembukaan, penutupan dan perubahan alamat kantor pemasaran Perusahaan Asuransi dan kantor

selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan. Rincian pelaporan kantor selain kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 31 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Kantor selain Kantor Cabang IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi						
- Pembukaan KLKP	26	8	34	32	2	-
- Penutupan KLKP	7	9	16	16	-	-
- Perubahan Alamat KLKP	25	3	28	27	1	-
- Perubahan Pimpinan KLKP	-	-	-	-	-	-
Subtotal	58	20	78	75	3	-
Perusahaan Asuransi Jiwa						
- Pembukaan KLKP	20	23	43	38	4	1
- Penutupan KLKP	17	8	25	25	-	-
- Perubahan Alamat KLKP	8	16	24	21	3	-
- Perubahan Pimpinan KLKP	1	-	1	1	-	-
Subtotal	46	47	93	85	7	1
Perusahaan Pembiayaan						
- Pembukaan KSKC	322	98	420	409	11	-
- Penutupan KSKC	12	17	29	29	-	-
- Perubahan Alamat KSKC	21	22	43	43	-	-
Subtotal	355	137	492	481	11	-
Total	459	204	663	641	21	1

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

8. Pelaporan/Persetujuan Produk dan Persetujuan

Bancassurance

Pada periode triwulan II-2019, terdapat 130 permohonan pelaporan/persetujuan produk Perusahaan Asuransi Umum dan 217 permohonan/

pelaporan produk Perusahaan Asuransi Jiwa. Rincian pelaporan/persetujuan produk disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 32 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Produk

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi						
- Pencatatan Nama Lain	3	1	4	4	-	-
- Pencatatan Perubahan Produk	18	11	29	26	1	2
- Pencatatan Produk Baru	21	9	30	25	5	-
- Persetujuan <i>Bancassurance</i>	38	32	70	70	-	-
- Persetujuan Perubahan Produk	2	1	3	2	1	-
- Persetujuan Produk Baru	128	75	203	159	34	10
- Persetujuan ASO	-	1	1	-	1	-
Subtotal	210	130	340	286	42	12
Perusahaan Asuransi Jiwa						
- Pencatatan Nama Lain	5	11	16	15	1	-
- Pencatatan Perubahan Produk	88	64	152	138	10	4
- Pencatatan Produk Baru	-	-	-	-	-	-
- Persetujuan <i>Bancassurance</i>	60	45	105	105	-	-
- Persetujuan Perubahan Produk	21	27	48	30	16	2
- Persetujuan Produk Baru	142	60	202	166	32	4
- Persetujuan ASO	3	10	13	3	10	-
Subtotal	319	217	536	457	69	10
Total	529	347	876	743	111	22

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

**) Harus memperoleh persetujuan dari OJK dengan persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan POJK nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

9. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

OJK menerima 259 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) disertai dengan 507 yang merupakan *outstanding* dari triwulan

sebelumnya. Rincian PKK bagi pihak utama IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 33 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	72	35	107	76	4	27	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	75	31	106	86	9	11	-
Dana Pensiun	122	45	167	131	36	-	-
Perusahaan Pembiayaan	159	74	233	109	56	5	63
Perusahaan Penjaminan	22	7	29	14	6	1	8
Perusahaan Modal Ventura	48	49	97	23	44	9	21
Perusahaan Pergadaian	9	18	27	1	11	4	11
Total	507	259	766	440	166	57	103

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Dari sejumlah 440 permohonan PKK yang telah diselesaikan, terdapat 377 permohonan yang telah ditetapkan hasilnya terdiri dari 142 komisaris/dewan

pengawas, 193 direksi/pengurus, 14 pemegang saham pengendali, 13 aktuaris, dan 15 auditor internal.

10. Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB

OJK menerima 186 pelaporan perubahan pengurus IKNB, disertai dengan sebanyak 195 pelaporan yang merupakan *outstanding* dari triwulan sebelumnya. Berdasarkan jumlah dimaksud, sebanyak 302

pelaporan telah dicatat dan sebanyak 79 sisanya telah ditanggapi dan dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 34 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	22	26	48	35	8	5	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	25	24	49	46	-	3	-
Dana Pensiun	108	81	189	126	63	-	-
Perusahaan Pembiayaan	29	42	71	71	-	-	10
Perusahaan Modal Ventura	9	8	17	17	-	-	3
Perusahaan Penjaminan	2	5	7	7	-	-	8
Total	195	186	381	302	71	8	24

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

11. Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

Pada triwulan II-2019, terdapat 51 pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB disertai dengan sebanyak 89 pelaporan yang merupakan

outstanding dari triwulan I-2019. Rincian pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 35 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	86	14	100	100	-	-
Perusahaan Pembiayaan	3	37	40	40	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-
Total	89	51	140	140	-	-

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

12. Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal

Selama triwulan II-2019, terdapat 67 pelaporan tenaga ahli, aktuaris dan auditor internal yang seluruhnya merupakan tenaga ahli dari perusahaan

asuransi umum dan jiwa. Rincian pelaporan aktuaris dan auditor internal dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 36 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi						
- Tenaga Ahli dan Aktuaris	19	41	60	45	9	6
- Auditor Internal	7	3	10	7	-	3
Perusahaan Asuransi Jiwa						
- Tenaga Ahli dan Aktuaris	19	17	36	34	1	1
- Auditor Internal	9	6	15	13	-	2
Total	54	67	121	99	10	12

*j) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

13. Pelaporan Tenaga Kerja Asing

OJK menerima 40 pelaporan penggunaan tenaga kerja asing dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Modal Ventura, serta terdapat 57 pelaporan yang merupakan

outstanding dari periode sebelumnya. Adapun rincian pelaporan tenaga kerja asing dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 37 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding s.d. Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	11	12	23	20	-	3
Perusahaan Asuransi Jiwa	35	15	50	41	-	9
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	11	12	23	23	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	1	1	1	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-
Total	57	40	97	85	-	12

*j) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

14. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

OJK menerima permohonan terkait Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II - 38 ◇ Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Layanan	Permohonan Triwulan II-2019	Outstanding Triwulan II-2019	Status			
				Selesai	Proses*	Batal	Pengembalian Dokumen**
1.	Pemberian Izin Usaha	2	1	1	0	0	2
2.	Perubahan Nama	1	1	1	1	0	0
3.	Perubahan Kepemilikan	8	43	3	46	1	1
4.	Penambahan Modal	3	12	2	12	1	0
5.	Perubahan Pengurus	28	69	27	64	4	2
6.	Perubahan Alamat	4	15	1	16	0	2
7.	Pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan	2	7	4	3	1	1
8.	Pendaftaran Tenaga Ahli	15	31	12	31	2	1
9.	Pendaftaran Pialang Asuransi	17	15	17	14	0	1
10.	Pendaftaran Pialang Reasuransi	1	1	1	1	0	0
11.	Rekomendasi Tenaga Kerja Asing	2	0	1	1	0	0

*) Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) atau masih proses analisis

**) Pengembalian dokumen dilakukan apabila dokumen yang disampaikan pihak pemohon (perusahaan) belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dan harus dilengkapi secara benar jika permohonan ingin diproses

Pada periode pelaporan terdapat penambahan jumlah profesi terdaftar, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II - 39 ◇ Pendaftaran Profesi sampai dengan Triwulan II-2019

Jenis Profesi	Jumlah Profesi yang Terdaftar pada triwulan II-2019	Total Jumlah Profesi Terdaftar
Akuntan Publik	12	408
Konsultan Aktuaria	-	31
Penilai	13	172
Total	26	611

Selain itu terdapat penambahan jumlah agen terdaftar di OJK sehingga berdasarkan data laporan

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), jumlah Agen Asuransi Perseorangan bertambah sebanyak 10 orang.

Tabel II - 40 ◇ Pendaftaran Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Jenis Profesi	Jumlah Agen Terdaftar sampai dengan Triwulan II-2019
Agen Asuransi Perseorangan	
- Asuransi Umum	20.116
- Asuransi Jiwa	603.605
Agen Asuransi Berbadan Hukum	6
Agen Penjamin Perseorangan	59
Agen Penjamin Berbadan Hukum	50

2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan II-2019, mencakup antara lain:

1. Perumusan tools pengawasan berbasis Teknologi Informasi, berupa aplikasi OJK-BOX dan *Condensed Report* guna memberikan gambaran kondisi bank secara lebih dini kepada pengawas;
2. Penyusunan pedoman koordinasi untuk internal Pengawas Bank dengan satuan kerja yang memiliki fungsi investigasi Bank dalam menindaklanjuti penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank.

Selain itu, OJK juga memperkuat metode pengawasan bank umum terkait APU dan PPT dalam rangka menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) yang akan dilaksanakan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) atas rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Indonesia.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pada triwulan II-2019, kegiatan pengembangan pengawasan BPR dan/atau BPRS yang telah dilakukan meliputi:

1. Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU dan PPT berdasarkan Risiko bagi BPR dan BPRS. Pedoman ini bertujuan untuk menyeragamkan kertas kerja penilaian tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta memberikan acuan bagi Pengawas BPR dan BPRS dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan berbasis risiko.
2. Finalisasi pengembangan Sistem Informasi Pengawasan BPR (SIP BPR) untuk modul perencanaan pengawasan BPR berdasarkan risiko.
3. Penyusunan dan pengkinian Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan BPR. SPO dimaksud ditujukan sebagai petunjuk teknis bagi Pengawas BPR. Proses penyusunan dan pengkinian SPO akan dilakukan secara bertahap, mencakup:
 - a. SPO Ketentuan Laporan Bulanan BPR, Laporan Publikasi BPR, Laporan Tahunan BPR;
 - b. SPO Rencana Bisnis BPR; dan
 - c. Penyusunan dan pembahasan rancangan SPO dimaksud dengan pengawas dan satuan kerja terkait.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

A. Kajian Pasar Modal

1. Kajian *Code of Conduct* Perusahaan Pemeringkat Efek tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek

Kajian ini membahas mengenai kecukupan dan kesesuaian *Code of Conduct* yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek di Indonesia dengan *IOSCO Code of Conduct Fundamentals Credit Rating Agency* tahun 2015, *IOSCO Statement of Principles regarding the Activities of Credit Rating Agencies*, dan *Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation: Principle 22* dan aplikasinya dalam praktik bisnis pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

2. Kajian *Gap Analysis* Ketentuan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE)

Kajian ini merupakan komitmen OJK atas revisi yang perlu dilakukan pada PAPE yaitu terkait perubahan sebelum revisi PAPE secara keseluruhan. Kajian usulan perubahan PAPE tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan mengingat ruang lingkup pengaturan PAPE yang cukup luas, antara lain mencakup:

- a. Kajian perubahan PAPE terkait Akuntansi Manajer Investasi, dan
- b. Kajian *gap analysis* ketentuan PAPE Bab 3 tentang Akuntansi Perantara Pedagang Efek

3. Kajian Pemahaman XBRL (*Extensible Business Reporting Language*)

Sejak 2015, penerapan XBRL telah dimanfaatkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sistem pelaporan keuangan oleh Emiten yang terdaftar di BEI. Terkait inisiatif untuk pengembangan implementasi XBRL di masa yang akan datang pada pelaporan Emiten dan Perusahaan Publik, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian awal pemahaman tentang XBRL. Kajian ini ditujukan untuk memahami bagaimana XBRL mengubah format pelaporan keuangan, menelaah fitur-fitur yang dimiliki oleh XBRL, mencari tahu cara membuat XBRL yang sesuai dengan kebutuhan, menetapkan alasan untuk menggunakan XBRL, dan menjembatani kesenjangan informasi antara sistem bisnis yang telah ada.

4. Kajian Akuntan Publik dalam Rangka Perlindungan Investor Reksa Dana

Mengingat lemahnya posisi investor dalam mengetahui validitas NAB, NAB yang ditransaksikan dan Informasi dalam *fund fact sheet* maka perlu dikaji apakah diperlukan peran pihak yang independen agar kebenaran informasi tersebut lebih dapat dipercaya. Adapun tujuan kajian tersebut adalah:

- a. Memperoleh informasi dari investor Reksa Dana terkait :
 - 1) Informasi yang dibutuhkan investor dalam pengambilan keputusan investasi,
 - 2) Area-area dalam setiap industri Reksa Dana yang paling memerlukan pengawasan, dan
 - 3) Informasi penting menurut investor yang memerlukan keterlibatan Akuntan Publik.
- b. Mengidentifikasi peraturan keterbukaan informasi dan keterlibatan Akuntan Publik dalam Reksa Dana di Indonesia dengan negara pembanding (USA, UK, Hong Kong)

5. Kajian Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dengan Adopsi IFRS Secara Penuh

Kajian ini sesuai dengan wacana Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) untuk menambah pilar standar akuntansi yaitu SAK *Full IFRS*. SAK *Full IFRS* adalah SAK berbasis IFRS tanpa adanya *gap* waktu, penyesuaian dengan kondisi di Indonesia, serta SAK non-IFRS dan SAK Syariah. Dalam rangka menanggapi wacana DSAK IAI tersebut, perlu adanya suatu kajian untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam menerapkan SAK *Full IFRS*, terutama dari sisi regulator. Terdapat tiga tujuan dalam penyusunan kajian ini, yaitu:

- a. Melakukan *gap analysis* SAK dengan IAS/IFRS;
- b. Melakukan perbandingan penerapan IAS/IFRS di negara lain; dan
- c. Pemetaan perusahaan di Indonesia yang berpotensi menggunakan SAK *Full IFRS*.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)

Pada triwulan II-2019, OJK melaksanakan sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di Surabaya dan Bandung dengan rangkaian kegiatan mencakup Sosialisasi Obligasi Daerah dan PED kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, OJK Pasar Modal mengajar, Seminar Investasi Pasar Modal, *Class visit* SPM, *Talkshow* radio, *Business Meeting* dengan calon emiten potensial, *Talkshow* Wakaf Saham sebagai Wakaf produktif di Indonesia, *Media Gathering/press conference*, *Opening Ceremony Capital Market Summit & Expo* 2019, Audiensi OJK dengan Gubernur, Seminar PED, Simulasi, Wakaf Saham dan Notasi Khusus, *Workshop Go Public*, Seminar Cerdas Berinvestasi di Pasar Modal, *J-Talks (Talkshow* Investasi bersama Jouska), *Closing Ceremony Capital Market Summit & Expo* 2019, dan Arah Kebijakan Pasar Modal 2019.

Selain itu, OJK juga melakukan sosialisasi peraturan Pasar Modal, antara lain POJK Nomor 37/POJK.04/2018

tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) dalam Forum Koordinasi Inklusi Keuangan (FKIK) OJK Triwulan II-2019 dan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Surabaya dan Jakarta.

C. Penguatan Infrastruktur Pasar Modal

Dalam rangka pembenahan untuk memperkuat performa Pasar Modal, OJK bersama SRO menginisiasi pengembangan infrastruktur Pasar Modal, yaitu:

1) Pengembangan Infrastruktur Pasar Repo - *Tri Party Repo*

Pengembangan sistem *third party* repo bertujuan untuk mengembangkan model bisnis dan sistem repo yang efektif dan efisien serta dapat diaplikasikan oleh pelaku pasar. KPEI sebagai *third party* menyediakan layanan *back-office* atas transaksi repo yang sudah dilakukan para partisipan dalam pengelolaan agunan, *mark to market* dan *margin management*. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara OJK-SRO, dapat ditetapkan bahwa:

- a) Sistem telah *live* dan memasuki tahap implementasi bisnis, yaitu sosialisasi ke pelaku untuk pemanfaatan sistem *Triparty* Repo
- b) Anggota Kliring yang akan menggunakan sistem *triparty* dalam tahap pengujian sebagai partisipan (*workshop*, pemenuhan administrasi)

2) Dukungan Pendirian Perusahaan Efek Daerah (PED)

Dalam rangka mendukung program pendirian PED, telah disusun kajian mekanisme bisnis SRO guna mendukung pembentukan serta operasional PED. Saat ini telah dilakukan pembuatan kajian infrastruktur PED, sosialisasi kepada pihak terkait, FGD terkait konsep PED, pengembangan infrastruktur, serta pengembangan BOFIS PED untuk membahas kesiapan Sponsor PED.

3) *Electronic Book Building*

Dalam rangka Meningkatkan kemudahan akses investor untuk berpartisipasi dalam Pasar Perdana baik dalam pembentukan harga maupun Penawaran Umum; Meningkatkan kepercayaan investor terhadap proses Penawaran Umum dan harga IPO yang telah ditetapkan serta Memperluas partisipasi Perusahaan Efek sebagai *selling agent* dalam proses Penawaran Umum maka di inisiasi

proyek *Electronic Book Building*. Adapun progress pengembangan sampai saat ini yaitu telah dilakukan finalisasi RPOJK EBB dan RSE OJK EBB IPO Saham serta penyusunan konsep *User manual* dan perjanjian SLA dengan SRO.

4) Sistem Penyampaian Dokumen Pencatatan Secara Elektronik (E-Registration)

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan kecepatan dalam proses evaluasi Penawaran Umum dan Pencatatan serta kebutuhan untuk memudahkan akses penyampaian dokumen yang relatif sejenis, OJK menginisiasi sistem yang dapat digunakan oleh Calon Emiten dan *Underwriter* dalam melakukan penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK dan Permohonan Pencatatan kepada BEI satu pintu dan terintegrasi dalam sistem SPRINT OJK. Adapun target *live* mekanisme penyampaian tersebut adalah pada Juni 2019 dan sampai periode pelaporan, OJK masih melakukan proses sosialisasi kepada *Underwriter*, Anggota Bursa, dan Emiten.

5) Pengembangan Notasi Khusus

Dalam rangka menyajikan keterbukaan informasi Perusahaan Tercatat yang perlu mendapat perhatian bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi, OJK menginisiasi peningkatan *awareness* dan pemahaman investor melalui informasi notasi khusus. Hingga periode pelaporan progres sistem dan peraturan telah rampung dan sosialisasi telah dilakukan secara efektif untuk mendukung implementasi.

6) Pengembangan Produk Derivatif 2019

a) Structured Warrant

Dalam rangka mendukung aktifnya perdagangan *equity warrant* di Bursa telah dikembangkan produk *Structured Warrant* untuk menambah instrument investasi dengan target investor ritel. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan basis investor serta menambah alternatif produk investasi dan sarana diversifikasi bagi investor. *Output project* ini adalah tersedianya peraturan pencatatan, keanggotaan dan perdagangan, serta sistem perdagangan *structured warrant* dengan *cash settlement*. Sampai periode laporan telah dilakukan penyusunan *business requirement* dan tengah dilakukan penyusunan *technical requirement* terkait *structured warrant*.

b) IDX 30 Futures

Berdasarkan hasil evaluasi atas produk derivatif yang ada saat ini, Bursa akan mengeluarkan produk *IDX30 Futures* dengan beberapa perbaikan spesifikasi produk dan mekanisme perdagangan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan derivatif di Bursa. Program ini bertujuan selain sebagai Sarana lindung nilai portofolio atas pergerakan harga Index 30 di

Pasar Sekunder juga untuk menambah alternatif produk investasi dan sarana diversifikasi. *Output* program ini tersedianya peraturan perdagangan dan sistem perdagangan *IDX30 Futures* dengan *cash settlement*. Sampai periode laporan telah dilakukan penyusunan *business requirement* dan tengah dilakukan penyusunan *technical requirement* terkait *IDX 30 Futures*.

c) Single Stock Futures

Program *Single Stock Futures* diinisiasi atas kebutuhan Investor akan sarana lindung nilai terhadap pergerakan harga saham di Pasar Sekunder, menambah alternatif produk investasi dan sarana diversifikasi. *Output* program ini tersedianya peraturan perdagangan, dan sistem perdagangan *Single Stock Futures* dengan *cash settlement*. Sampai periode laporan telah dilakukan penyusunan *business requirement* dan tengah dilakukan penyusunan *technical requirement* terkait *Single Stock Futures*.

2.3.3 Pengembangan IKNB

A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK dengan tujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaris keahlian khusus asuransi umum. Pada triwulan II-2019, OJK melakukan rekapitulasi atas laporan kegiatan Program 1000 Aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), Jasindo Insurance Academy (JIA), dan Tim READI dalam rangka penyusunan laporan kegiatan Program 1000 Aktuaris tahun 2018. Jumlah aktuaris mengalami kenaikan sejumlah 17 orang, sehingga sampai dengan triwulan II-2019 terdapat 602 aktuaris yang terdiri dari 306 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan 296 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*).

B. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi (SKKNI)

Dalam rangka mendukung penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dibentuk suatu Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian. Adapun kegiatan

yang telah dilakukan terkait SKKNI selama triwulan II-2019, yaitu melakukan koordinasi terkait penyusunan SKKNI Bidang Perasuransian.

2.3.4 Inovasi Keuangan Digital

Pada triwulan II-2019, OJK melaksanakan FGD Forum Panel untuk 28 IKD yang telah mengajukan permohonan pencatatan pada *batch* 2. Dalam forum panel ini telah dilakukan pengkajian awal terkait model bisnis dari setiap IKD untuk menentukan proses maupun status selanjutnya dari IKD yang mengajukan pencatatan diri tersebut. Dari hasil FGD forum panel tersebut ditetapkan 14 IKD mendapatkan status tercatat di OJK.

Disisi lain, 34 IKD yang telah mendapat status tercatat pada *batch* 1 telah memasuki proses *regulatory sandbox* (RS) dengan 23 IKD menjadi sampel uji coba RS. Tahapan awal RS adalah penyusunan skenario pengujian 12 klaster model bisnis IKD yang meliputi aspek Legal, Model dan Proses Bisnis, Teknologi Informasi, Manajemen Risiko, Perlindungan Data dan Konsumen, Rencana Bisnis, dan APU PPT.

Selain itu, pada triwulan II 2019 tercatat terdapat 62 penyelenggara IKD melakukan konsultasi di OJK Infinity. Untuk memfasilitasi hal tersebut, OJK melaksanakan *Knowledge Sharing* dengan tema "*Fintech Business Life Cycle*" dan "*Implementasi Blockchain Pada Layanan Keuangan Digital*". Peserta *Knowledge Sharing* dihadiri oleh para anggota Forum Panel IKD dan perwakilan satker di OJK dengan peserta lebih dari 100 orang.

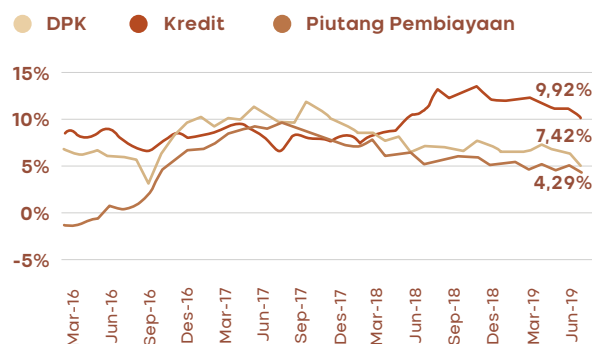
2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Stabilitas sistem keuangan masih terjaga di triwulan II-2019, didukung oleh kinerja industri jasa keuangan yang stabil, solvabilitas yang tinggi, dan tingkat risiko yang terkendali. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan, OJK senantiasa memantau dinamika perekonomian dan pasar keuangan global secara berkala dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Kinerja fungsi intermediasi industri jasa keuangan terpantau stabil. Kredit perbankan tumbuh sebesar 9,92% (yoy). Sebagian besar pendanaan kredit bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 7,42% (yoy). Sementara itu, piutang pembiayaan tumbuh moderat sebesar 4,29% (yoy).

Grafik II - 2 ◆ Kinerja Intermediasi IJK

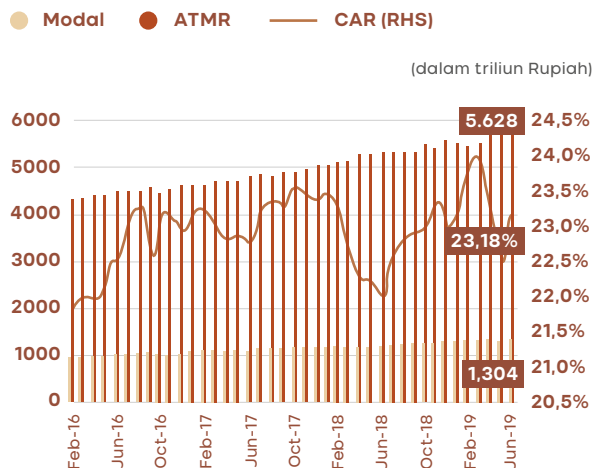


Sumber: OJK

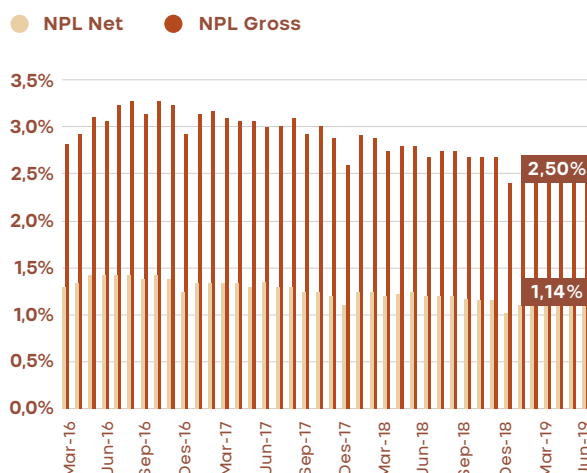
Pemanfaatan pasar modal Indonesia sebagai sumber pendanaan korporasi domestik masih terpantau positif. Sejak awal tahun 2019, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp104,3 triliun (ytd) yang berasal dari 29 emiten baru.

Pasar keuangan terus melanjutkan penguatan dari triwulan I-2019. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 6.358,63 (-1,70% *qtoq*) di akhir triwulan. Yield Surat Berharga Negara (SBN) tercatat turun rata-rata 20,1 *bps*, dengan penurunan terbesar berasal dari yield tenor jangka menengah sebesar 32,1 *bps*. Yield tenor jangka pendek dan panjang masing-masing turun sebesar 9,6 *bps* dan 19,1 *bps*. Performa pasar keuangan yang positif ini sejalan dengan *net buy* investor non residen di pasar saham dan SBN masing-masing sebesar Rp56,67 triliun dan Rp21,63 triliun.

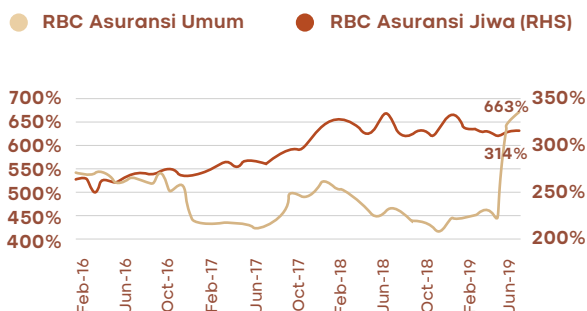
Daya tahan sektor jasa keuangan terhadap potensi peningkatan risiko ke depan dinilai masih kuat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan, *Risk-Based Capital* (RBC) perasuransian, dan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang berada di atas ketentuan minimum. CAR perbankan per Juni 2019 tercatat stabil sebesar 23,18%. Sementara itu, RBC industri asuransi umum dan asuransi jiwa di Juni 2019 tercatat masing-masing sebesar 313,5% dan 663%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di Juni 2019 tercatat sebesar 2,83 kali. Angka tersebut memang terpantau turun dibandingkan rata-rata historis tahun 2017 dan 2018. Namun demikian, *gearing ratio* terpantau stabil sepanjang tahun 2019 dan masih berada di atas ketentuan batas normal. Dengan demikian, masih terdapat ruang bagi industri jasa keuangan untuk tumbuh lebih lanjut.

Grafik II - 3 ◇ CAR Perbankan

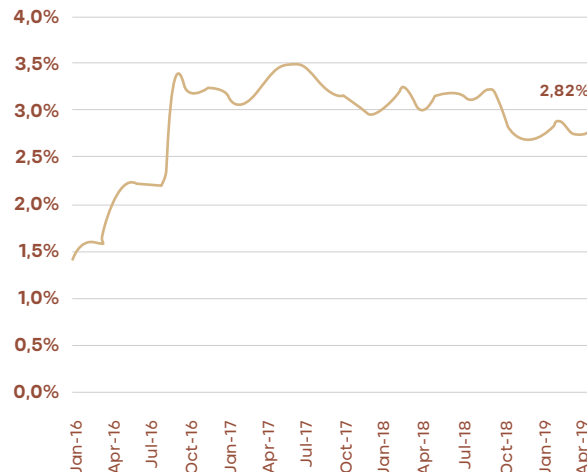
Sumber: OJK

Grafik II - 6 ◇ Rasio NPL Perbankan

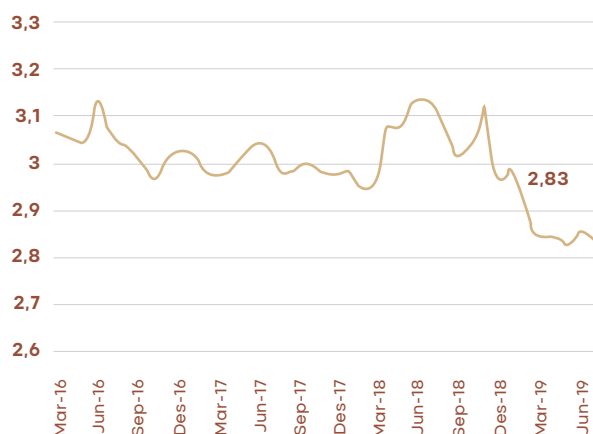
Sumber: OJK

Grafik II - 4 ◇ RBC Industri Perasuransian

Sumber: OJK

Grafik II - 7 ◇ Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan

Sumber: OJK

Grafik II - 5 ◇ Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan

Sumber: OJK

Risiko kredit industri jasa keuangan terpantau masih rendah. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) gross dan net perbankan per Juni 2019 tercatat masing-masing sebesar 2,50% dan 1,14%. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan stabil di 2,82%. Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang terkendali.

Risiko likuiditas dan risiko pasar industri jasa keuangan dinilai masih rendah. Rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) tercatat sebesar 90,09% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 19,05%, pada periode Juni 2019. Tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan tercatat di 94,28%. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga dinilai masih rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang masih rendah di tingkat 2,04%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, nilai investasi industri, perasuransian, dan dana pensiun menunjukkan peningkatan. Nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun masing-masing naik 1,96% (*qtq*) dan 2,30% (*qtq*).

Stabilitas sistem keuangan Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara berkembang lainnya. Pertumbuhan kredit perbankan masih berada di atas

rata-rata *peer group*, dengan pertumbuhan DPK yang masih mampu menopang pertumbuhan kredit. Risiko kredit masih berada pada level yang terkendali dengan tingkat solvabilitas masih menjadi yang

tertinggi dibandingkan negara lainnya. Selain itu, risiko pasar perbankan Indonesia merupakan yang terkecil sehingga relatif lebih tahan terhadap tekanan nilai tukar dibandingkan dengan negara lainnya.

Tabel II - 41 ◇ Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang

EMs	Kredit (% yoy)	DPK (% yoy)	NPL %	PDN %	CAR %
Indonesia	9,32	7,42	2,50	2,04	23,18
Malaysia	4,56	5,46	1,46	9,39	18,01
Thailand	0,55	3,42	2,95	N.A.	18,22
Filipina	10,57	6,22	2,06	4,52	15,44
Vietnam	13,46	10,42	1,91	N.A.	11,79

Sumber: OJK, CEIC

2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK akan terus memantau dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta dampaknya terhadap kinerja dan stabilitas sektor jasa keuangan nasional secara berkala. Selain itu, OJK akan terus mengambil *policy measures* yang tepat dan memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memitigasi dampak tekanan volatilitas global di domestik.

Dengan masih tingginya risiko di pasar keuangan, OJK akan terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya kegiatan operasional yang berkaitan dengan risiko pasar dan risiko likuiditas. Selanjutnya, sebagai implementasi mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK juga terus memutakhirkan daftar bank sistemik yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Di samping memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga, OJK juga mengarahkan agar sektor jasa keuangan berperan semakin signifikan dalam upaya mempersempit defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan. OJK juga akan melanjutkan inisiatif pendalaman pasar keuangan dalam upaya memperkuat ketahanan pasar domestik.

2.4.3 Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). UU PPKSK telah mengamankan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan. Selama triwulan II-2019, telah dilaksanakan Rapat KSSK dan dihadiri oleh keempat lembaga

anggota KSSK, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan hasil pemantauan lembaga-lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan selama triwulan II-2019, KSSK menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional terjaga dengan baik.

2.5 KEBIJAKAN SEKTOR JASA KEUANGAN TERINTEGRASI

2.5.1 Pengembangan Sektor Prioritas

A. OJK memberikan insentif bagi SJK untuk menyalurkan pembiayaan ke industri berorientasi ekspor, penghasil barang substitusi impor, pariwisata dan perumahan melalui penerbitan regulasi sebagai berikut:

1. Sektor Perumahan

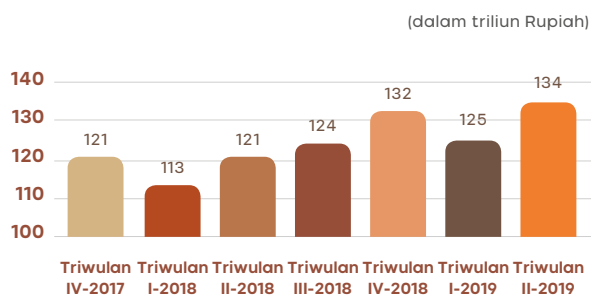
- SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 mengenai ATMR Risiko Kredit
- POJK Nomor 14/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa
- SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah
- POJK Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- e. POJK Nomor 16/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah

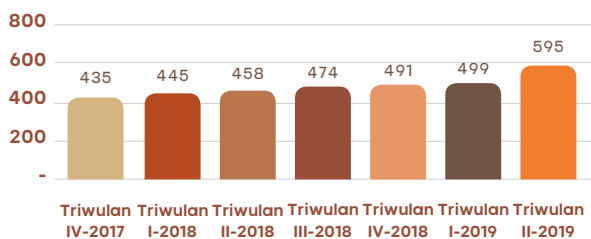
2. Sektor Pariwisata

- a. POJK Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa
- b. POJK Nomor 7/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank
- B. OJK memberikan insentif bagi lembaga pembiayaan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 86 untuk menyalurkan pembiayaan minimal 10% ke sektor produktif (modal kerja dan investasi)
- C. OJK menyediakan alternatif sumber pendanaan dari masyarakat pemodal berbasis ekuitas (saham) dengan memanfaatkan teknologi informasi. POJK Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)
- D. Relaksasi peraturan yang berpotensi menahan dana repatriasi *tax amnesty*
Revisi POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Reksa Dana Penyertaan Terbatas. *Key point* Revisi POJK RDPT:
1. Investasi RDPT dapat dilakukan dalam mata uang asing maupun Rupiah
 2. Nilai minimum investasi per investor Rp 1 miliar
 3. Bersifat tertutup (*close-end fund*) dan memiliki *holding period*;
 4. Dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang Penawaran Umum atau pun Non Penawaran Umum, dan Efek Bersifat Ekuitas perusahaan tertutup
 5. Dapat berinvestasi pada instrumen *hedging* mata uang

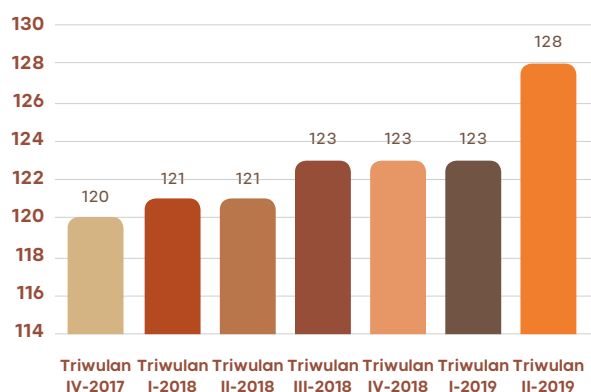
Grafik II - 8 ◇ Kredit Perbankan ke Sektor Berorientasi Ekspor



Grafik II - 9 ◇ Kredit Perbankan ke Sektor Perumahan



Grafik II - 10 ◇ Kredit Perbankan ke Sektor Pariwisata



OJK terus mendorong Bank untuk memberikan kredit dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata, melalui:

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah		
Pengembangan Sektor Pariwisata		
1. Competitiveness	2. Promotion	
MoU OJK & Kementerian Pariwisata		
 Perbankan • Keringanan pembukaan Jaringan Kantor Bank di wilayah destinasi wisata prioritas pemerintah • Pelonggaran BMPK menjadi 30% untuk penyediaan dana kepada BUMN yang membangun 10 Destinasi Wisata - Bali Baru • Pelonggaran BMPK menjadi 30% untuk penyediaan dana kepada BUMN yang membangun 10 Destinasi Wisata - Bali Baru *Outstanding Kredit Rp162 T	 Pasar Modal • Mengembangkan instrumen pasar modal untuk pembiayaan proyek Infrastruktur Kawasan Pariwisata • RDPT • Blended Finance • DINFRA • Obligasi Daerah • Pelonggaran BMPK menjadi 30% untuk penyediaan dana kepada BUMN yang membangun 10 Destinasi Wisata - Bali Baru	 Industri Keuangan Non Bank • Meningkatkan peran Lembaga Dana Pensiun dan Asuransi dalam investasi di instrumen pasar modal untuk sektor pariwisata • Mendorong pengembangan produk-produk asuransi yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, termasuk penerbitan Asuransi Perjalanan Wisata • Meningkatkan peran Lembaga Penjaminan dalam proyek infrastruktur di sektor pariwisata • Memanfaatkan platform peer-to-peer landing dan skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro untuk UMKM sektor pariwisata

2.5.2 Blended Finance

OJK dan Pemerintah terus mengembangkan penerapan pola *blended finance* sebagai salah satu instrumen keuangan untuk membiayai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara umum *blended finance* adalah proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan untuk mendukung proyek dalam pembangunan berkelanjutan dengan memadukan unsur keberlanjutan. Dengan *blended finance* diharapkan tercipta skema pendanaan yang menarik bagi swasta dengan melibatkan pendanaan pemerintah dan lembaga internasional maupun filantropis yang bersifat *soft loan*, *grant* maupun *guarantee mechanism*. *Blended finance* dapat digunakan sebagai salah satu instrumen keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menutup keterbatasan ruang fiskal, menarik sumber pendanaan internasional masuk ke Indonesia dan sekaligus berkontribusi pada kestabilan sistem keuangan.

Khusus dukungan proyek ramah lingkungan dan sosial, OJK memfasilitasi *Sustainable Finance* atau Keuangan Berkelanjutan, yaitu sistem keuangan untuk pembiayaan proyek dalam *platform SDGs Indonesia One*. Keuangan Berkelanjutan merupakan inisiatif OJK untuk mempersiapkan Industri Jasa Keuangan dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan (Rendah Karbon) yang tertuang dalam *Roadmap Keuangan Berkelanjutan*. Fokus *Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019* antara lain peningkatan pemahaman IJK akan pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan dan penyiapan regulasi untuk

menciptakan *level playing field* dan insentif dalam penerapan keuangan berkelanjutan, serta sebagai awal pendalaman pasar untuk pembiayaan proyek berkelanjutan.

Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan *Tri Hita Karana International Forum on Sustainable Development* bersamaan dengan pelaksanaan the IMF World Bank *Annual Meeting*. Dalam *Tri Hita Karana Forum* yang mengambil tema "*Blended Finance and Innovation for Better Business Better World*" diluncurkan 31 proyek, investasi dan inisiatif yang terkait dengan SDGs. Berikut adalah perkembangan dari proyek-proyek tersebut:

1. Enam Proyek telah terlaksana/mulai dilaksanakan pada akhir 2018.
2. Tujuh Proyek direncanakan mulai dilaksanakan pada 2019.
3. 11 Proyek dalam persiapan dan diperkirakan dimulai pada 2020.
4. Enam Proyek masih pembahasan awal.
5. Satu Proyek dilaksanakan di luar Indonesia.

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang ditunjuk sebagai katalisator bertugas antara lain mencari proyek, membuat skema pendanaan, dan menawarkan kepada investor melalui *platform SDG Indonesia One*. Berkaitan dengan dukungan pembiayaan, terdapat komitmen pelaksanaan proyek dalam skema *Blended Finance* sebesar USD2,46 miliar.

Dalam rangka memantau perkembangan pelaksanaan komitmen yang disepakati dalam *Tri Hita Karana Forum*

on *Sustainable Development* di Bali, OJK mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), *United in Diversity* (UID), dan tiga bank serta Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pertemuan tersebut disampaikan *update* dari *platform* yang berada di bawah koordinasi pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan dan informasi yang diperoleh, berikut ini adalah usulan kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait:

1. *Supply Side*:

- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait optimalisasi berbagai *platform* yang tersedia.
- Memantau setiap proyek yang sedang dan akan berjalan dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan alternatif solusinya.
- Membuat skema insentif bagi LJK: penurunan ATMR, pengurangan biaya penerbitan *green bond*.
- Memantau tiga bank yang telah menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2019 (*supervisory action*).

2. *Demand Side*:

- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait identifikasi proyek yang potensial didanai dengan skema *blended finance* (a.l. kegiatan FGD).
- Usulan skema insentif, a.l. penurunan pajak penghasilan, pembebasan pajak barang produksi impor, harga pembelian listrik yang lebih tinggi, subsidi bunga, subsidi biaya penerbitan *green bond*, kemudahan perizinan, dan kepastian kontrak.

2.5.3 Program B20

Pemerintah berusaha memaksimalkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang cukup melimpah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prioritas pengembangan energi nasional berdasarkan Kebijakan Energi Nasional yang terdiri dari (1) memaksimalkan penggunaan energi terbarukan; (2) meminimalkan penggunaan minyak bumi; (3) mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; (4) menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional; dan (5) memanfaatkan nuklir sebagai pilihan terakhir.

Cukup banyak ragam dan jenis energi terbarukan yang terdapat di Indonesia, salah satu implementasi penggunaan energi terbarukan dilakukan melalui Program *Mandatory Biofuel*/Bahan Bakar Nabati (BBN) yang berasal dari biji kelapa sawit dengan tujuan untuk:

- Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- Meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi;
- Stabilisasi harga CPO;
- Meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri kelapa sawit;
- Memenuhi target 23% kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam total energi mix pada tahun 2025 (Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional).
- Mengurangi impor BBM;
- Memperbaiki neraca perdagangan; dan
- Menghemat devisa.

Pada 2018, kebijakan *mandatory B20* berupa kewajiban pencampuran 20% Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan 80% bahan bakar minyak jenis Solar telah efektif dijalankan. Kebijakan tersebut resmi diluncurkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Selanjutnya akan diterapkan kebijakan B-30 pada 2020 dimana presentase BBN akan meningkat dari 20% menjadi 30%. Dalam rangka persiapan penerapan kebijakan dimaksud, saat ini sedang dilaksanakan pengujian implementasi dan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI). Lebih jauh lagi, Pemerintah dengan *stakeholder* terkait saat ini sedang mengembangkan Biohidrokarbon atau Bahan Bakar Hijau (*green fuel*) berdasarkan bahan baku lokal yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait B20, OJK telah menyelenggarakan FGD dengan tema "Kebijakan Dukungan Pembiayaan B20" yang bertujuan:

- Memberikan pemahaman dan pendalaman mengenai kebijakan B20;
- Melakukan pembahasan mengenai langkah-langkah pemerintah, institusi, BUMN, dan asosiasi dalam mendukung kebijakan B20; dan
- Membahas alternatif dukungan sektor jasa keuangan terhadap kebijakan B20.

Dalam rangka mendorong penerapan kebijakan pengembangan BBN, sektor jasa keuangan saat ini sedang menjajaki berbagai alternatif dukungan antara lain sebagai berikut:

- Potensi kerjasama antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) dengan Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait program KUR Khusus (klaster) skema perkebunan sawit.
- Pendanaan untuk kebutuhan investasi terkait penyediaan fasilitas pengolahan, *blending*, dan distribusi BBN.

2.5.4 Perizinan Terintegrasi

A. Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

Capaian pengembangan modul perizinan pada aplikasi SPRINT sampai dengan triwulan II-2019 adalah 31,6% atau sebanyak 221 dari 699 sub izin yang

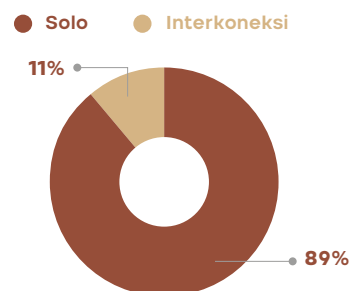
menjadi target pengembangan sampai dengan tahun 2022. Adapun jumlah layanan perizinan yang masuk melalui SPRINT dapat dilihat pada figur di bawah ini.

Penggunaan Aplikasi SPRINT

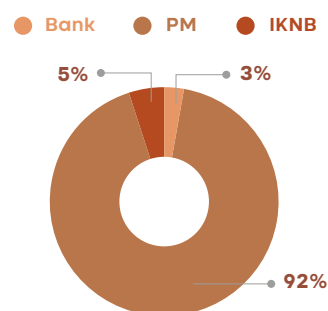
Sistem Perizinan Terintegrasi (SPRINT) digunakan sebagai pintu masuk perizinan secara elektronik khususnya untuk berbagai perizinan lintas bidang. Sampai saat ini tercatat sebanyak 38,629 pengajuan proses perizinan yang masuk ke dalam aplikasi SPRINT.

 IZIN PRODUK/ AKTIVITAS 5.865	 IZIN PERORANGAN 31.069	 IZIN LEMBAGA 1.704
Pemasaran RD 679	WAPERD 18.982	Perbankan (Bancassurance) 110
Reksadana 3.397	WPPE 6.620	APERD 70
Bancassurance 1.598	WMI 2.915	Asuransi (Bancassurance) 154
Emiten EREG 163	WPEE 744	MI 106
KIK-EBA 12	AP 1.697	KAP 323
DIRE 16	AS 111	Konsultan Hukum 422
		Notaris 246
		Penilai 251
		Penasihat Investasi 11
		Biro Administrasi Efek 11

Jenis Perizinan melalui SPRINT



Penggunaan SPRINT per Industri



B. Layanan Informasi Satu Pintu SPRINT

Pada triwulan II-2019 OJK mengalihkan layanan informasi dan pengaduan perizinan serta registrasi melalui SPRINT kepada Kontak OJK 157 pada Juni 2019.

C. Integrasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

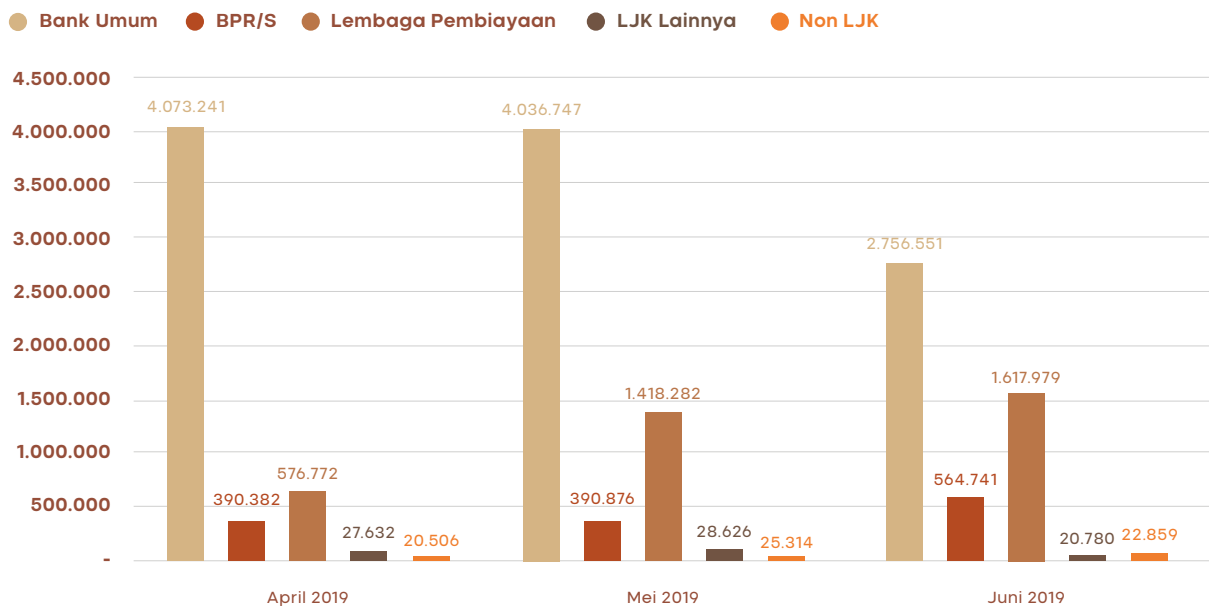
OJK dan BEI mencapai kesepakatan untuk melakukan integrasi proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum dan pencatatan Efek melalui aplikasi SPRINT. Saat ini integrasi tahap 1 sedang dalam pengembangan dan ditargetkan akan diluncurkan pada triwulan mendatang.

industri perbankan saja namun termasuk juga industri keuangan non bank. Informasi debitur pada SLIK merupakan kontribusi 2.109 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terdiri dari 99 Bank Umum Konvensional, 34 BUS/UUS, 1.581 BPR, 164 BPRS, 179 Lembaga Pembiayaan, delapan Perusahaan Modal Ventura, 35 Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu Perusahaan Modal Ventura Syariah, tiga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, 1 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan empat Koperasi Simpan Pinjam. LJK yang menjadi pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan informasi debitur secara *online* melalui SLIK Web.

2.5.5 Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

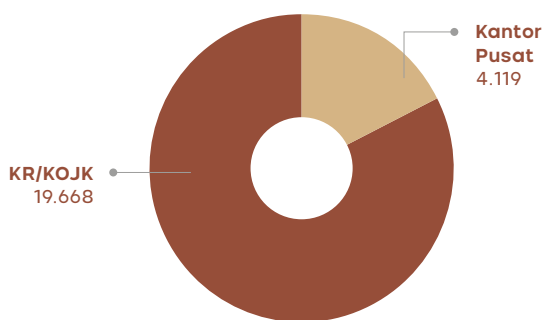
Masyarakat dapat memperoleh informasi debitur melalui layanan SLIK di kantor OJK masing-masing wilayah pada pukul 09.00-15.00 WIB. Salah satu kelebihan SLIK dibandingkan dengan layanan Sistem Informasi Debitur (SID) sebelumnya adalah cakupan informasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada

Grafik II - 11 ◇ Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK

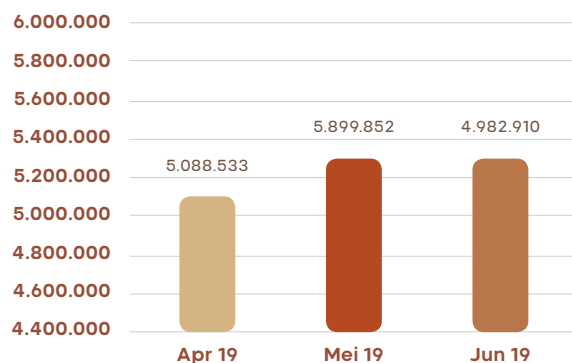


Pada triwulan II-2019, sebanyak 23.787 masyarakat telah menerima layanan SLIK melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK. Cakupan informasi debitur yang bersumber dari SLIK terdiri dari informasi mengenai data pokok debitur, fasilitas penyediaan dana (plafon kredit, baki debit, kualitas kredit, tunggakan, serta denda atau penalti), agunan, dan penjamin kredit/pembiayaan. Disamping itu, SLIK juga menyediakan informasi mengenai rincian pengurus khususnya untuk debitur badan usaha.

Grafik II - 12 ◇ Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Periode Triwulan II-2019



Grafik II - 13 ◇ Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK



SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit/pembiayaan sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Grafik II - 14 ◇ Manfaat SLIK



2.6 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.6.1 Sosialisasi Pengaturan

Sebagai rangkaian kegiatan sosialisasi ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), selama triwulan II-2019 OJK menyelenggarakan sosialisasi di Padang, Tangerang Selatan, Manado dan Cirebon. Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan Pelaku

Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, media lokal, dan masyarakat umum.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut antara lain terkait:

Tabel II - 42 ◇ Materi Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)

No.	Tema	Materi Sosialisasi
1.	"Mendorong Peningkatan Kepercayaan Konsumen dan Masyarakat Melalui Peraturan Layanan Pengaduan Konsumen"	a. POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. b. SEOJK No.17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. c. <i>Overview</i> Layanan Pengaduan Konsumen dengan fokus hubungan dan integrasi antara Trilogi Pemberdayaan Konsumen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan.
2.	"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kegiatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Serta Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan"	a. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. b. SEOJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. c. Ketentuan dan Kebijakan mengenai Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan POJK Nomor 76 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan serta peraturan pelaksanaannya
3.	"Mendukung Pertumbuhan Melalui Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen"	a. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Layanan Pengaduan Konsumen) b. SEOJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (SEOJK Pedoman Layanan Pengaduan Konsumen) c. Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen oleh OJK d. Ketentuan dan Kebijakan mengenai Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

2.6.2 Inklusi Keuangan

A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk percepatan akses keuangan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program-program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (*startup business*) lainnya.

Selama triwulan II-2019, telah dikukuhkan dua TPAKD, yaitu TPAKD Kabupaten Banjarnegara dan TPAKD Kabupaten Jeneponto. Sehingga sampai dengan triwulan II-2019, sebanyak 89 TPAKD dengan rincian 32 TPAKD Provinsi dan 57 TPAKD Kabupaten/Kota telah dikukuhkan.

Kegiatan terkait TPAKD selama triwulan II-2019 antara lain:

- a. *Re-launching* pengukuhan TPAKD Jawa Barat serta pelaksanaan rapat pleno TPAKD Provinsi Jawa Barat tahun 2019
- b. Rapat Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenko Perekonomian, dalam rangka persiapan teknis pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD tahun 2019
- c. *Kick off meeting* pengembangan sistem pelaporan TPAKD

B. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

Pada awal triwulan II-2019, data SimPel/SimPel iB adalah sebagai berikut:


314
Bank Peserta


21.151.460
Jumlah Rekening


334.030
Sekolah


Rp400.454
Saldo Rata-rata

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Hingga triwulan II 2019, terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan dalam rangka optimalisasi BUMDes:

- a. Kegiatan sosialisasi dan *workshop* penguatan BUMDes/BUMADEs
- Kegiatan sosialisasi dan *workshop* penguatan BUMDes/BUMADEs diselenggarakan dalam rangka memaparkan perspektif strategi tiga pilar (pilar kelembagaan dan bisnis, pilar akses keuangan, dan pilar digitalisasi) serta skema bisnis yang dikembangkan oleh OJK bersama pemangku kepentingan terkait. Dalam sosialisasi dan *workshop* dimaksud, OJK juga memfasilitasi pengembangan bisnis kepada BUMDes/BUMADEs

dalam bentuk *business matching* dengan industri jasa keuangan dan berbagai pelaku bisnis di sektor lain. Pada triwulan II-2019 OJK telah melaksanakan sosialisasi dan *workshop* penguatan BUMDes/BUMADEs di tiga wilayah yaitu Bandung, Jayapura dan Kupang dengan mencakup 136 desa.

- b. Realisasi BUM-Desa Center
- BUMDes Center merupakan *pilot project* BUMDes yang telah difasilitasi OJK untuk menerapkan strategi tiga pilar. Pada triwulan II-2019, OJK melakukan fasilitasi pendirian terhadap delapan BUM-Desa Center dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 43 ◇ Kegiatan Sosialisasi dan *Workshop*

No.	Nama BUMDes Center	Wilayah	
		Desa	Kab. Kota
1.	BUM-Desa Center Trias Sejahtera	Buluagung	Trenggalek
2.	BUM-Desa Center Damai Mandiri	Suruh	Trenggalek
3.	BUM-Desa Center Sari Bumi	Pule	Trenggalek
4.	BUM-Desa Center Mitra Amanah	Dukuh	Trenggalek
5.	BUM-Desa Center Mitra Sejati	Sukorejo	Trenggalek
6.	BUM-Desa Center Kembang Jati	Jatiprahu	Trenggalek
7.	BUM-Desa Center Suci Mandiri	Purwodadi	Magetan
8.	BUM-Desa Center Blaran	Blaran	Magetan

D. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) merupakan program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur produk keuangan

sesuai seperti asuransi dan/atau produk investasi lainnya yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel II - 44 ◇ Fitur Tabungan Mahasiswa dan SiMUDA

	SiMuda RumahKu	SiMuda InvestasiKu	SiMuda EmasKu
	Tabungan rencana untuk mengangsur uang muka KPR (DP KPR) dan dilindungi dengan proteksi asuransi.	Tabungan rencana yang memiliki fitur berinvestasi di reksa dana secara berkala dan dilindungi dengan proteksi asuransi.	Pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah (jual beli) dan dilindungi dengan proteksi asuransi.
Setoran Awal	Kebijakan masing-masing bank	Minimal Rp100.000	Kebijakan masing-masing bank
Biaya Admin	Tidak ada	Kebijakan masing-masing bank	Tidak ada
Setoran Bulanan	Minimal Rp100.000	Sama dengan setoran awal	Minimal Rp50.000
Jangka Autodebet	Minimal 12 bulan	Minimal 12 bulan	Minimal 12 bulan

Adapun jumlah rekening SiMUDA pada triwulan II-2019 adalah 11.052 rekening dengan total saldo sebesar Rp12,41 miliar. Adapun rincian berdasarkan fitur tabungan SiMuda adalah sebagai berikut:

SiMuda RumahKu

Jumlah rekening adalah 10.994 rekening dengan total saldo sebesar Rp12,37 miliar.

SiMuda InvestasiKu

Jumlah rekening adalah 48 rekening dengan total saldo sebesar Rp31.155.905,00

SiMuda InvestasiKu

Jumlah rekening adalah 48 rekening dengan total saldo sebesar Rp31.155.905,00

SimPel Day



SimPel Day diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang bertepatan dengan hari pendidikan nasional yaitu tanggal 2 Mei 2019 melalui kolaborasi dengan OJK di pusat maupun di daerah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 10.000 pelajar dan *stakeholders* terkait. Adapun kegiatan SimPel Day di Jakarta dilaksanakan di Gedung Dhanapala dihadiri oleh sekitar 1.385 orang yang terdiri dari pelajar, guru pendamping, serta *stakeholders* terkait.

Kegiatan SimPel Day bersinergi dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Industri perbankan, serta Kementerian/Lembaga terkait. Pada kesempatan tersebut, Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) menyampaikan laporan perkembangan program SimPel/SimPel iB, tujuan dan agenda kegiatan SimPel Day 2019, capaian pembukaan rekening dalam kegiatan SimPel Day, dan tindak lanjut dalam mendukung pencahangan Hari Indonesia Menabung.

Selanjutnya Ketua Dewan Komisiner OJK memaparkan materi '*Financial Inclusion for A Brighter Future*' mencakup:

- a. Pentingnya budaya menabung sejak dini, khususnya melalui SimPel/SimPel iB sebagai tabungan yang ideal bagi nasabah muda atau pelajar sebagai salah satu target segmen pada Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
- b. Diperlukan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) untuk mewujudkan program "*One Student, One Account*". Selain itu, perbankan juga diminta untuk meningkatkan kegiatan kunjungan sekolah agar kesempatan menabung bagi pelajar lebih terbuka.

SimPel Day



Pada kegiatan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian turut menyampaikan arahan pada kegiatan yang secara umum mencakup:

- Para pelajar diharapkan dapat mulai mengelola uang serta menabung melalui berbagai produk tabungan perbankan yang cocok bagi pelajar, seperti SimPel/SimPel iB.
- Menghimbau bank agar lebih sering melakukan kunjungan ke sekolah serta sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya menabung.
- Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kemendikbud, Kemenag, Kemenpora, dan Kemenristekdikti diharapkan dapat mendukung Aksi Indonesia Menabung dalam rangka Hari Indonesia Menabung.

Pada kegiatan SimPel Day tersebut juga dilakukan pembacaan "Ikhar Aksi Pelajar Indonesia Menabung" secara serentak oleh pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA/ sederajat di seluruh wilayah Indonesia. Pembacaan ikhar tersebut merupakan simbol komitmen dan semangat para pelajar untuk melaksanakan budaya menabung sejak dini serta mendukung Aksi Indonesia Menabung.

Selain itu, terdapat sesi *edutainment* dari para *influencer* yang menyampaikan testimoni mengenai program SimPel/SimPel iB. Pada kesempatan dimaksud juga dilakukan penjurian final atas kegiatan SimPel Vlog Competition, SimPel Dance Competition dengan tema "Aku Pelajar, Aku Generasi SimPel", serta Lomba Jagoan SimPel (Ranking 1).

Kegiatan SimPel Day dilaksanakan serentak oleh 23 BPD di daerah masing-masing berkoordinasi dengan KR/KOJK dan Dinas Pendidikan setempat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya menabung sejak dini serta mendorong budaya menabung di kalangan pelajar Indonesia.

E. Kajian Dana Pensiun Mikro

Menindaklanjuti *Focus Group Discussion* (FGD) "Peluang dan Tantangan Pengembangan Model Inklusi Keuangan bagi pekerja Sektor Informal Melalui Produk Dana Pensiun Mikro". OJK melakukan kajian terkait Dana Pensiun Mikro.

Dalam rangka penyusunan kajian, OJK melaksanakan *mini survey* untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap program pensiun. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia terhadap pemanfaatan program dana pensiun di wilayah Jabodetabek. Metode *mini survey* dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu menggunakan metode *cross sectional survey*. Metode tersebut dilakukan dengan cara pengambilan data pada satu kurun waktu tertentu, tidak berulang atau periodik. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran terkait objek, aspek atau materi tertentu dengan penyajian data lebih berupa angka atau satuan numerik tertentu.

Sasaran responden terdiri dari pekerja informal sebesar 70% dan pekerja formal sebesar 30%. Selain itu, dalam survei ini memiliki komposisi responden sebesar 50% merupakan responden perempuan dan 50% merupakan responden laki-laki. Adapun kriteria responden pada *mini survey* tersebut diantaranya:

1. Telah bekerja minimal 3 tahun;
2. Berdomisili di wilayah Jabodetabek, perdesaan dan perkotaan sesuai kondisi wilayah; dan
3. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

2.6.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

A. Pengembangan Infrastruktur dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat

Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilaksanakan oleh OJK pada 2016 menunjukkan bahwa indeks literasi masyarakat Indonesia baru sebesar 29.6%, sedangkan indeks inklusi masyarakat Indonesia sebesar 67.8%. Tingkat literasi yang lebih rendah dibanding tingkat inklusi atau penggunaan produknya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menggunakan produk dan layanan di lembaga keuangan formal tidak diikuti dengan pemahaman yang cukup. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan serta produk dan layanan keuangan dalam rangka mencapai target literasi keuangan 35% dan inklusi keuangan 75% sesuai dengan Peraturan Presiden No.50 tahun 2017 dan Perpres No.82 tahun 2016, selama triwulan II-2019 OJK melaksanakan sejumlah kegiatan edukasi secara masif melalui Pagelaran Seni Budaya, OJK Goes to Campus dan *Financial Expo*.

1. Sinergi Edukasi OJK

OJK telah melaksanakan kegiatan Sinergi Edukasi OJK bagi tenaga pengajar baik di tingkat perguruan tinggi maupun sekolah menengah di berbagai daerah di Indonesia, antara lain bekerja sama dengan Kemenristekdikti, Kemenag dan Kemendikbud. Materi yang disajikan mencakup Pengetahuan mengenai OJK, Pembiayaan, Perbankan, Perasuransian, Pergadaian, Pasar Modal, Dana Pensiun, dan Ekonomi dan Sektor Jasa Keuangan Syariah.

Kegiatan ini secara total diikuti oleh 43 dosen perguruan tinggi di Solo dan Yogyakarta, 148 orang Guru IPS tingkat SMA/SMK/MA di Wilayah Kota Manado, dan 60 guru IPS Tingkat SMP/MTs di Jayapura. Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan berdasarkan nilai *pre test* dan *post test* tergolong cukup baik sehingga diharapkan selanjutnya para dosen dan guru tersebut dapat mengajarkan materi literasi keuangan kepada siswa serta berbagi ilmu kepada guru lainnya sehingga menghasilkan *multiplier effect* yang lebih luas.

2. Training of Trainers (ToT) bagi Community Organizer (CO) Komunitas Keluarga Buruh Migran

Untuk meningkatkan literasi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI), OJK melaksanakan *Training of Trainers* (ToT) bagi *Community Organizer* (CO) Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) di Bogor. CO KKBM merupakan unit di bawah BNP2TKI yang bersentuhan langsung dengan PMI maupun keluarganya. Melalui kegiatan edukasi keuangan yang diselenggarakan oleh OJK, diharapkan para CO KKBM dapat menambah ilmu pengetahuan maupun keterampilan khususnya mengenai literasi keuangan sehingga dapat mengadvokasi para calon PMI maupun purna PMI beserta keluarga dalam meningkatkan kapasitasnya mengenai keuangan. Dengan melakukan ToT kepada CO KKBM diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* kepada para PMI dan keluarga. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 56 peserta yang terdiri CO KKBM dari seluruh Indonesia serta pendamping dari Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). Peserta mendapatkan materi Pengenalan OJK dan Waspada Investasi, Perencanaan Keuangan, Produk KUR TKI, KUR Kecil dan KUR Mikro, serta Program perlindungan jaminan sosial bagi para TKI.

B. Edukasi Keuangan bagi Komunitas

1. Edukasi Keuangan bagi Perempuan dan Ibu Rumah Tangga dalam Rangka Memperingati Hari Kartini

Sebagai upaya OJK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan serta produk dan layanan keuangan telah dilaksanakan Edukasi Keuangan bagi Perempuan dan Ibu Rumah Tangga sekaligus Memperingati Hari Kartini. Kegiatan ini diikuti oleh 282 peserta yang merupakan pengurus dan anggota Ikatan Istri Pegawai Kementerian/Lembaga, Pimpinan Industri Jasa Keuangan serta organisasi perempuan). Untuk memeriahkan kegiatan edukasi keuangan tersebut, terdapat pembukaan *booth* UMKM dan PT Pegadaian (persero). Pada kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi Perencanaan Keuangan dan Pemanfaatan *Financial Technology (Fintech)* dengan hasil tingkat pemahaman yang cukup baik.

2. Edukasi Keuangan Kepada Forum UMKM-IKM Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK -DAPM) dan Mahasiswa

Kegiatan edukasi keuangan: *Digitalpreneur Workshop* dengan Tema Sukses Berwirausaha di Era Revolusi Industri 4.0 merupakan pembekalan bagi para pelaku usaha UMKM maupun calon pengusaha di wilayah Sulawesi Tenggara agar mampu memberikan nilai tambah di era digitalisasi dan meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan media sosial. Secara umum materi yang disampaikan oleh para narasumber adalah sebagai berikut:

- Pengenalan OJK, perencanaan keuangan dan waspada investasi;
- Mekanisme ekspor (klinik ekspor);
- Digital marketing*;
- Materi Sistem Aplikasi Usaha Mikro dan Kecil (SIAPIK)

3. Safari Ramadhan

Pada bulan suci Ramadhan 2019, OJK kembali melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan sebagai bentuk peningkatan pemahaman terkait literasi dan inklusi keuangan syariah. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi Pengenalan OJK, Waspada Investasi, Perencanaan Keuangan, dan Perbankan Syariah.

Serupa dengan tahun sebelumnya, Safari Ramadhan dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu kepada komunitas santri setingkat SMA di wilayah Jabodetabek, kepada mahasiswa dan pengajar Universitas Al – Azhar Indonesia,

dan kepada Komunitas Pengusaha Muslimah Indonesia bekerjasama dengan IPEMI PD Depok.

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan pengukuran pemahaman peserta melalui pengisian *pre-test* dan *post-test* dengan pertanyaan terkait metrik yang disampaikan. Dari penilaian tersebut, didapatkan peningkatan pemahaman peserta yang cukup baik.

4. Workshop Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) di Semarang dan Banjarmasin

Sebagai bentuk pemantauan kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh PUJK, OJK membangun sistem pelaporan elektronik yang disebut Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI). SiPEDULI mulai beroperasi sejak 2015, namun dalam perkembangannya dilakukan penyempurnaan dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan sistem yang lebih baik. Salah satu bentuk penyempurnaan yang dilakukan pada sistem ini adalah penyesuaian format laporan edukasi dan inklusi keuangan dengan SEOJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada PUJK tentang tata cara pelaporan rencana maupun realisasi kegiatan edukasi dan inklusi keuangan, telah dilaksanakan kegiatan *Workshop* SiPEDULI di Semarang dan Banjarmasin. Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari seluruh PUJK di wilayah Kota Semarang dan Kota Banjarmasin. Selain itu dihadiri juga oleh perwakilan dari KR/KOJK di wilayah Jawa Tengah dan DIY serta perwakilan dari Kantor Regional 9 Kalimantan, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat. Adapun materi-materi yang disampaikan adalah:

- Ketentuan mengenai literasi dan inklusi keuangan
- Evaluasi pelaporan dan teknis pengisian laporan edukasi keuangan
- Evaluasi pelaporan dan teknis pengisian laporan inklusi keuangan

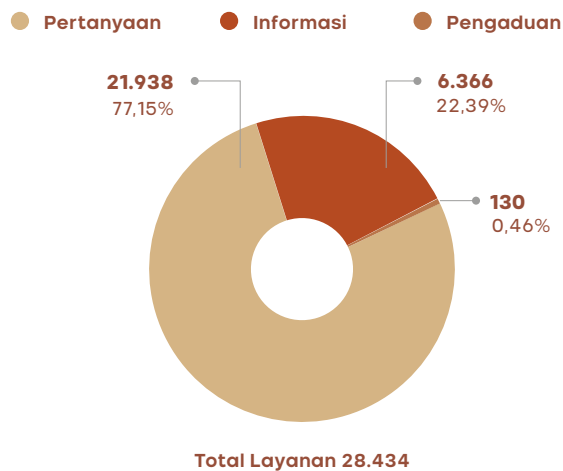
2.6.4 Perlindungan Konsumen

A. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

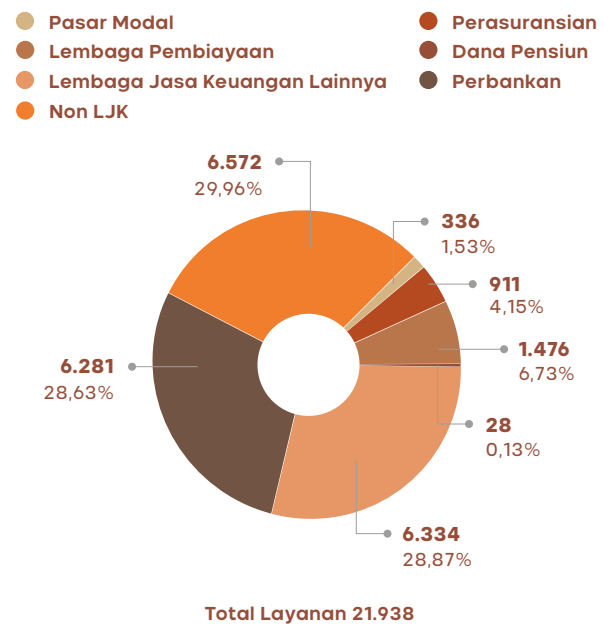
Pada triwulan II-2019, Layanan Konsumen OJK menerima 28.434 layanan yang terdiri dari 6.366 layanan penerimaan informasi (laporan), 21.938 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 130 layanan pengaduan. Jumlah ini mengalami penurunan

sebesar 10,07% (3.184 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari 21.938 pertanyaan, terdapat 132 layanan yang kemudian diklasifikasikan sebagai layanan berindikasi pengaduan.

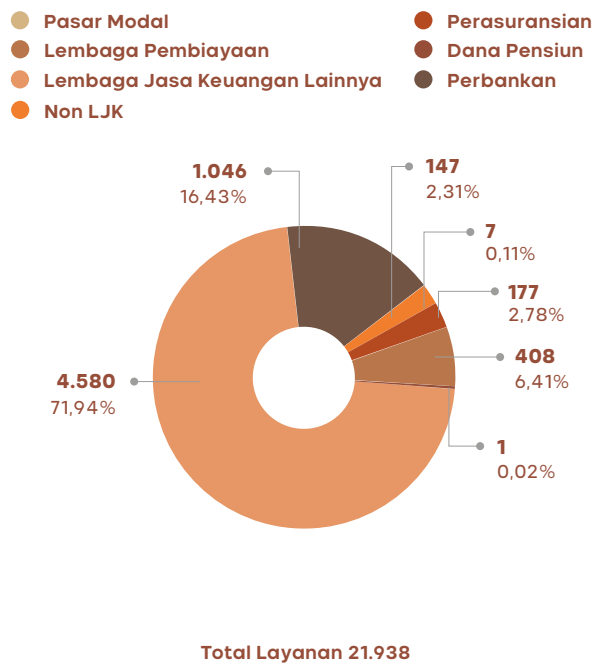
Grafik II - 15 ◇ Penerimaan Layanan Triwulan II-2019



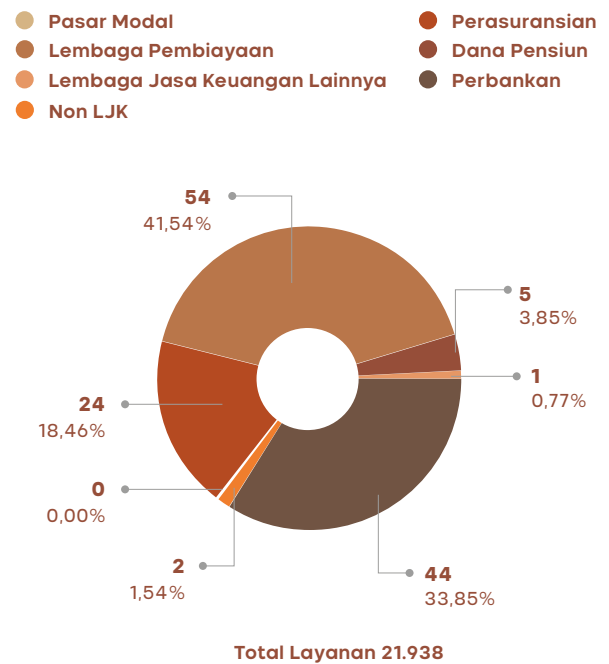
Grafik II - 16 ◇ Layanan Pertanyaan Triwulan II-2019



Grafik II - 17 ◇ Layanan Informasi Triwulan II-2019



Grafik II - 18 ◇ Layanan Pengaduan Triwulan II-2019

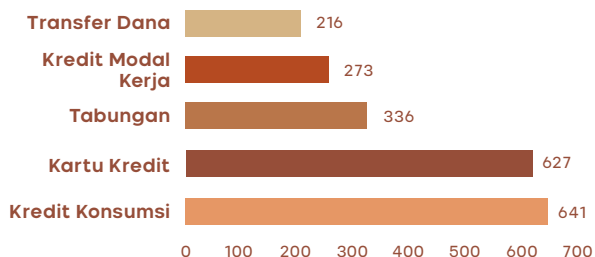


Sumber: OJK

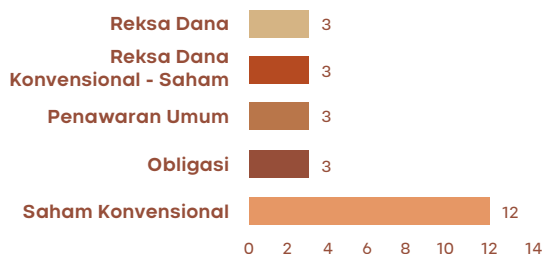
Dari masing-masing sektor, terdapat jenis produk yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen yaitu : kredit konsumsi pada perbankan, saham konvensional pada pasar modal, produk asuransi berjangka (*term life*) pada perasuransian, produk manfaat pasti pada industri dana pensiun, produk pembiayaan konsumen pada

industri lembaga pembiayaan, dan penerima pinjaman dana pada IKNB-lainnya. Pada produk penerima pinjaman dana, sebagian besar berkaitan dengan industri *financial technology (fintech)*, pada sektor non LJK jenis produk yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen yaitu terkait sistem pembayaran lainnya.

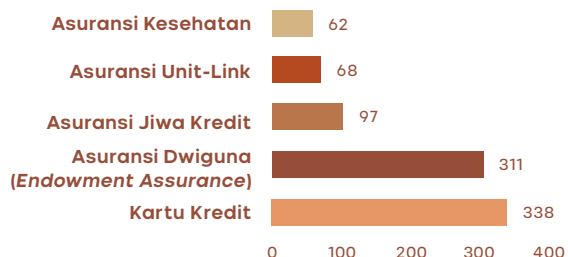
Grafik II - 19 ◇ Pertanyaan Terkait Produk Perbankan Terbanyak



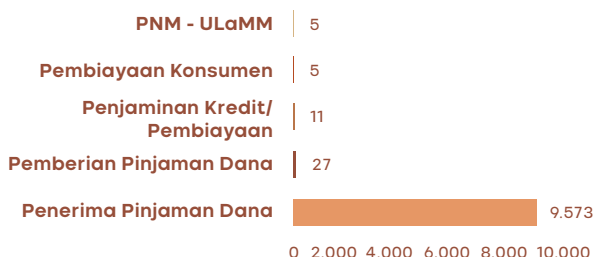
Grafik II - 20 ◇ Pertanyaan Terkait Produk Pasar Modal Terbanyak



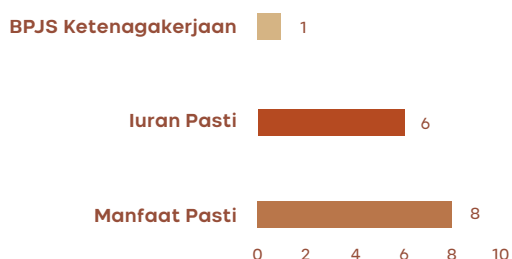
Grafik II - 21 ◇ Pertanyaan Terkait Produk Perasuransian Terbanyak



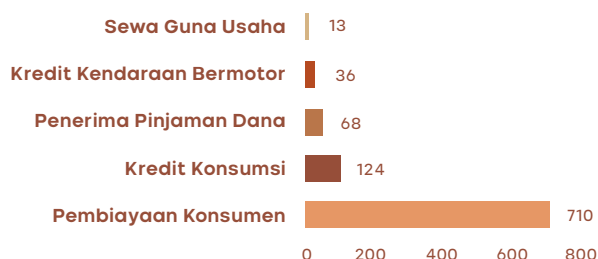
Grafik II - 22 ◇ Pertanyaan Terkait Produk IKNB Lainnya Terbanyak



Grafik II - 23 ◇ Pertanyaan Terkait Produk Dana Pensiun Terbanyak



Grafik II - 24 ◇ Pertanyaan Terkait Produk Lembaga Pembiayaan Terbanyak

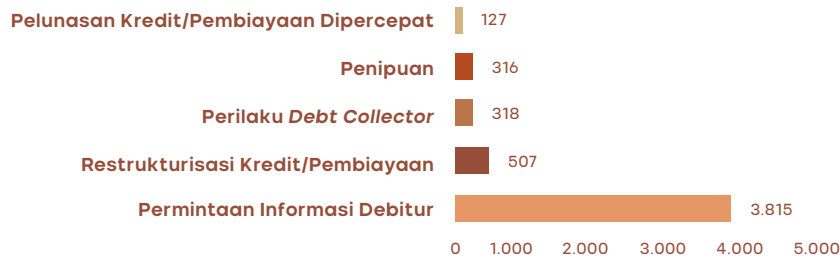


Sumber: OJK

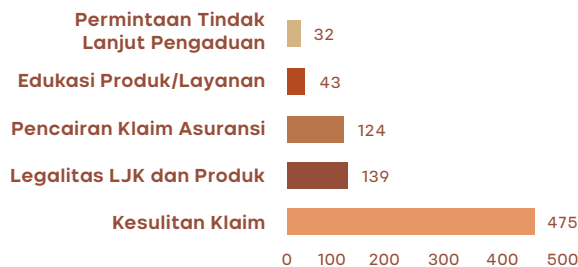
Pada triwulan II-2019, permasalahan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen pada masing-masing sektor yaitu : permintaan informasi debitur pada perbankan, legalitas LJK dan produk pada pasar modal, kesulitan klaim pada perasuransian,

tidak dapat mencairkan manfaat pada industri dana pensiun, permintaan informasi debitur pada industri lembaga pembiayaan, perilaku *debt collector* pada IKNB-lainnya dan permintaan informasi debitur pada sektor non LJK.

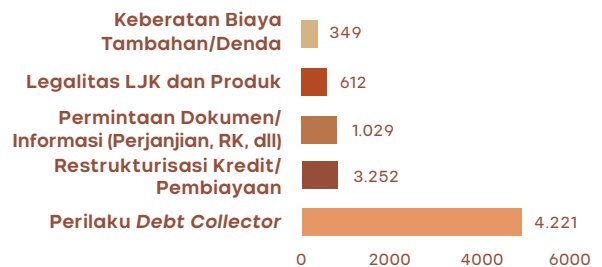
Grafik II - 25 ◇ Permasalahan Perbankan Terbanyak



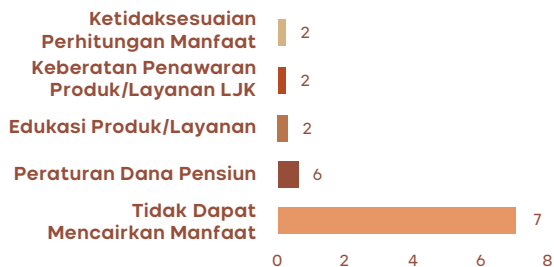
Grafik II - 26 ◇ Permasalahan Perasuransian Terbanyak



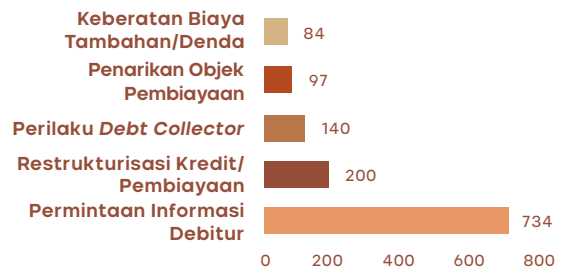
Grafik II - 27 ◇ Permasalahan IKNB Lainnya Terbanyak



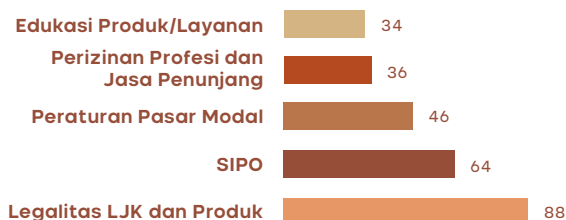
Grafik II - 28 ◇ Permasalahan Dana Pensiun Terbanyak



Grafik II - 29 ◇ Permasalahan Lembaga Pembiayaan Terbanyak



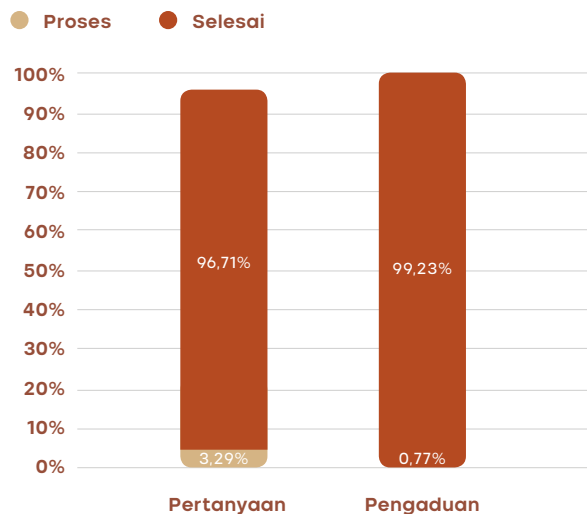
Grafik II - 30 ◇ 5 Besar Jenis Produk IKNB - Lainnya



Sumber: OJK

Pada layanan yang masuk di triwulan II-2019, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 96,71% (21.216 layanan), sedangkan layanan pengaduan yang selesai sebanyak 99,23% (129 pengaduan).

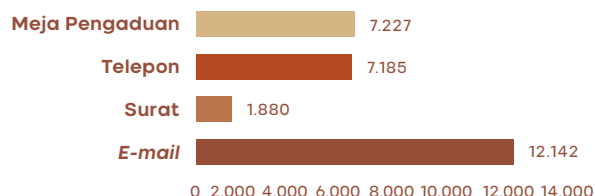
Grafik II - 31 ◇ Tingkat Penyelesaian Layanan



Sumber: OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon, surat dan *walk in*. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut:

Grafik II - 32 ◇ Kanal Layanan



Sumber: OJK

Berdasarkan grafik kanal layanan triwulan II - 2019, konsumen dan/atau masyarakat paling banyak mengakses layanan konsumen OJK melalui *walk in* atau datang langsung ke kantor OJK.

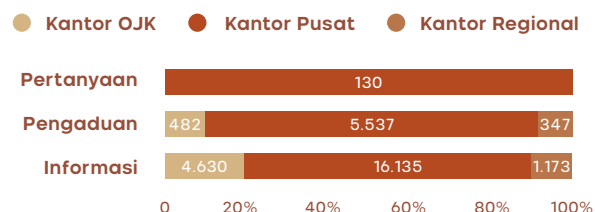
Tabel II - 45 ◇ Penerimaan Layanan OJK

Penginput	Total Layanan
Kantor Pusat	21.802
Kantor Regional	1.520
Kantor OJK	5.112
Total	28.434

Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) pada masing-masing wilayah untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Berdasarkan tabel penerimaan layanan di atas, Kantor Pusat menjadi satuan kerja yang menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 76,68% dari total penerimaan layanan pada triwulan II-2019.

Grafik II - 33 ◇ Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



Sumber: OJK

B. Coffee Morning bersama Working Group Internal Dispute Resolution

Dalam rangka memperkuat upaya perlindungan konsumen serta sebagai sarana komunikasi terkait penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, OJK telah membentuk *Working Group Internal Dispute Resolution* (WG IDR) yang beranggotakan 38 PUJK yang terdiri dari 21 PUJK sektor perbankan, 11 PUJK sektor asuransi, dan enam PUJK sektor pembiayaan.

OJK kembali menyelenggarakan acara *coffee morning* dengan anggota WG IDR dengan tema diskusi tentang "Manfaat dan Tantangan Penggunaan Data Dukcapil bagi Industri Jasa Keuangan". Peserta yang hadir sebanyak 74 orang dari anggota WG IDR serta sebanyak 42 orang internal OJK.

2.6.5 Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen

A. Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS

Terdapat 55 permohonan penyelesaian sengketa yang diterima oleh LAPS pada Semester II-2018. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) menerima paling banyak permohonan yakni sebanyak 23 permohonan. Jenis sengketa diterima LAPSPI pada semester 2 tahun 2018 terdiri dari enam hal yakni restrukturisasi atau *rescheduling* kredit, keringanan tanggungan kredit, permasalahan agunan kredit, penyalahgunaan kartu kredit, sanggahan transaksi *online*, dan permasalahan penolakan pencairan deposito. Sementara itu, jenis sengketa yang diterima BMAI terdiri dari penolakan klaim dan klaim penebusan polis.

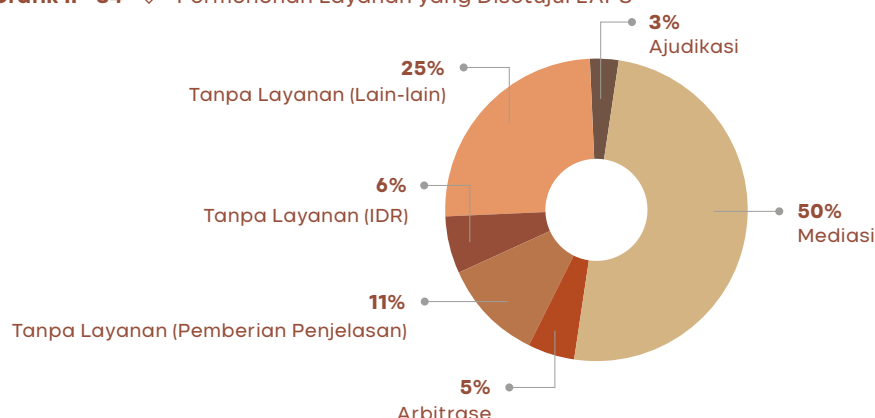
Tabel II - 46 ◇ Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diterima oleh LAPS pada Semester II-2018

Lembaga	Persetujuan Permohonan		Grand Total
	Disetujui	Tidak Disetujui	
Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)	23	0	23
Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI)	0	0	0
Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)	0	1	1
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	12	11	23
Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI)	0	0	0
Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI)	1	7	8
Total	36	19	55

Dari total 55 permohonan penyelesaian sengketa yang diterima dan diproses oleh LAPS tersebut di atas, terdapat total 19 permohonan yang ditolak karena beberapa hal yakni tidak memenuhi persyaratan administratif, sengketa akan diselesaikan melalui mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR), sengketa bukan terkait hal keperdataan dan sengketa di luar sektor LAPS terkait. Dari 36 permohonan yang

disetujui LAPS untuk ditindaklanjuti, sebanyak 18 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan mediasi, satu permohonan ditindaklanjuti melalui layanan adjudikasi, dan dua permohonan ditindaklanjuti melalui layanan arbitrase. Sisanya sebanyak 15 permohonan ditindaklanjuti dengan layanan lain seperti pemberian penjelasan dan rekomendasi.

Grafik II - 34 ◇ Permohonan Layanan yang Disetujui LAPS



2.6.6 Market Conduct

A. Thematic Surveillance dan Operasi Intelijen Pasar

Dalam kerangka penegakan disiplin pelaku pasar, OJK melaksanakan Pemeriksaan *Market Conduct* terhadap sampel Bank Umum, Bank Umum Syariah, maupun Bank Pembangunan Daerah sepanjang triwulan II-2019 dengan tema Perjanjian Baku.

Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan kebijakan penyusunan perjanjian baku, implementasi perjanjian baku, evaluasi perjanjian baku, baik dari sisi format maupun konten klausula memenuhi prinsip keadilan, kewajaran, dan keseimbangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Sepanjang triwulan II-2019, OJK melaksanakan pemeriksaan *market conduct* terhadap lima sampel PUJK yang terdiri dari dua Bank Umum, satu Bank Umum Syariah dan dua Bank Pembangunan Daerah. Pemeriksaan *market conduct* dilaksanakan bersama dengan jadwal pemeriksaan oleh Pengawas Prudensial masing-masing sampel. Hasil pemeriksaan *market conduct* diharapkan dapat menjadi pelengkap, sehingga PUJK tidak hanya kuat dari sisi bisnis, tapi juga menjalin memiliki hubungan yang baik dengan konsumennya. Hal ini dimaksudkan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia semakin meningkat.

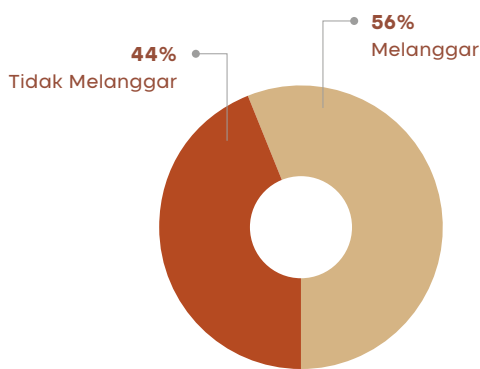
B. Pemantauan Iklan Triwulanan

Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan. *Monitoring* harian yang

dilaporkan secara triwulanan ini mencakup iklan yang dipublikasikan melalui media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

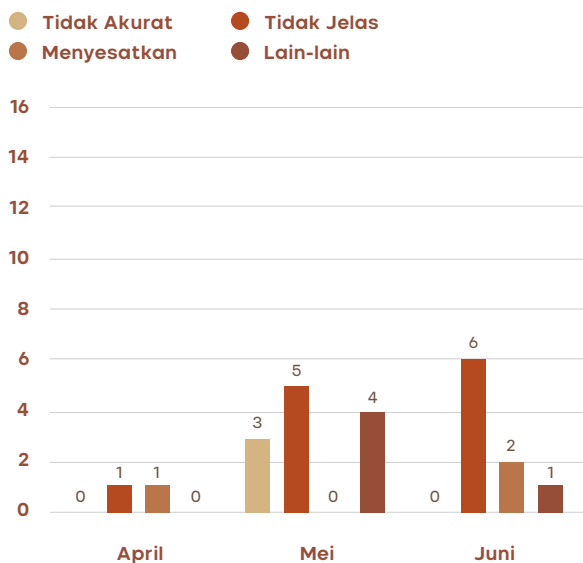
Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 36 iklan berkaitan dengan produk/jasa keuangan, yang terdiri dari 32 iklan dari sektor perbankan Umum dan empat iklan dari sektor Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil analisis, dari 36 iklan di media cetak ditemukan 20 iklan (56%) masih melanggar ketentuan yang tertuang dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan serta masih belum menyesuaikan tuntunan dalam Pedoman Iklan Jasa Keuangan.

Grafik II - 35 ◇ Pelanggaran Iklan



Kategori yang paling banyak dilanggar selama periode laporan berturut-turut adalah Lain-Lain (4), Tidak Jelas (12), Menyesatkan (3), dan Tidak Akurat (3). Termasuk dalam kategori Lain-Lain adalah tidak mencantumkan pernyataan "terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan" dan/atau pernyataan yang dicantumkan tidak terbaca (ditulis dengan ukuran yang terlalu kecil, dicantumkan tidak secara horisontal, atau warna tidak kontras dengan latar belakang). Termasuk dalam kategori Tidak Jelas adalah iklan yang informasi terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuannya tidak lengkap. Termasuk dalam kategori Menyesatkan adalah iklan yang materinya berisiko menimbulkan perbedaan persepsi dengan masyarakat. Termasuk dalam kategori Tidak Akurat adalah iklan yang mencantumkan klaim dan/atau menggunakan data, namun tidak mencantumkan sumber data yang kredibel.

Grafik II - 36 ◇ Tren Pelanggaran Iklan



Sehubungan dengan hasil pemantauan ini, sepanjang triwulan II 2019 OJK telah mengirimkan 15 Surat Pembinaan kepada PUJK yang melakukan pelanggaran iklan. Jumlah surat ini berbeda dengan jumlah pelanggaran iklan, karena terdapat beberapa PUJK yang memiliki iklan melanggar lebih dari satu.

2.7 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

2.7.1 Penanganan Perkara

Pada triwulan II-2019, OJK menerbitkan enam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), empat pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, dan tiga berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21), sehingga jumlah penyidikan yg dilakukan selama triwulan I-2019 dan triwulan II-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 47 ◇ Penyidikan

Penyidikan		
Perkara Perbankan	Perkara Bank Umum dan BPR/S	7
Perkara Pasar Modal	Perkara Emiten PP	4
Perkara IKNB	Perkara Asuransi	1
Total		12

Dari hasil penyidikan dan gelar perkara, OJK selanjutnya mengirimkan delapan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 48 ◇ Pemberkasan Kejaksaan

Perkara	Penyidikan	P21	
Perbankan	Perkara BPR/S	4	4
Pasar Modal	Perkara Emiten / PP	2	2
IKNB	Perkara Pembiayaan	2	1
Total		8	7

Secara total, terdapat tujuh berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI.

2.7.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

Dalam rangka upaya pemenuhan infrastruktur yang berupa penyempurnaan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan dan evaluasi Nota Kesepakatan, serta penyusunan kajian terkait tindak pidana sektor jasa keuangan, selama triwulan II-2019, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Review Nota Kesepakatan OJK dengan Instansi penegak hukum;
- Penyusunan ketentuan terkait *Restorative Justice* di Sektor Jasa Keuangan;
- Penyusunan ketentuan pembentukan *Task Force* dalam rangka penguatan koordinasi penyelesaian perkara tindak pidana sektor jasa keuangan;
- Kajian Kewenangan Penyidik OJK dalam melakukan upaya paksa; dan
- Kajian putusan pengadilan atas perkara Perbankan dan IKNB.

2.7.3 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan KR/KOJK.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang banyak beroperasinya penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan TNI. Dengan narasumber dari OJK,

Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi & UKM.

Pada triwulan II-2019, Satgas Waspada Investasi mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi waspada investasi kepada masyarakat di Jakarta, Pekanbaru dan Surabaya. Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Satgas Waspada Investasi, rata-rata tingkat pemahaman peserta tercatat 5,85 dari skala 6.

Untuk memberikan arahan dan pemahaman yang sama terkait pelaksanaan tugas kepada Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah, pada triwulan II-2019 Satgas Waspada Investasi memberikan pembekalan kepada anggota Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di Denpasar.

Selain itu, Satgas Waspada Investasi secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi terkait Waspada Investasi dengan menjadi narasumber untuk memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Kristen Indonesia.

2.7.4 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Pada periode triwulan II-2019, OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 116 Entitas investasi ilegal dan 284 Entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin OJK.

2.8 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

2.8.1 Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020

Indonesia sedang mengikuti proses Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF) dengan agenda *on-site visit* pada bulan Maret 2020 dan hasilnya akan dibahas pada FATF Plenary Meeting bulan Oktober 2020. MER FATF adalah prosedur yang harus diikuti oleh Indonesia untuk dapat menjadi anggota penuh dalam FATF. MER FATF akan menilai dua hal yaitu kesiapan perangkat peraturan dan otoritas lembaga sesuai dengan rekomendasi FATF, serta evaluasi atas efektivitas perangkat peraturan dan otoritas lembaga dalam mencapai tujuan sesuai dengan standar FATF.

Strategi OJK untuk MER FATF salah satunya adalah menjadikan hasil MER Indonesia oleh APG Tahun 2017/2018 sebagai bekal awal untuk menangani defisiensi-defisiensi yang sudah teridentifikasi dan

memenuhi rekomendasi dalam laporan hasil MER APG tersebut melalui *Priority Actions Plan* OJK yang mencakup:

1. Penyempurnaan ketentuan APU PPT di SJK;
2. Peningkatan penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko di seluruh SJK;
3. Penguatan pengawasan APU PPT terhadap grup konglomerasi;
4. Penerapan sanksi administratif secara tepat waktu yang lebih *dissuasive* jika tindakan lain tidak meningkatkan kepatuhan;
5. Peningkatan pemahaman risiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU PPT, serta penerapan APU PPT berbasis risiko, kepada pelaku industri jasa keuangan;
6. Peningkatan kerja sama terkait APU PPT di tingkat nasional dan internasional, dan
7. Pengelolaan statistik APU PPT yang terintegrasi.

Selanjutnya, untuk memenuhi *priority action plan* tersebut dan dalam rangka persiapan MER FATF, OJK melakukan koordinasi aktif dengan para pelaku industri jasa keuangan dan asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan. Koordinasi aktif tersebut merupakan hal yang penting dalam keberhasilan MER Indonesia oleh FATF, khususnya mendukung penilaian yang baik atas efektivitas implementasi program APU PPT yang sesuai dengan standar FATF terkait *preventive measures* (*immediate outcome* 4).

Selama triwulan II-2019, OJK melakukan persiapan pelaksanaan MER FATF dengan melibatkan pelaku industri jasa keuangan dan asosiasi sektor jasa keuangan, meliputi:

1. Rapat Pembahasan Penyampaian Informasi PJK
2. *Focus Group Discussion* pembahasan template kuesioner *Immediate Outcome 4 – Preventive Measures*
3. Forum Strategis mengenai Kesiapan Perbankan Menghadapi MER FATF yang diselenggarakan oleh FKDKP di Jakarta.

OJK secara internal membahas dan menyusun pengisian kuesioner *Technical Compliance* untuk MER FATF. Melalui rapat intensif, OJK menyampaikan jawaban atas *Technical Compliance* kepada PPATK selaku koordinator nasional MER Indonesia.

2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia internal OJK dilakukan melalui program sertifikasi level 1 kepada seluruh pengawas, dan program pelatihan lanjutan yang mengangkat topical atau *current issues* tertentu, yaitu:

1. *In-House Training* Penguatan Pengawasan Program APU PPT terhadap Penyedia Jasa Keuangan yang Bergerak di Bidang Pasar Modal di Jakarta.
2. *In-House Training* Penerapan *Risk Based Approach* (RBA) dalam Pengawasan Program APU PPT dan Implementasi Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) Tahap 2 di Jakarta.
3. Diseminasi Laporan Kompilasi Hasil Pengawasan Program APU PPT tahun 2018 dengan satuan kerja internal dan turut mengundang AUSTRAC *Representative* sebagai narasumber pemaparan regulasi dan pendekatan yang diambil oleh AUSTRAC terkait dengan pengawasan APU PPT di Jakarta.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada industri jasa keuangan, OJK menyelenggarakan pelatihan topik APU PPT, yaitu:

1. *Workshop* pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko bagi sektor Pasar Modal di Jakarta.
2. *Workshop* pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko untuk IKNB di Jakarta.
3. *Industrial Testing* SIGAP kepada BPR/BPRS di Bandung.

2.9 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Dalam rangka menguatkan peran OJK dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memelihara hubungan kerja sama dengan instansi terkait baik dalam lingkup domestik dan internasional.

2.9.1 Kerjasama Domestik

Selama periode triwulan II-2019, OJK menandatangani dua kerja sama sebagai berikut:

Tabel II - 49 ◇ **Kerjasama Domestik**

No.	Kerjasama Domestik	Ringkasan Kerjasama
1.	Nota Kesepahaman antara OJK dengan Kementerian Keuangan tentang "Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan".	Landasan optimalisasi dan utilisasi barang milik negara untuk mewujudkan penyediaan gedung kantor bagi OJK dan Kementerian Keuangan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dan urusan pemerintahan.
2.	Nota Kesepahaman antara OJK dengan Universitas Bengkulu tentang "Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan".	Pengembangan keilmuan (akademis) dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Di samping penandatanganan kerja sama antar lembaga, OJK juga menjalin hubungan kelembagaan dengan menyelenggarakan 33 kegiatan kelembagaan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain:

- Dewan Perwakilan Rakyat;
- Kementerian Keuangan;
- Mahkamah Agung;
- Bank Indonesia;
- Lembaga Penjamin Simpanan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemerintah Daerah; dan
- Industri Jasa Keuangan.

Kegiatan kelembagaan yang telah dilakukan antara lain Sosialisasi OJK bersama Anggota Komisi XI DPR RI antara lain terkait Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Non-Bank, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pasar Tradisional Syariah, Akses Keuangan bagi Masyarakat Desa, Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh *Fintech* kepada Pelaku UMKM, Penanaman Nilai-Nilai Syariah dalam Budaya Kerja untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif di Masyarakat Indonesia, Membangun Motivasi Berinvestasi Syariah Melalui Perbankan Syariah, Peran OJK dalam Percepatan Akses Keuangan Daerah, peran OJK Mendorong *Fintech Lending* Kembangkan UMKM, Peran OJK Membangun Ekonomi Bangsa melalui Penguatan Bank Wakaf Mikro, Merencanakan Keuangan Millenial, dan Mengoptimalkan Peran Satgas Waspada Investasi dalam Pencegahan dan Penindakan Investasi Ilegal. Selain melaksanakan kunjungan kerja di daerah Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, OJK bersama Komisi XI DPR RI melaksanakan Rapat Kerja Komisi dengan tema pembahasan Asumsi Dasar dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020, dan Penyampaian Laporan Triwulan I-2019 OJK.

2.9.2 Kerjasama Internasional

A. Kerja Sama Hubungan Bilateral dan Regional

a. Penguatan Peran dan Posisi OJK dalam Perundingan Jasa Keuangan

Kerja sama bilateral dan regional diperlukan sebagai penguatan peran dan posisi OJK dalam perundingan jasa keuangan. Adapun peran OJK dinilai dari posisi/ *stance* OJK yang dapat diterima menjadi posisi Indonesia dan counterparts dalam penyelesaian perundingan perdagangan internasional untuk sektor jasa keuangan, baik untuk bilateral, regional (ASEAN), maupun plurilateral:

Adapun sampai dengan triwulan II-2019 telah dilakukan :

1. Pertemuan *Working Committee on Financial Services Liberalisation* (WC-FSL) di Labuan Bajo
2. Perundingan putaran ke-8 *Working Group on Trade in Services* (WG-TiS), Indonesia – *European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) di Jakarta.
3. *General Review of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (GR-IJEP), hasil *Chief Negotiator Meeting*.

b. Penguatan Hubungan Kerja Sama Kelembagaan OJK dengan Otoritas Keuangan Asing maupun Lembaga Internasional

Dalam rangka penguatan hubungan kerja sama kelembagaan dengan otoritas keuangan asing maupun lembaga internasional OJK melakukan berbagai pembahasan perjanjian kerja sama. Adapun sampai dengan triwulan II-2019 telah dilakukan:

1. **Perundingan Perjanjian Kerja Sama Internasional**
 - a. Pembentukan *Working Group Banking and Finance Indonesia* dan Russia (OJK-BI-BKF).
 - b. MoU OJK - *Hong Kong Monetary Authority* (HKMA).
 - c. MoU OJK - *IFC on Credit Reporting System*.
2. **Implementasi Kerjasama Internasional**
 - a. International Labour Organization
Peluncuran hasil riset *Internasional Labour Organization* (ILO) "*Financing Small Businesses in Indonesia; Challenges and Opportunity*"
 - b. Embassy Korea
Pertemuan dengan Satgas Waspada Investasi terkait adanya *Fintech* ilegal Korea di Indonesia
 - c. Al Baraka Banking Group
Courtesy Visit kepada Deputi Komisioner Internasional dan Riset

- d. Japan Embassy
Courtesy Visit OJK ke Kedutaan Jepang dalam rangka *update* kelangsungan program Global Financial Partnership Center (GLOPAC) dan rencana kunjungan Japan FSA ke Indonesia
- e. Kementerian Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Uganda *Benchmarking* delegasi dari Kementerian Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Uganda dengan topik *Tax Regimes for Islamic Financial Services Sector in Indonesia*
- f. Monetary Authority Singapore
OJK berkoordinasi dengan MAS untuk menjadi pembicara dalam *Focus Group Discussion Supervision of Capital Market Development*
- g. Securities Commission Malaysia SECCOM
OJK berkoordinasi dengan SECCOM untuk menjadi pembicara dalam *Focus Group Discussion Supervision Of Capital Market Development*

B. Kerja Sama Hubungan Multilateral

Indonesia berkepentingan untuk mengimplementasikan berbagai *reform* sebagai bentuk komitmen anggota G-20, termasuk standar di bidang keuangan, atau *Global Financial Sector Reforms* (GFSR). Untuk mendukung hal tersebut, OJK menjadi anggota berbagai fora keuangan internasional dengan tujuan dapat memahami, memberi masukan, dan mempertimbangkan bentuk implementasi terbaik bagi Indonesia terhadap standar keuangan yang ada.

Saat ini OJK menjadi anggota aktif di beberapa fora keuangan internasional antara lain: Financial Stability Board (FSB); Basel Committee on Banking Supervision (BCBS); Islamic Financial Service Board (IFSB); International Organisation of Securities Commissions (IOSCO); The International Financial Consumer Protection Organisation (FinConet); International Capital Market Association (ICMA); International Association of Insurance Supervisors (IAIS); ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI); International Organization of Pension Supervisors (IOPS); International Network on Financial Education (INFE); International Financial Reporting Standards (IFRS); dan The Insurance Information and Ratingmaking Forum of Asia (IIRFA).

Selanjutnya, sebagai sarana untuk memonitor implementasi standar keuangan oleh anggota G20, secara periodik dilakukan berbagai asesmen implementasi standar-standar yang ada. Sebagai konsekuensinya, Indonesia menjalani beberapa asesmen dari lembaga internasional di antaranya: Financial Sector Assessment Program (FSAP) oleh IMF dan World Bank; Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) oleh BCBS; Country Peer Review dan Thematic Peer Review oleh FSB; The Report on

the Observance of Standards and Codes Accounting and Auditing (ROSC AA) oleh World Bank dan Mutual Evaluation Report (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF).

Selain asesmen di atas, OJK juga berkontribusi dalam survei terkait GFSR antara lain: Annual Survey of Investment Regulation of Pension Funds oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Survey OECD Project on the Contribution of Reinsurance to Risk Management, IFSB Survey on Investor Protection in Islamic Capital Markets, FSB evaluation on effects of reforms on SME financing dan Survey FSB Thematic Peer Review on Resolution Planning.

Sampai saat ini OJK juga bekerja sama dengan lembaga internasional dalam mengadakan program *Technical Assistance* antara lain: (i) Asian Development Bank (ADB); (ii) World Bank Group (WB); (iii) International Monetary Fund (IMF); (iv) Islamic Development Bank (IDB); (v) Australian Securities & Investment Commission (ASIC) dan Australian Prudential Regulation Authority (APRA) melalui Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA).

Selain itu, OJK melakukan pemetaan Isu terkait Global Financial Sector Reforms (GFSR) dan Pembahasan FSAP recommendation dan Article IV.

C. Pengembangan Fungsi Investor Relation Unit

Dalam rangka mengembangkan fungsi *investor relation unit*, OJK menyelenggarakan kegiatan penyediaan informasi pada pertemuan dengan *rating agencies* yang terkait proses bisnis utama terkait sektor jasa keuangan di Indonesia. Adapun pada triwulan II-2019 terdapat dua kunjungan *Rating Agencies* yaitu *Moody's Investor Service Visit* dan *Fitch Rating Asia Pacific Regional Visit*. Kunjungan tersebut membahas perkembangan Sektor Perbankan Indonesia dan perkembangan regulasi *Financial Technology (Fintech)* dan Keuangan Syariah.

IRU juga memberikan layanan dalam fungsi *International Relations* bagi para *stakeholders* dengan memfasilitasi korespondensi antara lain terkait Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*). Topik pertemuan mencakup penerapan *green financing* di Indonesia, posisi Indonesia dalam upayanya mencapai *Sustainable Development Goals*, dan kesempatan kerja sama pendalaman pasar keuangan berkelanjutan.



03

Tinjauan Industri dan Operasional
Sektor Jasa Keuangan Syariah

Pengembangan



Penerbitan 4 POJK yang mengatur Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah serta 5 SEOJK yang mengatur Perbankan Syariah



Penyusunan Program Kerja Utama Transformasi Perbankan Syariah



Kajian *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020 – 2024



Kajian Mengenai Skema Sukuk



Pendampingan Penerbitan Sukuk Wakaf



Penelitian Optimalisasi *Branding* Produk Asuransi Syariah di Indonesia

Event



Training On Trainers bersama Masyarakat Ekonomi Syariah



Workshop Sukuk sebagai Sumber Pendanaan Perusahaan untuk *Corporate Secretary*



Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah melalui Media Sosial



Sosialisasi IKNB Syariah di Gorontalo, Aceh, Kendari



Roadshow Seminar Asuransi Syariah dan *Multifinance* Syariah



Workshop Uang Elektronik Berdasarkan Prinsip Syariah

3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

masing-masing sebesar 1,91% (*qtq*) dan 0,99% (*qtq*), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 1,45% (*qtq*).

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan baik. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK)

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada triwulan II 2019 dengan rasio NPF *Gross* sebesar 3,26%.

Tabel III - 1 ◇ Indikator Perbankan Syariah

Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan I-2019		Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan II-2019		Pertumbuhan (<i>yoy</i>) Triwulan II-2019	
	II-2018	I-2019	II-2019	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
BUS + UUS + BPRS									
Total Aset Perbankan Syariah (Rp Triliun)	444,43	492,23	499,34	2,54	+0,52	7,12	+1,45	54,91	+12,36
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	5,71	5,94	5,95	-	-0,26		+0,14		+0,24
DPK (Rp Triliun)	348,38	390,87	394,72	10,91	+2,87	3,85	+0,99	46,34	+13,30
Pembiayaan (Rp Triliun)	303,54	336,39	342,81	7,11	+2,16	6,42	+1,91	39,26	+12,94
Jumlah NPF (Rp Triliun)	10,68	11,21	11,72	1,24	+12,40	0,51	+4,52	1,04	+9,78
Jumlah Bank						0,00			
- BUS	13	14	14	0,00	0,00	0,00	+0,00	1,00	+7,69
- UUS	21	20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-4,76
- BPRS	168	165	164	-2,00	-1,20	-1,00	-0,61	-4,00	-2,38
Jumlah Kantor	2.634	2.746	2.788	22,00	+0,81	42,00	+1,53	154,00	+5,85
Rasio Keuangan BUS & UUS									
NPF <i>Gross</i> (%)	3,28	3,18	3,26	-	+0,33	-	+0,08	-	-0,02
NPF <i>Net</i> (%)	1,88	1,91	2,02	-	+0,17	-	+0,11	-	+0,14
ROA (%)	1,69	1,58	1,68	-	-0,01	-	+0,10	-	-0,01
BOPO (%)	84,78	85,58	83,94	-	+0,09	-	-1,64	-	-0,84
FDR (%)	86,46	85,44	86,15	-	-0,68	-	+0,71	-	-0,31
BUS									
Total Aset BUS (Rp Triliun)	294,32	318,06	322,95	1,37	+0,43	4,89	+1,54	28,63	+9,73
DPK (Rp Triliun)	241,07	262,71	266,57	5,10	+1,98	3,86	+1,47	25,49	+10,58
Pembiayaan (Rp Triliun)	189,68	205,92	212,56	3,62	+1,79	6,64	+3,22	22,88	+12,06
Jumlah NPF (Rp Triliun)	7,27	7,09	7,14	0,49	+7,48	0,05	+0,70	-0,13	-1,79
CAR (%)	20,32	19,85	19,56	-	-1,54	-	-0,29	-	-0,76
NPF <i>Gross</i> (%)	3,83	3,44	3,36	-	+0,18	-	-0,08	-	-0,47
ROA (%)	1,37	1,46	1,61	-	+0,18	-	+0,15	-	+0,24
BOPO (%)	88,75	87,82	85,72	-	-1,36	-	-2,10	-	-3,03
FDR (%)	78,68	78,38	79,74	-	-0,15	-	+1,36	-	+1,06
Jumlah Kantor	1.826	1.886	1.894	11,00	-5,79	8,00	+0,42	68,00	+3,72

Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (qta) Triwulan I-2019		Pertumbuhan (qta) Triwulan II-2019		Pertumbuhan (yoy) Triwulan II-2019	
	II-2018	I-2019	II-2019	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
UUS									
Total Aset UUS (Rp Triliun)	138,88	161,76	163,94	1,12	+0,70	2,19	+1,35	25,06	+18,04
DPK (Rp Triliun)	100,14	120,03	120,06	5,80	+5,08	0,03	+0,03	19,91	+19,89
Pembiayaan (Rp Triliun)	105,34	121,07	120,52	3,18	+2,70	-0,55	-0,46	15,18	+14,41
Jumlah NPF (Rp Triliun)	2,40	3,31	3,72	0,77	+30,40	0,42	+12,62	1,32	+54,95
NPF Gross (%)	2,28	2,73	3,09	-	+0,58	-	+0,36	-	+0,81
ROA (%)	2,40	1,82	1,83	-	-0,43	-	+0,01	-	-0,57
BOPO (%)	72,62	79,80	79,54	-	+4,42	-	-0,26	-	+6,93
FDR (%)	105,19	100,87	100,39	-	-2,34	-	-0,49	-	-4,81
Jumlah Kantor	349	364	388	10,00	+2,82	24,00	+6,59	39,00	+11,17
BPRS						0,04			
Total Aset BUS (Rp Triliun)	11,22	12,41	12,45	0,05	+0,39	-0,04	+0,31	1,23	+10,92
DPK (Rp Triliun)	7,17	8,14	8,10	0,00	+0,01	0,33	-0,45	0,93	+13,03
Pembiayaan (Rp Triliun)	8,52	9,40	9,73	0,31	+3,44	0,04	+3,50	1,20	+14,14
Jumlah NPF (Rp Triliun)	1,00	0,82	0,86	-0,03	-3,19	-	+4,94	-0,15	-14,48
CAR (%)	19,96	20,19	19,54	-	+0,86	-	-0,65	-	-0,42
NPF Gross (%)	11,78	8,71	8,83	-	-0,60	-	+0,12	-	-2,95
ROA (%)	2,41	2,36	2,51	-	+0,49	-	+0,14	-	+0,10
BOPO (%)	85,97	87,00	85,78	-	-0,66	-	-1,22	-	-0,19
FDR (%)	118,91	115,50	120,08	-	+3,83	-	+4,58	-	+1,16
Jumlah Kantor	459	496	506	1,00	+0,20	10,00	+2,02	47,00	+10,24

Sumber: OJK, diolah

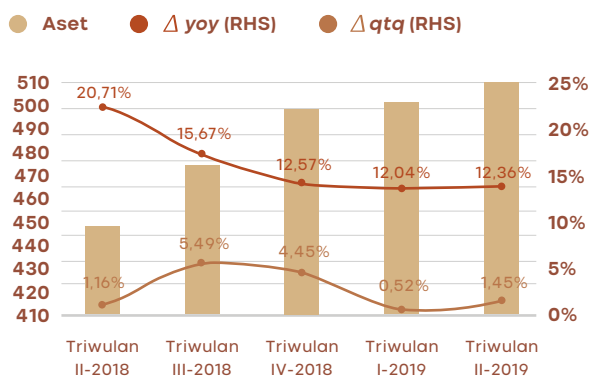
Keterangan : Statistik Perbankan Syariah (SPS), Juni 2019

A. Aset

Aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga double digit (12,36%, yoy), dengan pangsa aset mencapai 5,95% terhadap perbankan nasional, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,94%. BUS, UUS, dan BPRS masing-masing mengalami pertumbuhan aset yang tertahan sebesar 1,54% (qta), 1,35% (qta) dan 0,31% (qta). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 64,68%, 32,83%, dan 2,49%.

Dilihat dari komponennya, aset perbankan syariah utamanya ditempatkan pada pembiayaan yang disalurkan (PYD) dengan porsi sebesar 45,65%, surat berharga yang dimiliki (12,49%), dan penempatan pada Bank Indonesia (14,11%). PYD tumbuh 1,93% (qta) atau 12,90% (yoy), penempatan perbankan syariah pada surat berharga mengalami penurunan 12,81% (qta) atau naik 1,70% (yoy). Di lain pihak, penempatan pada Bank Indonesia mengalami peningkatan 20,38% (qta) atau naik 34,40% yoy. Di sisi pasiva, pertumbuhan aset dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK yang sebesar 0,99% (qta) atau 13,30% (yoy), sementara modal terjaga dengan pertumbuhan sebesar 0,14% (qta), meski secara tahunan menurun 1,89% (yoy).

Grafik III - 1 ◇ Tren Aset Perbankan Syariah

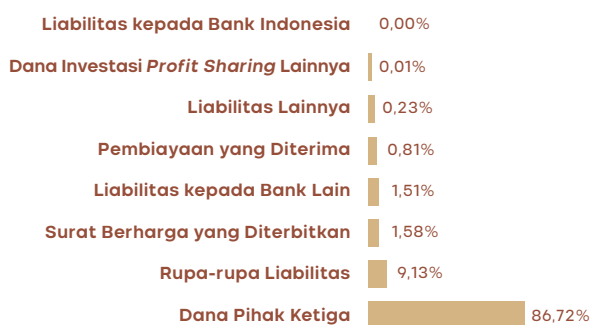


Sumber: SPS, Maret 2019

B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 86,72% dari total sumber dana perbankan syariah (selain modal), diikuti oleh komponen rupa-rupa liabilitas sebesar 9,13%, surat berharga yang diterbitkan sebesar 1,58% dan liabilitas kepada bank lain sebesar 1,51% sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perbankan syariah posisi triwulan II-2019.

Grafik III - 2 ◇ Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (selain Modal)

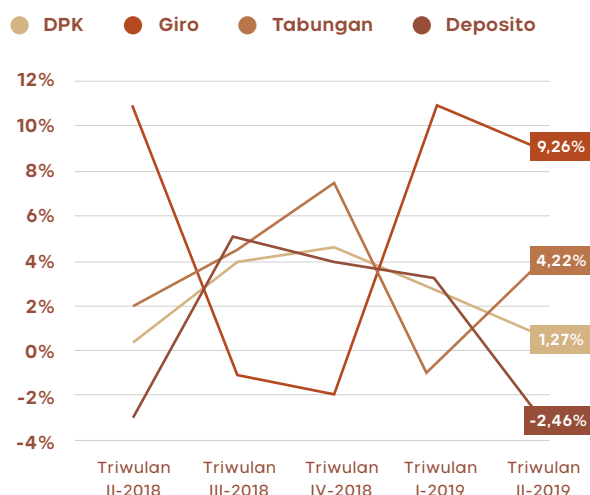


Sumber: SPS, Juni 2019

Sumber dana perbankan syariah pada triwulan II-2019 tumbuh sebesar 1,27% (*qtq*) atau 12,78% (*yoy*). Pertumbuhan sumber dana perbankan syariah ditopang oleh DPK yang tumbuh 0,99% (*qtq*) atau 13,30% (*yoy*), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,87% (*qtq*). Pertumbuhan DPK sangat dipengaruhi oleh Deposito yang komposisinya merupakan mayoritas dibandingkan instrumen DPK lainnya. Deposito memiliki porsi sebesar 55,81%, diikuti Tabungan yang memiliki porsi sebesar 30,78%, dan sisanya merupakan instrumen Giro yang memiliki porsi sebesar 13,41%.

Dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan Deposito cukup terjaga. Pada periode triwulan II 2019, Deposito melambat dengan laju sebesar 2,46% (*qtq*), atau secara tahunan tumbuh 10,13% (*yoy*). Di sisi lain, Tabungan mengalami peningkatan sebesar 4,22% (*qtq*), meski secara tahunan tumbuh 16,97% (*yoy*). Sementara giro menunjukkan peningkatan dengan laju tertinggi sebesar 9,26% (*qtq*) atau 18,98% (*yoy*).

Grafik III - 3 ◇ Pertumbuhan DPK Bank Syariah (*qtq*)



Sumber: SPS, Juni 2019

C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan bank syariah pada triwulan II-2019 tumbuh 1,91% (*qtq*), melambat dibandingkan posisi triwulan I-2019 yang tumbuh sebesar 2,16% (*qtq*). Perlambatan pertumbuhan ini terjadi pada jenis penggunaan Modal Kerja dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar -0,76% (*qtq*) dan 2,72% (*qtq*). Pada periode laporan, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar -0,76% (*qtq*), 4,10% (*qtq*), dan 2,72% (*qtq*), sementara pada triwulan sebelumnya, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 1,38% (*qtq*), 2,99% (*qtq*), dan 2,31% (*qtq*). Berdasarkan porsinya, pembiayaan bank syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 44,06% diikuti modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 31,84% dan 24,10%.

Tabel III - 2 ◇ Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp Miliar)	2018	2019		Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan II - 18	Triwulan I - 19	Triwulan II - 19	Triwulan II - 18	Triwulan I - 19	Triwulan II - 19
Modal Kerja	105,34	109,98	109,14	31,84%	-2,20%	1,38%	-0,76%	10,06%	9,41%	3,61%
Investasi	69,44	79,35	82,60	24,10%	1,11%	2,99%	4,10%	7,02%	15,28%	18,95%
Konsumsi	128,76	147,06	151,06	44,06%	2,24%	2,31%	2,72%	14,72%	17,32%	17,32%
Total	303,54	336,39	342,80	100%	3,00%	2,16%	1,91%	11,25%	14,15%	12,94%

Sumber: SPS, Desember 2018

Pembiayaan perbankan syariah berdasarkan ekonomi yang ditunjukkan oleh tabel Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi menunjukkan 56,03% PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif) yang pada triwulan II-2019 meningkat sebesar Rp2,13 triliun (*qtq*), tumbuh sebesar 1,16% (*qtq*) atau 9,70% (*yoy*). Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh sektor Konstruksi yang meningkat Rp1,35 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 4,98% (*qtq*). Kontributor pertumbuhan terbesar kedua pada sektor lapangan usaha adalah Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga yang mengalami pertumbuhan sebesar Rp619 miliar, atau tumbuh sebesar 165,68% (*qtq*). Kontributor peningkatan pembiayaan lapangan usaha terbesar berikutnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran yang

mengalami pertumbuhan sebesar Rp581 miliar, atau tumbuh sebesar 1,74% (*qtq*).

Sementara itu, sektor Rumah Tangga (non-produktif) berkontribusi sebesar 42,39% pada pembiayaan BUS dan UUS. Sektor Rumah Tangga meningkat sebesar Rp4,17 triliun (*qtq*), tumbuh sebesar 3,05% (*qtq*) atau 15,35% (*yoy*).

Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal yang meningkat Rp3,12 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 4,25% (*qtq*). Kontributor terbesar berikutnya adalah pembiayaan untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) yang meningkat Rp921 miliar (*qtq*) atau tumbuh sebesar 1,92% (*qtq*).

Tabel III - 3 ◇ Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp Miliar)	2018	2019		Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan II - 18	Triwulan I - 19	Triwulan II - 19	Triwulan II - 18	Triwulan I - 19	Triwulan II - 19
Lapangan Usaha	170.122	184.483	186.618	56,03%	3,12%	2,05%	1,16%	8,78%	11,83%	9,70%
Pertanian, Pemburuan dan Kehutanan	11.924	12.168	12.749	3,83%	14,71%	5,83%	4,78%	21,10%	17,05%	6,91%
Perikanan	1.191	1.169	1.135	0,34%	13,70%	-2,95%	-2,93%	-11,75%	11,58%	-4,74%
Pertambangan dan Penggalian	5.555	5.306	5.838	1,75%	-15,21%	-1,92%	10,04%	-21,61%	-19,01%	5,11%
Industri Pengolahan	22.934	25.343	25.621	7,69%	6,97%	4,02%	1,10%	11,56%	18,20%	11,72%
Listrik, gas dan Air	13.576	16.274	14.694	4,41%	21,76%	-1,96%	-9,71%	72,80%	45,96%	8,23%
Konstruksi	22.033	27.180	28.533	8,57%	3,57%	10,27%	4,98%	11,38%	27,77%	29,50%
Perdagangan Besar dan Eceran	32.935	33.462	34.043	10,22%	1,43%	0,89%	1,74%	8,16%	3,05%	3,37%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.125	4.789	4.688	1,41%	10,58%	1,28%	-2,10%	18,21%	28,39%	13,66%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	9.841	9.254	8.985	2,70%	0,07%	-1,28%	-2,91%	-10,77%	-5,89%	-8,69%
Perantara Keuangan	17.769	18.352	18.321	5,50%	-4,42%	-6,22%	-0,17%	-8,34%	-1,28%	3,11%
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	12.217	12.903	12.852	3,86%	-0,01%	-3,09%	-0,40%	4,80%	5,61%	5,20%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4	10	23	0,01%	-24,36%	150,99%	138,02%	-54,83%	75,14%	451,15%
Jasa Pendidikan	4.947	5.760	6.026	1,81%	3,18%	5,50%	4,61%	12,68%	20,15%	21,81%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.862	5.343	5.451	1,64%	-2,98%	11,58%	2,04%	10,00%	34,20%	41,14%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	6.454	6.038	6.342	1,90%	-3,66%	12,80%	5,03%	31,85%	-9,87%	-1,74%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	354	374	993	0,30%	6,99%	1,35%	165,68%	3,06%	13,05%	180,74%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	1	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Kegiatan yang Belum Jelas Batasnya	402	757	324	0,10%	-12,93%	-19,21%	-57,25%	-46,54%	64,11%	-19,43%

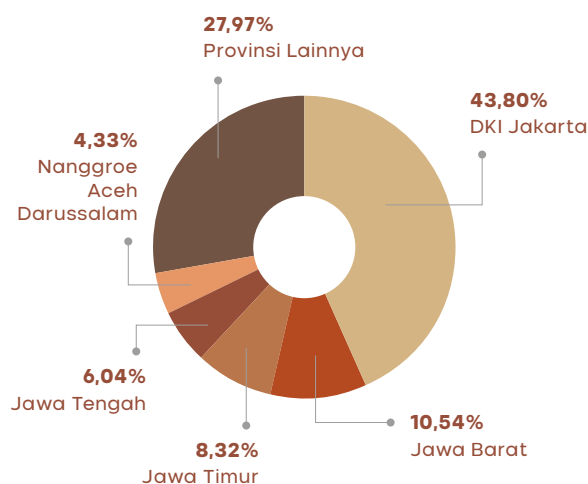
Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp Miliar)	2018	2019		Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan II - 18	Triwulan I - 19	Triwulan II - 19	Triwulan II - 18	Triwulan I - 19	Triwulan II - 19
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)	122.389	137.006	141.182	42,39%	3,03%	2,54%	3,05%	15,23%	15,34%	15,35%
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	65.221	73.256	26.373	22,93%	4,65%	1,90%	4,25%	17,80%	17,55%	17,10%
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	2.240	2.818	2.931	0,88%	7,07%	5,52%	4,02%	37,22%	34,69%	30,85%
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	3.121	3.348	3.449	1,04%	0,05%	2,31%	3,02%	1,14%	7,33%	10,52%
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	10.012	9.731	96.56	2,90%	2,38%	-1,89%	-0,78%	7,61%	-0,49%	-3,55%
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (Termasuk Multiguna)	41.796	47.852	48.773	14,64%	0,77%	4,34%	1,92%	13,49%	15,37%	16,69%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2.510	5.505	5.281	1,59%	-12,27%	-5,05%	-4,07%	-7,54%	92,37%	110,36%
Total	295.021	326.993	333.080	100%	2,93%	2,12%	1,86%	11,20%	14,09%	12,90%

Sumber: SPS, Juni 2019

Kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup terjaga yang ditunjukkan oleh rasio NPF Gross BUS dan UUS pada triwulan II-2019 di bawah *threshold* 5%, meski mengalami peningkatan 14 bps (qtq) menjadi 3,26%. Peningkatan NPF didorong oleh meningkatnya NPF pada sektor Rumah Tangga sebesar 12 bps (qtq) menjadi 1,88%. Sektor Lapangan Usaha juga mengalami peningkatan NPF sebesar 6 bps (qtq) menjadi 4,30%.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 67,70%, khususnya DKI Jakarta (42,80%), Jawa Barat (10,54%), Jawa Timur (8,32%), dan Jawa Tengah (6,04%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk 5 besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 4,33%.

Grafik III - 4 ◇ Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



Sumber: SPS, Juni 2019

D. Likuiditas

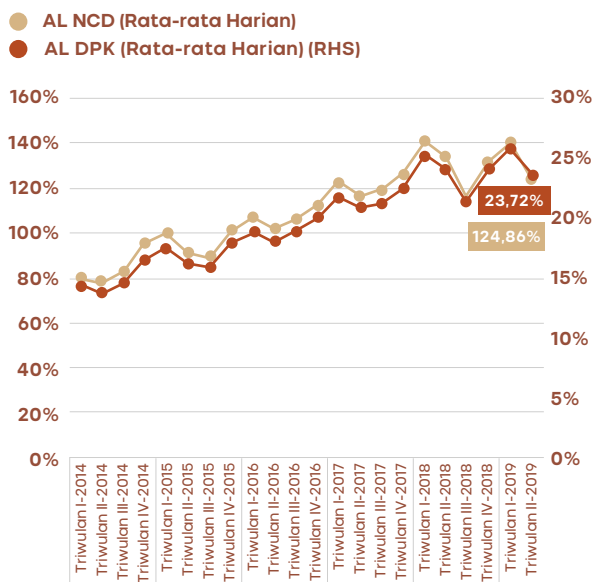
Likuiditas perbankan syariah memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR perbankan syariah yang selalu terjaga dalam *threshold*. Pada triwulan II-2019, FDR perbankan syariah sebesar 86,15%, meningkat 71 bps (qtq) dibandingkan triwulan I-2019 yang sebesar 85,44%, meski secara tahunan mengalami penurunan sebesar 31 bps (yoy) dari triwulan II-2018 yang sebesar 86,46%. Peningkatan FDR selama triwulan II-2019 didorong oleh peningkatan FDR BUS sebesar 136 bps (qtq) menjadi sebesar 79,74%. Sementara, FDR UUS mengalami penurunan sebesar 49 bps (qtq) menjadi sebesar 100,39%. FDR BPRS mengalami peningkatan

dari triwulan I-2019 yang sebesar 115,50% menjadi sebesar 120,08% pada triwulan II-2019.

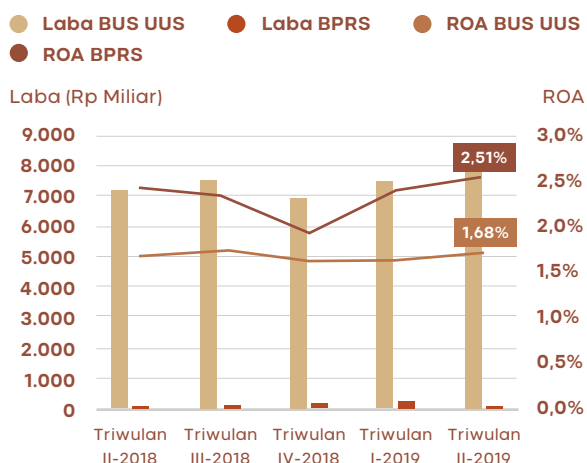
Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS yaitu rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (NCD) dan terhadap DPK juga menunjukkan likuiditas yang memadai. Rata-rata harian rasio AL/ NCD selama triwulan II-2019 sebesar 124,86%, menurun dibandingkan pada triwulan I-2019 sebesar 139,50%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/ DPK yang pada triwulan II-2019 sebesar 23,72%, menurun dibandingkan triwulan I-2019 yang sebesar 25,86%.

Tabel III - 4 ◇ Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS

Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	Triwulan II-2015	Triwulan II-2016	Triwulan II-2017	Triwulan II-2018	Triwulan II-2019
AL/NCD	91,45%	101,74%	117,04%	134,04%	124,86%
AL/DPK	16,29%	18,06%	21,03%	24,42%	23,72%

Grafik III - 5 ◇ Indikator Likuiditas Harian BUS**E. Rentabilitas**

Rentabilitas BUS dan UUS meningkat, tercermin dari rasio ROA pada triwulan II-2019 sebesar 1,68%, cukup stabil jika dibandingkan triwulan II-2018 maupun triwulan I-2019 yang masing-masing sebesar 1,69% dan 1,58%. Hal tersebut dipengaruhi oleh pembiayaan dan efisiensi bank syariah yang terjaga. Kenaikan laba selama triwulan II-2019 sebesar 7,22% (qta) dari Rp7,47 triliun menjadi Rp8,01 triliun. Kenaikan laba BUS dan UUS juga mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,57% (yoy). Sementara itu, pada BPRS, rasio ROA mengalami peningkatan 15 bps (qta) dari 2,36% menjadi 2,51% pada triwulan II-2019.

Grafik III - 6 ◇ Laba dan ROA Perbankan Syariah

Sumber: SPS, Juni 2019

F. Permodalan

Pada triwulan II-2019, CAR BUS mengalami penurunan 29 bps dari posisi triwulan sebelumnya menjadi 19,56%. Penurunan CAR didorong oleh pertumbuhan modal BUS yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Modal BUS sebesar Rp37,25 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 0,38% (qta), sementara ATMR BUS sebesar Rp190,50 triliun, mengalami peningkatan 1,90% (qta). Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS mengalami penurunan, dari 20,19% pada triwulan I-2019 menjadi 19,54% pada triwulan II-2019.

3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah**A. Perkembangan Saham Syariah**

Pada periode triwulan II-2019, OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode I melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-72/D.04/2018 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 Mei 2019 yang meliputi 408 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. DES periode I tahun 2019 berlaku sampai dengan akhir November 2019.

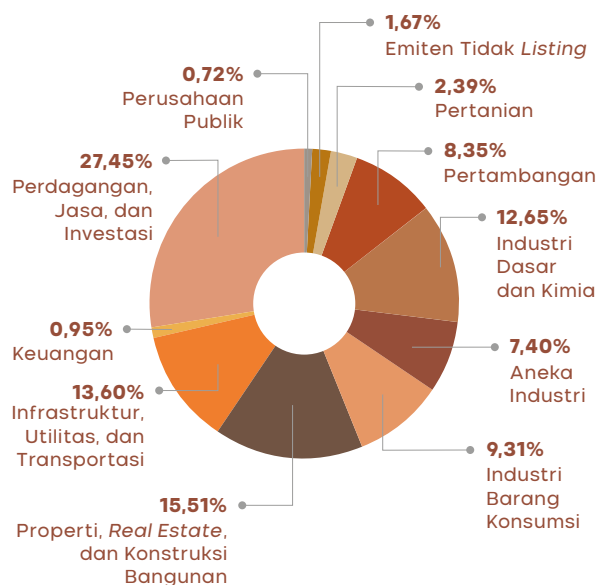
Sejak diterbitkannya DES Periode I, terdapat penambahan 11 saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham yaitu:

Tabel III - 5 ◇ Penambahan Emiten pada DES

No.	Emiten	Tanggal Efektif
1.	PT Bali Bintang Sejahtera Tbk	31 Mei 2019
2.	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk	31 Mei 2019
3.	PT Golden Flower Tbk	14 Juni 2019
4.	PT Krida Jaringan Nusantara Tbk	18 Juni 2019
5.	PT Bima Sakti Pertiwi Tbk.	25 Juni 2019
6.	PT Darmi Bersaudara Tbk	25 Juni 2019
7.	PT Eastparc Hotel Tbk	26 Juni 2019
8.	PT Berkah Prima Perkasa Tbk	27 Juni 2019
9.	PT Envy Technologies Indonesia Tbk	27 Juni 2019
10.	PT Hensel Davest Indonesia Tbk	27 Juni 2019
11.	PT DMS Propertindo Tbk.	28 Juni 2019

Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga akhir periode laporan berjumlah 419 saham. Mayoritas Saham Syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebanyak 115 saham (27,45%).

Grafik III - 7 ◇ Judul Siaran Pers



Kinerja saham syariah berdasarkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII) dan Jakarta Islamic Index (JII) 70 secara umum mengalami koreksi. Pada akhir periode laporan, ISSI ditutup pada level 186,01 poin atau menurun sebesar 2,18% dibandingkan periode sebelumnya sebesar 190,17. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI, menurun sebesar 2,62% jika menjadi sebesar Rp3.699,47 triliun.

Pada periode yang sama, indeks JII ditutup pada level 682,85 atau menurun 3,13% dibandingkan periode sebelumnya. Kapitalisasi JII ditutup pada Rp2.114,40 triliun menurun 8,17% dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan JII 70, pada akhir Juni 2019, ditutup pada level 226,08 menurun 3,43% dibandingkan pada akhir periode triwulan I-2019. Kapitalisasi JII70 per akhir Juni 2019 ditutup pada level Rp2.707,71 triliun, menurun 3,10% dibandingkan akhir triwulan I-2019.

Tabel III - 6 ◇ Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2013	1.672,10	2.557,85	-	4.219,02
2014	1.944,53	2.946,90	-	5.228,04
2015	1.737,29	2.600,85	-	4.872,70
2016	2.041,07	3.175,05	-	5.759,38
2017	2.288,02	3.704,54	-	7.052,39
2018	2.239,50	3.666,70	2.715,85	7.023,50
Triwulan I-2019	2.302,45	3.798,99	2.794,25	7.356,38
Triwulan II-2019	2.114,40	3.699,47	2.707,71	7.243,04

Tabel III - 7 ◇ Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2013	585,11	143,71	-	4.274,18
2014	691,04	168,64	-	5.226,95
2015	603,35	145,06	-	4.593,01
2016	694,13	172,08	-	5.296,711
2017	759,07	189,86	-	6.355,65
2018	685,22	184,00	227,55	6.194,50
Triwulan I-2019	704,69	190,17	234,11	6.468,76
Triwulan II-2019	682,65	186,01	226,08	6.358,63

B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode triwulan II-2019 terdapat penerbitan sebanyak 12 Sukuk Korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp2,49 triliun, dan tidak terdapat sukuk korporasi yang jatuh tempo selama periode tersebut.

Dengan demikian, jumlah *outstanding* sukuk korporasi menjadi sebanyak 127 seri atau meningkat sebesar 4,96% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari sisi nilai *outstanding* sebesar Rp24,95 triliun atau meningkat sebesar 4,96% dibandingkan akhir triwulan I-2019.

Tabel III - 8 ◇ Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

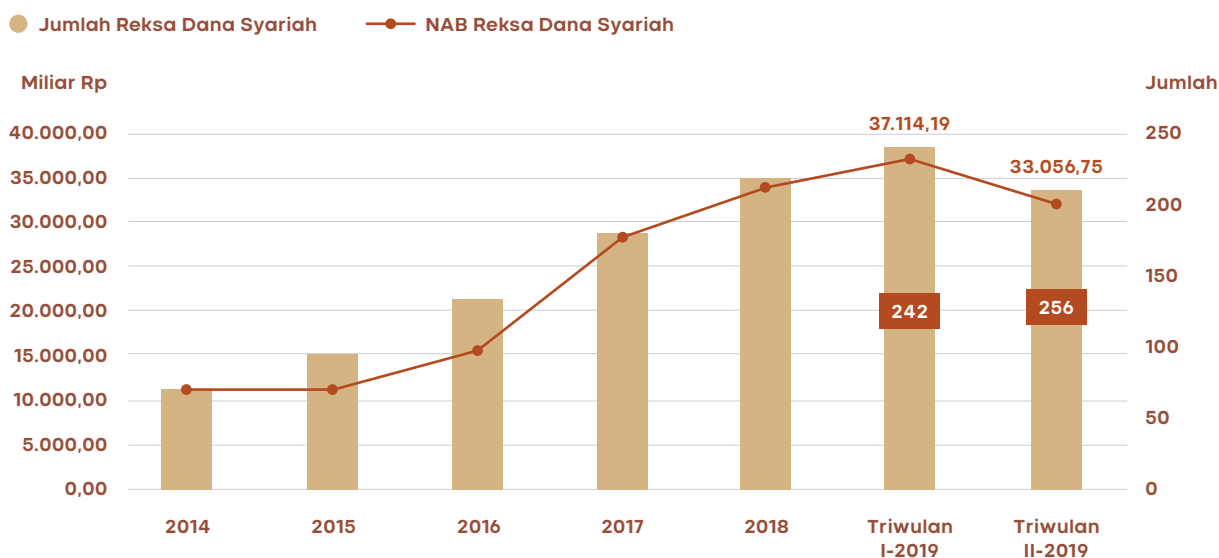
Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah
2013	11.949	64	7.562	36
2014	12.872	71	7.114	35
2015	16.656	87	9.902	47
2016	20.425	102	11.878	53
2017	26.394	137	15.740	79
2018	36.121	175	21.299	99
Triwulan I-2019	39.449	199	24.626	121
Triwulan II-2019	41.936	209	24.955	127

C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Pada triwulan II-2019 terdapat 21 Reksa Dana Syariah efektif terbit serta tujuh Reksa Dana Syariah bubar. Reksa Dana tersebut dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut atau dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK. Total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 256, dengan NAB sebesar Rp33,06 triliun atau meningkat 5,79% dari sisi jumlah namun menurun 10,93% dari sisi NAB dibanding periode sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 12,23% dari total 2.093 Reksa Dana dan 6,45% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp512,59 triliun.

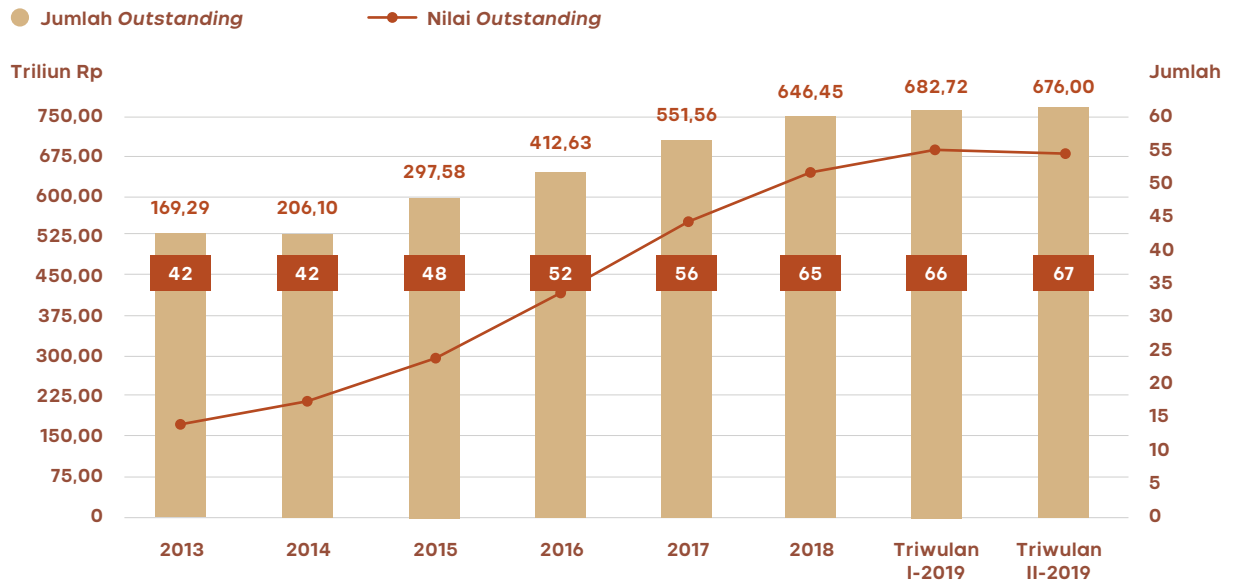
Tabel III - 9 ◇ Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp. Miliar)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11.158,00	230.225,59	241.462,09	4,65%
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,81	4,40%
2017	182	1.595	1777	10,24%	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19%
2018	224	1.875	2.099	10,67%	34.491,17	470.899,50	505.390,67	6,82%
Triwulan I-2019	242	1.847	2.089	11,58%	37.114,19	478.502,93	515.617,12	7,20%
Triwulan II-2019	256	1.837	2.093	12,23%	33.056,75	479.528,56	512.585,31	6,45%

Grafik III - 8 ◇ Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah**D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara**

Sampai dengan triwulan II-2019, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 67 seri, atau meningkat 1,52% dibandingkan periode sebelumnya.

Di sisi lain, nilai sukuk negara *outstanding* sebesar Rp676,00 triliun atau menurun sebesar 0,98% dibandingkan periode sebelumnya.

Grafik III - 9 ◇ Perkembangan Sukuk Negara Outstanding**E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal**

Sampai dengan dengan triwulan II-2019, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

Tabel III - 10 ◇ Jasa Layanan Syariah

Pihak Terlibat/Mempunyai Jasa Layanan Syariah	Jumlah
Manajer Investasi Syariah	53
Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Sukuk Korporasi	28
Pihak Penerbit DES	12
Bank Kustodian yang mengelola reksadana syariah	15
Perusahaan Efek yang mengembangkan dan melaksanakan perdagangan <i>online</i> saham berdasarkan prinsip syariah	15
Wali Amanat yang terlibat perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi	8
Ahli Syariah Pasar Modal	103

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Selama triwulan II-2019, aset IKNB Syariah mengalami penurunan sebesar 1% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp102,06 triliun. Aset industri

perasuransian Syariah masih mendominasi dengan porsi sebesar 43% dari total aset IKNB Syariah secara keseluruhan.

Tabel III - 11 ◇ Aset IKNB Syariah

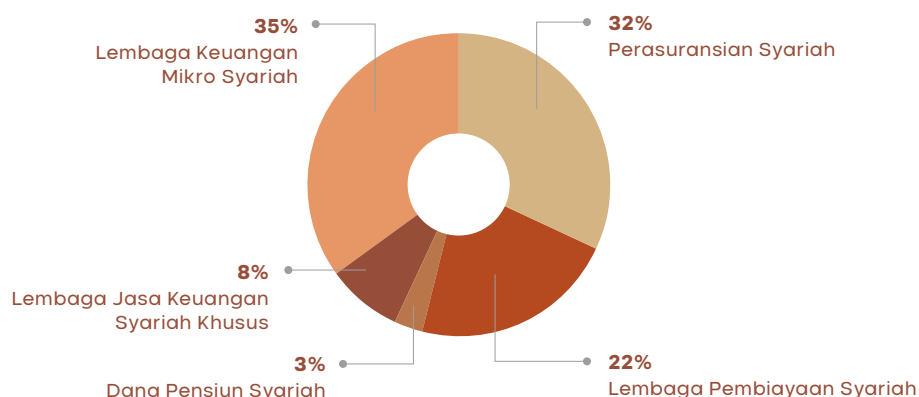
(dalam triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
1.	Perasuransian Syariah	42,06	41,93	41,78	43,08	43,53
2.	Lembaga Pembiayaan Syariah	29,51	28,23	25,71	27,06	26,87
3.	Dana Pensiun Syariah	-	-	3,50	6,24	4,02
4.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	23,84	26,18	25,33	26,93	27,29
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,15	0,24	0,24	0,27	0,35
Total		95,56	96,58	96,56	103,58	102,06

Sampai akhir triwulan II-2019, terdapat 62 perusahaan Perasuransian Syariah, 42 lembaga pembiayaan Syariah, enam Dana Pensiun Syariah, 15 lembaga jasa

keuangan Syariah khusus, dan 62 lembaga keuangan mikro Syariah.

Grafik III - 10 ◇ Jumlah Entitas IKNB Syariah



A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan II-2019, industri Perasuransian Syariah mengalami peningkatan nilai aset dan investasi, masing-masing sebesar 0,22% dan 0,18% menjadi Rp43,53 triliun dan Rp38,28 triliun dibandingkan

triwulan I-2019. Secara *year-on-year*, kontribusi bruto pada triwulan II-2019, mengalami kenaikan sebesar 2,63% menjadi Rp7,60 triliun, sedangkan klaim bruto menurun 85,44% menjadi Rp4,73 triliun.

Tabel III - 12 ◇ Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
1.	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	34,36	34,38	34,47	35,90	35,89
	Asuransi Umum Syariah	5,69	5,62	5,62	5,66	5,73
	Reasuransi Syariah	1,80	1,82	1,86	1,88	1,92
Jumlah		41,85	41,82	41,96	43,44	43,54

2. Investasi					
Asuransi Jiwa Syariah	31,26	31,71	31,88	33,05	33,02
Asuransi Umum Syariah	3,81	3,70	3,78	3,81	3,86
Reasuransi Syariah	1,23	1,25	1,30	1,34	1,40
Jumlah	36,30	36,66	36,97	38,21	38,28
3. Kontribusi Bruto					
Asuransi Jiwa Syariah	6,00	8,90	12,70	3,16	6,22
Asuransi Umum Syariah	0,99	1,31	1,84	0,47	0,91
Reasuransi Syariah	0,41	0,64	0,83	0,22	0,47
Jumlah	7,40	10,85	15,37	3,85	7,60
4. Klaim Bruto					
Asuransi Jiwa Syariah	1,90	4,11	6,20	1,80	4,04
Asuransi Umum Syariah	0,37	0,57	0,79	0,19	0,38
Reasuransi Syariah	0,28	0,43	0,60	0,15	0,31
Jumlah	2,55	5,11	7,58	2,14	4,73
5. Kewajiban					
Asuransi Jiwa Syariah	4,29	4,05	4,20	4,43	4,33
Asuransi Umum Syariah	2,86	2,72	2,73	2,60	2,55
Reasuransi Syariah	0,72	0,77	0,81	0,82	0,82
Jumlah	7,86	7,53	7,73	7,86	7,70

*) Triwulan I-2019 merupakan data bulanan Maret 2019

Pengelolaan perusahaan Perasuransian Syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit Syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 62 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi Syariah *full fledged*, satu perusahaan reasuransi syariah *full fledged*, 47 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Industri Dana Pensiun Syariah

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terdiri dari tiga Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged* dan

tiga dana pensiun konvensional yang menjual paket investasi syariah dengan aset total dana pensiun syariah sebesar Rp4,02 triliun.

C. Industri Pembiayaan Syariah

Sampai dengan akhir triwulan II-2019 terdapat 35 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan 31 perusahaan berbentuk UUS, dengan total aset sebesar Rp21,21 miliar atau mengalami penurunan sebesar 4% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel III - 13 ◇ Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(dalam miliar Rupiah)

No.	Industri	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
1.	Kas dan Setara Kas	553	655	580	1.238	1.317
2.	Aset Tagihan Derivatif	43	49	23	15	4
3.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
4.	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto (aset Produktif)	23.800	21.751	19.297	18.008	17.197
5.	Penyertaan Modal	-	-	-	-	22
6.	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	-	8	3	3	3
7.	Aset yang Disewaoperasikan - Neto	54	23	17	29	36
8.	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	118	116	109	139	151
9.	Aset Pajak Tangguhan	20	20	23	22	21
10.	Rupa-Rupa Aset	2.532	2.245	2.126	2.735	2.468
	Total Aset	27.120	24.867	22.179	22.189	21.218

Sedangkan untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah berjumlah empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan dua perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp2,27 triliun. Selain itu, terdapat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Unit Syariah dengan aset sebesar Rp3,38 triliun.

D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pada triwulan II-2019 jumlah perusahaan Penjaminan Syariah adalah sebanyak enam perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan empat UUS dengan total aset adalah Rp1,85 triliun. Perusahaan Pergadaian Syariah berjumlah tujuh perusahaan terdiri atas satu unit usaha syariah dari PT Pegadaian (Persero) dan enam perusahaan pergadaian swasta, dengan total aset Rp8,99 triliun.

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan LPEI masing-masing adalah unit syariah dari perusahaan dimaksud dengan total aset masing-masing sebesar Rp1,53 triliun dan Rp14,91 triliun. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 65 perusahaan berbentuk *full fledged* dengan total aset Rp0,34 triliun.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan II-2019, OJK menerbitkan beberapa SEOJK bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan POJK terkait, dengan rincian sebagai berikut:

1. SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang berlaku untuk sektor perbankan meliputi bank umum dan BPR, baik yang menjalankan kegiatan secara konvensional maupun secara syariah. SEOJK ini mengatur mengenai pihak utama yang dinilai kembali, cakupan penilaian kembali, tata cara penilaian kembali, konsekuensi hasil akhir penilaian kembali, permohonan peninjauan ulang, alamat penyampaian, dan ketentuan peralihan. Dengan diberlakukannya SEOJK ini maka SEBI Nomor 14/25/DPbS perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit*

and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini mengatur Standar Penerapan dan Pelaporan Manajemen Risiko.

3. SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini mengatur pedoman kerja kepatuhan, sistem dan prosedur kepatuhan serta fungsi kepatuhan.

4. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini mengatur Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

5. SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini mengatur terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap penerapan tata kelola, laporan penerapan tata kelola dan rencana tindak penerapan tata kelola. Dengan diberlakukannya SEOJK ini maka SEBI Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan tidak berlaku.

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Selama triwulan II-2019 OJK merevisi dua peraturan terkait Pasar Modal Syariah, yaitu:

1. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 terkait Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Tujuan revisi peraturan ini adalah untuk mengakomodasi dinamika penerapan ketentuan mengenai ASPM. POJK tersebut mengatur antara lain perizinan, pelaporan, pelaksanaan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL), rangkap jabatan, serta pengawasan ASPM. Selain itu, juga akan

dilaksanakan penyelarasan regulasi terkait di sektor perbankan syariah dan IKNB syariah.

2. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 terkait Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah

Tujuan revisi peraturan ini adalah untuk menghasilkan suatu kerangka peraturan penerbitan Reksa Dana Syariah yang komprehensif dan terkini, sehingga tidak hanya dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun juga alternatif investasi yang aman bagi investor.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama triwulan I-2019 OJK menerbitkan dua peraturan terkait IKNB Syariah, yaitu:

1. POJK Nomor 15/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun

Peraturan ini berisikan ketentuan Tata Kelola Dana Pensiun baik yang konvensional maupun syariah. Hal terkait syariah yang secara khusus diatur dalam POJK ini adalah pengaturan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2. POJK Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Peraturan ini berisikan ketentuan mengenai pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Dalam peraturan dimaksud, terdapat pengaturan mengenai kegiatan usaha syariah, unit usaha syariah dan Dewan Pengawas Syariah. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha syariah bagi perusahaan sehingga dapat lebih fokus dan berdaya saing.

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Selama triwulan II-2019 OJK melaksanakan kegiatan pengawasan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus bank dan DPS, perizinan produk baru, jaringan kantor, dan perizinan lainnya.

Tabel III - 14 ◇ Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pengurus Bank dan DPS

Keterangan	Rata-rata Realisasi SLA Sejak Dokumen Lengkap	Disetujui	Dalam Proses	Jumlah
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus Bank	4	2	9	35
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon DPS	-	-	3	11
Total Permohonan				46

Terkait Perizinan Produk Baru, terdapat sembilan permohonan masuk dengan satu perizinan produk baru dinyatakan tidak disetujui dan delapan perizinan produk baru yang masih dalam proses penyelesaian.

Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 32 permohonan jaringan kantor

perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor dan pemindahan alamat kantor dengan hasil 24 permohonan telah disetujui, satu permohonan tidak disetujui dan 8 permohonan masih dalam proses penyelesaian. Rata-rata realisasi SLA untuk perizinan tersebut adalah 3 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.

Tabel III - 15 ◇ Permohonan Perizinan

Jenis Permohonan	Jumlah
Persetujuan prinsip pendirian Bank Syariah	4
Izin usaha Bank Syariah	2
Perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah (konversi)	6
Pemisahan (<i>spin off</i>)	1
Merger dan/atau akuisisi BUS	2
Merger dan/atau akuisisi BPRS	3

Selanjutnya dari permohonan yang OJK terima tersebut, satu permohonan merger dan/atau akuisisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah disetujui, dan 17 permohonan perizinan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Rata-rata realisasi SLA untuk perizinan tersebut adalah 8 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Sampai dengan triwulan II-2019, terdapat 12 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES, yaitu:

1. PT CIMB Principal Asset Management,
2. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia,
3. PT BNP Paribas Investment Partners,
4. PT Schroders Investment Management Indonesia,
5. PT Aberdeen Asset Management,
6. PT Bahana TCW Investment Management,
7. PT Mandiri Manajemen Investasi,
8. PT Maybank Asset Management,
9. PT Eastspring Investments Indonesia,
10. PT Indosurya Asset Management, dan
11. PT RHB Management Asset Indonesia
12. PT Samuel Aset Manajemen

Pada triwulan II-2019 OJK melakukan pengawasan terhadap satu Pihak Penerbit DES dan laporan hasil pemeriksaan tersebut telah diselesaikan.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

A. Pengawasan

Pada triwulan II-2019 OJK melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap tiga perusahaan perasuransian syariah syariah dengan pemeriksaan seluruh aspek risiko dan satu perusahaan reasuransi syariah (*full fledged*) dengan pemeriksaan sebagian aspek risiko. Atas pemeriksaan langsung tersebut, OJK menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) yang sedang melalui proses permintaan tanggapan sebelum ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final. Selain itu juga dilakukan pengawasan *offsite* yaitu rapat eksekutif dengan dua perusahaan asuransi syariah dan dua dana pensiun syariah.

Terkait pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus (*onsite*), OJK menerbitkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS). Selain itu, OJK melaksanakan rapat eksekutif dengan tiga perusahaan pembiayaan syariah dan satu perusahaan pergadaian syariah.

B. Perizinan

Pada triwulan II-2019, OJK melakukan kegiatan terkait perizinan kelembagaan sebagai berikut:

1. Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha

- Pencabutan izin unit usaha syariah: satu perusahaan pembiayaan PT Trihamas Finance Syariah d/h PT Pro Mitra Finance dan satu perusahaan modal ventura PT Vasham Kosa Sejahtera.
- Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari DPLK PT AXA Mandiri Financial Services (penjualan paket investasi syariah di DPLK).

2. Perizinan dan Pelaporan Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Unit Syariah, Kantor selain Kantor Cabang Syariah, serta Kantor di luar Kantor Pusat

- Pencatatan atas perubahan nama dua kantor di luar kantor pusat unit syariah perusahaan asuransi umum.
- Pencatatan perubahan alamat dan nama pimpinan lima kantor perusahaan asuransi umum syariah.
- Pencatatan atas perubahan alamat satu kantor di luar kantor perusahaan asuransi umum syariah
- Penerbitan izin pembukaan enam Kantor Cabang Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan dan 62 Kantor Cabang Unit Syariah Perusahaan Modal Ventura.

3. Pencatatan Perubahan Susunan Direksi, Komisaris, DPS, Pimpinan UUS, Internal Audit serta Tenaga Ahli

- Pencatatan atas pengangkatan dua orang Direksi, dua orang DPS, dua orang auditor internal, enam orang pimpinan unit syariah, satu orang tenaga ahli perusahaan asuransi jiwa syariah, satu orang tenaga ahli unit syariah perusahaan asuransi jiwa dan pemberhentian satu orang tenaga ahli unit syariah perusahaan asuransi jiwa.
- Pencatatan perubahan susunan DPS pada dua Perusahaan Pembiayaan sebanyak tiga orang dan pencatatan perubahan Pimpinan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan sebanyak satu orang.

4. Pencatatan Produk IKNB Syariah

- OJK menerbitkan 24 surat persetujuan produk asuransi syariah terdiri dari 20 produk asuransi jiwa syariah dan empat produk asuransi umum syariah. Selain itu, OJK juga menerbitkan 10 surat pencatatan produk Asuransi Jiwa Syariah dan tujuh surat persetujuan kerjasama pemasaran *Bancassurance* produk Asuransi Syariah serta pencatatan satu produk Perusahaan Pembiayaan Syariah.

5. Pengujian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama

No.	Jenis Industri	Jumlah Pihak Utama	
		Lulus	Tidak Lulus
1.	Perasuransian Syariah	10	3
2.	Dana Pensiun Syariah	1	1
3.	Lembaga Pembiayaan Syariah	2	1
4.	Lembaga Keuangan Syariah Khusus	-	-
Jumlah		13	5

6. Pemenuhan Syarat Keberlanjutan

OJK melakukan pencatatan atas pemenuhan syarat keberlanjutan pada 20 pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah, tiga pihak utama Dana Pensiun Syariah, dan sembilan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan II-2019, OJK telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait pengembangan perbankan syariah antara lain:

1. Penyusunan Program Kerja Utama Transformasi Perbankan Syariah

Jangka waktu *Roadmap* Perbankan Syariah akan berakhir pada 2019, maka dibutuhkan arah kebijakan dan program kerja untuk 5 tahun berikutnya. Terkait hal tersebut, OJK tengah menyusun arah kebijakan pengembangan perbankan syariah yang mengacu pada Kajian Transformasi Perbankan Syariah Indonesia yang telah diselesaikan pada 2018. Selama periode laporan, OJK menyelenggarakan dua *Focus Group Discussion*, yaitu FGD internal OJK yang mengundang pengawas bank syariah dan FGD eksternal yang mengundang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Working Group Pengembangan Produk

Dalam rangka mendorong pengembangan industri perbankan syariah khususnya dalam hal peningkatan produk dan layanan perbankan syariah, OJK melakukan pembahasan awal pengkinian kodifikasi produk perbankan syariah bersama anggota *Working Group* Produk Perbankan Syariah.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

1. Kajian *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020 – 2024

Merespon perkembangan Pasar Modal Syariah selama lima tahun terakhir yang telah mengalami kemajuan, OJK melanjutkan pengembangan Pasar Modal Syariah secara komprehensif. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan rencana pengembangan yang terstruktur dan terencana, yang tertuang di dalam Kajian *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020–2024.

Kajian ini berisikan evaluasi implementasi *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015–2019, identifikasi faktor pengembangan Pasar Modal Syariah, serta landasan penyusunan panduan pengembangan.

2. Materi Pasar Modal Syariah di Perguruan Tinggi

Dalam rangka menciptakan lulusan universitas siap pakai di industri Pasar Modal Syariah, OJK berinisiatif merumuskan konsep silabus materi Pasar Modal Syariah untuk diimplementasikan di perguruan tinggi. Konsep silabus tersebut telah terlebih dahulu diperkenalkan dan selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan atas modul tersebut, antara lain untuk memperoleh masukan terkait isi modul dan memperoleh komitmen dari perguruan tinggi yang terlibat.

3. Kajian Mengenai Skema Sukuk

Salah satu upaya pengembangan sukuk korporasi Indonesia adalah dengan mendorong perkembangan sukuk korporasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui diversifikasi skema penerbitan menggunakan *Special Purpose Vehicle* (SPV), yang merupakan praktik yang umum digunakan di dunia internasional. Praktik penerbitan sukuk dengan SPV telah diterapkan di Indonesia, yaitu pada penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Indonesia melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Namun, penerbitan sukuk korporasi menggunakan SPV berbadan hukum Perseroan Terbatas berpotensi menghadapi hambatan berupa kompleksitas dan biaya. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian SPV pada Penerbitan Sukuk Korporasi, dengan tujuan untuk menganalisis aspek syariah dan aspek hukum penerapan SPV pada penerbitan sukuk, mengidentifikasi struktur SPV pada penerbitan sukuk, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu diatur terkait SPV.

4. Kajian Implementasi Produk Reksa Dana Syariah Berbasis Pertanian

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan memberikan alternatif sumber permodalan petani di Indonesia, OJK mengidentifikasi produk investasi syariah di pasar modal yang dapat digunakan sebagai sumber permodalan baru di sektor pertanian sekaligus menjadi sarana investasi

baru bagi investor. Salah satu rekomendasi adalah penerbitan *pilot project* produk investasi syariah di pasar modal dengan menggunakan sukuk dan/atau Reksa Dana Syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas (RDPT syariah) dengan *underlying asset* berupa beberapa portofolio subsektor pertanian. Selain itu, dapat juga menggunakan Reksa Dana Syariah berbasis sukuk (RDSBS) dengan aset yang mendasarinya berupa *Medium Term Notes* (MTN) syariah yang diterbitkan perusahaan/anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertanian. Dalam rangka mewujudkan *pilot project* tersebut, OJK melakukan kajian yang mengidentifikasi pihak yang berminat dan mendukung penerbitan produk Reksa Dana Syariah berbasis pertanian ini.

5. Perilaku Harga Saham terkait Penerbitan Daftar Efek Syariah

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan harga, volume perdagangan, dan volatilitas harga saham pada sebelum dan sesudah pengumuman Daftar Efek Syariah (DES) khususnya pada saham-saham yang keluar dari DES. Hasil dari kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi pengaturan Reksa Dana Syariah yang saat ini mengatur periode penjualan efek yang keluar dari DES selama 10 hari. Pengaturan yang berbasis data tersebut diharapkan dapat mendorong industri Pasar Modal Syariah, khususnya Reksa Dana Syariah yang memiliki basis portofolio saham.

6. Kajian Pemetaan Potensi Penerbitan Sukuk Daerah

Kajian ini merupakan lanjutan dari Kajian Pengembangan Sukuk Daerah yang disusun pada 2016. Kajian ini memuat perkembangan sukuk daerah baik dari sisi regulasi hingga perkembangan kebutuhan pendanaan daerah. Penerbitan sukuk daerah masih memiliki beberapa kendala yakni terkait kendala payung hukum. Oleh karena itu, kajian ini membahas mengenai harmonisasi peraturan dengan melibatkan beberapa pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah. Selain itu, kajian ini juga berfokus pada pemetaan potensi daerah yang dinilai berdasarkan beberapa indikator seperti kapasitas fiskal, kemampuan finansial daerah serta dukungan dari pemerintah daerah itu sendiri.

7. Pendampingan terhadap Pihak yang Berminat Melakukan Penerbitan Sukuk Wakaf

Berdasarkan rekomendasi hasil kajian produk investasi berbasis wakaf, akan dilaksanakan *pilot project* penerbitan sukuk wakaf di 2019. Dalam rangka mendukung pelaksanaan hal tersebut, dilakukan pendampingan bekerja sama dengan konsultan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang wakaf dan pasar modal.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

A. Penelitian IKNB Syariah

Pada triwulan II-2019, OJK melakukan penelitian mengenai Optimalisasi *Branding* Produk Asuransi Syariah di Indonesia. Penelitian ini telah mencapai tahap penyusunan kuisioner untuk responden serta penyusunan jadwal wawancara responden.

B. Pengembangan IKNB Syariah

OJK melakukan kegiatan pengembangan IKNB Syariah di beberapa kota di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, khususnya Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Roadshow Seminar Asuransi Syariah dan Multifinance Syariah

OJK bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas ekonomi syariah di berbagai kota. Pada triwulan II-2019 acara *Roadshow Multifinance* Syariah diadakan di Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Kota Surabaya (Jawa Timur) dan Kota Medan (Sumatera Utara) dengan menghadirkan narasumber dari OJK, perwakilan MES Pusat dan perwakilan dari perusahaan pembiayaan. Topik yang dibahas dalam *roadshow* ini adalah:

- Isu Strategis dan arahan Kebijakan Pengembangan *Multifinance* Syariah di Indonesia.
- Bedah Akad dan Landasan Syar'i Pembiayaan Multiguna Syariah di Indonesia.
- Mekanisme Pembiayaan Multiguna Perusahaan *Multifinance* Syariah.

Selain itu, OJK juga melaksanakan *Roadshow* Asuransi Syariah di dua kota yaitu Bengkulu dan Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari OJK, perwakilan MES Pusat dan perwakilan dari perusahaan asuransi. Tema *Roadshow* Asuransi Syariah ini adalah Hidup Penuh Berkah dengan Asuransi Syariah.

2. Workshop Uang Elektronik Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam rangka peningkatan kapasitas internal mengenai pemahaman fikih kontemporer, OJK menyelenggarakan *Workshop* mengenai Uang Elektronik Berdasarkan Prinsip Syariah dengan narasumber perwakilan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.



OTORITAS JASA KEUANGAN

04

**Manajemen Strategis
dan Tata Kelola Organisasi**



4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Dalam merumuskan strategi, rencana dan evaluasi kinerja organisasi, OJK mengacu pada siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK). Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap dan pada triwulan II-2019, OJK memasuki tahap pertama untuk siklus tahun 2020, yaitu penyusunan dan penyesuaian strategi OJK. Tahapan yang telah dilaksanakan antara lain penerjemahan misi dan visi, *external* dan *internal environmental scanning*, serta penggalian masukan pemangku kepentingan dan ahli.

Grafik IV - 1 ◇ Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK mengacu pada Peta Strategi 2019 yang merupakan kelanjutan hasil evaluasi dari strategi tahun sebelumnya. Di dalamnya terdapat enam Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel

2. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan
3. Terwujudnya SJK yang Tangguh, Stabil dan Berdaya Saing
4. Terwujudnya SJK yang Kontributif terhadap Pemerataan Kesejahteraan
5. Terwujudnya Keuangan Inklusif bagi Masyarakat melalui Perlindungan Konsumen yang Kredibel
6. Terwujudnya Ekonomi Syariah Melalui Peningkatan Keuangan Syariah

OJK menerbitkan Laporan Triwulan I-2019 sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian OJK kepada publik.

4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis dan Program Khusus OJK

Sehubungan dengan pelaksanaan IS dan PK OJK 2019 sampai dengan triwulan-II 2019 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. IS-1 Inovasi Keuangan Digital Untuk Peningkatan Efisiensi Dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mendorong inklusi, efisiensi, dan pertumbuhan industri jasa keuangan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sampai dengan triwulan II-2019 telah dilakukan pencatatan dan *mapping* bisnis model 34 penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD), uji coba pada 23 IKD yang tercatat dari total 12 klaster model bisnis yang terbentuk pada *regulatory sandbox*, serta koordinasi dengan pihak eksternal terkait *technical assistance* untuk pengembangan kerangka dan panduan *supervisory technology* (Suptech).

2. IS-2 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mewujudkan pengawasan SJK yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan yang cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui penyediaan sistem informasi pengawasan SJK berbasis teknologi informasi (TI) yang andal dan aman. Sampai dengan triwulan II-2019, telah diselesaikan pengembangan aplikasi OJK-BOX (O-BOX) tahap I. Selain itu, telah dilaksanakan sosialisasi dan implementasi aplikasi tersebut kepada 10 bank *pilot project*.

3. IS-3 Pendalaman Pasar Keuangan

Inisiatif Strategis ini merupakan serangkaian kegiatan pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan, proses bisnis, dan infrastruktur yang dihadapi dalam upaya pendalaman pasar keuangan serta menyusun

rekomendasi dan upaya konkret yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Selama periode laporan, OJK menginisiasi *high level meeting* (HLM) obligasi daerah dengan Pemerintah Daerah Bali, Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman manfaat penerbitan Obligasi Daerah. Selain itu dilaksanakan pemaparan *dashboard* Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SNP3K) dalam *High Level Meeting Forum* Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKP3K).

4. IS-4 Reformasi Industri Keuangan Non-Bank

Inisiatif Strategis ini terdiri dari penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan IKNB. Sampai dengan triwulan II-2019, OJK telah menyusun naskah akademik rancangan POJK tentang Tingkat Kesehatan IKNB (*Risk Based Non Bank Rating*), finalisasi *draft* RPOJK Tingkat Kesehatan IKNB, dan Pedoman analisis *early warning system* (EWS) pada perusahaan asuransi dan reasuransi. OJK juga melakukan uji coba model sistem pengawasan berbasis risiko lembaga jasa keuangan non bank (LJKNB).

5. IS-5 Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk memastikan sistem aplikasi keuangan OJK dapat diandalkan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta tersedianya infrastruktur dan kebijakan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. Sampai dengan triwulan II-2019, OJK telah melakukan penyusunan kajian *early warning system*, Pedoman Rekonsiliasi Aset OJK dan *User Requirement* Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) Generasi-II.

6. IS-6 Penyederhanaan dan Otomasi Proses Bisnis

Inisiatif Strategis ini bertujuan terciptanya proses bisnis yang standar, efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan *stakeholders* utama OJK. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Pengembangan aplikasi Sistem Data Terintegrasi PUJK tahap 1, *User Acceptance Test* (UAT) Penilaian Kepatuhan dan Kepatutan SPRINT untuk Bank Umum Konvensional, Dana Pensiun, dan Pemeringkat Efek, Layanan pengaduan perizinan pada Kontak OJK 157, Pengembangan Standar Prosedur Operasional (SPO) generik di OJK, *Draft* Pedoman Tata Naskah Dinas yang didalamnya memuat *Digital Signature* dan Tata Naskah Dinas elektronik Penyusunan RPDK Keberlangsungan Bisnis (MKB).

7. IS-7 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi OJK yang terintegrasi, handal, aman, berkualitas, mendukung pencapaian visi dan misi OJK, serta memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*. Selama triwulan II-2019, kegiatan terkait IS-7 antara lain Pengembangan *Mobile Apps Executive Information System Dashboard* SJK Terintegrasi (EXIST), *Big Data Analytics* untuk Waspada Investasi, Portal Bersama Integrasi Pelaporan dan OJK telah memberikan akses Portal Bersama kepada BI untuk dilakukan uji coba *Single Sign-On*.

8. IS-8 Percepatan Akses Keuangan

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk melakukan percepatan peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan melalui program yang menyasar kelompok tertentu. Sampai dengan triwulan II-2019, OJK melaksanakan Kajian potensi unggulan/ sektor prioritas di daerah sebagai acuan penyusunan program TPAKD, Penandatanganan Nota Kesepahaman perihal Penguatan Tugas dan Kewenangan OJK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Perjanjian Kerja Sama antara OJK dengan Kemendagri tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Perlindungan Konsumen melalui Optimalisasi Peran TPAKD, *kick off* Sistem Informasi TPAKD (SI-TPAKD) yang terintegrasi, SimPel Day dan Aksi Ikhar Pelajar Indonesia Menabung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang melibatkan Kantor Regional dan Kantor OJK daerah.

Selain pelaksanaan kedelapan IS tersebut, OJK juga melaksanakan serangkaian kajian dalam Proyek Khusus (PK) OJK. Sampai triwulan II-2019, progres pelaksanaan PK adalah sebagai berikut:

1. PK-1 Pengembangan KUR

OJK telah menyusun tinjauan pustaka penelitian mengenai sistem klastering Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada UMKM serta melaksanakan studi literatur terkait.

2. PK-2 Penguatan Riset Untuk Dasar Kebijakan Sektor Jasa Keuangan (*Research Based Policy*)

OJK melaksanakan pengembangan dan peluncuran laman riset di situs OJK, koordinasi riset di lingkungan OJK dengan mengumpulkan data dan informasi topik penelitian yang dilakukan seluruh unit kerja dan menyelenggaraan Seminar Riset *working paper* hasil penelitian 2018 dan *Focus Group Discussion* (FGD) topik riset 2019.

3. PK-3 Digital Economy dan Pengaruhnya Bagi Sektor Jasa Keuangan

OJK melaksanakan FGD dengan akademisi, *platform e-commerce*, serta industri jasa keuangan terkait *e-Commerce*.

4. Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

OJK memfasilitasi pendirian sembilan Bank Wakaf Mikro dan 15 BUMDesa serta melakukan pelatihan lanjutan bagi 41 pengurus Bank Wakaf Mikro, mengembangkan Sistem Informasi dalam bentuk *dashboard* program BWM dan menyusun kerangka Panduan Program (Panpro) Optimalisasi BUMDes.

4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas

4.2.1 Audit Internal

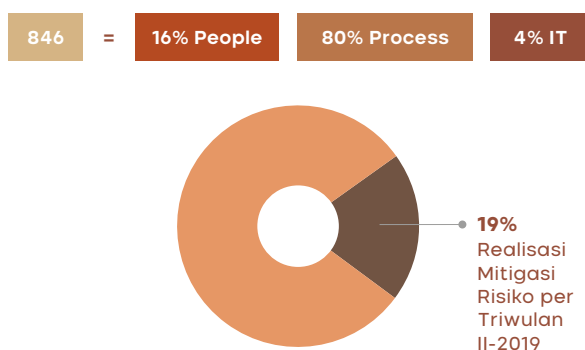
Sampai dengan periode pelaporan, total temuan audit internal 2018-2019 sebanyak 790 dan rekomendasi audit internal sebanyak 1064. Sebanyak 958 rekomendasi (90,03%) telah selesai ditindaklanjuti. Atas total temuan audit tersebut dikategorikan ke dalam delapan fokus asurans, yakni pengawasan, perizinan, EPK, organisasi dan SDM, teknologi informasi, hukum, keuangan, dan logistik.

4.2.2 Pengelolaan Risiko

Dalam melakukan peningkatan Kualitas Proses Bisnis Satuan Kerja di OJK, terdapat 256 rekomendasi yang telah diselesaikan yang berasal dari 259 rekomendasi yang telah jatuh tempo dan satu rekomendasi belum jatuh tempo di periode pelaporan. Pengelolaan risiko OJK selama periode pelaporan dapat diperoleh sebanyak 846 mitigasi. 16% terkait dengan *people*, 80% terkait dengan *process*, dan 4% terkait dengan IT. Realisasi sampai dengan triwulan II-2019 sebanyak 19%. Pengelolaan risiko OJK difokuskan untuk perbaikan proses bisnis yang efektif dan efisien.

Grafik IV - 2 ◇ Pengelolaan Risiko OJK 2019

Total Mitigasi Risiko OJK 2019



4.2.3 Indeks Integritas

Selama periode pelaporan OJK menyelenggarakan survei penilaian integritas. Survei dilakukan kepada responden internal dan eksternal. Responden internal terdiri dari pegawai OJK sedangkan responden eksternal merupakan pengguna layanan OJK. Indeks Integritas menggambarkan sejauh mana OJK sebagai lembaga yang berwenang mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen sektor jasa keuangan menjunjung tinggi nilai integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Hasil survei tersebut menunjukkan indeks integritas OJK pada tahun 2018 yang cukup baik, yaitu sebesar 78,84%.

4.2.4 Control Self Assessment (CSA)

Pendampingan Sistem Pengendalian Kualitas (SPK) dilaksanakan untuk menilai efektivitas atas pelaksanaan proses bisnis di OJK, memberikan konsultasi kepada Satuan Kerja, dan menyampaikan *point of improvement* (POI) kepada Satuan Kerja dalam penerapan SPK OJK. SPK dilakukan dengan melakukan diskusi bersama Satuan Kerja dan analisis atas dokumen-dokumen seperti:

- Standar Operasional Prosedur/Pedoman Pelaksanaan Proses Bisnis
- Kebijakan Kualitas Satuan Kerja
- Rencana Kerja Tahunan
- Kesepakatan Kinerja Satuan Kerja
- Dokumen terkait Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja
- Profil Risiko Satuan Kerja
- Manual Risiko Satuan Kerja (jika ada)
- Daftar Mitigasi Risiko OJK (jika ada)
- Risalah Rapat yang berhubungan dengan SPO yang dipilih

Hasil diskusi dan analisis dokumen-dokumen sumber tersebut menjadi dasar dalam penyusunan POI yang perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja. Selama periode pelaporan telah dilakukan pendampingan *on-site* ke 7 satuan kerja dengan hasil rata-rata menunjukkan kinerja yang efektif.

4.2.5 Program Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi Otoritas Jasa Keuangan (UPG OJK), pada periode laporan menerima dan mengelola 76 laporan gratifikasi dengan 69 merupakan laporan penerimaan dan tujuh laporan merupakan laporan penolakan. Sehingga total sampai dengan triwulan II-2019 sejumlah 128 laporan.

Berdasarkan jenis gratifikasi, 43 laporan dalam bentuk uang dengan nilai ±735 juta dan 33 laporan dalam bentuk barang dengan nilai ±43 juta, sehingga total nilai laporan, yaitu senilai ±778 juta.

UPG secara aktif melakukan *email blast* fakta gratifikasi melalui email Info OJK. Salah satunya yaitu *reminder* terkait larangan penerimaan dan pemberian gratifikasi dalam rangka hari raya idul fitri. Reminder tersebut dikirimkan melalui email dan dimuat di beberapa media cetak dan digital nasional.

4.2.6 Pengelolaan LHKPN

Tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) melalui sistem oleh pegawai OJK atau e-LHKPN per 30 Juni 2019 yaitu 100%. Tingkat kepatuhan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yaitu satu Pegawai yang tidak melapor LHKPN.

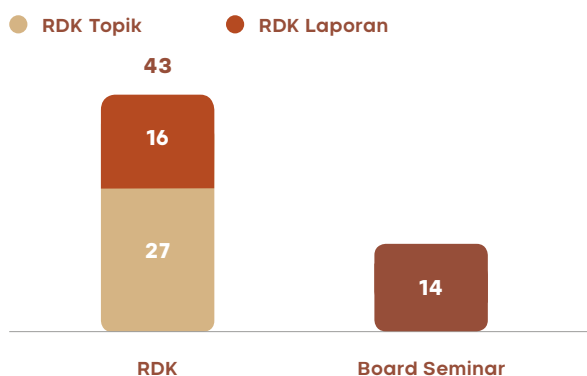
4.2.7 Whistle Blowing System

WBS OJK merupakan sarana pelaporan yang digunakan untuk melaporkan dugaan *fraud* yang dilakukan Insan OJK. Pada triwulan II-2019, WBS OJK menindaklanjuti 65 laporan yang mempunyai cukup bukti dan 29 laporan telah selesai ditindaklanjuti.

4.3 Rapat Dewan Komisiner

Selama triwulan II-2019, Dewan Komisiner telah menyelenggarakan 14 kali Rapat Dewan Komisiner yang membahas 43 materi yang terdiri dari 16 RDK Laporan dan 27 RDK Topik. Sementara itu, *Board Seminar* diselenggarakan sebanyak 10 kali dengan jumlah materi yang dibahas sebanyak 14 materi.

Grafik IV - 3 ◆ Pelaksanaan Rapat Dewan Komisiner (RDK) dan *Board Seminar* (BS)



Dalam RDK Laporan, selain menerima laporan hasil asesmen dan *surveillance* terhadap kondisi perekonomian dan industri jasa keuangan, Dewan Komisiner juga menerima laporan perkembangan pelaksanaan kebijakan strategis OJK. Sementara itu, dalam RDK topik, Dewan Komisiner memutuskan beberapa kebijakan strategis terkait pelaksanaan fungsi dan tugas OJK, di antaranya persetujuan atas

penerbitan sejumlah peraturan. Selama triwulan II-2019, sebanyak enam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) telah mendapatkan persetujuan RDK.

Di sektor Perbankan, Dewan Komisiner menyetujui penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berlaku sejak 1999. Selain mempertimbangkan bahwa peraturan yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan beberapa ketentuan lainnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian, penerbitan peraturan ini juga mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan konsolidasi industri BPR dan BPRS agar efisien dan kuat serta meningkatkan efektifitas pengawasan.

Dalam rangka memperluas akses masyarakat di daerah untuk berinvestasi di Pasar Modal dan untuk meningkatkan basis investor, terutama pemegang saham potensial di daerah, Dewan Komisiner menyetujui penerbitan RPOJK tentang Perusahaan Efek Daerah. Selanjutnya, terdapat penyempurnaan ketentuan Bapepam 1997 terkait Transaksi Efek dengan latar belakang perlunya penyempurnaan ketentuan untuk praktik transaksi efek di bursa maupun luar bursa dan perluasan pengaturan *intermediaries*. Ketentuan ini mengadopsi standar prinsip internasional, seperti *Principle For Financial Market Infrastructures*.

Di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Dewan Komisiner menyetujui RPOJK tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). Dengan penyusunan rencana bisnis oleh LJKNB diharapkan dapat mendorong dan mengarahkan kegiatan operasional pelaku LJKNB agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Selain itu, ketentuan ini juga menstandarkan pelaporan rencana bisnis LJKNB yang selama ini tidak sama antar LJKNB.

Selanjutnya adalah RPOJK yang berlaku untuk seluruh Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perizinan secara elektronik. Selain sebagai payung hukum untuk perizinan secara elektronik seluruh Sektor Jasa Keuangan, penerbitan RPOJK ini juga mendukung program Pemerintah terkait Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Setelah mendapatkan persetujuan di RDK, beberapa RPOJK tersebut akan dilanjutkan ke proses berikutnya sebelum diterbitkan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di OJK.

Sementara itu, materi pembahasan dalam forum BS sebagian besar mengenai RPOJK, selain pembahasan terkait kajian, progres Inisiatif Strategis OJK, dan materi lain yang membutuhkan arahan dari Dewan Komisiner.

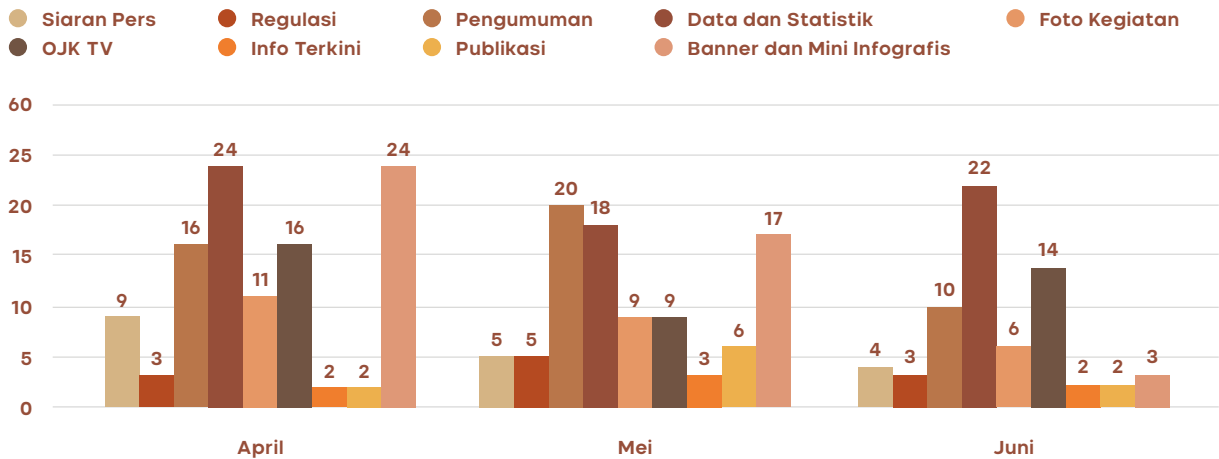
4.4 Komunikasi

4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

Selama periode laporan, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik

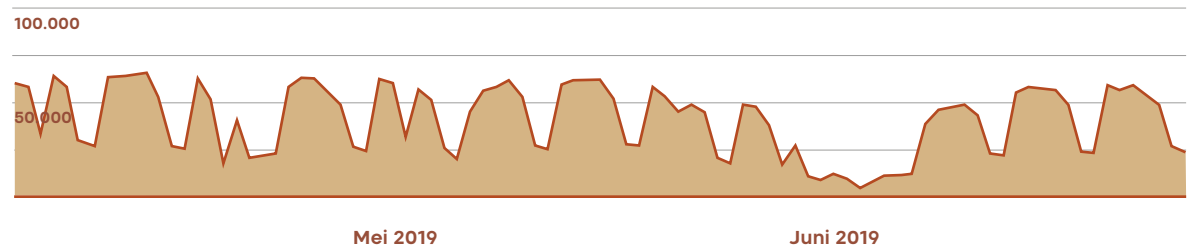
cetak, elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube*.

Grafik IV - 4 ◇ Jumlah Publikasi Website



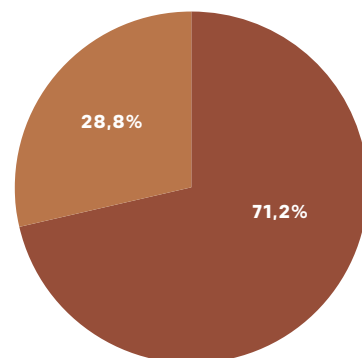
Grafik IV - 5 ◇ Statistik Pengunjung Website OJK Triwulan II-2019

● Pageviews



Pengguna	Pengguna Baru	Sesi
730.453	627.628	1.264.220
Jumlah Sesi per Pengguna	Pageviews	Halaman per Sesi
1,73	3.664.486	2,90
Durasi Rata-rata	Bounce Rate	
00:03:09	58,79%	

● Pengguna Lama ● Pengguna Baru



Selama periode triwulan II-2019, *website* OJK mengunggah 265 materi, antara lain meliputi siaran pers, regulasi, data dan statistik, pengumuman, foto kegiatan, dan info terkini. Berdasarkan data statistik, jumlah pengunjung *website* pada periode ini sebanyak 730.453 pengunjung dengan rata-rata 8.026 pengunjung setiap harinya. Sedangkan jumlah halaman yang diakses sebanyak 3.664.486 *pageviews*.

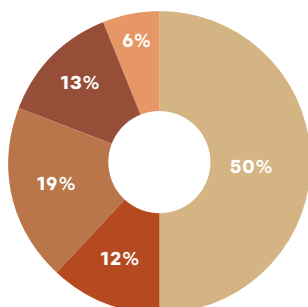
Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (*twitter*, *facebook* dan *instagram*), tingkat publikasi OJK meningkat sebesar 50,5%, dari triwulan I-2019 sebanyak 287 konten menjadi 432 konten pada periode triwulan II-2019. Publikasi tersebut meliputi infografis, *motion* grafis, kultwit, foto dan video kegiatan serta kebijakan OJK. Sampai akhir periode triwulan II-2019, media sosial *twitter* OJK memiliki lebih dari 49.000 *followers*, *facebook* OJK lebih dari 47.000 *followers* dan *instagram* OJK lebih dari 200.000 *followers*.

Mengenai pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media massa dan media sosial. Analisis ini dilakukan melalui *monitoring* berita mengenai OJK dan Industri Jasa Keuangan secara umum pada 18 media cetak, 1.175 media *online*, 14 stasiun televisi nasional dan media sosial. Total pemberitaan selama triwulan II-2019 sebanyak 6.067 berita, dengan rata-rata 2.022 berita perbulan atau sekitar 65 berita per harinya. Berdasarkan sentimen berita, *tone* positif memiliki persentase tertinggi yakni sebesar 84,1% (5.104 berita). Sementara, *tone* netral sebesar 15,8% (957 berita) dan *tone* negatif sebesar 0,1% (6 berita).

Sementara itu terkait relasi media, selama triwulan II-2019 OJK menerbitkan 16 siaran pers yang didominasi oleh topik OJK Wide. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK atau isu lainnya terkait dengan Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa.

Grafik IV - 6 ◇ Tema Siaran Pers

● OJK Wide ● Perbankan ● Pasar Modal
● IKNB ● EPK



Adapun judul siaran pers yang diterbitkan oleh OJK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV - 1 ◇ Judul Siaran Pers

No.	Judul Siaran Pers	Bidang
1.	Optimalisasi Barang Milik Negara (BMN): Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Sepakati Pembangunan Gedung Indonesia Financial Center (IdFC)	OJK Wide
2.	Komitmen OJK Jalankan Pembiayaan Berkelanjutan Untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi	OJK Wide
3.	OJK Sampaikan Peluang Investasi di Pasar Keuangan Indonesia di Hadapan Investor di Inggris	OJK Wide
4.	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Triwulan I Tetap Terjaga - Kinerja Intermediasi dan Penghimpunan Dana Positif	OJK Wide
5.	Perluas Investor Ritel OJK Gelar Capital Market Summit & Expo 2019 di Surabaya - OJK Siapkan Peraturan Perusahaan Efek Daerah	Pasar Modal
6.	OJK Resmikan Bank Wakaf Mikro di Jayapura - Peletakan Batu Pertama Kantor OJK Papua dan Papua Barat	IKNB
7.	Dorong Inklusi Keuangan OJK Gelar Hari Simpanan Pelajar Dan Seminar Digital Disruption, Banking For The Future	EPK
8.	OJK Arahkan Fintech Lending Kembangkan UMKM - Gelar Fintech Days 2019	IKNB
9.	OJK Perkuat Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi	OJK Wide
10.	OJK Cabut Izin Usaha - BPRS Muamalat Yotefa Jayapura	Perbankan
11.	Kembangkan Pasar Modal, OJK Resmikan "Market Standard" Transaksi Repo Atas Efek Bersifat Ekuitas	Pasar Modal
12.	Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Mei: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga dengan Kinerja Intermediasi Positif	OJK Wide
13.	OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Legian Denpasar	Perbankan
14.	Perkuat Layanan Masyarakat, OJK Bangun Gedung Kantor di Yogyakarta	OJK Wide
15.	Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Juni: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Dengan Risiko Terkendali	OJK Wide
16.	Otoritas Jasa Keuangan Berikan Sanksi Kasus - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Pasar Modal

Selanjutnya, OJK menyelenggarakan jumpa pers dan *Media Briefing* sebanyak empat kali. Adapun topik jumpa pers dan *media briefing* pada triwulan II-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 2 ◇ Jumpa Pers dan *Media Briefing*

No.	Tema Kegiatan	Narasumber
1.	Pedoman Iklan Jasa Keuangan	Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK
2.	Perkembangan Pasar Modal Syariah	Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK
3.	Perkembangan IKNB Syariah	Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK
4.	Jumpa Pers Bersama OJK dan Kementerian Keuangan mengenai Kasus Laporan Keuangan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK

Selain itu, sebagai upaya untuk menjaga relasi dan meningkatkan pemahaman media terhadap program dan kebijakan OJK, serta perkembangan industri jasa keuangan, OJK mengadakan kegiatan pelatihan dan *gathering* wartawan dan Redaktur dengan Anggota Dewan Komisioner (ADK).

Sebagai pengayaan program kerja, OJK bekerja sama dengan IDX Channel membuat program bernama '*Decision Maker - OJK Update*'. Sebuah program *talkshow* yang disiarkan secara langsung oleh IDX Channel yang menyajikan data dan informasi dengan tema yang aktual mengenai kebijakan OJK dan perkembangan sektor jasa keuangan yang ditujukan bagi para pengambil kebijakan di industri jasa keuangan. Acara tersebut dapat disaksikan melalui link <https://www.idxchannel.tv/idxc-live>.

Tabel IV - 3 ◇ Tema *Decision Maker - OJK Update*

No.	Tema Kegiatan
1.	OJK Dorong Inklusi Keuangan Melalui SimPel Day 2019
2.	Bank Wakaf Mikro Mudahkan Usaha Kecil
3.	Pentingnya Keterbukaan Informasi Emiten kepada Publik di Pasar Modal
4.	Stop Investasi Ilegal
5.	Perkembangan Laku Pandai dan Strategi Pengembangannya
6.	Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Mei 2019

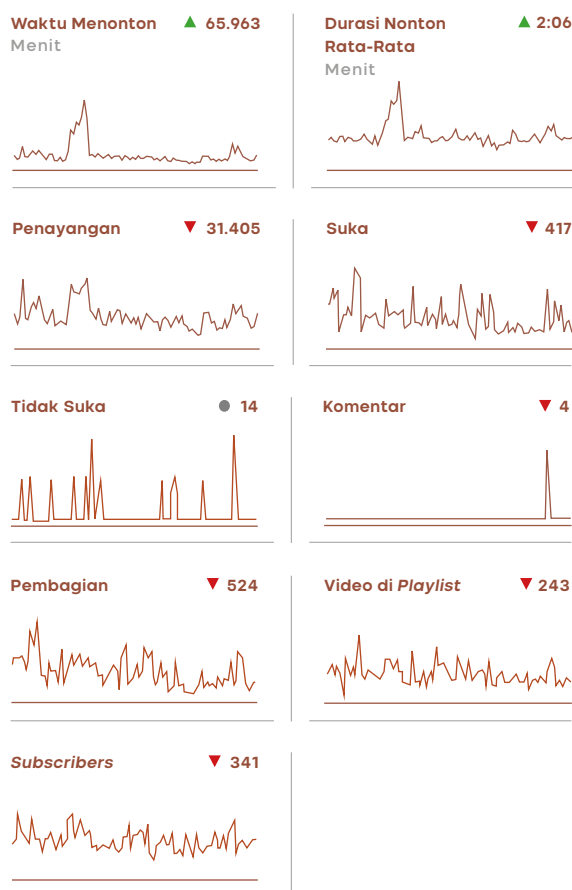
4.4.2 Layanan Informasi

Selama periode triwulan II-2019, OJK menerima surat elektronik sebanyak 8.314 dan telepon sebanyak 359 yang meliputi permintaan data dan *visit* OJK, lowongan kerja dan magang, *sponsorship*, permintaan narasumber, pengaduan lembaga jasa keuangan serta peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan.

4.4.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan serta disiarkan di IDX Channel (TV Bursa). Selama triwulan II-2019, OJK TV memproduksi 75 liputan yang terdiri dari 32 liputan OJK *Wide*, empat liputan bidang Perbankan, 14 liputan bidang Pasar Modal, 14 liputan bidang IKNB, dan 11 liputan bidang EPK.

Grafik IV - 7 ◇ Statistik OJK TV

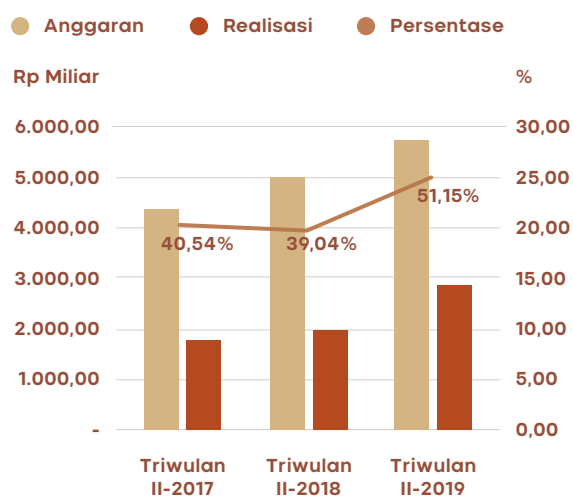


4.5 Keuangan

4.5.1 Realisasi Anggaran

Pada triwulan II-2019 pagu anggaran mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp5.679,70 miliar menjadi Rp5.529,74 miliar. Realisasi anggaran triwulan II-2019 sebesar 51,15% dari pagu anggaran tersebut. Persentase realisasi tersebut mengalami peningkatan dibanding triwulan II-2018 yaitu sebesar 39,04%. Peningkatan realisasi 2019 merupakan indikator bahwa terdapat peningkatan kualitas OJK dalam proses menyusun anggaran dan melaksanakan program kerja yang telah disusun. OJK 2019 dibiayai sepenuhnya oleh penerimaan pungutan OJK.

Grafik IV - 8 ◇ Realisasi Anggaran



4.5.2 International Organization for Standardization (ISO) 9001: 2015

Dalam rangka meningkatkan standar mutu proses bisnis pengelolaan keuangan, OJK mengimplementasikan Standar Internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Penerapan ISO 9001:2015 tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta meningkatkan reputasi lembaga.

Penerapan Implementasi ISO 9001:2015 tersebut diawali dengan penandatanganan Kebijakan Kualitas pada *Kick-Off* ISO 9001:2015 yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada triwulan II-2019, dilakukan finalisasi atas analisa kesenjangan (*gap analysis*) terkait implementasi ISO 9001:2015.

4.5.3 Pemenuhan Kewajiban PPh Badan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan, OJK menyelesaikan kewajiban PPh Badan Tahun 2018 sebesar Rp190,04 miliar dan menyampaikan Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2018 pada tanggal 30 April 2019.

4.6 Sistem Informasi

4.6.1 Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) 2018-2022

OJK secara aktif mengembangkan Sistem Informasi OJK yang terintegrasi, handal, aman, berkualitas, mendukung pencapaian visi dan misinya, serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, antara lain melalui penyusunan Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) 2018 – 2022.

Implementasi RBSI 2018 – 2022 dilaksanakan secara bertahap. Salah satu program strategis yang akan dilaksanakan pada 2019 adalah pemanfaatan teknologi *Big Data Analytics* untuk mendukung pengambilan keputusan terkait perlindungan konsumen, khususnya pemantauan investasi ilegal dan pemantauan iklan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Dalam hal pemanfaatan teknologi *Big Data Analytics* untuk pemantauan investasi ilegal, OJK akan mengumpulkan informasi aduan dari masyarakat dan informasi pendukung lainnya yang berasal dari data media *online*, sosial media, forum, dan blog. Selanjutnya, data tersebut akan diolah menggunakan *Machine Learning* dan ditampilkan dalam bentuk *dashboard*. Layanan *Big Data Analytics* untuk Waspada Investasi telah selesai dikembangkan dan telah digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan Satuan Tugas Waspada Investasi terkait legalitas suatu entitas yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin.

Dalam hal pemantauan iklan yang dikeluarkan oleh PUJK, OJK akan memanfaatkan teknologi *Big Data Analytics* dalam membantu menilai kepatuhan iklan produk dan layanan jasa keuangan pada sosial media terhadap Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh OJK, sehingga diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang jelas, akurat, jujur, dan tidak menyesatkan dari iklan yang dipublikasikan oleh PUJK.

4.6.2 Pertukaran Informasi Antar Lembaga

OJK memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga melalui pertukaran informasi, seperti dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Dalam Negeri - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). OJK berkoordinasi dengan BI sejak 2013 melalui Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial (FKMM)

dan Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP). Salah satu fokus pembahasan dalam forum tersebut adalah terkait mekanisme dan koordinasi pertukaran informasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga. Sampai saat ini, OJK melakukan pertukaran data Perbankan dengan BI secara berkala melalui Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT) OJK-BI.

OJK juga melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPS yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) nomor (MoU-1/D.01/2019)/(MoU 2 Tahun 2019) yang merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman OJK-LPS tahun 2014. Saat ini, OJK dan LPS sedang menyusun mekanisme koordinasi dan pertukaran data, serta membangun sarana pertukaran informasi OJK-LPS. Adapun data yang akan dipertukarkan pada 2019 adalah pelaporan BPR dan BPRS. Ditargetkan pertukaran data OJK-LPS akan mulai diimplementasikan pada September 2019.

Secara trilateral, OJK juga bekerja sama dengan BI dan LPS melalui pembangunan Integrasi Pelaporan. Integrasi Pelaporan merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK Pasal 43. Pembangunan Integrasi Pelaporan bertujuan untuk mewujudkan sistem pelaporan yang efisien, menghindari redudansi, serta fleksibel, baik bagi industri dan otoritas terkait, guna mendapatkan informasi yang selaras untuk kegiatan perumusan kebijakan dan pengawasan industri jasa keuangan. Pada periode laporan, OJK selesai mengembangkan Portal Bersama Integrasi Pelaporan berbasis *Single Sign-On* sebagai gerbang bagi LJK untuk menyampaikan pelaporan kepada OJK, BI, maupun LPS.

Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman nomor (MoU-2/D.01/2019)/(119/ 1560/SJ) tentang Penguatan Tugas dan Kewenangan OJK dan Kementerian Dalam Negeri. Salah satu ruang lingkup pada NK adalah pemanfaatan data kependudukan, nomor induk kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik oleh OJK dan lembaga yang diawasi OJK. Pelaksanaan NK ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Dukcapil dengan OJK nomor (119/1174/DUKCAPIL)/(PRJ-1/ PB.1/2019) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Tugas OJK.

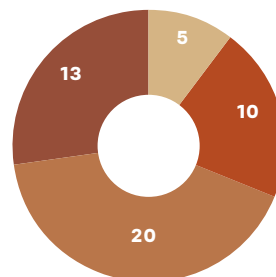
4.6.3 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap Industri Jasa Keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sampai dengan triwulan II-

2019, OJK telah mengimplementasikan 82 Aplikasi yang terbagi menjadi beberapa fungsi.

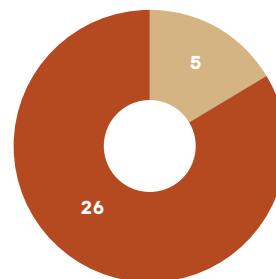
Grafik IV - 9 ◇ Fungsi Utama

- Edukasi dan Perlindungan Konsumen
- Industri Keuangan Non-Bank
- Perbankan
- Pasar Modal



Grafik IV - 10 ◇ Fungsi Pendukung

- Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
- Manajemen Strategis



Menuju OJK *Digital Office*

Sistem Informasi Procurement (SIPROJEK)

Sistem Informasi *Procurement* Otoritas Jasa Keuangan (SIPROJEK) merupakan portal elektronik pengadaan barang/jasa antara OJK dengan Pelaku Usaha/ Penyedia. Penggunaan SIPROJEK sendiri akan menggantikan penggunaan sistem *e-procurement* milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). SIPROJEK telah diimplementasikan secara penuh pada Juni 2019 dengan berlandaskan pada Peraturan Dewan Komisioner Nomor 7/PDK.01/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Otoritas Jasa Keuangan. Adapun modul yang tersedia pada SIPROJEK meliputi:

1. *E-Vendor Management*

Modul Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa, yang meliputi: pendaftaran, verifikasi, pengkinian data, dan penilaian kinerja.

2. *E-Tendering* (pemilihan penyedia)

Modul untuk melaksanakan setiap tahapan pemilihan Penyedia. Metode pemilihan Penyedia yang sudah tersedia di SIPROJEK adalah: Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, dan Tender/Seleksi.

3. *E-Auction* (negosiasi harga)

Modul untuk melakukan negosiasi harga dalam metode Pemilihan Langsung dan Seleksi Langsung.

4. *E-Reporting & E-Monitoring* (pemantauan dan pelaporan)

Modul untuk melakukan pemantauan dan pelaporan seluruh transaksi pengadaan barang/jasa di OJK.

Grafik IV - 11 ◇ Alur Penggunaan SIPROJEK



Menuju OJK *Digital Office*

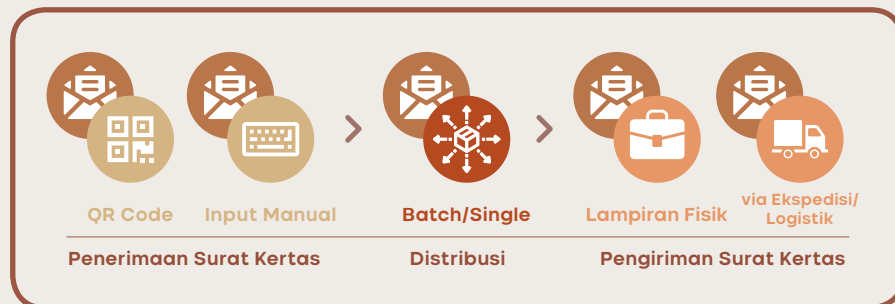
Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA)

Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) merupakan Aplikasi Sistem Tata Persuratan Dan Kearsipan yang terintegrasi dengan Teknologi Informasi. Tujuan pembangunan SIPENA secara umum adalah untuk:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan OJK
2. Memberikan kemudahan bagi lembaga jasa keuangan dalam melakukan pengiriman naskah dinas
3. Mempercepat kegiatan penerimaan dan pendistribusian naskah dinas di lingkungan OJK, serta memberikan informasi terkait data Naskah Dinas dan Arsip Dinamis secara akurat dan *real time* untuk mendukung pelaksanaan kerja seluruh Satuan Kerja di OJK sehingga menjadi lebih cepat dan cermat
4. Mengurangi penggunaan kertas (*paperless office system*)

Adapun tiga *workflow* utama yang dikembangkan pada SIPENA adalah:

1. Pengelolaan *Mailing Room*, merupakan modul yang digunakan untuk mengelola surat masuk dan surat keluar di lingkungan OJK.



2. Pengelolaan Naskah Dinas, merupakan modul yang dapat digunakan oleh pengguna Internal dalam pembuatan dan pendistribusian naskah dinas di lingkungan OJK. Fungsi yang tersedia pada modul ini di antaranya: *Compose*, *Inbox*, *Pending Job*, *Sent*, dan Pengiriman Surat Kertas (MR).



3. Pengelolaan Arsip, merupakan modul yang dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam melakukan pemberkasan, kodifikasi dan labelisasi, pemindahan, akuisisi, alih media, serta pemusnahan arsip dan penyerahan arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

● Pembahasan Ruang Lingkup ● Pengadaan ● Desain ● Pemrograman ● Pengujian ● Implementasi

162 Laporan Triwulanan OJK

	Nama Aplikasi	Tahapan Pekerjaan
Pengelolaan Sumber Daya Pendukung	Mobile App Financial Locator	
	Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO)	
	Sistem Informasi Remunerasi (OJK SAR)	
	Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	
	Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (SIKEPO)	
	Sistem Informasi Administrasi dan Manajemen Penyidikan (SIANDIK)	
Integrasi	Aplikasi Database <i>Track Record</i> Terintegrasi untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)	
	Aplikasi <i>Single Sign On</i> (SSO) IKNB	
	Enterprise Data Warehouse (EDW) dan Business Intelligence (BI) SJK Terintegrasi Tahap 1	
	Dashboard QPR User Interface (UI)	
	Dashboard Pendalaman Pasar Keuangan	
	Data Warehouse Pasar Modal (Integrasi SPE-IDXNET)	
	Data Warehouse Pasar Modal (Pemantauan, Validasi dan Perbaikan Data)	
	Aplikasi Mobile EIS (termasuk Bank Wakaf Mikro)	
	Integrasi Bertahap Sistem Informasi Tahap 1 (<i>Middleware</i>)	
	Master Data Management (MDM) dan Data Referensi Sektor Jasa Keuangan (SJK) Terintegrasi	

4.7 Logistik

4.7.1 Penyediaan Gedung Kantor Pusat

OJK telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Kementerian Keuangan. PKS itu berupa penggunaan tanah yang terletak di Lot 1 Sudirman

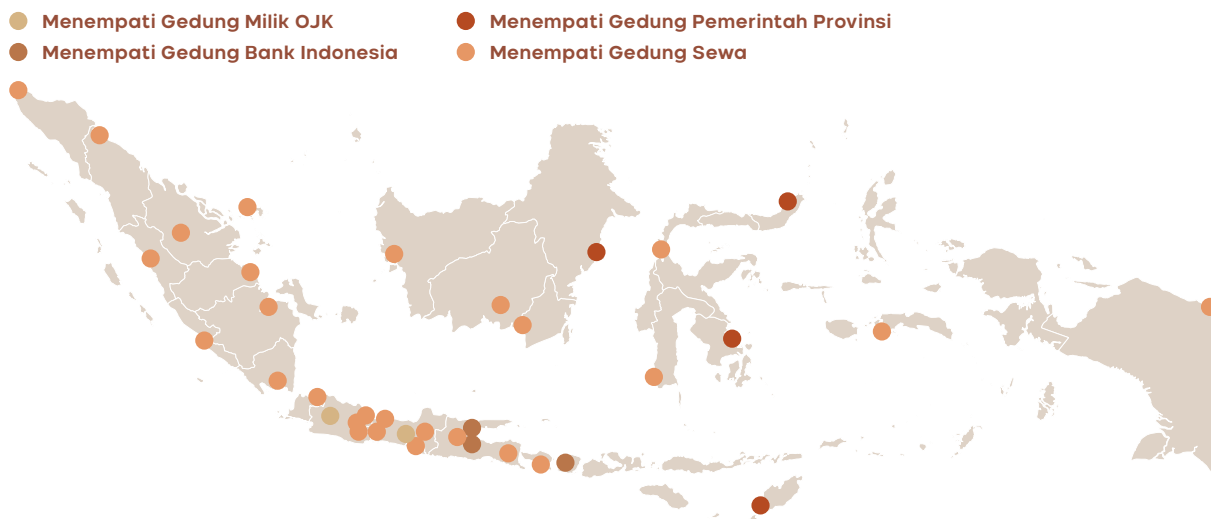
Center Bussiness District (SCBD). Tujuan dari PKS ini adalah untuk mewujudkan penyediaan gedung kantor bagi OJK dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4.7.2 Penyediaan Gedung Kantor Regional/OJK

Terkait Penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, saat ini terdapat dua kantor yang merupakan milik OJK, empat Kantor OJK yang

merupakan pinjam pakai aset milik pemerintah daerah, dan tiga Kantor OJK yang menempati Gedung BI. Selain itu terdapat juga gedung sewa sebanyak 26 Kantor.

Grafik IV - 12 ◇ Lokasi KR/KOJK Posisi Juni 2019



OJK telah selesai melakukan perencanaan untuk pembangunan KOJK Solo, KOJK Daerah Istimewa Yogyakarta, KOJK Nusa Tenggara Barat, dan KOJK Papua dan Papua Barat. Selain itu, telah dilakukan

penataan gedung KOJK Nusa Tenggara Timur. KOJK Nusa Tenggara Timur telah menempati gedung yang merupakan aset milik pemerintah provinsi yang dipinjamkakan.

4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Terkait dengan pengaturan kelogistikan, selama periode laporan OJK sedang menyusun beberapa ketentuan yaitu Peraturan Dewan Komisiner tentang Kearsipan, Surat Edaran Dewan Komisiner tentang Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip, Peraturan Dewan Komisiner Barang Milik OJK, Peraturan Dewan Komisiner Pengamanan, dan Surat Edaran Dewan

Komisioner Asuransi Barang Milik Negara dan Surat Edaran Dewan Komisiner Asuransi Barang Milik OJK.

OJK juga melakukan *pilot project* perihal sosialisasi penggunaan Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) ke beberapa Satuan Kerja sebagai transisi menuju *digital office* OJK.

4.8 SDM dan Tata Kelola Organisasi

4.8.1 Kebijakan Sumber Daya Manusia

OJK melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka peningkatan pemahaman dan kapasitas pengawas serta pengembangan proses bisnis pada Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal. FGD dilaksanakan dalam dua sesi, yakni dengan *Self Regulatory Organisations* (SRO) Pasar Modal di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta dengan instansi regional, yaitu Monetary Authority of Singapore (MAS) dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Maksud dan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan FGD mengenai pengawasan sektor pasar modal antara lain adalah untuk (i) Mendapatkan masukan atas peranan otoritas pengawas pasar modal negara lain dalam kegiatan pengawasan, pengaturan, dan pengembangan pasar; (ii) Mendapatkan masukan atas peran SRO dalam kegiatan pengawasan pasar modal dan hubungannya dengan otoritas pengawasan; dan (iii) Mempelajari hubungan kelembagaan antara otoritas pengawas pasar modal, bank sentral, bursa efek, dan lembaga pemerintahan lain yang terkait.

4.8.2 Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM)

OJK melaksanakan proses penerimaan pegawai melalui jalur umum dengan metode penelusuran bakat (*talent scouting*) pada triwulan II-2019 terhadap kandidat dari 32 Perguruan Tinggi Negeri dan 10 Perguruan Tinggi Swasta yang termasuk

dalam peringkat 10 besar nasional di Indonesia. Berdasarkan proses yang telah dilakukan, telah diumumkan 115 orang yang dinyatakan memenuhi persyaratan seluruh tahapan seleksi.

◆ Pemenuhan Fasilitas Kantor Pusat dan Kantor OJK

OJK terus meningkatkan layanan kepada masyarakat salah satunya dengan memenuhi fasilitas Gedung Kantor OJK baik di kantor pusat maupun Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan OJK menyepakati penggunaan barang milik negara di lokasi LOT-1 kawasan SCBD, Jakarta. Nantinya, tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung Indonesia *Financial Center* yang akan menjadi kantor pusat OJK. Kesepakatan penggunaan sendiri tertuang dalam nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*). Melalui nota kesepahaman ini juga Kemenkeu memberikan hak kepada OJK untuk membangun gedung, fasilitas penunjang, dan sarana prasarana lingkungan pada BMN tersebut. Hal ini merupakan wujud perhatian Pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan OJK serta sebagai bagian dari upaya dalam peningkatan peran OJK dalam mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan.

Pembangunan gedung ini merupakan bentuk optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara, sejalan dengan kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.



Pembangunan Gedung Indonesia *Financial Center*

Pemenuhan Fasilitas Kantor Pusat dan Kantor OJK

Selain itu, OJK juga telah selesai melakukan perencanaan untuk pembangunan KOJK Solo, KOJK Daerah Istimewa Yogyakarta, KOJK Nusa Tenggara Barat, dan KOJK Papua dan Papua Barat. Beberapa kantor daerah, seperti KOJK Nusa Tenggara Timur telah menempati gedung aset milik pemerintah provinsi yang dipinjam-pakai.



Peletakan Batu Pertama KOJK DIY



Peletakan Batu Pertama KOJK Solo



4.8.3 Seleksi Izin Prinsip Tugas Belajar

Selama periode laporan, dilakukan proses pemberian izin definitif program pendidikan formal dalam rangka mengembangkan kompetensi Pegawai melalui peningkatan basis pengetahuan akademis sesuai

kebutuhan OJK dengan mengacu pada SEDK Nomor 15/SEDK.02/2017 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tabel IV - 5 ◇ Pemberian Izin Definitif Pegawai OJK

SKIM	Jenjang	Keterangan				
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September
SKIM 1	S2 (Master)	-	-	-	4 orang	3 orang
SKIM 2	S2 (Master)	1 orang	-	-	1 orang	2 orang
SKIM 3	S2 (Master)	-	2 orang	2 orang	-	-

4.8.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selama triwulan II-2019, OJK melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan SDM sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

PPKB bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Pada triwulan II-2019, telah dilaksanakan kegiatan PPKB sebanyak dua kali sebagai berikut:

- PPKB Level Pertama (Kasubbag) dengan jumlah peserta 40 orang.
- PPKB Level Lanjutan (Direktur) dengan jumlah peserta 24 orang.

2. Program Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan Kompetensi pegawai baik untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*) yang telah dilaksanakan pada triwulan II-2019 adalah sebagai berikut:

a. PPK Non In House Dalam Negeri :

PPK Non In House Dalam Negeri tercatat selama triwulan II-2019 telah mengirimkan sebanyak 60 orang pegawai dengan rincian:

- Dua orang pegawai mengikuti program pengembangan kompetensi teknis dalam satu judul program.
- 58 orang pegawai mengikuti program pengembangan kompetensi teknis dengan 29 judul program.

b. PPK Non In House Luar Negeri :

PPK Non In House Dalam Negeri tercatat selama triwulan II-2019 telah mengirimkan sebanyak 10 orang pegawai mengikuti program pengembangan kompetensi teknis dengan empat judul program.

c. PPK In House Dalam Negeri (IHT) :

PPK In-House Dalam Negeri selama triwulan II-2019 telah melaksanakan 17 IHT untuk pengembangan kompetensi teknis dengan jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 540 pegawai.

3. Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Selama triwulan II-2019, telah diterbitkan tiga surat tugas dan memberangkatkan satu orang pegawai untuk skim-1 (beasiswa penuh dari OJK), dua orang pegawai untuk skim-2 (beasiswa dari pihak lain dengan *top up* fasilitas dari OJK), tiga orang pegawai untuk skim-3 (beasiswa dari pihak lain dengan remunerasi dari OJK), dan satu orang pegawai untuk skim-4 (beasiswa dengan pembiayaan secara mandiri dengan penggantian dari OJK).

4. Learning Management System OJK

Pada triwulan II-2019, OJK melakukan *launching* Learning Management System (LMS-OJK). Dengan hadirnya LMS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya penyelenggaraan pelatihan dan efisiensi waktu pelatihan, serta meningkatkan akurasi data untuk mendukung kebijakan pengembangan SDM OJK yang berkelanjutan dan selaras dengan strategi organisasi.

Dalam tahap awal pemanfaatan, LMS OJK akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pembekalan calon pegawai baru OJK (*onboarding program*) serta pelaksanaan Sertifikasi Pengawas SJK.

Learning Management System OJK

Sebagai salah satu *tools* pendukung proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi pegawai yang lebih terarah, terukur, dan termonitor, serta meningkatkan akurasi data pengembangan SDM OJK dalam mewujudkan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan kredibel didukung kapasitas internal yang andal, OJK meluncurkan *Learning Management System* (LMS-OJK). LMS-OJK merupakan sistem untuk mengelola materi pelatihan dan pendidikan, serta mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara *online*.

Dalam pemanfaatannya, LMS-OJK memiliki 5 fitur utama, yaitu :

1. Program Pengembangan SDM Internal
2. *e-Library*
3. Layanan Pengembangan SDM Eksternal
4. *Dashboard, Reporting, Monitoring, dan Evaluation*
5. *Master Data Management*

Grafik IV - 13 ◇ Fitur LMS OJK



Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan waktu penyelenggaraan pelatihan dengan pemanfaatan metode *e-learning*. Selain itu, dengan adanya sarana pembelajaran baru yang dapat diakses secara mandiri, pegawai dapat aktif menggali dan mengembangkan ketertarikannya terhadap isu-isu tertentu terutama yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dalam bekerja sehingga menciptakan suasana kompetisi yang sehat. Keberadaan LMS nantinya dapat menjadi alternatif media pembelajaran bagi pegawai dan *stakeholder* OJK.

Dalam tahap awal pemanfaatan, LMS OJK akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pembekalan calon pegawai baru OJK (*onboarding program*) serta pelaksanaan Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan.

4.9 OJK Institute

Dalam rangka mewujudkan *center of excellence* di bidang jasa keuangan, OJK Institute mengemban tugas melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor jasa keuangan (SJK), standardisasi profesi sektor jasa keuangan, pengelolaan riset (*pure research*) dan pendampingan pembelajaran kepada masyarakat. Adapun program pengembangan SDM yang dilaksanakan OJK Institute selama triwulan II-2019 meliputi:

4.9.1 Program Pengembangan SDM SJK

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) ini merupakan bentuk kontribusi OJK kepada sektor jasa keuangan dalam membentuk SDM SJK yang kompeten dan professional. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Program Pengembangan SDM SJK yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel IV - 6 ◇ Kegiatan Pengembangan SDM SJK

No.	Tema Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
1.	Workshop Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR Batch 1	Bandung	45 Peserta
2.	Workshop Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR Batch 2	Bali	86 Peserta
3.	Workshop Pelatihan Penaksir Barang Jaminan bagi Perusahaan Pergadaian Swasta Level 1	Yogyakarta	30 Peserta
4.	Workshop TOT Pendampingan Penerapan Program APU-PT Berbasis Risiko bagi Sektor Jasa Keuangan Batch 1	Jakarta	80 Peserta
5.	Workshop TOT Pendampingan Penerapan Program APU-PT Berbasis Risiko bagi Sektor Jasa Keuangan Batch 2	Jakarta	80 Peserta
6.	Seminar Flagship Digital Disruption: Banking for the Future	Jakarta	465 Peserta
7.	Workshop Implementasi Holistic Governance, Risk Management and Compliance	Jakarta	150 Peserta
8.	Workshop Bank Wakaf Mikro	Bogor	30 Peserta

4.9.2 Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, perlu disusun suatu standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNi (RKKNI) bidang sektor jasa keuangan. Berikut adalah realisasi penyusunan dan kaji Ulang RSKKNI dan RKKNI selama April - Juni 2019:

- FGD Penyusunan KKNi
- Rapat Penyusunan KKNi Bidang Pasar Modal
- Rapat Pembahasan RPOJK KKNi dengan Satuan Kerja Terkait
- FGD Pendirian LSP
- FGD Pembahasan Peta Kompetensi RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan
- FGD Pembahasan RSKKNI Bidang Penjaminan Tahap I

4.9.3 Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

Program praktek kerja di lingkungan OJK bagi pelajar SMA/SMK dan mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja. Realisasi pada triwulan II-2019 yaitu sejumlah 124 pelajar dan mahasiswa.

Grafik IV - 14 ◇ Realisasi Jumlah Peserta PKL OJK Triwulan II-2019



OJK juga memberikan kesempatan kepada para peneliti/mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selama triwulan II-2019 terdapat 62 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi.

Grafik IV - 15 ◇ Realisasi Jumlah Peserta Penelitian



4.9.4 Program Visit OJK

Program Kunjungan atau Visit OJK adalah program pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Jumlah kunjungan untuk triwulan II-2019 yaitu 13 kunjungan dengan total 1.095 orang.

4.9.5 OJK Mengajar

Sebagai salah satu bentuk kontribusi OJK kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan pihak lain yang terkait dalam SJK dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, OJK melaksanakan kegiatan mengajar. Tujuan program ini adalah meningkatkan pemahaman kepada sektor jasa keuangan terhadap tugas dan fungsi OJK, mengenalkan produk dan jasa sektor jasa keuangan kepada masyarakat. Pada triwulan II-2019 telah dilaksanakan kegiatan OJK Mengajar di Universitas Muhammadiyah Pontianak di Kota Pontianak dengan peserta 210 orang.

4.9.6 Penelitian OJK Institute dan e-library

OJK Institute melaksanakan penelitian bersifat akademis bekerja sama dengan lembaga/institusi pendidikan. Adapun topik penelitian tahun ini adalah (1) *digital banking*, (2) pengembangan kompetensi SDM SJK menghadapi Industri 4.0, dan (3) kolaborasi *fintech*, UMKM, bank dan sektor jasa keuangan lainnya.

Selama triwulan II-2019 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka penelitian dimaksud:

1. FGD Perkembangan Terkini Transformasi Digital di Industri Perbankan Indonesia
2. FGD Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Sektor Jasa Keuangan (SJK) Menghadapi Industri 4.0
3. FGD Potensi Pengembangan UMKM dan Inklusi Keuangan melalui Kolaborasi antara Lembaga Keuangan, Financial Technology, Lembaga Keuangan Mikro dan *Community Agent*

4. FGD Potensi Kolaborasi *Fintech*, Perbankan dan UMKM di Jakarta

Selanjutnya, OJK Institute juga mengembangkan *e-library* dalam rangka memberikan fasilitas pembelajaran untuk pegawai OJK maupun masyarakat khususnya SDM sektor jasa keuangan, pelajar dan mahasiswa. Dalam rangka mengembangkan *e-library* dimaksud telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. *User Acceptance Test (UAT)* Aplikasi *Learning Management System (LMS) Modul e-Library*
2. *Soft Launching* Aplikasi *Learning Management System (LMS) Modul e-Library*

4.10 Manajemen Perubahan

Sesuai dengan *roadmap* Program Budaya OJK, pada tahun ini OJK mengusung tema "Insan OJK Andal" yang difokuskan pada penguatan budaya belajar berkelanjutan. Tema ini ditujukan guna menguatkan kompetensi, konsistensi, kredibilitas dan ketangguhannya dalam bekerja. Sepanjang 2019, seluruh Insan OJK akan berpartisipasi dalam menjalankan program budaya yang terdiri dari:

1. OJK Cerdas

Program pengembangan perilaku belajar berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi dan memperluas wawasan Insan OJK yang dibutuhkan dalam melayani *stakeholders*. Sepanjang triwulan II-2019, Insan OJK telah menjalankan rangkaian program yang ditujukan memfasilitasi peningkatan kompetensi berupa:

- a. 437 program *knowledge sharing* tatap muka, dan
- b. Sejumlah program non-tatap muka lainnya seperti *mini library*, bedah buku, kuis, dll.

2. OJK Ringkas

Inisiasi program yang ditujukan untuk menyederhanakan proses kerja dan meng-*update* informasi yang dibutuhkan untuk mempercepat proses kerja atau yang memberikan nilai tambah kepada *stakeholder*, antara lain terdiri dari:

- a. Pengembangan sistem atau aplikasi baru;
- b. Pemanfaatan dan pengembangan sistem atau aplikasi yang sudah tersedia; dan
- c. Perubahan proses bisnis guna percepatan kinerja.

3. OJK Tangkas

Program pengembangan perilaku Insan OJK yang mendukung gaya hidup *work-life balance* melalui kegiatan peningkatan kesehatan jasmani dan rohani dengan bersinergi bersama pemangku kepentingan/satker/bidang lainnya. Selama triwulan II-2019, Insan OJK telah melaksanakan

458 program tatap muka yang ditujukan untuk mendukung *work-life balance*.

4.10.1 Program Manajemen Perubahan

OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna mengakselerasi proses internalisasi kultur dan nilai-nilai strategis, yakni melalui penyelenggaraan:

1. Festival Budaya Ramadhan

OJK menyelenggarakan Festival Budaya Ramadhan 2019 di Jakarta. Kegiatan yang diikuti lebih dari 200 Insan OJK ini merupakan salah satu bentuk dukungan OJK dalam mencerdaskan dan menyeimbangkan kehidupan insan OJK di bidang rohani. Adapun rangkaian acara tersebut termasuk peringatan malam Nuzulul Quran, peresmian Masjid Atta'awun, buka puasa bersama ADK, lomba seni dan dakwah antar bidang, serta *talkshow* Ramadhan bertemakan *THR Trap* dengan Jouska Indonesia sebagai narasumber.

2. Town Hall Meeting

OJK menginisiasi forum komunikasi antara Anggota Dewan Komisiner (ADK) seluruh Insan OJK mengenai budaya kerja dan kebijakan organisasi yang diselenggarakan secara periodik. Kesempatan ini juga digunakan ADK dalam menyampaikan visi dan harapannya kepada Insan OJK dalam suasana yang santai dan bersifat kekeluargaan.

Selama triwulan II-2019, bertepatan dengan Hari Kartini, dilaksanakan *Town Hall Meeting* edisi spesial Hari Kartini. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Dewan Komisiner menyampaikan pentingnya peran perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

4.10.2 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Media komunikasi program budaya kerja OJK Way adalah segala bentuk alat kampanye yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide, program, informasi atau pesan yang bersifat persuasif, terencana, dan dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu. Sejumlah upaya telah dilakukan dalam mendukung internalisasi nilai-nilai strategis OJK, yakni:

1. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah internal bulanan OJK ini berisikan informasi tentang implementasi program perubahan, budaya, dan kinerja Satuan Kerja.



2. Penyampaian Pesan Anggota Dewan Komisiner

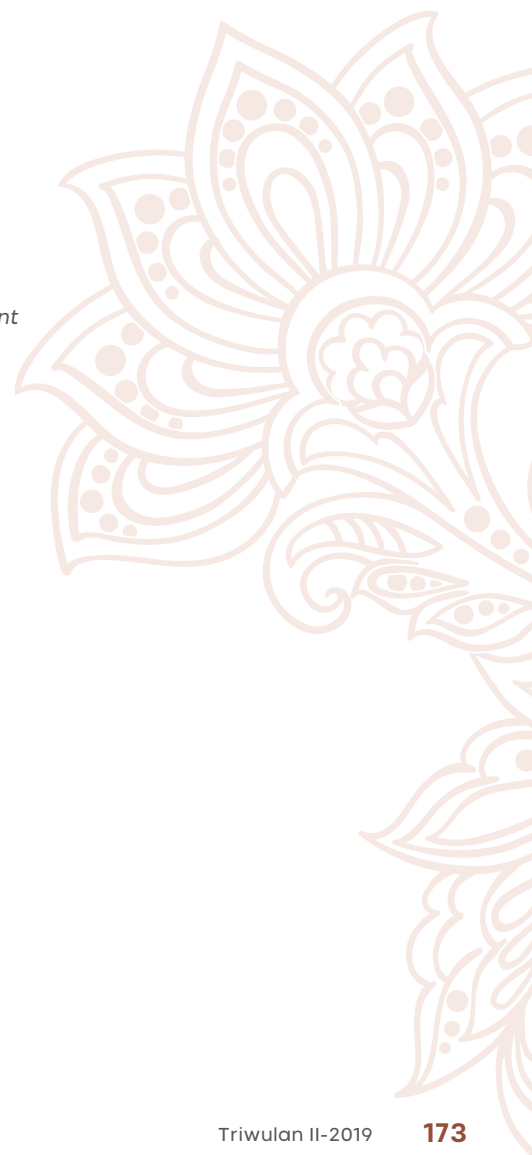
Pesan Anggota Dewan Komisiner merupakan salah satu media komunikasi antara Anggota Dewan Komisiner dengan Insan OJK. Pesan berkala ini disampaikan melalui *e-mail blast*, akun *instagram @ojkway*, dan *e-magazine website* budaya internal OJK Way. Tradisi ini diharapkan mampu menginspirasi dan memotivasi Insan OJK untuk selalu semangat berkarya dalam mengimplementasikan nilai-nilai strategis OJK. Adapun pesan yang telah disampaikan adalah:

- a. Pesan Wakil Ketua Dewan Komisiner – Semangat Kartini OJK
- b. Pesan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB - Menjaga Integritas, Meningkatkan Kinerja
- c. Pesan Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen - Silaturahmi dengan Berbagi Informasi
- d. Pesan Ketua Dewan Komisiner edisi spesial Idul Fitri

Singkatan dan Akronim

ADK	Anggota Dewan Komisioner
AIMRPK	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATM	<i>Automatic Teller Machine</i>
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
BMAI	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	Badan Mediasi Dana Pensiun
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BS	<i>Board Seminar</i>
BSA	<i>Basic Saving Account</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
CRM	<i>Costumer Relationship Management</i>
DES	Daftar Efek Syariah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EBA-SP	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKMM	Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	<i>Financial Services Agency</i>
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSS	<i>Financial Supervisory Service</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
IFAR	Investasi Terhadap Total Aset
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IFSB	<i>Islamic Financial Services Board</i>
IGBF	<i>Indonesia Government Bond Futures</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IJK	Industri Jasa Keuangan
IKI	Indikator Kinerja Pegawai
IKNB/NBFI	Industri Keuangan Non Bank/ <i>Non Bank Financial Industry</i>
IKU/KPI	Indikator Kerja Utama/ <i>Key Performance Indicators</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>

IOSCO	<i>International Organization of Securities Commission</i>
IS	Inisiatif Strategis
JARING	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i>
JII	<i>Jakarta Islamic Index</i>
KDK	Keputusan Dewan Komisiner
KI	Kredit Investasi
KIK	Kontrak Investasi Kolektif
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KMK	Kredit Modal Kerja
KOJK	Kantor OJK
KPD	Kontrak Pengelolaan Dana
KPMM/CAR	Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/ <i>Capital Adequacy Ratio</i>
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KR	Kantor Regional
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KYC	<i>Know Your Customer</i>
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LJKNB	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LoI	<i>Letter of Intent</i>
LPHE	Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
MEA/AEC	Masyarakat Ekonomi Asean/ <i>Asean Economic Community</i>
MI	Manajer Investasi
MIA	Manajer IKU dan Anggaran
MoU	<i>Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman</i>
MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NPF	<i>Non Performing Finance</i>
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PDB	Produk Domestik Bruto
PDK	Peraturan Dewan Komisiner
PDN	Posisi Devisa Neto
PE	Perusahaan Efek
PMK	Protokol Manajemen Krisis
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	Kelompok Tani
PPKB	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	Rapat Kerja Strategis
RBS	<i>Risk Based Supervisory</i>
RDK	Rapat Dewan Komisiner
REPO	<i>Repurchase Agreement</i>
RKA	Rencana Kerja Anggaran
ROA	<i>Return on Assets</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satgas	Satuan Tugas
SBN	Surat Berharga Negara



SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SEDK	Surat Edaran Dewan Komisioner
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	Sistem Informasi Debitur/ <i>Debtor Information System</i>
SIMARIO	Sistem Informasi Manajemen Risiko
SiMOLEK	Mobil Literasi Keuangan
SimPel	Simpanan Pelajar
SIMPEL	Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SISPANDI	Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SJK	Sektor Jasa Keuangan
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SMES	Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SMF	Sarana Multi Finance
SNKI	Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/ <i>Whistle Blowing System</i> OJK
SRO	<i>Self Regulatory Organization</i>
STP	<i>Straight Through Processing</i>
STTD	Surat Tanda Terdaftar
SUN	Surat Utang Negara
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TOT	<i>Training of Trainers</i>
UMKM/MSME	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/ <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
UU	Undang-Undang
UU OJK	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
WMI	Wakil Manajer Investasi
WPEE	Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	Wakil Perantara Pedagang Efek
yoy	<i>year over year</i>
ytd	<i>year to date</i>







Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Tel. 62 21 296 00000
www.ojk.go.id

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)
 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)
 [ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)
 [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan)